

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Satuan

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tegal.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Tegal.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima tahun) dari Tahun 2010 - 2014.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 - 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013-2018.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada khir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2014-2019.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

(1) Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV Analisis Isu – Isu Strategis;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. BAB XI Penutup.

Pasal 7

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Perda dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2023 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Nopember 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 3 Nopember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP.19680216 198903 1 004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tegal kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Tengah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD disertai rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD Kota Tegal pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2020 yang diwujudkan dalam RKPD Kota Tegal Tahun 2020, disusun berdasarkan RPJPD serta mengacu RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN

Pasal 12

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Kota Tegal telah memilih Hj. Siti Masitha Soeparno dan Drs. HM. Nursholeh, M.MPd sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal untuk periode tahun 2014-2019, yang telah dilantik pada tanggal 23 Maret 2014. Dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Tegal periode 2014-2019, maka melekat kewajiban menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang akan menjadi dasar dalam mencapai visi dan misi Kota Tegal tahun 2014-2019, dan sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pasal 50 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

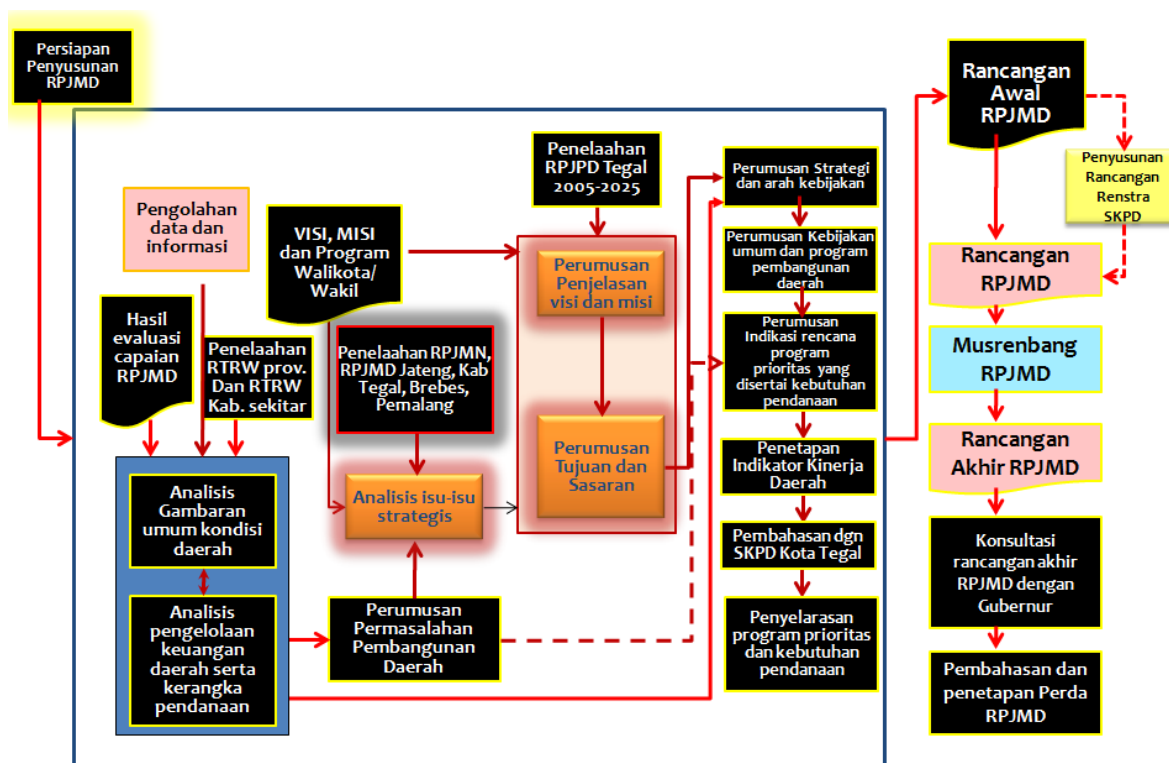
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Periode 2014-2019 merupakan penjabaran dari Tahap II tahun terakhir dan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014-2019 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon Kepala Daerah, oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen Rencana hasil proses perencanaan atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar: 1.1
Diagram Alir Penyusunan RPJMD

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPJMD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 12) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- 13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - 26) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
 - 27) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 - 28) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
 - 29) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
 - 30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 - 31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
 - 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

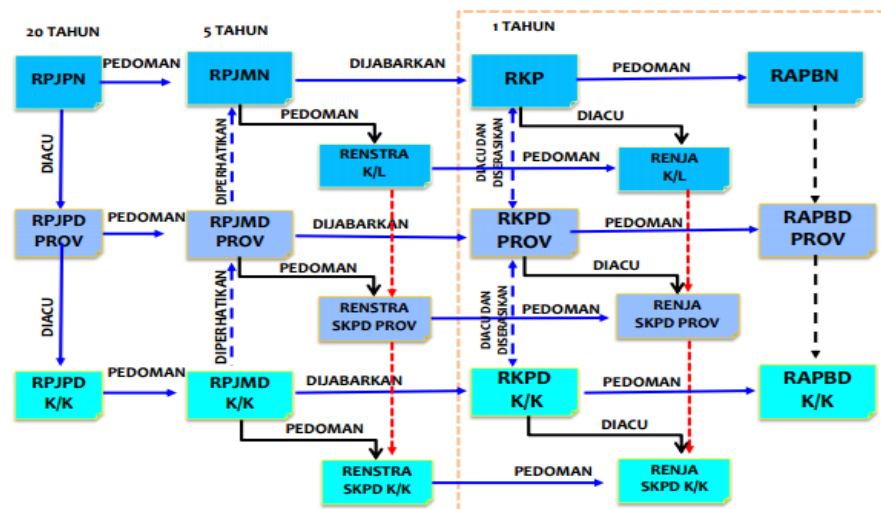
- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 33) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
 - 34) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
 - 35) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
 - 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 39) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, baik jangka panjang maupun jangka menengah, oleh karena itu penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyelarasan juga dilakukan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah, maupun RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kota Tegal akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja SKPD. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar: 1.2
Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Beberapa dokumen yang berkaitan erat dengan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010–2014.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.
3. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Tegal.
8. Dokumen terkait lainnya (perencanaan sektoral).

Mengingat RPJMN yang menjadi acuan saat ini akan berakhir di tahun 2014 dan akan digantikan menjadi menjadi RPJMN yang baru, maka RPJMD akan mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 untuk dapat melihat tahapan dan skala prioritas RPJMN ke-3 (2015-2019).

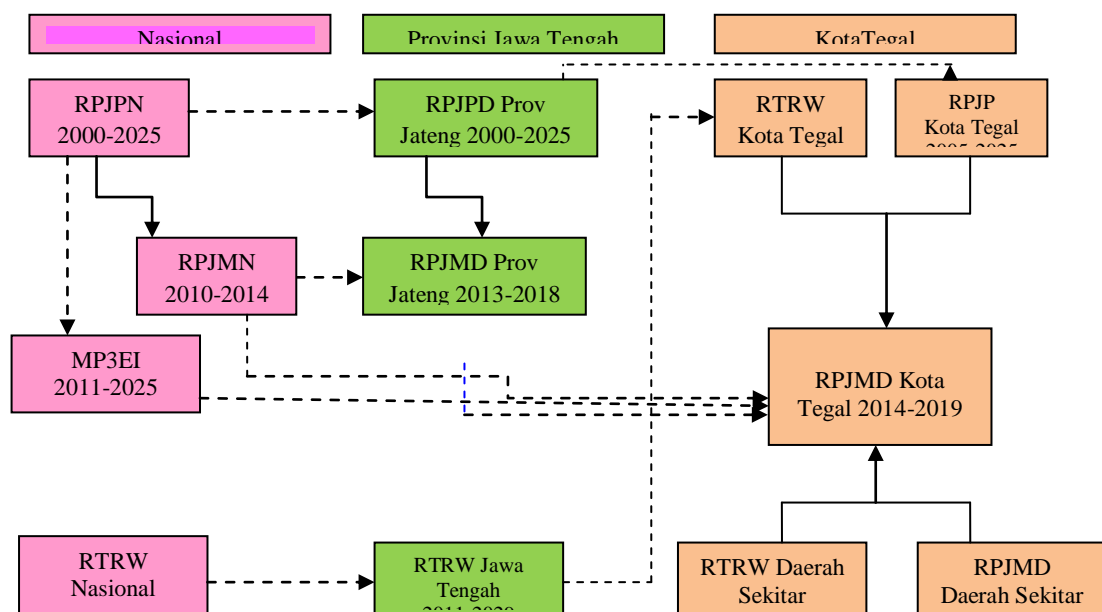
1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD

RPJMD tahun 2014-2019 merupakan RPJMD tahap Kedua tahun terakhir dan Ketiga sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD. RPJMD ini diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Kota Tegal yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusifitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin meningkat. Hal ini dicapai melalui:

1. Mewujudkan aneka usaha bidang perdagangan, jasa dan industri guna mendorong pengembangan ekonomi daerah yang semakin mantap.

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat, cerdas dan berbudaya.
3. Mewujudkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan.
4. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal serta menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas Aparaturur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

Arahan sebagaimana yang tertuang dalam RPJP untuk tahap kedua dan ketiga RPJMD ini akan diacu dalam penyusunan RPJMD, oleh karena itu penyelarasan visi, misi, tujuan dan program unggulan yang telah dirumuskan Walikota dan Wakil Walikota menjadi penting untuk dilakukan agar terjadi kesinambungan pemangunan dari waktu ke waktu. Gambaran keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dapat dilihat dalam Gambar 1.3 berikut ini :



Gambar:1.3
Diagram Keterkaitan Dokumen RPJPD dan RPJMD dengan RPJM
Provinsi dan Nasional

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tegal.

Renstra SKPD sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 93 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RPKD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Tegal yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Tegal sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Walikota terpilih masa bakti 2014-2019, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2. Tujuan

1. Mendiskripsikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tegal dalam menyusun Renstra SKPD periode 2014-2019;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Tegal dan Wakil Walikota Tegal kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014-2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014-2019, dengan berpedoman pada RPJPD;
4. Menetapkan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2019;
5. Menetapkan indikator kinerja SKPD dan Indikator Kinerja Walikota Tegal dan Wakil Walikota Tegal sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Tegal periode 2014-2019.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan ditambah satu bab yaitu bab ke 11 (sebelas) Penutup, sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Tegal.
2. BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tegal secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.
3. BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun)
4. BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS menjelaskan tentang berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
5. BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Tegal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran.
6. BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tegal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
7. BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perlu disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

8. BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN, Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
9. BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. Bagian ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.
10. BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta kaidah pelaksanaannya.
11. BAB 11 PENUTUP memuat harapan supaya RPJMD ini dijadikan acuan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tegal.

BAB II

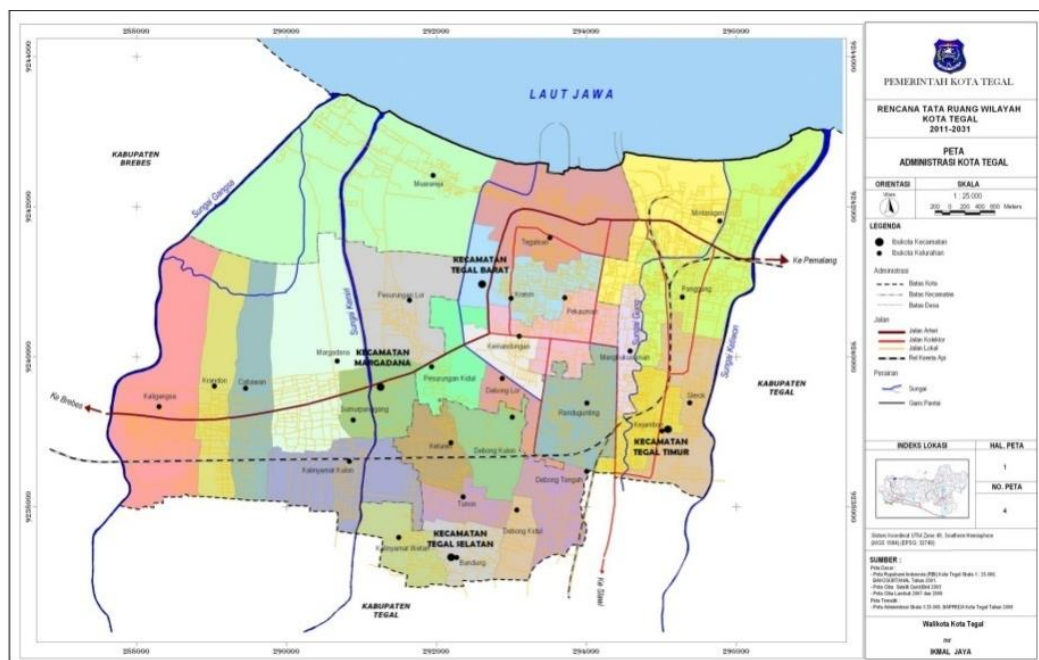
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km². Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Tegal di sebelah timur; Kabupaten Tegal di sebelah selatan; dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1



Sumber: RTRW Kota Tegal 2011-2031

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tegal

Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan; Kecamatan Tegal Barat; Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km²), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km²). Perincian nama kecamatan, kelurahan dan luas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Tegal berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan
(km²)

Kecamatan Tegal Selatan : 6,43	Kecamatan Tegal Timur : 6,36
1. Kel. Kalinyamat Wetan : 0,89	1. Kel. Kejambon : 0,86
2. Kel. Bandung : 0,59	2. Kel. Slerok : 1,39
3. Kel. Debong Kidul : 0,35	3. Kel. Panggung : 2,23
4. Kel. Tunon : 0,75	4. Kel. Mangkukusuman : 0,47
5. Kel. Keturan : 0,62	5. Kel. Mintaragen : 1,41
6. Kel. Debong Kulon : 0,74	
7. Kel. Debong Tengah : 1,11	
8. Kel. Randugunting : 1,38	
Kecamatan Tegal Barat : 15,13	Kecamatan Margadana : 11,76
1. Kel. Pesurungan Kidul : 0,72	1. Kel. Kaligangsa : 2,53
2. Kel. Debong Lor : 0,56	2. Kel. Krandon : 1,20
3. Kel. Kemandungan : 0,56	3. Kel. Cabawan : 1,28
4. Kel. Pekauman : 0,96	4. Kel. Margadana : 2,41
5. Kel. Kraton : 1,23	5. Kel. Kalinyamat Kulon : 1,52
6. Kel. Tegalsari : 2,19	6. Kel. Sumurpanggang : 1,00
7. Kel. Muarareja : 8,91	7. Kel. Pesurungan Lor : 1,82

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2013

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tegal secara astronomis terletak pada 109° 08' – 109° 10' BT dan 6° 50' – 6° 53' LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategic memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-Tegal-Yogyakarta.

2.1.1.3 Topografi

Topografi Kota Tegal termasuk dalam kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter diatas permukaan air laut (dpal), membentang dari wilayah Timur hingga ke Barat dan Wilayah Selatan hingga ke Utara.

2.1.1.4 Geologi

Batuan pembentuk lahan di Kota Tegal terbagi dalam dua jenis batuan pembentuk, yaitu tanah liat dan pasir. Batuan pasir banyak tersebar di sepanjang daerah pesisir mulai dari Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur yaitu Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen, dan Kelurahan Panggung. Adapun persebaran tanah liat berada di hampir keseluruhan Kecamatan di Kota Tegal.

2.1.1.5 Hidrologi

Terdapat 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Tegal. Kelima sungai tersebut yaitu Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Gangsa, Sungai Kemiri, dan Sungai Sibelis.

2.1.1.6 Klimatologi

Iklim di Kota Tegal termasuk kedalam kondisi iklim tropis kering. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi geografis Kota Tegal yang berada di daerah pesisir dengan suhu antara 24,9° Celcius hingga 31,6° Celcius dan tingkat kelembaban antara 71% – 86%. Musim hujan di Kota Tegal terjadi antara bulan Januari hingga bulan Juli dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 459 mm dan paling rendah pada bulan Juli sebesar 82 mm. Perkembangan klimatologi Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perkembangan Curah Hujan, Suhu Udara, dan Tingkat Kelembaban
Kota Tegal Tahun 2013

No	Bulan	Curah Hujan (mm/tahun)	Rata-rata Suhu Udara (°Celcius)	Tingkat Kelembaban (%)
1.	Januari	459	27,0	86
2.	Februari	103	27,8	82
3.	Maret	239	28,1	81
4.	April	82	28,3	81
5.	Mei	263	28,3	81
6.	Juni	300	27,9	82
7.	Juli	155	27,3	80
8.	Agustus	5	27,4	70
9.	September	0	27,9	71
10.	Oktober	5	28,8	72

No	Bulan	Curah Hujan (mm/tahun)	Rata-rata Suhu Udara (°Celcius)	Tingkat Kelembaban (%)
11.	November	127	28,6	74
12.	Desember	309	27,5	82

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2013

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

1. Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya Kota Tegal diklasifikasikan kedalam Sembilan kawasan, yaitu kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan ruang terbuka non hijau; kawasan ruang evakuasi bencana; kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan kawasan peruntukan lainnya.

2. Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan di Kota Tegal diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepadatan, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi dikelompokkan di Kelurahan Kraton, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Randugunting, Kelurahan Kejambon, dan Kelurahan Tegalsari. Adapun kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang dikelompokkan di Kelurahan Slerok, Kelurahan Mintaragen, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Cabawan, Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Debong Tengah, Kelurahan Sumurpanggang, Kelurahan Debong Lor, Kelurahan Debong Kulon, Kelurahan Bandung, Kelurahan Tunon, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Kuturen, dan Kelurahan Panggung; sedangkan kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah dikelompokkan di Kelurahan Pesurungan Lor, Kelurahan Muarareja, Kelurahan Margadana, Kelurahan Krandon.

3. Kawasan Perdagangan Dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Tegal dibagi kedalam dua kategori, yaitu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengembangan kawasan pasar tradisional di Kota Tegal dibagi kedalam 3 tingkatan skala pelayanan, yaitu regional, kecamatan, dan lingkungan. Peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional dan/atau kota meliputi: Pasar Pagi di Kelurahan Mangkukusuman; Pasar Malam Kelurahan Panggung; dan Pasar

Beras di Kelurahan Mintaragen. Peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan kecamatan dan/atau kelurahan meliputi: Pasar Langan di Kelurahan Slerok; Pasar Kejambon di Kelurahan Kejambon; Pasar Randugunting di Kelurahan Randugunting; Pasar Martoloyo di Kelurahan Panggung; Pasar Bandung di Kelurahan Bandung; Pasar Sumurpanggang di Kelurahan Sumurpanggang; dan Pasar Krandon di Kelurahan Krandon. Peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan meliputi: Pasar Karangdawa di Kelurahan Mangkukusuman; Pasar Cinde di Kelurahan Kraton; Pasar Muaraanyar di Kelurahan Muarareja; dan Pasar Debong Kimpling di Kelurahan Bandung.

4. Kawasan Perkantoran

Pengembangan kawasan perkantoran di Kota Tegal meliputi pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dilakukan di kawasan Jalan Ki Gede Sebayu, dan Jalan Hangtuah . Adapun pengembangan kawasan perkantoran swasta dilakukan pada kawasan perdagangan dan jasa.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan industri di Kota Tegal dibagi kedalam 4 kategori, yaitu industri mikro, kecil, menengah dan besar. Industri kecil dan menengah berada di Kawasan Industri Terpadu di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Barat. Pengembangan Industri kecil dan mikro terdapat di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur dan di Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan.

6. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kota Tegal adalah wisata pantai, yaitu Pantai Alam Indah dan Kawasan wisata terbuka sebagai kawasan sabuk hijau dan kawasan lindung yang berada di Kelurahan Muarareja.

7. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Tegal adalah pedestrian atau tempat pejalan kaki disepanjang jalan berikut ini: Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo; Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo; Jalan Kolonel Sugiyono; Jalan Mayjen Sutoyo; Jalan Gajah Mada; Jalan MT. Haryono; Jalan Kapten Sudibyo; Jalan KS. Tubun; Jalan Sultan Agung; Jalan Arif Rahman Hakim; Jalan Diponegoro; Jalan

Ahmad Yani; Jalan Veteran; Jalan Pemuda; Jalan Proklamasi; Jalan Kartini; Jalan Semeru; Jalan Pancasila; Jalan Menteri Supeno; Jalan Setia Budi; Jalan Dr. Soetomo; Jalan HOS. Cokroaminoto; Jalan Jend. Sudirman; Jalan Yos Sudarso; Jalan KH. Wahid Hasyim; Jalan KH. Mansyur; dan Jalan Tentara Pelajar.

8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya diperuntukkan bagi pengembangan kawasan pertanian, perikanan, pelayanan umum, pertahanan dan keamanan serta peruntukan pelabuhan.

Pengembangan kawasan pertanian meliputi kawasan pertanian irigasi teknis di Kecamatan Tegal Selatan, Tegal Timur, Tegal Barat dan Margadana. Sedangkan kawasan perikanan terdapat di Kecamatan Tegal Timur dan Tegal Barat. Untuk kawasan pelayanan umum tersebar di masing-masing kecamatan antara lain kawasan pendidikan dan olah raga, persampahan, air limbah, dan lainnya. Sedangkan peruntukan pelabuhan di Kecamatan Tegal Barat.

9. Kawasan Lindung.

Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dan kawasan cagar budaya.

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu sempadan sungai dan sempadan pantai. Daerah sempadan sungai tersebut meliputi Sungai Ketiwon, Sungai Kali Gung, Sungai Kali Gangsa, Sungai Kemiri, dan Sungai Sibelis. Wilayah yang termasuk dalam sempadan pantai terdapat pada Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat.

Mekanisme pengelolaan sempadan sungai adalah melalui identifikasi dan penataan bangunan di sempadan sungai; penghijauan sempadan sungai; pengaturan pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan; dan pembangunan jalan inspeksi. Adapun pengelolaan sempadan pantai melalui penghijauan, pembangunan groin dan breakwater untuk melindungi pantai dari abrasi; dan penetapan kawasan sempadan pantai yang dapat dimanfaatkan dermaga, pelabuhan, kegiatan perikanan lain, dan kegiatan lain yang diijinkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang Terbuka Hijau Kota di Kota Tegal dibagi kedalam dua kategori, yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. RTHK Kota Tegal antara lain taman kota, taman kecamatan yang tersebar pada semua daerah kecamatan; RTH sempadan berada di sepanjang sempadan sungai meliputi Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri, Sungai Gangsa dan daerah pesisir sepanjang pantai di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur dengan luasan yang bervariasi; dan hutan kota berada di setiap Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).

3) Kawasan Cagar Budaya

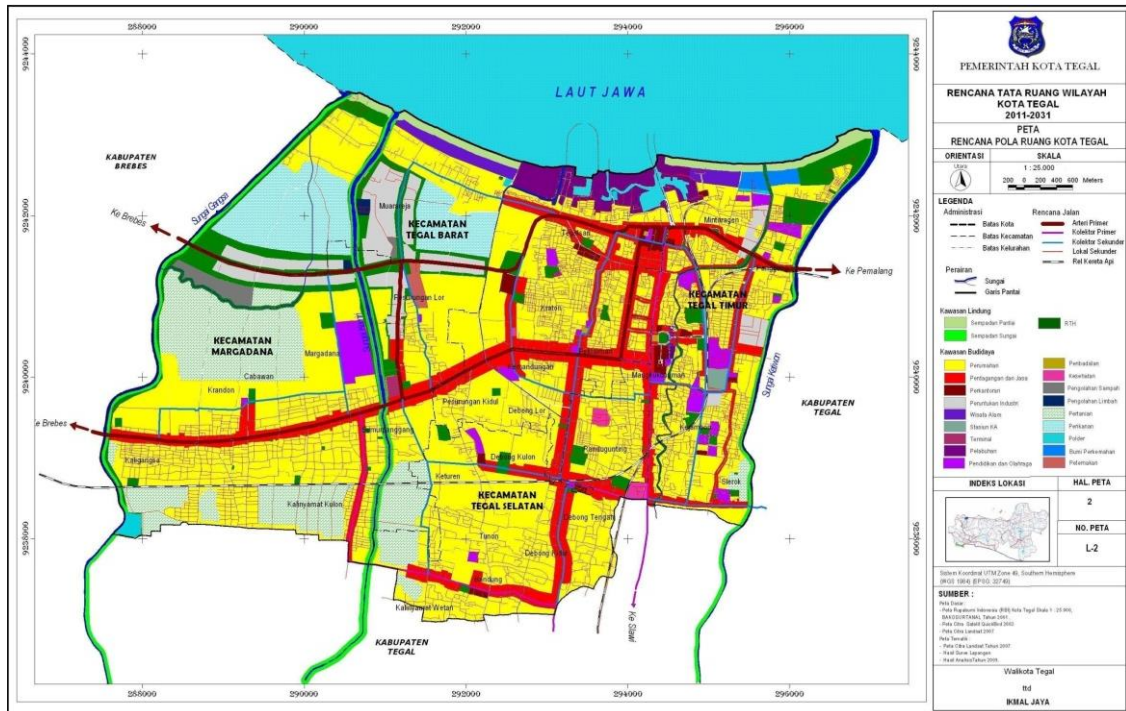
Kawasan cagar budaya di Kota Tegal berada di kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Mangkukusuman; kawasan Kota Lama yang terletak di lingkungan Balaikota lama di Kelurahan Tegalsari; dan kawasan Stasiun Besar Kereta Api di Kelurahan Panggung.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah menklasifikasikan Kota Tegal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota lain. Pada tahap pelayanan yang lebih tinggi, yaitu tingkat nasional, Kota Tegal tergabung dalam sebuah sistem perwilayahan sebagaimana disebut sebagai Bergasmalang terdiri atas Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang.

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari Rencana Tata dan Ruang Wilayah Kota Tegal. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal mengklasifikasikan rencana pola ruang di Kota Tegal kedalam dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat; Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK); kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan ruang terbuka non hijau; kawasan ruang evakuasi bencana; kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan kawasan peruntukan lainnya.

Detail rencana pola ruang dan wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

Gambar 2.2 Rencana Pola Ruang dan Wilayah Kota Tegal

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Jenis bencana alam yang mengancam Kota Tegal adalah abrasi, gelombang pasang (rob), banjir, dan angin puting beliung. Kawasan rawan bencana abrasi dan gelombang pasang terletak di sepanjang pantai Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Panggung; dan kawasan rawan bencana banjir berada di Kecamatan Tegal Selatan Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat. Kawasan rawan bencana alam tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya mitigasi bencana di Kota Tegal.

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2013 sebanyak 245.184 jiwa, terdiri dari 121.703 jiwa laki-laki dan 123.481 jiwa perempuan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Tegal Timur, yaitu sebanyak 75.571 jiwa, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Margadana sebanyak 46.203 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Tegal sebesar 6.142 jiwa/km², tertinggi di Kecamatan Tegal Timur yaitu 11.976 jiwa/km², sedangkan terendah berada di Kecamatan Margadana yaitu 3.919

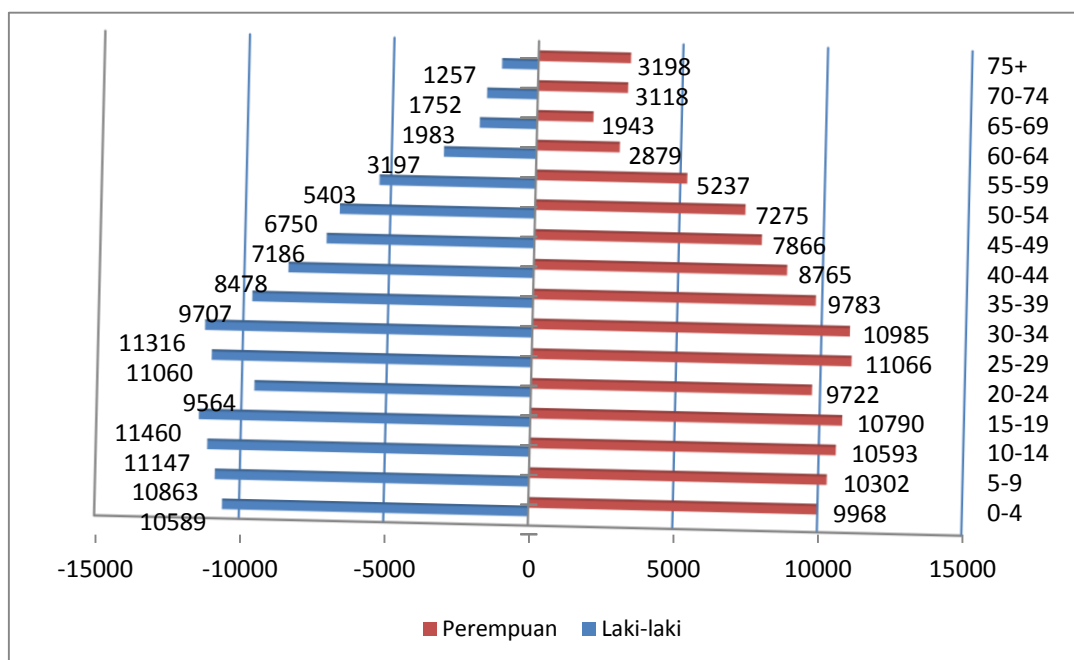
km². Rasio jenis kelamin di Kota Tegal adalah 98,56%, dengan kata lain setiap 100 perempuan terdapat 98,56 laki-laki. Rasio jenis kelamin di masing-masing kecamatan memiliki capaian yang berbeda. Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan (jiwa/km)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Tegal Selatan	30.217	29.929	60.146	100,96	9.355
Tegal Timur	37.122	38.449	75.571	96,55	11.884
Tegal Barat	31.121	32.143	63.264	96,82	4.182
Margadana	23.243	22.960	46.203	101,23	3.929
Jumlah	121.703	123.481	245.184	98,56	6.179

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2013

Penduduk Kota Tegal pada tahun 2013 lebih banyak didominasi oleh penduduk produktif, terlihat dari jumlah penduduk usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun keatas). Perbandingan jumlah penduduk non produktif terhadap jumlah penduduk produktif menunjukkan bahwa angka ketergantungan Kota Tegal pada tahun 2013 sebesar 45,53%, yang berarti sebanyak 100 orang produktif menanggung sebanyak 46 orang non produktif. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.3



Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2013

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Tegal Tahun 2013

Sebagian besar penduduk Kota Tegal sebagian besar berpendidikan SD, yaitu sebesar 36,68% dari total penduduk yang ada. Disusul kemudian oleh jenjang pendidikan SLTP (28,04%), SLTA (27,16%) dan Perguruan Tinggi/Akademi (8,12%). Pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi Kota Tegal Tahun 2013

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan			
		PT / AKADEMI	SLTA	SLTP	SD
I	Tegal Selatan	1.784	10.193	11.199	17.214
1.	Kalinyamat Wetan	54	431	806	1.396
2.	Bandung	88	640	682	2.215
3.	Debong Kidul	77	606	713	1.803
4.	Tunon	76	975	951	1.798
5.	Keturen	30	501	890	1.575
6.	Debong Kulon	184	637	665	1.879
7.	Debong Tengah	123	2.096	2.372	2.367
8.	Randugunting	1.152	4.307	4.120	4.181

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan			
		PT / AKADEMI	SLTA	SLTP	SD
II	Tegal Timur	5.165	17.691	16.757	17.745
1.	Kejambon	1.045	3.599	3.416	1.314
2.	Slerok	682	2.396	3.269	4.957
3.	Panggung	2.565	7.978	7.005	4.396
4.	Mangkukusuman	416	424	874	1.341
5.	Mintaragen	457	3.294	2.193	5.737
III	Tegal Barat	6.435	13.785	12.769	13.921
1.	Pesurungan Kidul	205	667	914	1.673
2.	Debong Lor	245	939	579	1.160
3.	Kemandungan	327	1.030	724	540
4.	Pekauman	550	1.662	1.360	2.450
5.	Kraton	1.154	4.445	3.753	1.886
6.	Tegalsari	3.855	4.679	4.727	3.142
7.	Muarareja	99	363	712	3.070
IV	Margadana	878	6.049	8.546	15.564
1.	Kaligangsa	162	1.080	2.180	3.514
2.	Krandon	88	816	846	1.241
3.	Cabawan	71	297	517	1.971
4.	Margadana	201	1.265	1.909	3.595
5.	Kalinyamat Kulon	97	529	864	2.030
6.	Sumurpanggang	160	1.183	1.178	2.014
7.	Pesurungan Lor	99	879	1.052	1.199
	Jumlah	14.262	47.718	49.271	64.444

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2013

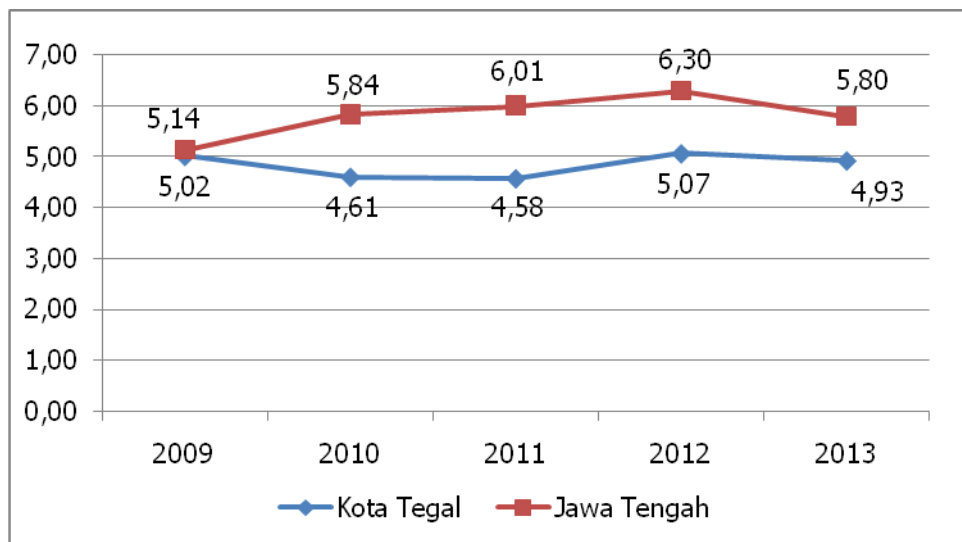
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tren pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama periode 2009-2013 cenderung menurun. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Tegal sebesar 5,02%, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 4,93%. Pertumbuhan ekonomi meningkat hanya pada tahun 2012 sebesar 5,07%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal memiliki pertumbuhan yang selalu lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal melambat meski masih menunjukkan angka positif. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.4.

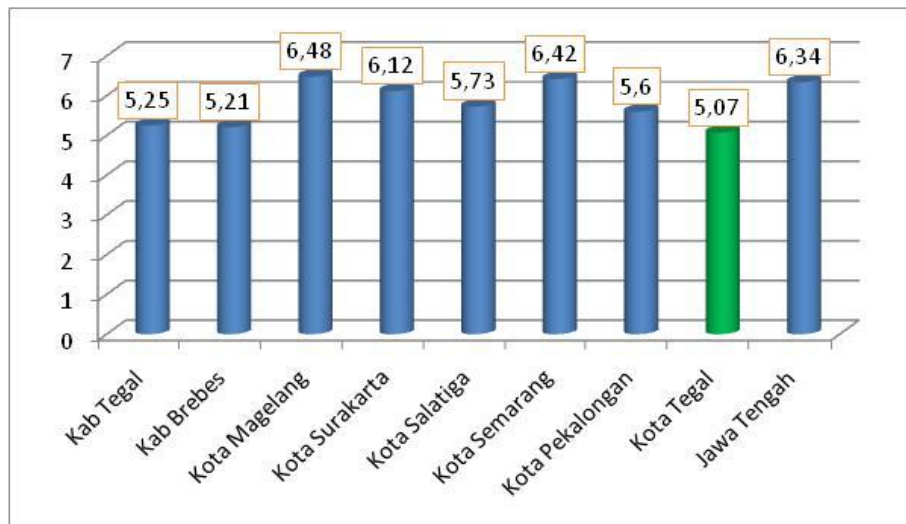


Sumber: BPS Jawa Tengah dan Kota Tegal, 2013

Gambar 2.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal dengan Jawa Tengah 2009-2013 (%)

Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama kurun waktu 2009-2013 membuat daya saing daerah melemah dan kegiatan perekonomian masyarakat menurun karena daya beli masyarakat turut tergerus. Selain itu, sektor pertanian, khususnya subsektor perikanan yang mengalami perlambatan karena dipengaruhi faktor musim. Namun pada tahun 2013, aktivitas sektor bangunan mampu memacu pertumbuhan sektor listrik dan air bersih. Jasa keuangan juga berkembang pesat selaras dengan ekspektasi membaiknya perekonomian dan kondusivitas iklim usaha di Kota Tegal.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal masih di bawah kota-kota lain di Jawa Tengah, bahkan lebih rendah dari kabupaten sekitar (Tegal dan Brebes), seperti terlihat pada Gambar 2.5.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal dengan Kota Lain dan Kabupaten Sekitar Tahun 2012

Selama periode 2009-2013, PDRB ADHB Kota Tegal trennya menunjukkan meningkat yaitu sebesar Rp. 2.387.809.780,96 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 3.398.772.978,75 pada tahun 2013. Rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB ADHB Kota Tegal sebesar 8,84 % setiap tahunnya. PDRB ADHB Kota Tegal mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2009 sebesar 10,41% dan pertumbuhan paling rendah sebesar 7,44% pada tahun 2011.

Tabel 2.5
Pertumbuhan PDRB ADHB Kota Tegal Tahun 2009-2013

Tahun	PDRB ADHB	Pertumbuhan (%)
2009	2.387.809.780,96	10,41
2010	2.635.244.110,93	9,39
2011	2.846.975.053,73	7,44
2012	3.081.836.460,41	7,62
2013	3.398.772.978,75	9,32

Sumber: PDRB Kota Tegal, 2013

Sumbangan proporsi terbesar PDRB ADHB Kota Tegal untuk tahun 2009 sampai 2013 adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant dengan nilai kontribusi rata-rata sebesar 24,08% dari total keseluruhan nilai PDRB ADHB Kota Tegal. Sementara itu penyumbang PDRB ADHB Kota Tegal paling rendah

yaitu dari sektor listrik, gas dan air minum dengan tingkat kontribusi rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,03 %. Kota Tegal merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak memiliki sektor usaha bidang pertambangan dan galian, sehingga sektor tersebut memiliki nilai nol karena tidak masuk pada perhitungan PDRB ADHB.

Tabel 2.6
Distribusi PDRB-ADHB Masing-Masing Sektor
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013 (%)

Lapangan usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	8,57	8,50	8,41	7,81	7,47
Pertambangan dan galian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	20,82	20,71	20,36	20,18	20,05
Listrik, gas dan air minum	2,92	2,98	2,98	2,96	3,03
Bangunan	12,79	12,59	12,70	12,64	12,71
Perdagangan, hotel dan restaurant	23,00	22,95	22,84	23,49	24,08
Pengangkutan dan komunikasi	11,36	11,15	11,00	11,04	10,97
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,83	10,01	10,17	10,46	10,56
Jasa-jasa	10,71	11,11	11,53	11,41	11,13
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Tegal, 2013

Sementara itu dilihat dari laju pertumbuhan masing-masing sektor pada PDRB ADHB Kota Tegal selama kurun waktu 2009-2013 rata-rata menunjukkan kondisi yang menurun. Sektor dengan pertumbuhan relatif cukup konsisten setiap tahunnya ditunjukkan oleh sektor industri pengangkutan dan komunikasi. Kondisi ini menunjukkan industri Angkutan dan komunikasi di Kota Tegal mengalami perkembangan yang cukup baik. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan yang menurun cukup drastis terjadi pada sektor pertanian dengan pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 6,89% menjadi 0,59 pada tahun 2012. Pertumbuhan

masing-masing sektor pada PDRB ADHB Kota Tegal selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB-ADHB Masing-Masing Sektor
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013 (%)

Lapangan usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	4,26	9,42	6,89	0,59	5,39
Pertambangan dan galian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	9,21	9,78	6,25	7,26	9,60
Listrik dan air minum	16,33	12,65	7,91	7,54	13,08
Bangunan	17,23	8,68	8,96	7,71	10,87
Perdagangan hotel dan restaurant	13,95	10,12	7,54	11,33	13,02
Angkutan dan komunikasi	8,03	8,33	6,60	8,66	9,59
Keuangan, sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan	11,53	12,37	9,77	11,37	11,34
Jasa-jasa	14,29	14,47	12,10	7,11	7,54

Sumber : PDRB Kota Tegal, 2013

Nilai PDRB Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 menunjukkan tren yang positif yaitu meningkat setiap tahunnya. Nilai PDRB ADHK Kota Tegal pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.225.102.106,91 meningkat menjadi Rp.1.477.505.818,74 pada tahun 2013. PDRB ADHK Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,69%. Pertumbuhan PDRB paling tinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,82%. Perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8
Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Kota Tegal Tahun 2009-2013

Tahun	PDRB ADHK 2000	Pertumbuhan (%)
2009	1.225.102.106,91	4,78
2010	1.281.528.201,39	4,40
2011	1.340.227.744,49	4,38
2012	1.408.144.095,34	4,82

2013	1.477.505.818,74	4,69
------	------------------	------

Sumber : PDRB Kota Tegal, 2013

Perkembangan PDRB Kota Tegal dilihat berdasarkan masing-masing sektor nilainya setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sektor penyumbang terbesar adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 24,79% dan sektor industri pengolahan dengan nilai sebesar 21,14%. Sektor yang tidak memiliki sumbangan terhadap PDRB di Kota Tegal adalah sektor pertambangan dan galian. Ini dikarenakan Kota Tegal tidak memiliki wilayah pertambangan yang menjadi sumber perekonomian masyarakat sehingga sumbangannya terhadap PDRB nol. Sampai saat ini, Kota Tegal merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang sebagian besar sektor perekonomiannya lebih banyak ditopang oleh sektor sekunder dan tersier. Persentase distribusi PDRB ADHK Kota Tegal selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9
Distribusi PDRB-ADHK 2000 Masing-Masing Sektor
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013 (%)

Lapangan usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	9,95	9,48	9,11	8,46	7,88
Pertambangan dan galian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	21,93	21,73	21,58	21,33	21,14
Listrik dan air minum	2,38	2,46	2,44	2,47	2,52
Bangunan	9,37	9,44	9,58	9,65	9,81
Perdagangan, hotel dan restaurant	23,46	23,58	23,76	24,32	24,79
Angkutan dan komunikasi	14,08	14,23	14,33	14,58	14,89
Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan	9,59	9,77	9,98	10,24	10,32
Jasa-jasa	9,24	9,31	9,21	8,95	8,66
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Tegal, 2013

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, sektor yang konsisten tumbuh positif selama periode 2009-2013 adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sementara itu sektor lainnya rata-rata mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sektor pertanian dengan sumbangan paling kecil terhadap PDRB di Kota Tegal sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2010 dan 2013. Menurunnya sumbangan sektor pertanian ditengarai semakin banyaknya alih fungsi lahan di Kota Tegal dari lahan pertanian terutama sawah banyak diubah untuk digunakan sebagai pendukung kegiatan perdagangan maupun kegiatan di sektor industri.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK 2000 Masing-Masing Sektor
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013 (%)

Lapangan usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	0,36	-0,35	0,52	-2,45	-2,27
Pertambangan dan galian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	3,40	3,63	3,86	3,85	3,97
Listrik, gas dan air bersih	6,71	8,02	3,72	6,41	6,81
Bangunan	9,23	5,46	6,15	5,83	6,62
Perdagangan hotel dan restaurant	5,65	5,16	5,39	7,51	6,96
Pengangkutan dan komunikasi	7,00	5,72	5,28	6,92	7,17
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,64	6,54	6,90	7,73	5,76
Jasa-jasa	3,42	5,39	3,46	2,13	1,54

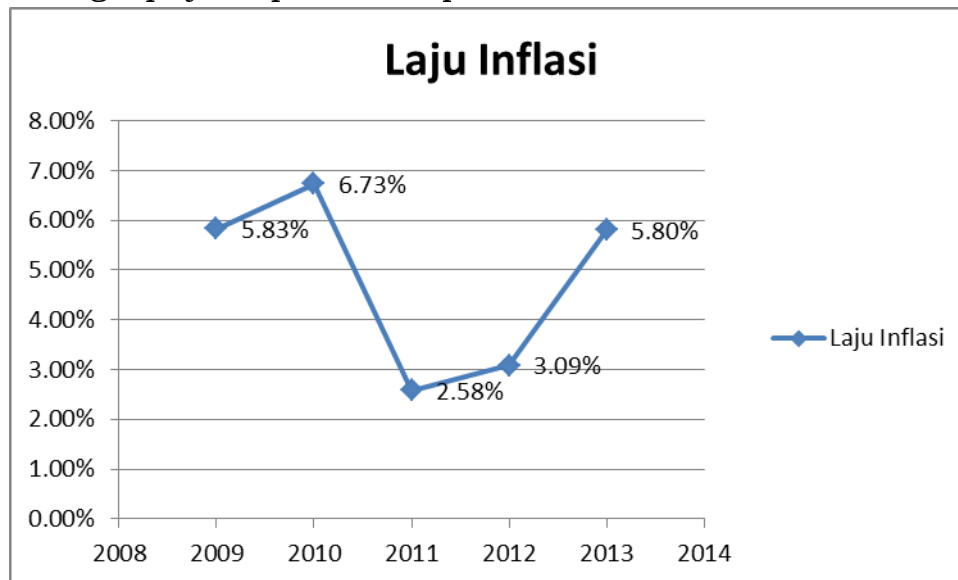
Sumber : PDRB Kota Tegal, 2013

2. Laju Inflasi

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Perkembangan laju inflasi di Kota Tegal cukup baik, berada pada angka dibawah dua digit. Laju Inflasi Kota Tegal fluktuatif, tertinggi pada tahun 2010 sebesar 6,73%, dan laju inflasi mengalami kenaikan yaitu dari 5,83% pada

2009 menjadi 6.73% pada tahun 2010. Akan tetapi, dalam periode dua tahun berikutnya yaitu Tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan, akan tetapi pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,80%. Secara umum pergerakan inflasi Kota Tegal relatif stabil, tanpa fluktuasi tajam, meski kadang lebih tinggi, atau lebih rendah dari pada inflasi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 7,99%. Hal ini menandakan kondisi perekonomian yang cenderung stabil, tanpa gejolak berarti yang dapat meresahkan masyarakat dan pemilik modal.

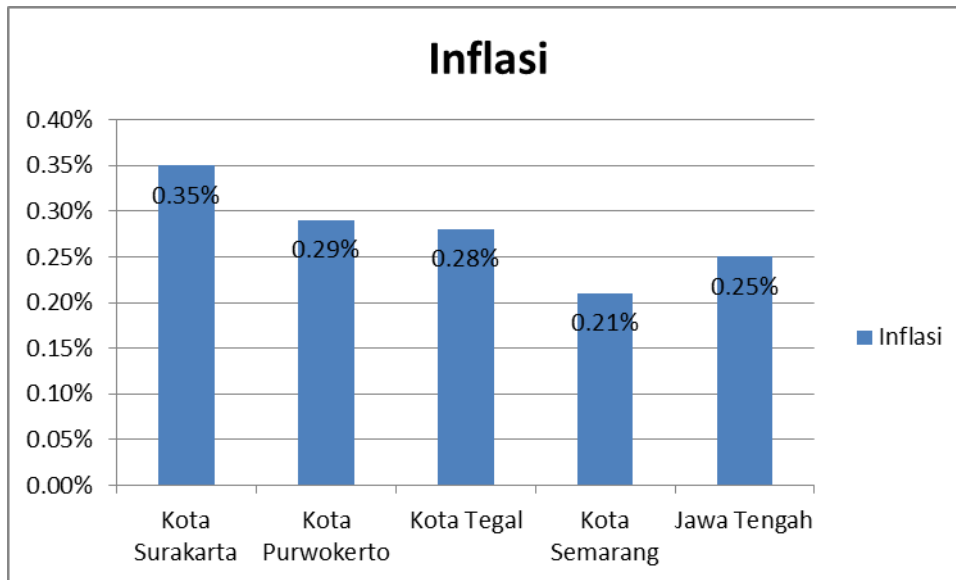
Laju inflasi di Kota Tegal dalam kurun waktu lima tahun selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: IHK Kota Tegal, 2009-2013

Gambar 2.6 Laju Inflasi Kota Tegal Tahun 2009 - 2013

Perbandingan dengan Kota lain sekitar inflasi Kota Tegal menunjukkan kinerja yang baik karena angkanya merupakan terendah kedua setelah Kota Semarang. Perbandingan laju inflasi Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.7



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.7 Perbandingan Inflasi Kota Tegal dengan Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2013

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kurun waktu tertentu. IHK memiliki fungsi antara lain untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa, sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan, sebagai penghitungan penyesuaian upah minimum regional kabupaten, dan untuk memantau permintaan dan penawaran. Kondisi capaian IHK Kota Tegal dari tahun 2009-2012 dapat dilihat dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Indeks Harga Konsumen Kota Tegal Tahun 2009-2013

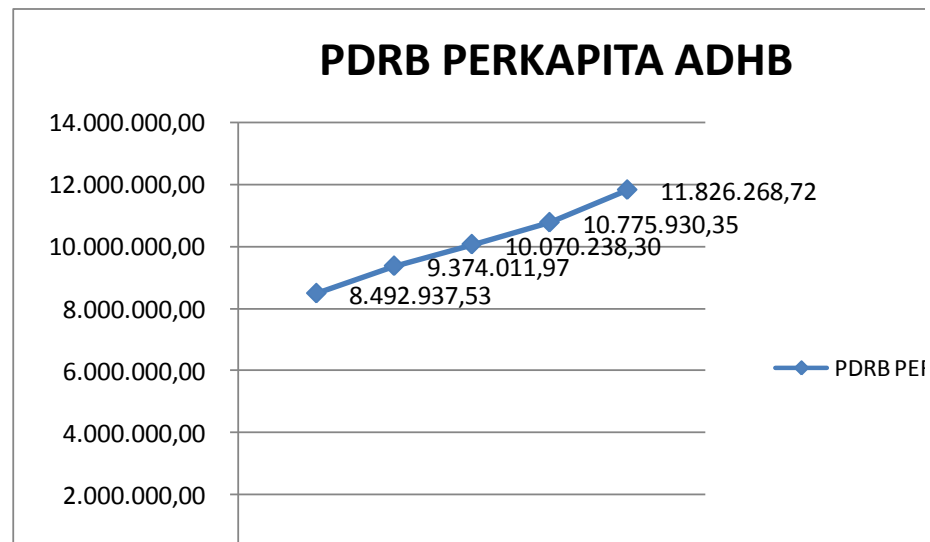
No	Tahun	Indeks Harga Konsumen
1	2009	118,94
2	2010	126,95
3	2011	130,23
4	2012	134,26
5	2013	142,05

Sumber : IHK Kota Tegal, 2009-2013

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat

dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tegal menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 8.492.937,53 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 11.826.268,72 pada tahun 2013, seperti terlihat pada Gambar 2.8.

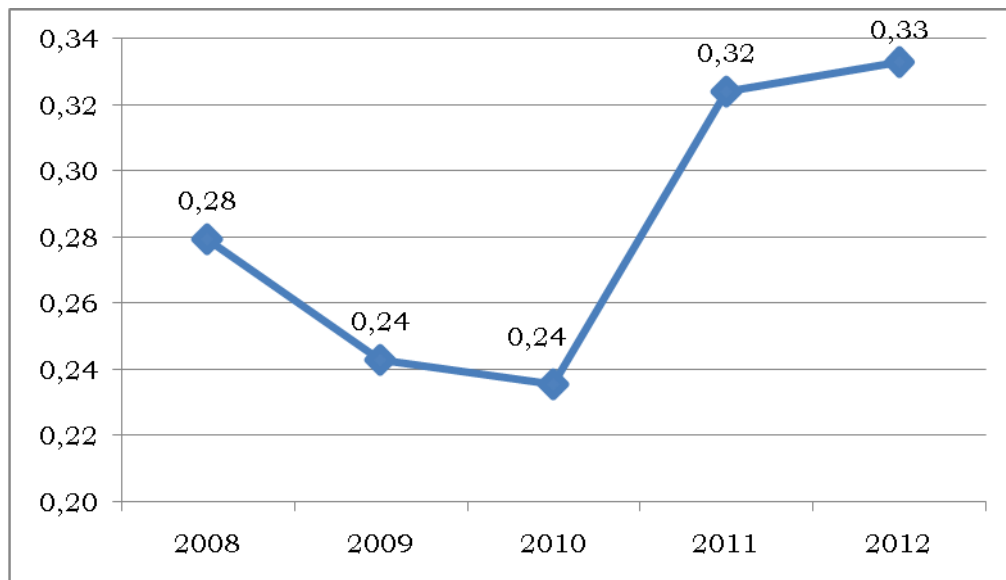


Sumber: PDRB Kota Tegal, 2013

Gambar 2.8 PDRB Per Kapita ADHB Kota Tegal Tahun 2009-2013 (Rp)

4. Indeks Gini

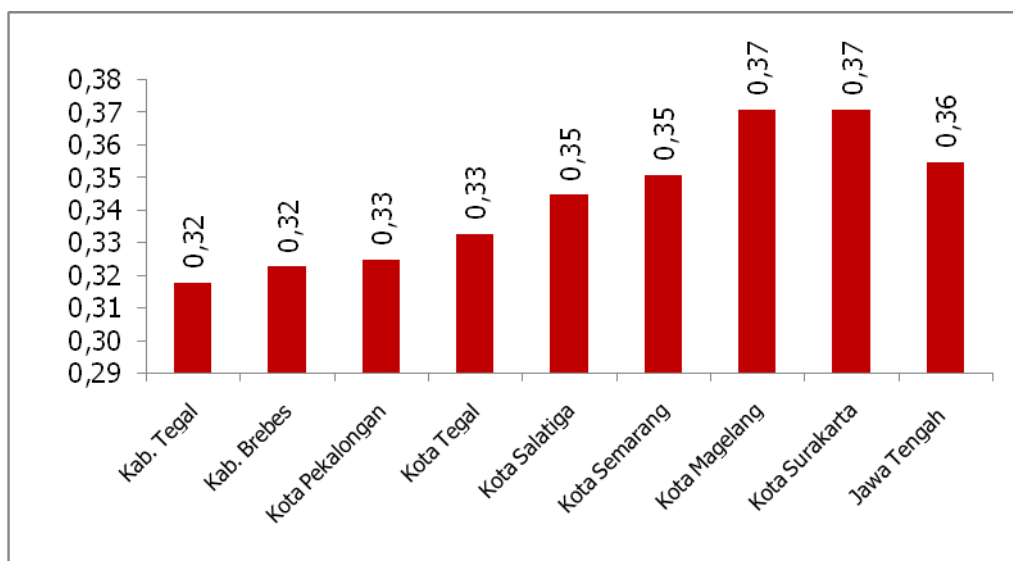
Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “rendah” bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan ketimpangan “sedang” bila indeks Gini 0,3 dan ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Indeks gini Kota Tegal pada tahun 2012 sebesar 0,33. Meningkat tajam jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 0,23 dan tahun 2011 sebesar 0,32. Indeks Gini Kota Tegal menunjukkan kesenjangannya antar kelompok pendapatan Kota Tegal termasuk kategori sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya). Perkembangan Indeks Gini Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.9. di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Gini Kota Tegal Tahun 2008 – 2012.

Sementara itu jika dibandingkan dengan lima kota lainnya di Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, indeks gini di Kota Tegal pada tahun 2012 sebesar 0,33 terlihat lebih tinggi dari pada Kabupaten Tegal, Brebes dan Kota Pekalongan, dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Magelang, dan Kota Surakarta, seperti terlihat pada Gambar 2.10.

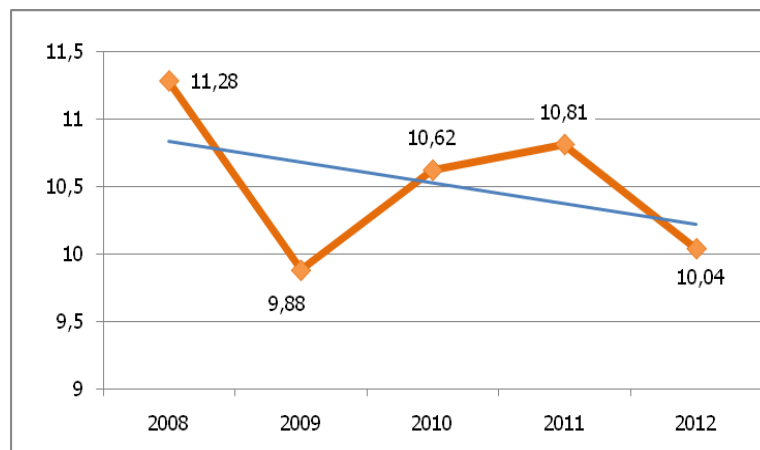


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.10 Perbandingan Indeks Gini Kota Tegal dengan Kota Lain dan Kabupaten Sekitar Tahun 2012

5. Penduduk Miskin

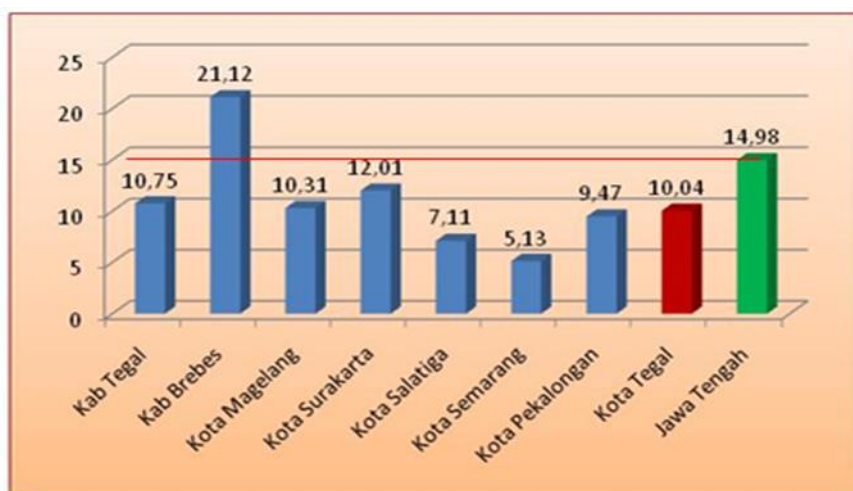
Tingkat kemiskinan di Kota Tegal berdasarkan garis kemiskinan mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Dalam kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan Kota Tegal mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011. Pencapaian terbaik penurunan kemiskinan di Kota Tegal pernah terjadi pada tahun 2009 dengan angka kemiskinan sebesar 9,88%, sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan angka kemiskinan sebesar 11,28%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Tegal selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Sumber: BPS Kota Tegal, 2012

Gambar 2.11 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Tegal Tahun 2012

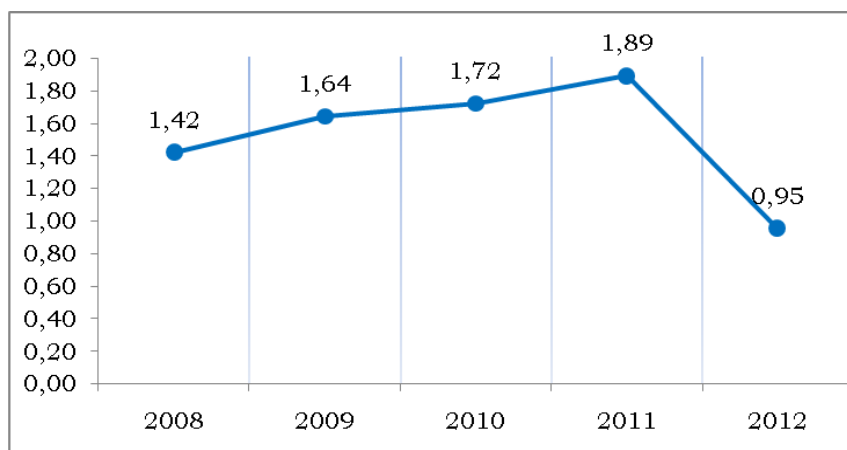
Dilihat posisi relatifnya, tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2012 sebesar 10,04 % berada dibawah (lebih baik) dari rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 14,98%. Jika dilihat berdasarkan kabupaten sekitar dan lima kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan Kota Tegal lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Brerebe, Kabupaten Tegal, Kota Magelang (10,31%), Kota Surakarta (12,01%) dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga (7,11%), Semarang (5,13%) serta Pekalongan (9,47%). Posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.12 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Tegal dengan Kota Lain dan Kabupaten Sekitar Tahun 2012

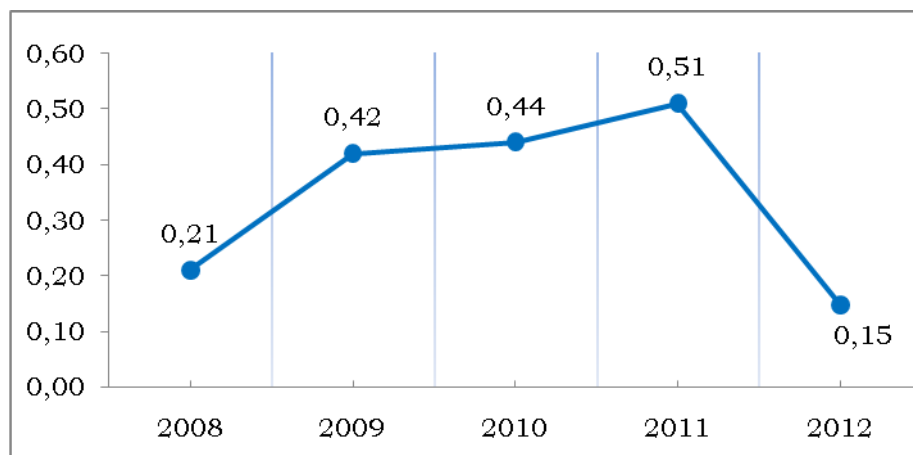
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. P1 Kota Tegal tren-nya terlihat menurun selama lima tahun terakhir (2008 – 2012). Hal ini dapat dilihat dari kondisi pada tahun 2008 sebesar 1,42 dan menurun menjadi tahun sebesar 0,95 pada 2012. Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan (semakin baik). Kondisi ini perlu dipertahankan karena jika melihat tren 4 tahun sebelumnya (2008-2011) kecenderungan P1 Kota Tegal meningkat seperti yang terlihat pada Gambar 2.13.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Tegal, Tahun 2008 – 2012

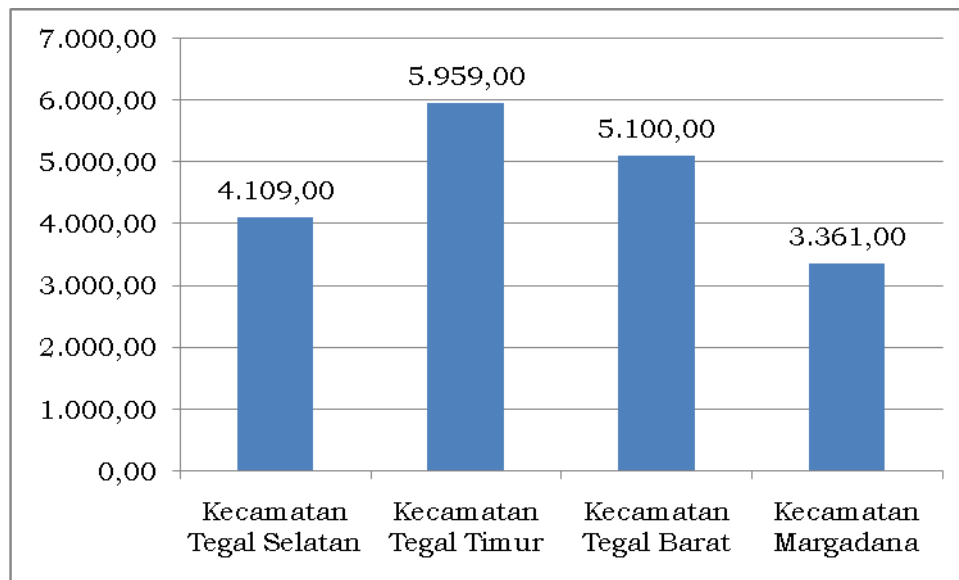
Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada grafik di bawah ini terlihat dalam lima tahun terakhir (2008-2012) indeks keparahan di Kota Tegal mengalami penurunan. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,15 dibanding tahun 2011 sebesar 0,51. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri di Kota Tegal semakin sedikit yang ditunjukkan oleh persebaran kemampuan penduduk miskin semakin membaik. Perkembangan P2 Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2008-2012) selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.14.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kota Tegal, Tahun 2008 – 2012

Jumlah rumah tangga miskin di Kota Tegal berdasarkan hasil validasi data PPLS 2011, pada tahun 2013 mencapai 18.529 rumah tangga. Persebaran jumlah penduduk miskin paling tinggi berada di Kecamatan Tegal Timur yaitu mencapai 5.959 rumah tangga. Sedangkan paling rendah berada di Kecamatan Margadana sebesar 3.361 rumah tangga.



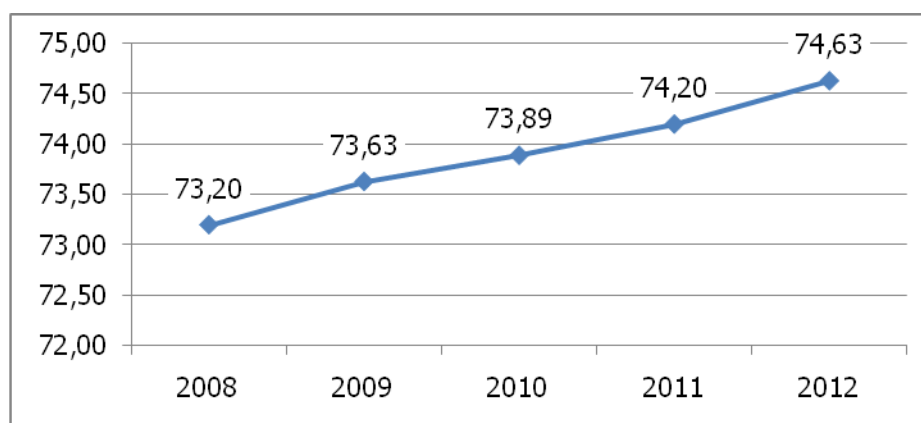
Sumber: PPLS 2011, validasi TKPK Kota Tegal tahun 2013

Gambar 2.15 Jumlah Rumah Tangga Miskin Masing-Masing Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2013

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

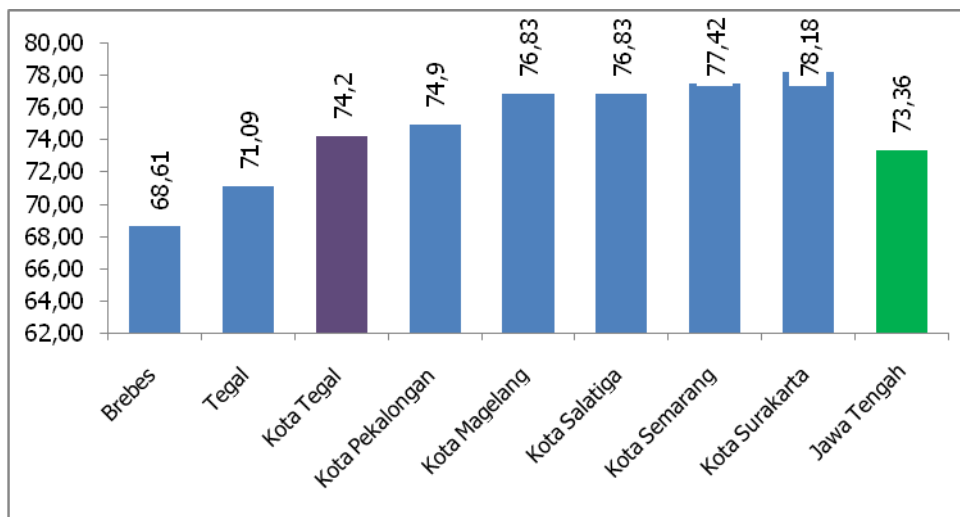
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2008-2012) trennya semakin baik. Capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun peningkatan relatif kecil, seperti yang terlihat pada Gambar 2.16.



Sumber: BPS Kota Tegal 2013

Gambar 2.16 Perkembangan IPM Kota Tegal Tahun 2008-2012

Pada tahun 2012, capaian IPM Kota Tegal sebesar 74,63 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,36. Akan tetapi jika dibandingkan dengan lima kota lainnya di Jawa Tengah, capaian IPM Kota Tegal lebih rendah namun lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya seperti yang terlihat pada Gambar 2.17.

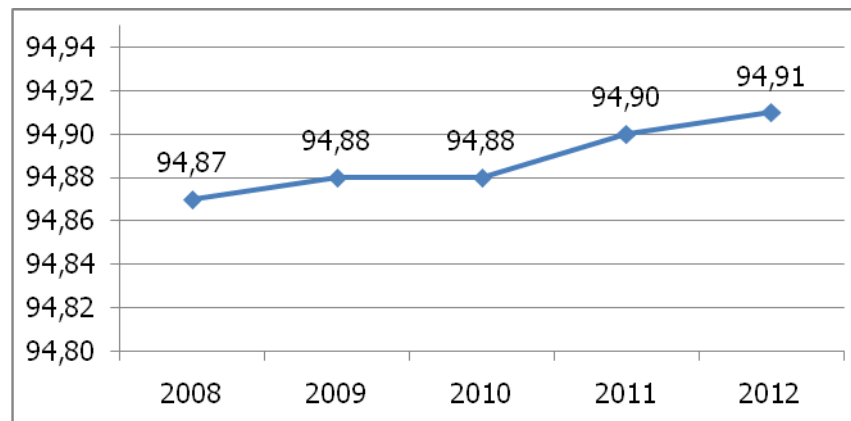


Sumber: BPS Kota Tegal, 2013

Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal dan kota lainnya di Jawa Tengah Tahun 2012

a. Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf di Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2008-2012) cenderung meningkat yaitu dari 94,87% pada tahun 2008 menjadi 94,91% pada tahun 2012. Angka melek huruf di Kota Tegal terlihat stagnan pada kurun waktu 2009 dan 2010 yaitu ada diangka 94,88%, kenaikan baru terlihat pada tahun 2011 dan 2012. Perkembangan angka melek huruf di Kota Tegal selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.18.

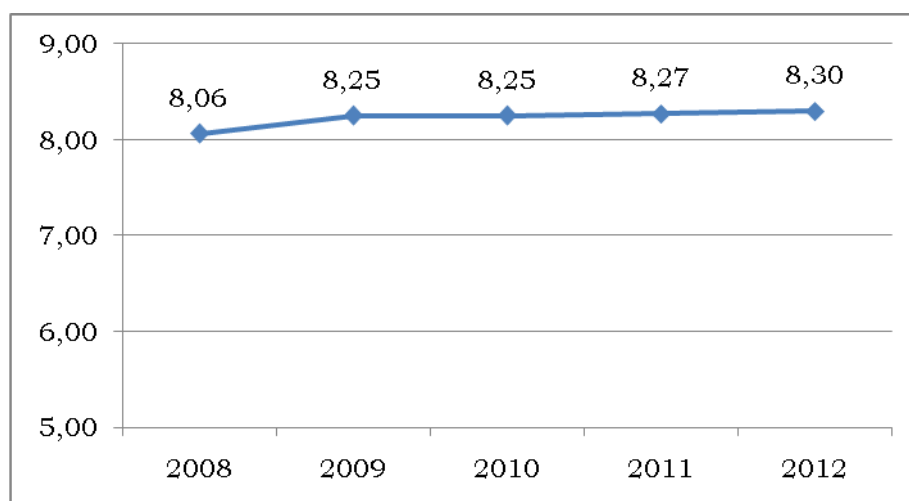


Sumber: BPS, 2013

Gambar 2.18 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Tegal Tahun 2008-2012

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kota Tegal selama lima tahun terakhir (2008-2012) juga mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2008 sebesar 8,06 tahun meningkat menjadi 8,30 tahun pada tahun 2012. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan kinerja tahunannya, rata-rata lama sekolah mengalami perbaikan pada tahun 2011 dan 2012, sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 tidak ada perbaikan yaitu cenderung sama diangka 8,25 tahun. Dengan kondisi tersebut, rata-rata lama sekolah di Kota Tegal belum mampu menjawab tantangan wajib belajar 9 tahun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk semua daerah. Kondisi perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.19.

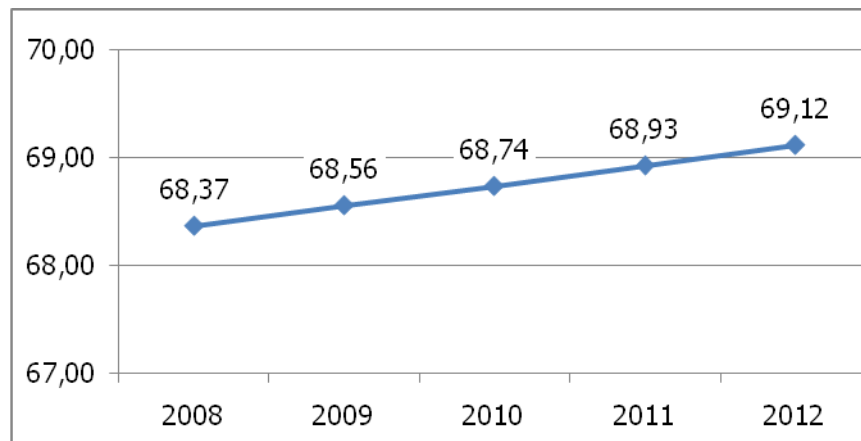


Sumber: BPS Kota Tegal, 2013

Gambar 2.19 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tegal Tahun 2008-2012

c. Usia Harapan Hidup

Pada tahun 2012, Angka Usia Harapan Hidup di Kota Tegal sebesar 69,12 tahun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 68,93 tahun dan tahun 2010 sebesar 68,74 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.20

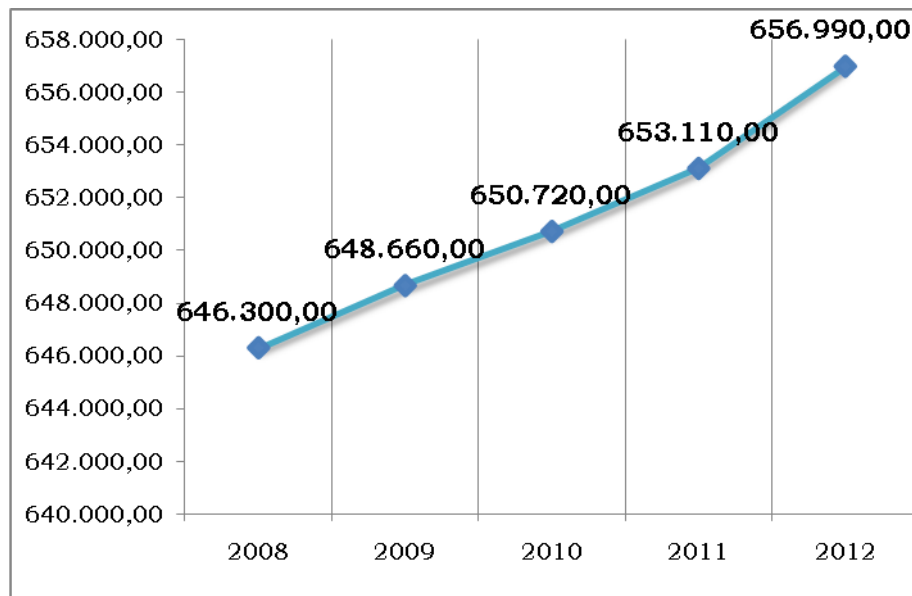


Sumber: BPS, 2013

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tegal Tahun 2008-2012

d. Pengeluaran per-Kapita

IPM Kota Tegal dilihat berdasarkan pengeluaran riil perkapita menunjukkan peningkatan selama periode 2008-2012. Kondisi ini ditunjukkan dari pengeluaran riil perkapita pada tahun 2008 sebesar 646.300 rupiah/bulan, meningkat menjadi 656.990 rupiah/bulan pada tahun 2012. Artinya dalam rentang lima tahun terakhir ada peningkatan sebesar 10.690 rupiah dengan rata-rata peningkatan sebesar 2.138 rupiah setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.21 berikut ini.

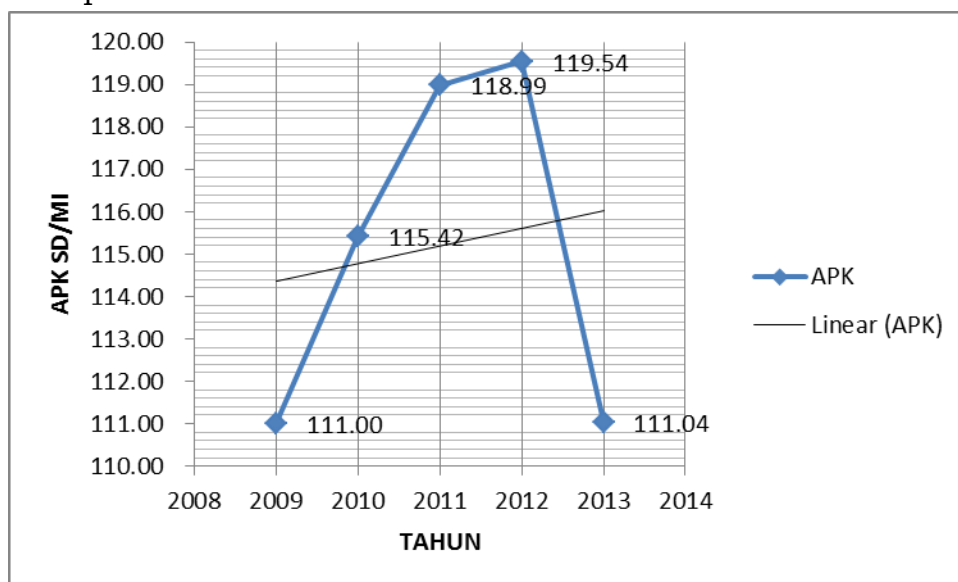


Sumber: BPS, 2013

Gambar 2.21 Grafik Perkembangan Pengeluaran per-Kapita (Rp) Kota Tegal Tahun 2008 - 2012

2. Angka Partisipasi Kasar

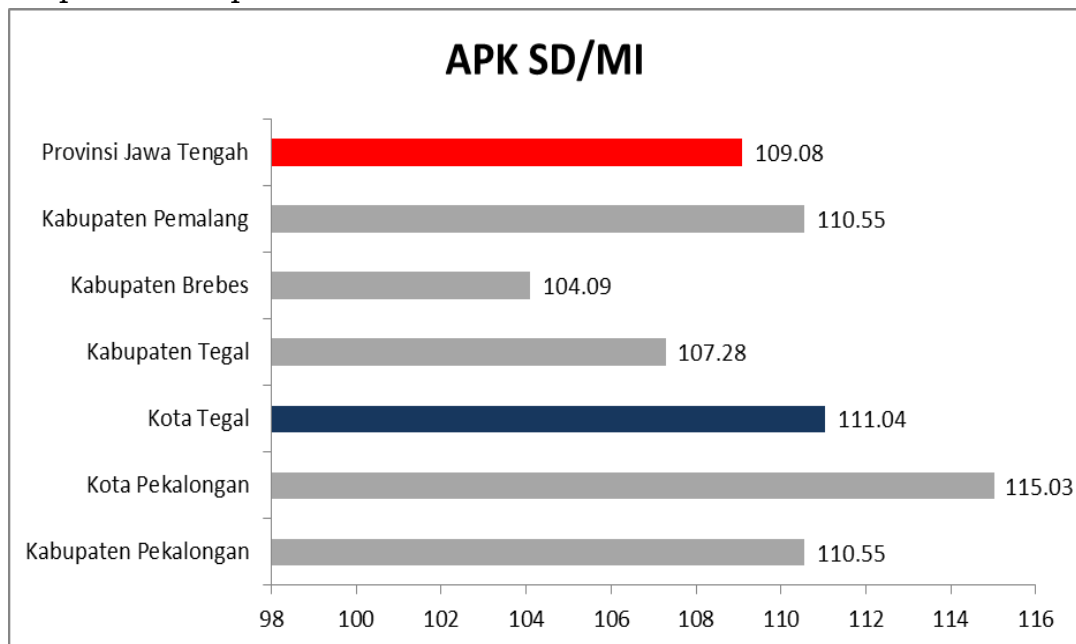
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kota Tegal selama kurun waktu antara 2009–2013 menunjukkan kenaikan walaupun tidak signifikan yaitu dari 111% pada tahun 2009 menjadi 111,04% pada tahun 2013. Penurunan APK SD/MI di Kota Tegal terjadi pada kurun waktu 2012/2013. Sejak tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan dari 111 menjadi 119,54%. Perkembangan APK SD/MI Kota Tegal selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

Gambar 2.22 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kota Tegal Tahun 2009 - 2013

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kota Tegal pada tahun 2013 sebesar 111,04%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 109,08%. Jika dibandingkan dengan dengan Kabupaten/Kota sekitar, APK SD/MI Kota Tegal lebih tinggi daripada Kabupaten Tegal 107,28%, Kabupaten Brebes 104,09%, Kabupaten Pemalang 110,55%, Kabupaten Pekalongan 110,55%, namun lebih rendah dari Kota Pekalongan 115,03%. Posisi relatif angka partisipasi kasar SD/MI Kota Tegal dengan Kab/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.23.

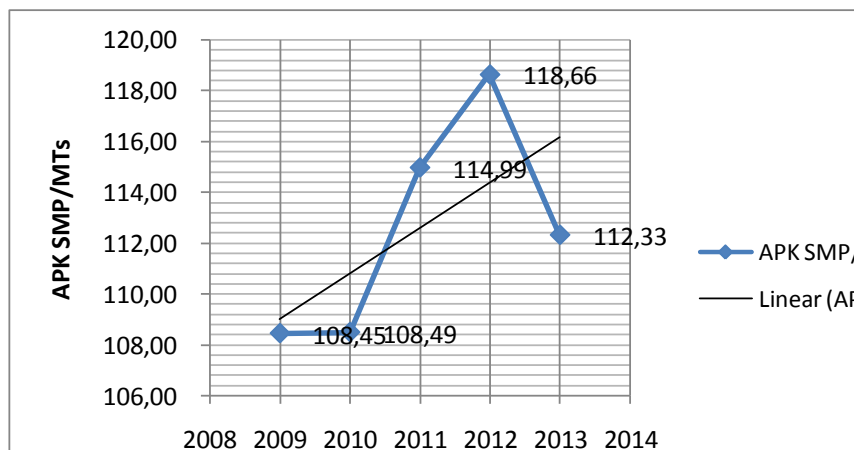


Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Jateng dan Kota Tegal

Gambar 2.23 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kota Tegal, Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Perkembangan APK SMP/MTs Kota Tegal dalam kurun waktu 2009-2013 menunjukkan tren meningkat. Akan tetapi terjadi penurunan capaian APK SMP/MTs pada tahun 2012/2013. Capaian APK SMP/MTs tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 118,66%, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun

2009 sebesar 108,45%. Perkembangan APK SMP/MTs Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.24.

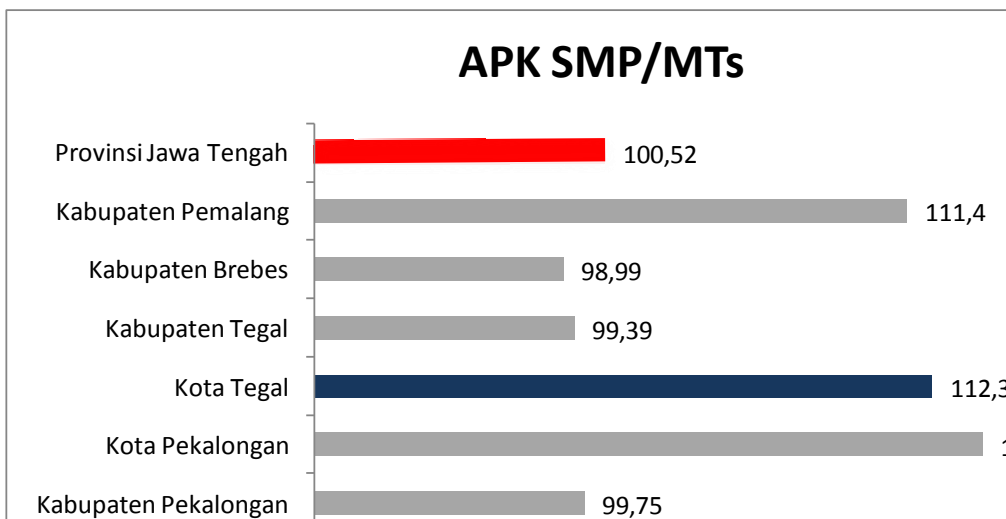


Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

Gambar 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Tegal Tahun 2009-2013

Angka partisipasi kasar SMP/MTs Kota Tegal pada tahun 2013 adalah sebesar 112,33%. Capaian tersebut cukup baik karena berada lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 100,52%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, APK SMP/MTs Kota Tegal lebih tinggi daripada Kabupaten Tegal 99,39%, Kabupaten Brebes 98,99%, Kabupaten Pemalang 111,40%, Kabupaten Pekalongan 99,75%, namun lebih rendah dari capaian APK Kota Pekalongan sebesar 114,13%.

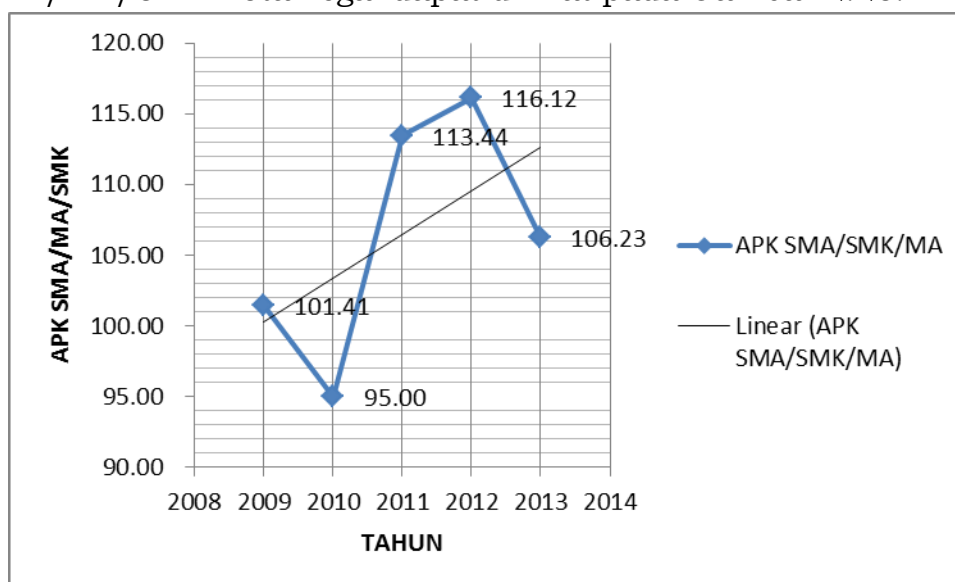
Perbandingan angka partisipasi kasar SMP/MTS Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Jateng dan Kota Tegal

Gambar 2.25 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Kota Tegal dalam kurun waktu antara 2009-2013 menunjukkan tren positif. Capaian APK SMA/MA/SMK cenderung fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 116,12% sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 95%. Perkembangan APK SMA/MA/SMK Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.26.

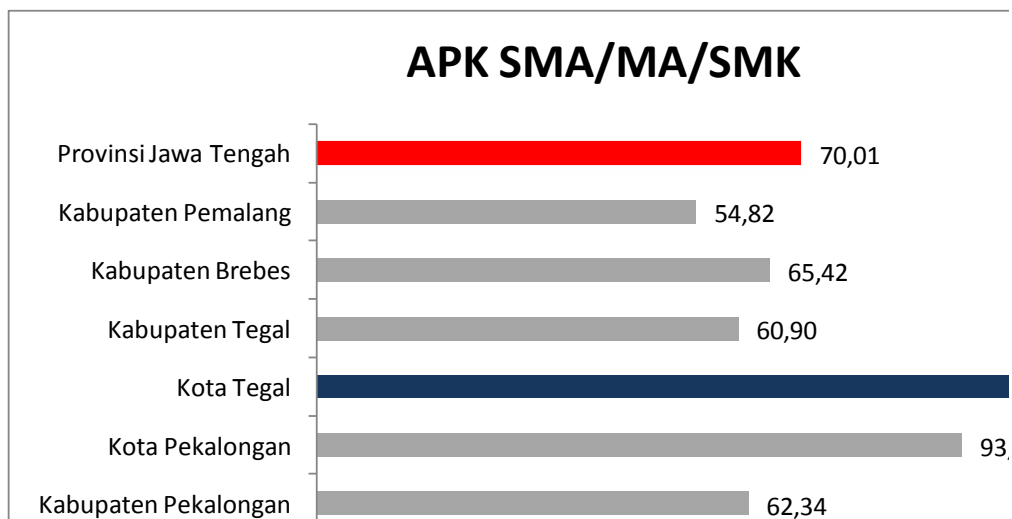


Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (%) Kota Tegal Tahun 2009 - 2013

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK Kota Tegal pada tahun 2013 adalah sebesar 106,23%. Capaian ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 70,01%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, APK SMA/MA/SMK Kota Tegal paling tinggi dari pada Kabupaten Tegal 60,90%, Kabupaten Brebes 65,42%, Kabupaten Pemalang 54,82%, Kabupaten Pekalongan 62,34% dan Kota Pekalongan 93,14%.

Perbandingan angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.27.

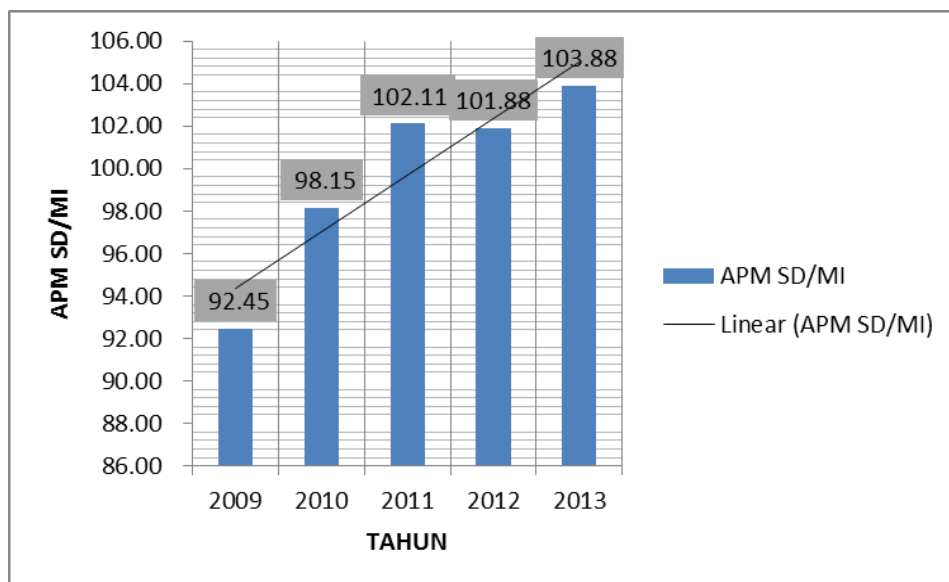


Sumber: Dinas Pendidikan Prov Jateng dan Kota Tegal

Gambar 2.27 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

3. Angka Partisipasi Murni

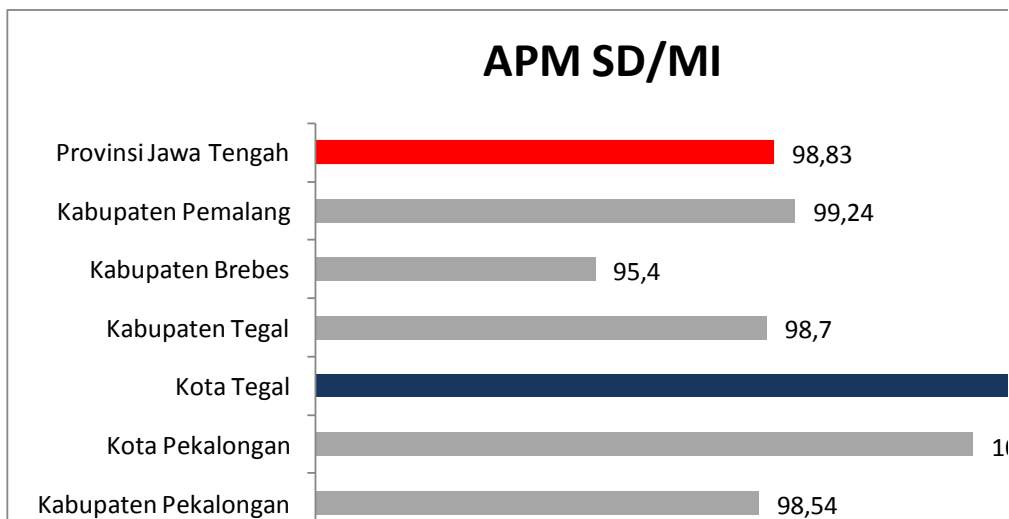
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kota Tegal dalam kurun waktu antara 2009-2011 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2009, capaian APM SD/MI adalah sebesar 99,71%, menurun menjadi 98,68% pada tahun 2010, dan 98,59% pada tahun 2011. Pada tahun 2012-2013, capaian APM SD/MI mengalami peningkatan dari 101,88% menjadi sebesar 103,88%. Perkembangan APM SD/MI dapat dilihat pada Gambar 2.28.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

Gambar 2.28 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Tegal Tahun 2009 - 2013

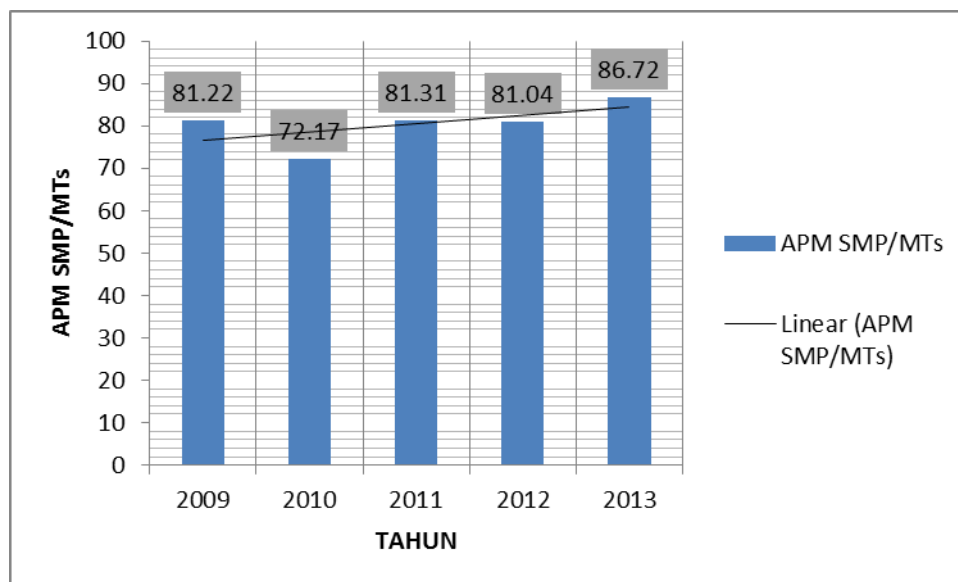
Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI Kota Tegal pada tahun 2013 adalah sebesar 103,88%. Capaian ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sekitar. Perbandingan angka partisipasi murni SD/MI Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.29.



Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Jateng dan Kota Tegal

Gambar 2.29 Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

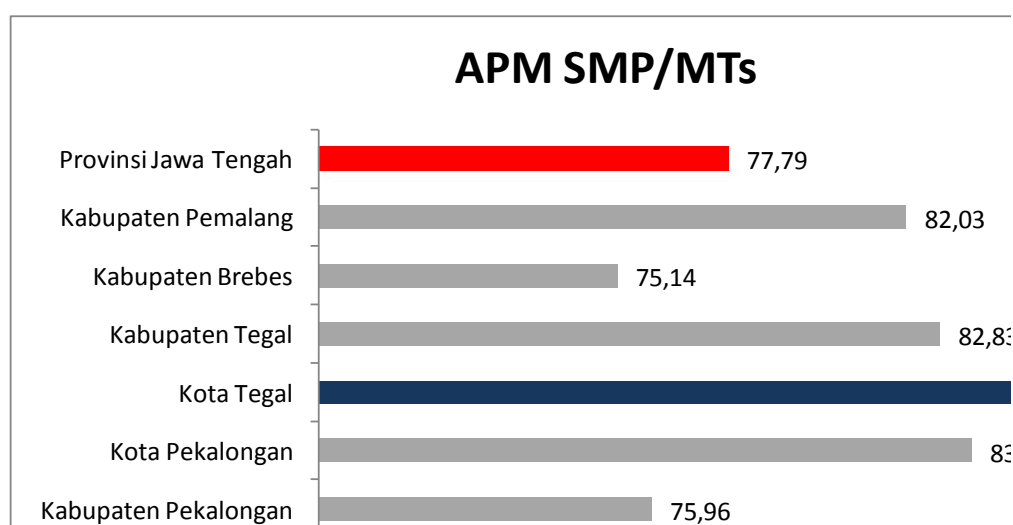
Perkembangan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kota Tegal selama kurun 2009-2013 cenderung naik dengan kondisi fluktuatif. Pada tahun 2009-2011 mengalami penurunan, capaian APM SMP/MTs adalah sebesar 81,68%, kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 73,29%. Akan tetapi, pada tahun 2012 dan 2013, capaian kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 81,04% menjadi 86,72%. Perkembangan APM SD/MI dapat dilihat pada Gambar 2.30.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

Gambar 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Tegal Tahun 2009-2013

Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kota Tegal pada tahun 2013 adalah sebesar 86,72%. Capaian ini cukup baik karena berada lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota sekitar. Perbandingan angka partisipasi murni SMP/MTs Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.31.

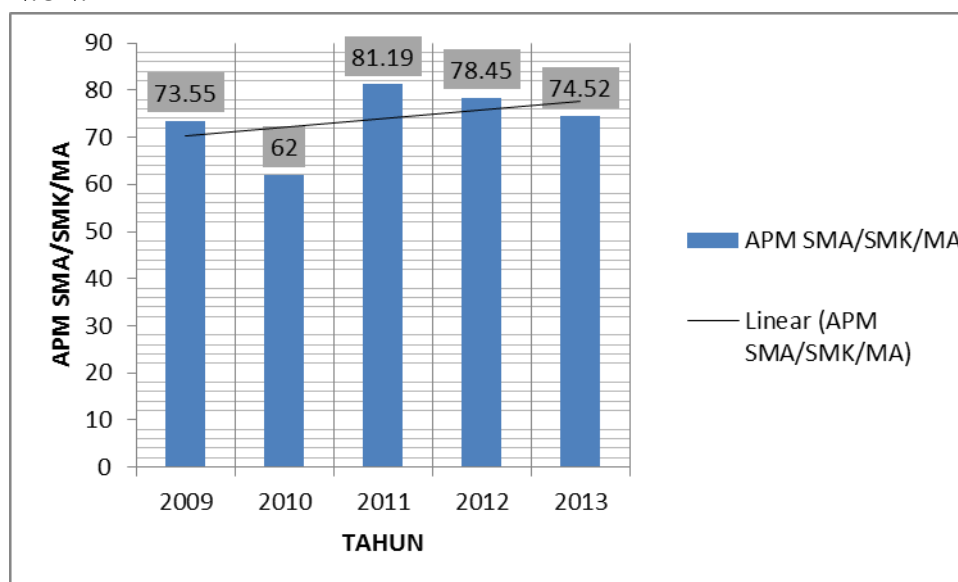


Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Jateng dan Kota Tegal

Gambar 2.31 Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Tegal dengan

Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

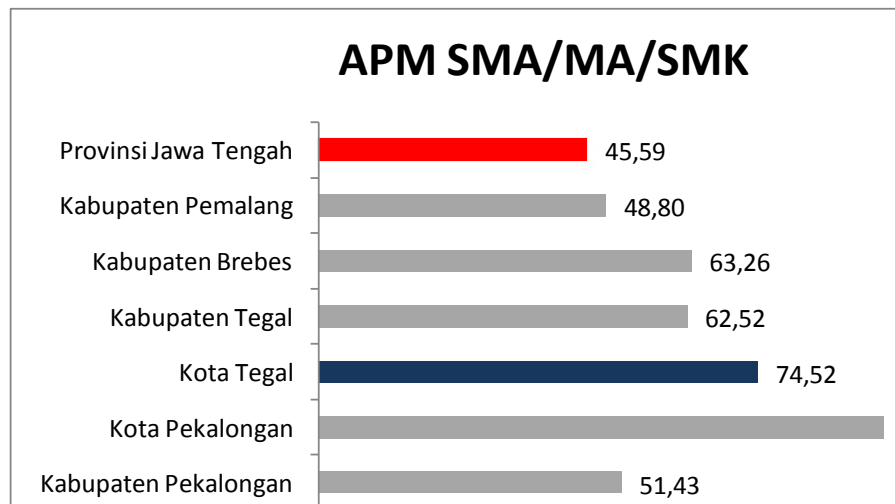
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Kota Tegal pada kurun waktu lima (5) tahun terakhir (2009-2013) cenderung fluktuatif walaupun jika dilihat secara keseluruhan meningkat. Terjadi penurunan capaian terjadi pada tahun 2011 ke 2013. Sedangkan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan capaian sebesar 81,19% dan tingkat capaian terendah terjadi pada tahun 2009 dengan capaian sebesar 72,57%. Perkembangan APM SMA/MA/SMK dapat dilihat pada Gambar 2.32.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

Gambar 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (%) Kota Tegal Tahun 2009 - 2013

Angka partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Kota Tegal pada tahun 2013 adalah sebesar 74,52%. Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 45,59% masih lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, SMA/MA/SMK Kota Tegal lebih tinggi daripada Kabupaten Tegal 62,52%, Kabupaten Brebes 63,26%, Kabupaten Pemalang 48,80%, Kabupaten Pekalongan 51,43%, namun lebih rendah dari capaian APM Kota Pekalongan sebesar 95,89%. Posisi relatif capaian angka partisipasi murni SMA/MA/SMK Kota Tegal, kabupaten/kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.33.

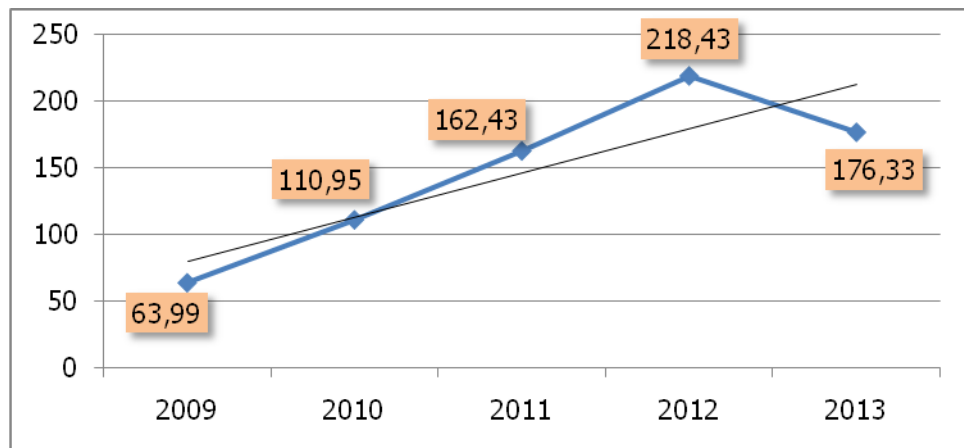


Sumber: Dinas Pendidikan Prov Jateng dan Kota Tegal , 2013

Gambar 2.33 Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Tegal dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Tegal dalam kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya AKI secara signifikan mulai tahun 2009 sebesar 76,26/ 100.000 KH, kemudian meningkat menjadi sebesar 218,43/100.000 KH pada tahun 2012. Dalam rentang 2009-2012, AKI di Kota Tegal setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, kondisi AKI mengalami perbaikan yaitu menurun menjadi sebesar 176,33/ 100.000 KH. Dengan tren tersebut di atas, menunjukkan kinerja penurunan AKI di Kota Tegal belum berjalan efektif dan ditengarai menjadi salah satu pendorong naiknya AKI Jawa Tengah. Perkembangan AKI Kota Tegal tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.34.

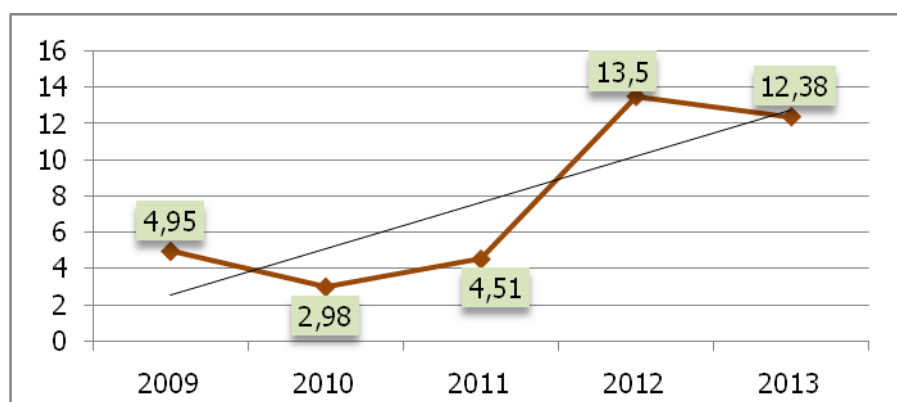


Sumber : Dinkes Kota Tegal, 2013

Gambar 2.34 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) (Jiwa) Kota Tegal Tahun 2009-2013

5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Tegal dalam kurun waktu antara tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2013 kondisinya menurun. Kenaikan AKB tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 13,5/1.000 KH. Sedangkan kondisi AKB terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,98/1.000 KH. Pada tahun 2013, terjadi penurunan capaian AKB menjadi sebesar 12,38/1.000 KH, namun belum dapat mendongkrak penurunan AKB pada 4 tahun sebelumnya. Untuk melihat perkembangan AKB Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.35.

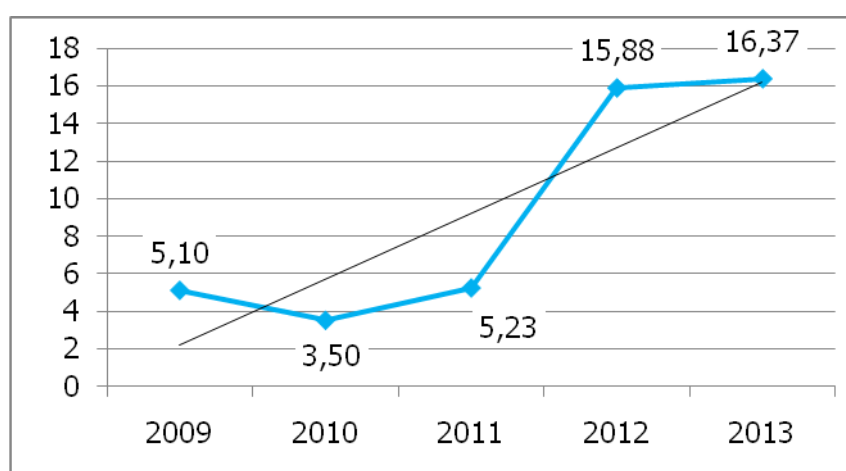


Sumber : Dinkes Kota Tegal, 2013

Gambar 2.35 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB/1000 KH) Kota Tegal Tahun 2009-2013

6. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita di Kota Tegal cenderung meningkat yang ditunjukkan kondisi pada tahun 2009 sebesar 5,10/1000 KH menjadi sebesar 16,37/1000 KH pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang mencapai 11,27/1000 KH. Selama kurun waktu tersebut, AKBa di Kota Tegal hanya pernah mengalami penurunan pada tahun 2010. Dengan melihat capaian tersebut, menunjukkan kinerja program maupun kegiatan dalam mendorong penurunan AKABA di Kota Tegal belum berjalan efektif. Selanjutnya perkembangan AKABA di Kota Tegal selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.36.



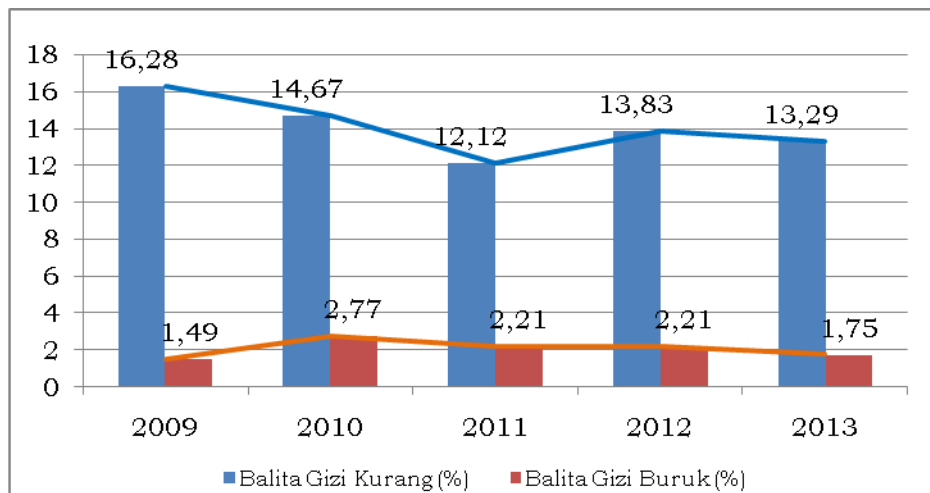
Sumber : Dinkes Kota Tegal, 2013

Gambar 2.36 Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Balita Kelahiran Hidup di Kota Tegal Tahun 2009-2013

7. Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Perkembangan balita dengan kondisi gizi kurang di Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2009-2015) cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 sebesar 16,28% menjadi 13,29% pada tahun 2013. Penurunan balita gizi kurang paling rendah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai pada angka 12,12%. Sementara itu kondisi balita gizi buruk di Kota Tegal jika dilihat dari capaian pada tahun 2009 sebesar 1,49% menjadi 1,75% pada tahun 2013 kondisinya meningkat. Peningkatan justeru terjadi diantara kurun waktu tersebut yaitu pada tahun 2010-2012 dengan angka capaian di atas 2%. Dengan kondisi tersebut, maka yang paling menjadi fokus perhatian besar adalah pada kondisi balita gizi buruk karena kinerja tahunannya termasuk rendah.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan balita gizi kurang dan balita gizi buruk dapat dilihat pada Gambar 2.37.

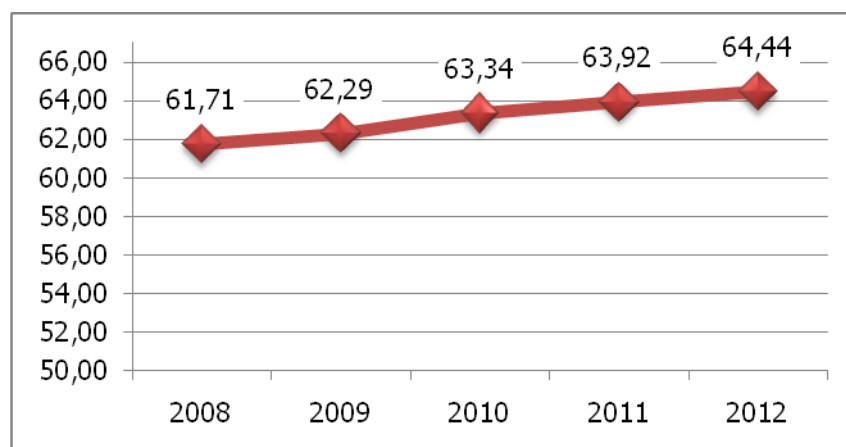


Sumber : Dinkes Kota Tegal, 2013

Gambar 2.37 Perkembangan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (%) di Kota Tegal Tahun 2009-2013

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM namun dengan memperhitungkan kesenjangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan Nilai IPM. IPG kota Tegal menunjukkan peningkatan dari sebesar 61,71 pada tahun 2008 menjadi sebesar 64,44 pada tahun 2012, seperti terlihat pada Gambar 2.38.



Sumber: Kementerian PP dan PA

Gambar 2.38 Perkembangan IPG Kota Tegal Tahun 2008-2012

Indikator komposit IPG meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan. Capaian angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Sementara itu angka harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Perkembangan indikator komposit IPG dapat dilihat pada Tabel 2.12

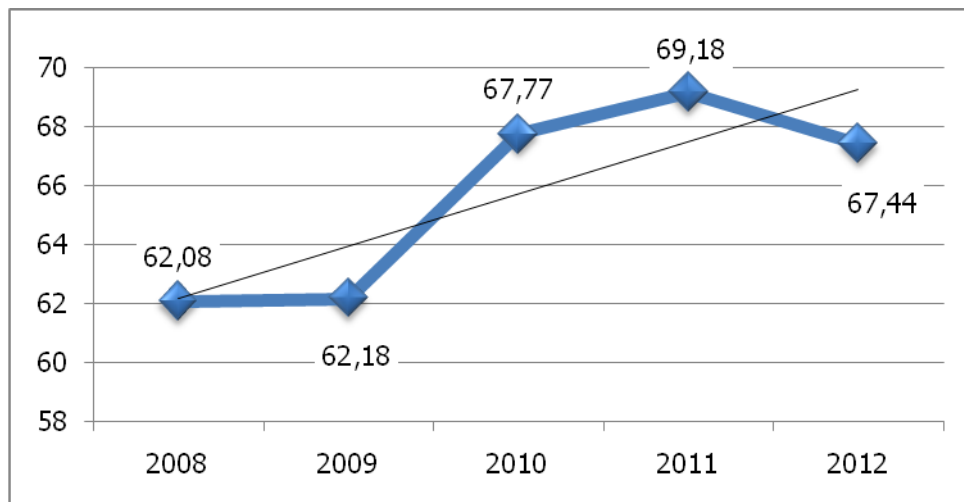
Tabel 2.12
Perkembangan Capaian Indikator Komposit IPG

No	Indikator	2009		2010		2011		2012	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,63	70,60	66,82	70,78	66,82	70,78	67,00	70,98
2	Angka Melek Huruf (%)	98,48	91,91	98,63	91,97	98,64	91,98	98,65	92,31
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,69	7,59	8,74	7,62	8,75	7,63	8,77	7,80
4	Sumbangan Pendapatan (%)	69,04	30,96	72,99	27,01	71,83	28,17	71,94	28,06

Sumber: Kementerian PP dan PA

9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perkembangan IDG Kota Tegal menunjukkan peningkatan dari sebesar 62,08 pada tahun 2008 menjadi sebesar 67,44, seperti terlihat pada Gambar 2.39



Sumber: Kementerian PP dan PA

Gambar 2.39 Perkembangan IDG Kota Tegal Tahun 2008-2012

Indikator komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meliputi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Keterwakilan perempuan di parlemen di Kota Tegal menunjukkan peningkatan, namun masih rendah (<30%).

Sementara itu perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi, dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja kecenderungannya menurun. Perkembangan indikator komposit IDG dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	16,67	16,67	23,33	23,33	23,33
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	46,74	45,98	40,11	45,89	36,49
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	35,82	30,96	27,01	28,17	28,06

Sumber: Kementerian PP dan PA

10. Kebudayaan

Kelompok seni di Kota Tegal jumlahnya cukup banyak, adapun kelompok yang telah bersertifikat jumlahnya sebanyak 34

kelompok pada tahun 2013. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sudah didukung dengan keberadaan gedung kesenian yang ada. Jumlah gedung kesenian di Kota Tegal sebanyak 6 unit.

Tabel 2.14
Jumlah Kelompok Seni Bersertifikat dan Gedung Kesenian di Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah kelompok kesenian	NA	NA	29	32	34
2.	Jumlah gedung kesenian	3	3	4	4	6

Sumber: Dinporabudpar Kota Tegal, Tahun 2013

11. Pemuda dan Olahraga

Prestasi keolahragaan di Kota Tegal sudah cukup bagus di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu upaya pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga perlu ditingkatkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui cabang-cabang olahraga yang ada. Sampai tahun 2013 cabang olahraga yang ada di Kota Tegal sebanyak 26. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga yang ada sebanyak 2 unit.

Tabel 2.15
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga di Kota Tegal Tahun 2009-2014

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah cabang olahraga	NA	NA	24	26	26
2.	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinporabudpar Kota Tegal, Tahun 2014

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Kinerja pembangunan pada urusan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, angka kelulusan, rata-rata nilai ujian nasional, Kondisi bangunan sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan kelayakan guru mengajar.

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal selama kurun waktu 2009 – 2013 menunjukkan kecenderungan menurun terutama sejak tahun 2012. Menurunnya APK PAUD sejak tahun 2012 karena mulai tahun 2012 APK PAUD tidak termasuk Taman Kanak-kanak (TK). APK PAUD pada tahun 2012 hanya untuk Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

Gambaran perkembangan APK PAUD dikemukakan pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	APK PAUD (%)
1	2009	52,00
2	2010	61,98
3	2011	62,05
4	2012	28,39
5	2013	30,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

b. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI selama kurun waktu 2009 – 2013 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 APS SD/MI sebesar 0,38%. meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2011 APS SD/MI sebesar 2,55%, namun turun cukup drastis pada tahun 2012.

APS SMP/MTs pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. APS SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 0,53% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 0,48%. APS tersebut apabila dibandingkan

dengan Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinggi. APS SMP/MTs Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 0,43%.

Angka putus sekolah SMA/SMK menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2009, APS SMA/SMK sebesar 0,83%, pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 0,41%, pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 2,60% dan pada tahun 2013 turun menjadi 1,36%. Kondisi ini menunjukkan bahwa APS SMA/SMK termasuk kategori tinggi, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kota Tegal. APS SMA/SMK Kota Tegal pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan APS SMA/SMK rata-rata Jawa Tengah yaitu sebesar 0,17%.

Perkembangan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Angka Putus Sekolah Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Jenjang	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	0,32	0,24	2,55	0,20	0,38
2	SMP/MTs	0,59	1,34	0,81	0,48	0,53
3	SMA/MA/SMK	0,83	0,41	2,60	1,00	1,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

c. Angka Melanjutkan (AM)

Perkembangan angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA fluktuatif namun masih menunjukkan kategori tinggi karena sudah melampaui 100%. Hal ini berarti Kota Tegal sebagai “magnet” pendidikan bagi warga di sekitar Kota Tegal terbukti. Banyak warga di sekitar Kota Tegal (Kabupaten Tegal, Pemalang dan Brebes) melanjutkan sekolah ke Kota Tegal. Perkembangan angka melanjutkan terlihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Angka Melanjutkan Kota Tegal Tahun 2009 – 2013 (%)

No	Jenjang	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Dari SD/MI ke SMP/MTs	117,45	100	128,51	104,23	108,20
2.	Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	122,11	113,94	133,43	138,82	113,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

d. Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) SD/MI selama kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan capaian tinggi. Pada tahun 2011 – 2013 AL SD/MI mencapai 100%. AL Kota Tegal Tahun 2012/2013 menduduki peringkat ke 35 dari 38 rayon Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Sedangkan AL SMP/MTs selama kurun waktu 2009 – 2013 fluktuatif. AL tahun 2013 sebesar 99,5% meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 94,2%. AL Kota Tegal Tahun 2012/2013 menduduki peringkat ke 3 dari 36 rayon Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Sedangkan angka kelulusan SMA/SMK/MA sebesar pada tahun 2013 sebesar 99,87% sedikit meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 99,66%. AL SMA/MA/SMK Kota Tegal Tahun 2012/2013 menduduki peringkat ke 3 dari 36 rayon Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK terlihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Angka Kelulusan Kota Tegal Tahun 2009 – 2013 (%)

No	Jenjang	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI	98,60	99,83	100	100	100
2.	SMP/MTs	95,00	92,25	99,21	94,2	99,5
3.	SMA/SMK/MA	97,31	96,52	99,94	99,66	99,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

e. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional

Rata-rata nilai Ujian Nasional tingkat SD/MI menunjukkan kecenderungan meningkat, namun masih pada kategori cukup. Perkembangan nilai rata-rata UN SMP/MTs fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 6,88 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 (7,44). Perkembangan nilai rata-rata UN SMA/SMK/MA menunjukkan kecenderungan meningkat walaupun tidak terlalu drastis seperti terlihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Rata-rata Nilai Ujian Nasional Kota Tegal Tahun 2009 – 2013
(%)

No	Jenjang	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI	6,19	6,19	6,69	7,44	6,88
2.	SMP/MTs	6,61	6,61	7,18	6,76	7,88
3.	SMA/SMK/MA	7,02	7,00	7,07	7,64	7,09

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

f. Kondisi Ruang Kelas

Kondisi ruang kelas di Kota Tegal menunjukkan kondisi yang relatif baik. Untuk jenjang pendidikan SD/MI ruang kelas kondisi baik tahun 2013 sebesar 80,32% pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 (85,61%) dan tahun 2011 (87,94%). Untuk jenjang SMP/MTs ruang kelas dengan kondisi bangunan baik sebanyak 80,97% pada tahun 2013. Kondisi tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,33%. Dibandingkan tahun 2009 kondisi ruang kelas SMP/MTs setiap tahunnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2013.

Tabel 2.21
Ruang Kelas dalam Kondisi Baik di Kota Tegal
Tahun 2009 – 2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI	75,09%	79,14%	87,94%	85,61%	80,32%
2.	SMP/MTs	92,74%	92,09%	87,81%	84,33%	80,97%
3.	SMA/SMKA /MA	96,48%	97,92%	96,83%	92,90%	86,22%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal 2013

g. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada semua jenjang pendidikan cukup baik untuk jenjang pendidikan SD/MI, sedangkan untuk PAUD masih relatif belum memadai. Rasio ini digunakan untuk menghitung ketersediaan sekolah apakah mencukupi untuk melayani pendidikan penduduk usia sekolah. Jumlah Taman kanak-kanak (TK) di Kota Tegal tahun 2013 sebanyak 78 sekolah. Sedangkan jumlah SD/MI tahun 2013 sebesar 143 sekolah. Jumlah SMP/MTs sebanyak 35 sekolah. Sedangkan Jumlah SMA/SMK/MA sebesar 32 sekolah.

Jumlah penduduk usia 4 -6 tahun pada tahun 2013 sebesar 12.637 jiwa, penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 25.906 jiwa, penduduk usia 13 – 15 tahun sebesar 13.332 orang dan penduduk usia 16 – 18 tahun 13.394 orang.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan TK sebesar 1: 162,01. Hal ini berarti untuk jenjang pendidikan TK masih harus ditambah TK baru. Rasio ideal adalah 1:40. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 1: 181,16. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan SD/MI sudah ideal. jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 1:380,91, kondisi ini menunjukkan tingkat ketersediaan SMP/MTs sudah cukup baik. Sedangkan rasio untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 1:418,56, termasuk kategori relatif kurang.

h. Kelayakan Guru Mengajar

Kualifikasi guru layak mengajar adalah guru yang telah lulus S1 atau D4 dan telah memperoleh sertifikasi profesional sebagai guru. Guru yang telah lulus S1 atau D4 pada jenjang pendidikan TK/RA pada tahun 2013 sebesar 57,12% dan jenjang pendidikan SD/MI sebesar 66,66%. Walaupun selama kurun waktu 2009 – 2013 guru TK/RA dan SD/MI yang memiliki kualifikasi S1 atau D4 menunjukkan kecenderungan meningkat, namun masih dalam kategori sedang. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA guru yang memiliki kualifikasi S1 atau D4 pada tahun 2013 sudah mencapai 89,85% dan 95,62% yang berarti sudah dalam kondisi baik.

Gambaran guru yang memiliki kualifikasi S1 dan D4 terlihat pada Tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22
Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Tegal
Tahun 2009 – 2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	TK	47,2%	52,03	52,15	56,71	57,12
2	SD/MI	23,41	76,97	61,68	65,83	66,66
3	SMP/MTs	81,00	83,87	91,21	92,88	89,85
4	SMA/MA/SMK	23,79	85	92,89	97,29	95,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

Guru bersertifikasi di Kota Tegal dari tahun 2009 – 2013 cenderung meningkat. Pada tahun 2012 guru bersertifikasi di Kota Tegal sebesar 85,06% meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 80,11% dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 74,09%. Besarnya guru sertifikasi tersebut tidak bisa diupayakan oleh Kota Tegal karena sertifikasi guru adalah kuota dari Pusat. Perbandingan guru bersertifikasi Kota Tegal dengan Kota-kota lain di Jawa Tengah terlihat pada Tabel 2.23 berikut:

Tabel 2.23
Persentase Guru Bersertifikasi di Kota Tegal
Tahun 2009 – 2012

No	Kota	2010	2011	2012
1	Kota Magelang	77,19	96,25	98,06
2	Kota Surakarta	66,86	72,61	77,07
3	Kota Salatiga	80,95	83,52	86,06
4	Kota Semarang	66,41	70,42	76,07
5	Kota Pekalongan	79,82	85,14	90,36
6	Kota Tegal	74,09	80,14	85,06

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

i. Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan

Data capaian SPM Kota Tegal pada tahun 2013 sudah mencapai 100% kecuali untuk indikator Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang, yaitu mencapai 41,83%. Alasan belum tercapainya capaian indikator tersebut adalah berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal dengan Kepala Kementerian Agama tentang Pedoman Kegiatan Peserta Didik Baru dan Kegiatan Sekolah tahun pelajaran 2012/2013 Nomor 422.1/027 tanggal 13 Juni 2012 menyatakan bahwa jumlah peserta didik SD/MI dalam setiap rombongan belajar maksimum 34 siswa termasuk tinggal kelas dan SMP/MTs dalam setiap rombel maksimum 32 termasuk tinggal kelas. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas. Capaian indikator SPM bidang pendidikan di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar di Kota Tegal
Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota						
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen.	-	-	-	100	100
2	Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas.	-	-	-	41,83	41,83
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	-	-	-	100	100
4	Di setiap SD dan MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	-	-	-	100	100
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	-	-	-	100	100
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru	-	-	-	100	100

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap kelompok mata pelajaran.					
7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	60,83	70
8	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	-	-	-	88,33	90
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	-	-	-	88,33	90
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	100	100
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	100	100
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	100	100
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan	-	-	-	100	100

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.					
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	-	-	-	100	100
Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan						
1	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	-	-	-	90	95
2	Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	-	-	-	90	95
3	Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster IPA.	-	-	-	60	65
4	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan Setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	-	-	-	81,39	100
5	Setiap guru tetap bekerja 37.5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk 24 jam tatap muka di dalam kelas, merencanakan pembelajaran,	-	-	-	100	100

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.					
6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran di satuan pendidikan selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :	-	-	-	100	100
	Kelas I : 18 jam per minggu	-	-	-		100
	Kelas II : 18 jam per minggu	-	-	-		100
	Kelas III : 24 jam per minggu	-	-	-		100
	Kelas IV - VI : 27 jam per minggu	-	-	-		100
	Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	-	-	-		100
7	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.	-	-	-	100	100
8	Setiap guru menyusun silabus untuk setiap mata pelajaran atau kelas yang diampunya.	-	-	-	100	100
9	Setiap guru mengembangkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	-	-	-	100	100
10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	-	-	-	100	100
11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar.	-	-	-	100	100

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
12	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan hasil test tengah tahunan dan hasil ujian akhir kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kandepag pada setiap akhir semester.	-	-	-	100	100
13	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2013

2. Kesehatan

Menurut Undang-undang No 39 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa tujuan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang tinggi dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah menurut undang-undang Kesehatan adalah menyediakan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial, sumber daya bidang kesehatan yang adil dan merata, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Pelaksanaan pembangunan Kesehatan di Kota Tegal dapat dilihat dari pencapaian indikator setiap program pembangunan kesehatan. Indikator pembangunan kesehatan meliputi indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (Permenkes 741/2008), indikator dalam Buku I Lampiran Permendagri 54 tahun 2010 dan indikator kinerja kesehatan lainnya.

Indikator makro pembangunan kesehatan adalah angka usia harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi (angka kelangsungan hidup bayi), dan gizi buruk. Angka usia harapan hidup di Kota Tegal dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 angka usia harapan hidup sebesar 68,56 tahun meningkat pada tahun 2012 menjadi 69,12 tahun. Rata-rata peningkatan Angka usia harapan hidup setiap tahun adalah sebesar 0,27%.

Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2009–2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 AKB sebesar 4,95 per 1.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2013 menjadi 12,38 per 1.000 kelahiran hidup. Secara nasional AKB di Kota Tegal telah mencapai target MDGs nasional pada tahun 2015 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup dan dibawah target MDGs dalam Pergub No. 20 Tahun 2011 tentang Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 8,5 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2009–2010 mengalami peningkatan. Peningkatan AKABa seiring dengan peningkatan AKB, hal ini dikarenakan perhitungan AKABa dimulai pada bayi usia 0 – 5 tahun. Angka kematian balita di Kota Tegal cenderung meningkat yang ditunjukkan kondisi pada tahun 2009 sebesar 5,10/1000 KH menjadi sebesar 16,37/1000 KH pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang mencapai 11,27/1000 KH. Selama kurun waktu tersebut, AKBa di Kota Tegal hanya pernah mengalami penurunan pada tahun 2010. Dengan melihat capaian tersebut, menunjukkan kinerja program maupun kegiatan dalam mendorong penurunan AKABA di Kota Tegal belum berjalan efektif. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, setiap tahun kondisi ini seharusnya mengalami penurunan.

Kasus Kematian Ibu tahun 2009 – 2010 fluktuatif. Pada tahun 2009 kasus kematian ibu sebanyak 4 kasus (AKI sebanyak 76,26 per 100.000 kelahiran hidup) meningkat pada tahun 2013 menjadi 7 kasus (176 per 100.000 kelahiran hidup). Kasus Kematian ibu tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 11 kasus. Namun pada tahun 2013, AKI di Kota Tegal mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 8 kasus (176,33 per 100.00 kelahiran hidup). Dibandingkan dengan target MDGs, AKI Kota Tegal masih diatas target, target MDGS untuk AKI pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, setiap tahun kondisi ini seharusnya mengalami penurunan.

Tabel 2.25
Jumlah Kasus Kematian Ibu Hamil Tahun 2013

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kematian (kasus)
1	Kecamatan Tegal Barat	3
2	Kecamatan Tegal Selatan	3
3	Kecamatan Tegal Timur	1
4	Kecamatan Margadana	1
	Jumlah	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Kematian ibu pada tahun 2013, sebagian besar yaitu masing-masing 3 kasus berasal dari wilayah Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Selatan sedangkan masing-masing sebanyak 1 kasus berasal dari Kecamatan Tegal Timur dan Margadana.

Dilihat dari penyebab kematian, sebanyak 3 kasus karena Pre Eklamsi, 2 kasus karena pendarahan dan masing-masing 1 kasus disebabkan karena sepsis, decomp cordis dan penyebab lainnya. Masih adanya kasus kematian ibu di Kota Tegal dipicu karena faktor-faktor belum optimalnya upaya deteksi dini pada pemeriksaan kehamilan sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Faktor lain adalah masih banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat dilihat dari angka *unmeet need* yang relatif masih tinggi di Kota Tegal.

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2009–2013 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 presentase balita gizi buruk sebesar 1,49% meningkat pada tahun 2013 menjadi 1,75%. Selama lima tahun rata-rata kenaikan per tahun sebesar 1,18%, kondisi ini perlu mendapat perhatian, setiap tahun kondisi ini seharusnya mengalami penurunan. Perkembangan indikator makro pembangunan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Indikator Makro Pembangunan Kesehatan Kota Tegal
Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka usia harapan hidup (tahun)	68,56	68,74	68,93	69,12	
2	Angka kelangsungan hidup bayi	0,99	0,997	0,995	0,986	0,987

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,95	2,98	4,51	13,5	12,38
4	Angka Kematian Balita (AKABa) per 1000 kelahiran Hidup	5,10	3,25	5,23	15,88	16,37
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup	76,26	119,74	164,43	218,43	177
6	Jumlah Kasus kematian ibu	4	7	9	11	7
7	Persentase balita gizi buruk (%)	1,49	2,77	2,21	2,1	1,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Upaya kesehatan di Kota Tegal diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam bentuk dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan pada anak balita dapat dilihat dari indikator cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat serta cakupan pelayanan anak balita. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD di Kota Tegal dari tahun 2009– 2013 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD sebesar 98,9% menurun pada tahun 2013 menjadi 96,3%. Kondisi ini masih dibawah target SPM 100% pada tahun 2010. Sedangkan cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2009 – 2013 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 cakupan pelayanan anak balita sebesar 70,2% meningkat pada tahun 2013 menjadi 85,8%. Kondisi ini masih dibawah target SPM 90% pada tahun 2010.

Pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di Kota Tegal dilaksanakan pada pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Dari tahun 2009 – 2013 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin fluktuatif. Pada tahun 2009 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 12,16% menurun menjadi 11,86% pada tahun 2013. Sedangkan paada pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin seluruhnya sudah mencapai 100%. Kondisi ini dikarenakan perhitungan pada

cakupan pelayanan kesehatan dasar bukan berdasarkan jumlah penduduk miskin namun berdasarkan jumlah kedatangan penduduk miskin.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dilihat dari indikator Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila. Pada tahun 2009 – 2010 Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila sebesar 57,9% meningkat pada tahun 2013 menjadi 94,49%. Rata-rata peningkatan pertahun sebesar 9,92%.

Pelayanan kesehatan dasar pada ibu dan anak dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana pada Tabel 2.27. Pada indikator-indikator pelayanan kesehatan dasar pada ibu dan anak yang memiliki kecenderungan menuurun pada tahun 2009–2013 adalah cakupan kunjungan ibu hamil K4 dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0,72%. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 memiliki arti penting dalam rangka menekan kasus kematian pada ibu hamil dan kematian bayi. Indikator pelayanan kesehatan dasar pada ibu dan anak rata-rata memiliki capaian di atas target SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan di Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	98,9	98,1	95,8	95,7	96,3
2.	Cakupan pelayanan anak balita	70,2	65,9	80,22	64,64	85,8
3.	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	57,9	92,81	88,48	93,53	94,49
4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88,04	92,66	92,34	99,98	100
5.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	12,16	14,71	10,04	12,03	11,86

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	miskin					
6.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (prosen)	100	100	100	100	100
7.	Cakupan kunjungan bayi	73,06	90,46	94,36	87,55	92,15
8.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	98,7	96,8	95,4	96,52	95,9
9.	Cakupan pelayanan nifas	90,48	67,2	84,1	97,28	97,8
10.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	NA	2,85	52,11	97,7	126,3
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
12.	Cakupan peserta KB aktif	71,46	72,6	73,18	73,36	73,38
13.	Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	4,5	2,88	5,36	4,13	5,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular memiliki jumlah indikator relatif lebih banyak. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular terdiri dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dalam rangka melakukan pencegahan penyakit indikator yang digunakan adalah cakupan kelurahan dengan UCI (Universal Child Immunization). Pada tahun 2009 – 2013 pencapaian target cakupan kelurahan dengan UCI fluktuatif. Pada tahun 2013 cakupan kelurahan dengan UCI masih dibawah target SPM.

Jenis penyakit yang dicegah dan dikendalikan dalam indikator ini sesuai SPM dan MDGs adalah TB BTA, HIV AIDS, Malaria, DBD, Diare, Pneumonia Balita, Filariasis dan AFP (Acute Flaccid Paralysis). Angka Kejadian TB mengalami kecenderungan meningkat begitu juga dengan tingkat kematian. Prevalensi DBD di Kota Tegal juga mengalami peningkatan. Kota Tegal bukan merupakan endemik

malaria sehingga kasus malaria tidak ditemukan. Perkembangan kinerja pencegahan dan penanggulangan penyakit dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96,3	100	100	100	96,3
2	Angka kejadian TB (per 100.000 penduduk)	127	698	534	508	587
3	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3	1	1	2	2
4	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	67,5	58,7	54,2	52,03	67,5
5	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	71	70	74	76	76
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
7	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	0,0051	0,013	0,019	0,034	0,038
8	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	NA	NA	NA	82,53	37,78
9	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut	34,04	71,1	78,3	83,6	88

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	yang memiliki akses pd obat antiretroviral					
10	Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0
11	Angka kesakitan malaria	0	0	0	0	0
12	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	8,96	13,42	1,26	0,57	2,88
13	Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam	0	0	0	0	0
14	Jumlah Kasus diare	14138	14206	14614	9874	7631
15	Jumlah kasus gangguan pernapasan (pneumonia) Balita	8,46	8,46	5,8	3,6	2,68
16	Jumlah kasus Filariasis (kaki Gajah)	0	0	0	2	0
17	Acute Flaccid Paralysis (AFP)	0	0	3	5	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Prevalensi gizi buruk yang relatif masih tinggi menjadi permasalahan tersendiri di Kota Tegal. Selain gizi buruk, gizi kurang juga mengalami kecenderungan meningkat pada tahun 2009 – 2013. Penanganan gizi buruk dan kurang telah dilakukan dengan baik di Kota Tegal. Hal ini dapat dilihat dari indikator Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan indikator pemberian mikro nutrient pada balita dan ibu hamil. Pada indikator tersebut telah mencapai nilai 100% artinya seluruh penderita gizi buruk telah mendapat perawatan. Selain itu seluruh indikator pemberian mikro nutrient (Vitamin A, Fe) cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan kondisi gizi masyarakat Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Kinerja Gizi Masyarakat Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Prevalensi balita dengan berat badan rendah /	4,08	4,09	2,25	2,01	2,79

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	kekurangan gizi (persen)					
2	Prevalensi balita gizi kurang (persen)	16,28	14,67	121,1 2	13,83	13,29
3	Prevalensi balita gizi buruk (persen)	0,43	0,41	0,40	0,35	0,24
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan(persen)	100	100	100	100	100
5	Persentase Bayi ditimbang berat badannya (D/S) (persen)	71,58	71,9	69,14	68,44	74,51
6	Tingkat Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah (persen)	NA	65,27	78,03	36,07	60,26
7	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (persen)	51,06	67,31	37,78	38,89	49,55
8	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (persen)	100	100	100	100	100
9	Persentase Bayi mendapat kapsul vitamin A (persen)	97,63	97,8	96,98	97,37	98,84
10	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (persen)	97,47	97,75	97,4	97,02	98,79
11	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi (persen)	97	97	95	92,71	95,25
12	Persentase ibu hamil mengalami KEP (persen)	NA	NA	NA	0,8	5,4
13	Persentase Ibu hamil yang anemia dan kekurangan yodium (persen)	NA	NA	NA	8,3	4,1

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
14	Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP) (persen)	17,77	17,44	14,33	16,04	15,04
15	Persentase kecamatan bebas rawan gizi (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Upaya pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif dilakukan melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), cakupan kelurahan siaga aktif dan rasio posyandu per satuan balita. Pada tahun 2009 – 2013 seluruh indikator cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan kinerja perilaku hidup bersih dan sehat di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kota Tegal
Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (persen)	84,3	87,8	87,1	87,7	89,4
2	Cakupan kelurahan Siaga Aktif (persen)	100	100	100	100	100
3	Rasio posyandu per satuan balita	11,62	12,78	12,08	12,36	12,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Lingkungan yang sehat dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator pengembangan lingkungan sehat adalah cakupan rumah sehat, angka jentik aedes, cakupan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan, Cakupan penggunaan Sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat dan Persentase lingkungan bebas rokok di lingkungan sekolah, tempat kerja dan tempat umum. Pencapaian indikator tersebut dari tahun 2009 – 2013 cenderung mengalami peningkatan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Lingkungan Sehat Kota Tegal
Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Cakupan Rumah Sehat (persen)	87,92	87,87	86,32	88,67	89,17
2.	Angka jentik aedes (persen)	86,95	86,95	86,62	87,24	93,06
3.	Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan (persen)	39,8	71,53	83,89	78,01	80,79
4.	Cakupan penggunaan Sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat. (persen)	68,09	68,09	71,39	74,89	76,34
5.	Persentase lingkungan bebas rokok di lingkungan sekolah, tempat kerja dan tempat umum (persen)	40	45	60	60	60

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi persayaratan dalam perwujudan derajat kesehatan masyarakat. Cakupan Puskesmas dari tahun 2009 – 2013 telah mencapai 100. Artinya setiap kecamatan telah tersedia puskesmas. Kota Tegal juga memiliki rumah sakit yang cukup memadai. Setiap 10.000 penduduk memiliki rasio 0,12. Seluruh rumah sakit telah memiliki pelayanan minimal 4 spesialis dasar. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Kota Tegal
Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100	0

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.	Cakupan pembantu puskesmas	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	0
3.	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	100	100	100	100	100	0
4.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,23	0,33	0,3	0,3	0,32	6,97
5.	Tingkat pemanfaatan Puskesmas	60,61	61,01	111,4	113,8	175,1	34,82
6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0
7.	Persentase RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar (Kandungan dan Kebidanan, Bedah, penyakit dalam dan anak)	100	100	100	100	100	0
8.	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit	108,7	111,5	119,1	121,6	142,8	7,22
9.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Rasio dokter di Kota Tegal pada tahun 2009 – 2010 mengalami peningkatan. Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2009 sebesar 0,2 meningkat pada tahun 2013 mencapai 0,5. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk juga cenderung mengalami peningkatan. Kinerja program standardisasi pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,2	0,25	0,35	0,45	0,5	24,92
2.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,5	0,52	0,82	0,9	1,01	20,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2013

Pelayanan rujukan di Kota Tegal dilaksanakan oleh 4 rumah sakit yaitu 1 rumah sakit pemerintah dan 3 rumah sakit swasta. Total tempat tidur di 4 rumah sakit sebanyak 666 unit. Pada Pelayanan rumah sakit daerah (RSU Kardinah) beberapa indikator pelayanan menunjukkan kondisi yang baik, hal ini dapat dilihat dari BOR (*Bed Occupancy Rate*), AVLOS (*Average Length of Stay* = Rata-rata lamanya pasien dirawat), TOI (*Turn Over Interval*), BTO (*Bed Turn Over* = Angka perputaran tempat tidur), NDR (*Net Death Rate*) dan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD. Berikut ini gambaran pelayanan kesehatan pada unit RSUD Kardinah. Perkembangan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan di RSUD Kardinah
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	BOR (Bed Occupancy Ratio) (%)	60,4	73,5	71,1	71,2	76,4
2	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) (hari)	4,3	4	4	4	4,1
3	TOI (Turn Over Interval) (hari)	2,8	1	1,8	1,8	1,4
4	BTO (Bed Turn Over =	51,4	64	59,9	59,3	46,4

	Angka perputaran tempat tidur) (%)					
5	NDR (Net Death Rate)	45,3	46	50,1	31,7	34,7
6	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	72,3	73,2	72	73	77,8

Sumber: RSUD Kardinah Kota Tegal, 2013

3. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan prasarana dan sarana pada suatu daerah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Sumberdaya Air, Jalan, Ciptakarya (Air Minum, Sanitasi, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penanganan Permukiman Kumuh), Jasa Konstruksi

a. Sumberdaya air

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pasal 1 menyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pada pasal yang sama dijelaskan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Ada dua indikator pelayanan untuk sumberdaya air yaitu indikator: persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan target 100 % untuk tahun 2019 dan persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan

kewenangannya dengan target 70% tahun 2019. Pada penyediaan air baku, Kota Tegal hingga tahun 2014 baru mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar 30 % (Dokumen Sanitasi Kota Tegal tahun 2010-2014). Sedangkan luas area layanan irigasi di Kota Tegal sebesar 931 Ha, tercakup dalam 3 Daerah Irigasi (DI) yaitu : DI Pesayangan seluas 417 Ha, DI Sidapurna seluas 497 Ha dan DI Gangsa Lumingser seluas 17 Ha. Ketiga DI tersebut merupakan bagian dari DI lintas kabupaten/kota sehingga dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

b. Jalan dan Jembatan

Pembangunan di bidang kebinamargaan ini dapat ditinjau dari kondisi jalan kota yang telah dipelihara maupun yang telah dibangun. Dalam SPM, persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang ditetapkan sebesar 60% tahun 2019; dan persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota dengan target 100% tahun 2019.

Jalan di Kota Tegal terbagi menjadi 2 kelas jalan yaitu jalan nasional dan jalan kota. Kondisi panjang jalan nasional selama 5 tahun terakhir relatif tetap yaitu 12,905 km. Sementara itu untuk kondisi panjang jalan Kota Tegal telah mengalami peningkatan pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Panjang jalan tahun 2009 sebesar 201,768 km, tahun 2013 panjang jalan meningkat menjadi 229,850 km dengan konstruksi permukaan jalan di Kota Tegal sebesar 90% sudah pengerasan aspal, sementara 10 % sisanya terbagi atas jalan kerikil, tanah, dan lain-lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan infrastruktur jalan di Kota Tegal. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kota Tegal Tahun 2009-2013

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Konstruksi Permukaan (Km)			
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lain-lain
2009	201,768	197,741	2,887	1,140	0
2010	202,965	198,938	2,887	1,140	0
2011	229,850	203,175	2,887	11,238	12,550
2012	229,850	208,512	0,300	10,373	10,665

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Konstruksi Permukaan (Km)			
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lain-lain
2013	229,850	211,692	0,300	9,923	7,935

Sumber : LKPJ-AMJ Kota Tegal Tahun 2009-2014

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Tegal mengalami perkembangan yang fluktuaktif. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, tahun 2009 proporsi panjang jalan baik sebesar 83,00%, tahun 2011 menurun menjadi 66,67%. Meskipun sempat mengalami penurunan proporsi jalan baik, namun di tahun 2013 Kota Tegal dapat meningkatkan kinerja jalan baik sehingga tahun 2013 proporsi jalan baik menjadi 73,92%, ini berarti telah melampaui target SPM yang ditetapkan yaitu sebesar 60% tahun 2019.

Meskipun proporsi jalan baik telah memenuhi standar SPM, dan baru mencapai 73,92%, namun sebesar 93% jalan di Kota Tegal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Ini menunjukkan adanya aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan di Kota Tegal mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi jalan di Kota Tegal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Kondisi Jalan Kota Tahun 2009- 2013

Tahun	Kondisi Jalan (Km)		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
2009	169,473	32,295	0
2010	137,348	62,307	3,310
2011	152,817	51,543	25,4`90
2012	161,236	44,426	24,188
2013	169,913	41,559	18,378

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, 2013

Selama 5 tahun terakhir pemerintah Kota Tegal, telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan umur jalan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi jalan. Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi tahun 2013 sebesar 87,63%, melalui program rehabilitasi yang dilakukan meningkatkan kualitas jalan. Sementara itu untuk kondisi

jembatan di Kota Tegal juga menunjukkan adanya peningkatan dimana panjang jembatan tahun 2009 432,5 m, tahun 2013 meningkat 9,1 % menjadi 591,5 m.

c. Cipta Karya

1). Air Minum

Dari 8 tujuan dan 18 target MDGs, air minum bersama sanitasi termasuk dalam Tujuan 7 MDGs yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan target 10 yakni mengurangi separuh, pada tahun 2015, dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. Untuk mencukupi kebutuhan air minum, telah dilakukan upaya pemenuhan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan melalui sistem perpipaan dilakukan oleh PDAM sedangkan non perpipaan dilaksanakan oleh DPU. Jumlah warga yang terlayani oleh sumur bor DPU tahun 2013 sebanyak ± 6.700 jiwa.

Cakupan pelayanan PDAM Kota Tegal Kota Tegal sampai tahun 2012 adalah 20,09%. PDAM melalui SPAM BREGAS untuk Kota Tegal pada tahun 2013 telah membangun Jaringan Distribusi Utama (JDU) sepanjang 8.800 m dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) sepanjang 568,5 m. Sedangkan pembangunan sumur air dalam dan jaringan distribusinya dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah sebanyak 14 unit.

2). Sanitasi

Upaya peningkatan sanitasi lingkungan yang sehat dilaksanakan melalui upaya pembangunan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat berupa pembangunan MCK Plus serta pembangunan septik komunal. Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kota Tegal
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk terlayani (KK)	NA	42.100	49.133	49.445	49.559
2	Jumlah	253.275	240.540	241.710	243.730	244.621

	penduduk (jiwa)					
	Persentase (%)	NA	70,01	71,39	74,89	76,34

Sumber : Bappeda Kota Tegal, 2014

3). Drainase

Sementara itu untuk saluran kondisi saluran drainase ini mengalami perkembangan yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Drainase Kota Tegal terbagi atas 4 saluran yaitu saluran utama, saluran sekunder, saluran tersier, dan drainase lingkungan. Sampai dengan tahun 2013 drainase utama kondisi baik sebanyak 21%, kurang baik 25%, dan rusak 56%. Sementara untuk kondisi saluran sekunder baik sebanyak 30%, kurang baik 26%, dan rusak 44%. Kondisi saluran drainase tersier baik 47%, kurang baik 2%, rusak 51%. Untuk drainase lingkungan sebanyak 96% kondisi baik dan 4% kondisi kurang baik. Perkembangan kondisi saluran drainase selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Kondisi Saluran Tahun 2009-2013

Nama Saluran	Kondisi (m)								
	2009			2010			2011		
	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak
Saluran utama	6.838,00	8.140,00	18.710,00	7.059,00	7.919,00	18.710,00	7.059,00	7.919,00	18.710,00
Saluran sekunder	30.586,95	38.255,40	56.093,50	33.426,25	35.407,10	56.072,50	36.463,45	33.072,40	55.890,00
Saluran tersier	21.926,20	920,00	25.123,00	21.949,60	920,00	24.755,60	22.626,60	920,00	24.755,60
Drainase lingkungan	24.939,55	1.097,00	2.004,75	26.672,55	1.097,00	271,45	26.944,30	1.097,00	0,00
	2012			2013					
Saluran utama	7.209,00	7.919,00	18.710,00	7.059,00	7.919,00	18.710,00			
Saluran sekunder	37.653,45	33.072,40	54.840,00	37.333,45	33.072,40	55.160,00			
Saluran tersier	22.876,60	920,00	24.755,60	22.876,60	920,00	24.755,60			
Drainase Lingkungan	26.944,30	1.097,00	0,00	26.944,30	1.097,00	0,00			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, 2013

Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kota Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Tahun 2013 genangan banjir sebesar 1,93 km², kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2009 dimana luas genangan banjir mencapai 2,92 km². Perkembangan luas genangan banjir di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Luas wilayah Tergenang Kota Tegal

Tahun	Genangan banjir (Km2)
2009	2,92
2010	2,55
2011	2,35
2012	2,03
2013	1,93

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, 2013

d. Jasa Konstruksi

Ketentuan tentang jasa konstruksi dapat dirunut dalam Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan pemerintah No 29 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Konstruksi Nasional. Dalam SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat dua indikator yaitu pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan target 60 % tahun 2019; dan perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap dengan target 100 % tahun 2019.

Dalam hal penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap sebagaimana tercermin pada Peraturan Menteri Keuangan, ternyata belum dapat dipenuhi karena waktu pengurusan ijin rata-rata membutuhkan waktu 30 hari. Berkaitan dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, telah dimiliki dan asih dalam uji coba.

4. Perumahan

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya adalah menyediakan rumah atau papan. Pembangunan perumahan memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga pihak swasta dan masyarakat.

Kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakatnya relative terbatas. Pemerintah harus dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan rumah bagi penduduk Kota Tegal. Selama ini pertumbuhan jumlah kebutuhan rumah tidak seimbang dengan kemampuan pihak pemerintah maupun swasta. Kebutuhan perumahan di Kota Tegal pada tahun 2013 sebanyak 13,757 unit pada tahun 2013 pemerintah bersama swasta telah membangun rumah sebanyak 407 unit, sehingga backlog kebutuhan rumah pada tahun 2013 sebesar 13.350 unit.

Dalam pembangunan perumahan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah dilaksanakan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, untuk tahun 2009 telah dikucurkan subsidi perbaikan rumah sebanyak 271 rumah yang disalurkan melalui pendampingan program PNPM tahun 2009 dan melalui paket P2KP sejumlah 136 rumah.

Jumlah RTLH pada Tahun 2009 sebanyak 1.105 unit selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 RTLH yang telah direhabilitasi sebesar 605 unit. Pada tahun 2012 itu pula terdapat RTLH baru sebanyak 171 unit, sehingga jumlah RTLH di Kota Tegal sampai dengan 2012 tersisa sebanyak 671 unit. Pada tahun 2013 rehabilitasi RTLH bersumber dari APBN (PNPM) sebanyak 231 unit, APBD provinsi Jawa Tengah sebanyak 60 unit, dan APBD Kota Tegal sebanyak 314 unit.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat dilakukan koordinasi dan pengendalian antar stakeholder pembangunan perumahan. Koordinasi dan pengendalian pembangunan dan pengembangan permukiman di Kota Tegal dilaksanakan sejak 2010 berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kota Tegal. Koordinasi tersebut melalui rapat koordinasi Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kota Tegal. Melalui rapat koordinasi tersebut instansi-instansi yang terkait pembangunan perumahan dan permukiman merencanakan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pemerintah Kota Tegal juga membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

yang pembangunannya berlokasi di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat. Pengelolaan Rusunawa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rusunawa. Sementara untuk Peraturan Walikotanya antara lain Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kota Tegal. Sebagai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rusunawa. Berdasarkan peraturan walikota tersebut pengelolaan Rusunawa telah dilaksanakan.

Dalam rangka peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di permukiman, pada tahun 2009 telah dilakukan perawatan dan pengadaan 12 suku cadang kendaraan PMK. Pada tahun 2010 telah dilakukan kegiatan dan paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Pada Tahun 2012 telah dilakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran. Jumlah personel kebakaran di UPTD Pemadam Kebakaran DPU Kota Tegal sebanyak 23 orang yang dibagi menjadi 4 regu per shift sehingga masing-masing regu beranggotakan 5-6 orang, dengan jumlah mobil pemadam kebakaran sebanyak 3 unit. Namun demikian permasalahan yang perlu dukungan yaitu adanya upaya penyadaran masyarakat untuk tanggap bencana kebakaran serta penyiapan akses jalan yang cukup untuk evakuasi.

Dari rentang waktu 2009 hingga 2013 penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan yang masih menjadi permasalahan adalah belum adanya data yang baku terkait dengan jumlah rumah dan kawasan kumuh di Kota Tegal. Di sisi lain, pemahaman-pemahaman masyarakat tentang perumahan juga masih kurang, seperti tentang ketentuan-ketentuan membangun rumah yang sehat. Permasalahan lain adalah belum adanya payung hukum dalam penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang. Permasalahan lain dalam mendukung perumahan dan permukiman adalah berkaitan dengan ketersediaan taman pemakaman umum

(TPU). Saat ini TPU di Kota Tegal masih terbatas. Sebagian besar masih merupakan tanah wakaf yang dikelola masyarakat.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Pengembangan Perumahan					
1.	Rumah tinggal bersanitasi (%)	68,09	68,09	71,39	74,89	76,34
2.	Jumlah rumah susun yang terbangun (twin block)	0	0	2	2	2
3.	Persentase kawasan kumuh (%)	4,63	4,63	4,42	4,23	4,01
	Lingkungan Sehat perumahan					
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99
2.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (rumah)	0	0	0	0	91
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU					
4.	Penyediaan Rumah Bagi MBR (unit)	0	0	196	196	196
	Pengelolaan areal pemakaman					
1.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0	0	0	0	0,96
	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	33	33	33	33	33
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	81,00	93,00	100,00	75,00	60,00
3.	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang	7,40	7,40	14,80	22,00	25,00

	Memenuhi Standar Kualifikasi					
4.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	33,3 (3 mobil)	33,3 (3 mobil)	33,3 (3 mobil)	33,3 (3 mobil)	33,3 (3 mobil)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, KLH, dan BPMPKB Kota Tegal, 2013

5. Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal selama 20 tahun, telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.

Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Kota Tegal menindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) di masing-masing Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK). Kota Tegal dibagi menjadi 4 SPPK, antara lain :

- SPPK Bandung memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Selatan;
- SPPK Kraton memiliki fungsi untuk pelayanan perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Barat;
- SPPK Kejambon memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah Kecamatan Tegal Timur; dan
- SPPK Sumurpanggang memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman dan pendidikan meliputi wilayah Kecamatan Margadana.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tegal telah menyusun dokumen materi teknis dan Raperda RDTRK untuk SPPK Kejambon dan SPPK Kraton, kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 menyusun Raperda RDTRK untuk SPPK Sumurpanggang dan SPPK

Bandung sehingga seluruh wilayah di Kota Tegal telah selesai disusun kajian RDTRK. Sampai dengan saat ini pengesahan Perda masih dalam proses.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, pemerintah kota menyelenggarakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh BP2T Kota Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2009 jumlah ijin yang dikeluarkan sebanyak 681 ijin, tahun 2013 meningkat menjadi 1.169 ijin.

Sementara itu untuk Rasio Ruang Terbuka Hijau Kota per Satuan Luas Wilayah tahun 2009- 2012 mengalami penurunan. Tahun 2009 Rasio RTHK sebesar 32%, tahun 2012 menurun menjadi 31,23%. Penurunan luas ruang terbuka hijau ini salah satunya disebabkan adanya alih fungsi lahan yang terjadi pada RTH privat. Sementara itu untuk ruang terbuka hijau publik di Kota Tegal menunjukkan peningkatan. Tahun 2009 RTH Publik sebesar 10,08%, tahun 2013 RTH Publik mencapai 13,50%.

Selama ini penegakan hukum bagi pelanggaran peruntukan ruang, belum optimal. Capaian Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang tahun 2013 sebesar 60%. Ini menunjukkan belum semua kasus pelanggaran penataan ruang tertangani. Kondisi alih fungsi lahan yang terjadi pada tahun 2013 terjadi pada pengalihan lahan pertanian menjadi perumahan atau perdagangan dengan luas 96.226 m².

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan pembangunan memerlukan dukungan data yang akurat dan proyeksi yang obyektif. Selain itu perencanaan pembangunan juga harus komprehensif mencakup semua urusan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah juga harus mampu mensinergikan semua dokumen perencanaan yang ada baik sektoral maupun perencanaan tingkatan pemerintahan di atasnya.

Dengan demikian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal harus selaras dan terpadu dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tegal untuk menyelesaikan permasalahan dan masalah mendesak yang dihadapi oleh daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan disusun

berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus mengacu pada penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Tegal wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara operasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Kota Tegal 2009-2013 dapat dilihat dari produk perencanaan pembangunan yang telah disusun secara rutin oleh Pemerintah Kota Tegal meliputi RKPD, KUA, PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan yang mendasar. Kebutuhan akan data dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sangat penting karena dengan tersedianya data maka segala informasi dapat diketahui dan dengan data pula masyarakat luas dapat memberikan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal. Kegiatan penyusunan yang up to date dilaksanakan antara lain data dan informasi penyusunan buku Tegal Dalam Angka dan Penyusunan Profil Daerah. Selain itu untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka telah dilakukan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyusunan Buku PDRB. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada juga telah dilakukan berbagai studi penelitian dan perencanaan, meliputi Penyusunan Profil Ekonomi Kota Tegal, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, studi Penanganan rob dan masterplan drainase Kota Tegal, kajian Analisa

Ibu dan Anak (ASIA), dokumen RAD MDGs, dokumen Strategi Sanitasi Kota dan Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (DMPSS), Dokumen RPIJM Bidang Keciptakarya, Masterplan Kompleks Perkantoran Jalan Hangtuah, Masterplan Kompleks Pendidikan dan Perkantoran Debong Kulon, Masterplan Kawasan PAI, studi inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lingkungan pendidikan dasar dan menengah.

Capaian kinerja urusan wajib perencanaan pembangunan di Kota Tegal secara umum mengacu pada 4 (empat) indikator kinerja kunci, antara lain: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008, 2) tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD tahun 2009-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2009, 3) tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tegal dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pada indikator ini dihitung berdasarkan persentase antara jumlah program RKPD dengan jumlah program RPJMD dengan capaian pada tahun 2009 sebesar 80%, tahun 2010 sebesar 79.15%, tahun 2011 menurun sebesar 66,31% dan tahun 2012 meningkat sebesar 92,22%

Secara lengkap hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal tahun 2009 – 2013 dapat disajikan pada Tabel 2.41. berikut ini.

Tabel 2.41
Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah Kota Tegal 2009 – 2013

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
b) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
d) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	80,00	79,15	66,31	92,22	93,22

Sumber : Bappeda Kota Tegal, 2013

7. Perhubungan

Simpul transportasi yang ada di Kota Tegal meliputi 1 buah terminal yang beroperasi untuk melayani angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, 1 buah stasiun kereta api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang lintas utara (Jakarta–Cirebon–Tegal–Pekalongan–Semarang–Surabaya) dan lintas selatan untuk penumpang (Semarang–Tegal–Purwokerto), serta pengangkutan barang (Tegal–Cilacap), dan 1 pelabuhan niaga, serta 3 pelabuhan perikanan.

Sementara itu untuk perlengkapan jalan yang tersedia di Kota Tegal meliputi : Rambu, Marka, APILL, Cermin tikung, Warning light, Guardraill, Fasilitas pendukung berupa halte dan Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Pelican Crossing. Kondisi Rambu- Rambu Lalu lintas selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana untuk jenis rambu peringatan, larangan, perintah, petunjuk, RPPJ, dan cermin tikung tahun 2009 sebanyak 772 unit, tahun 2013 meningkat menjadi 1.543 unit.

Untuk kondisi marka jalan juga mengalami peningkatan dimana panjang marka jalan tahun 2009 sebesar 350 m², tahun 2013 meningkat menjadi 958 m². Untuk fasilitas APILL sampai dengan tahun 2013, Kota Tegal telah memiliki 59 unit APILL. Untuk pagar pengaman atau Guardrail sampai dengan tahun 2013, Kota Tegal telah memiliki Guardrail 1000 m². Perkembangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Tegal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42. sebagai berikut :

Tabel 2.42
Fasilitas Perlengkapan Jalan

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
A.	Jenis Rambu						
	Peringatan	283	18	165	144	92	702
	Larangan	146	53	24	16	68	307
	Perintah	140	35	7	3	16	201
	Petunjuk	167	4	14	37	24	246
	RPPJ	36	15	10	17	0	78

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
	Cermin Tikung	0	5	0	4	0	9
	Jumlah (unit)	772	130	220	221	200	1543
	Akumulasi	772	902	1122	1343	1543	
B.	Marka Jalan						
	Jumlah (m ²)	350	350	580	1560	958	
C.	Jenis APILL						
	Traffic Light	16	0	0	2	2	
	Warning Lamp	20	0	16	0	2	
	Pelican Crossing	0	0	0	0	0	
	Jumlah (unit)	36	0	16	2	5	
	Total (unit)	59					
D.	Guardrail						
	Guardrail (Pagar Pengaman)	700	0	300	0	0	
	Jumlah (m ²)	700	0	300	0	0	
	Total (m ²)	1000					

Sumber: Dishubkominfo Kota Tegal, 2013

Untuk fasilitas pendukung perlengkapan jalan yaitu halte dan Zona Selamat Sekolah (ZOSS), sampai dengan tahun 2013 Kota Tegal telah memiliki 21 Halte dan 3 ZOSS. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.43 sebagai berikut:

Tabel 2.43
Fasilitas Pendukung Berupa Halte Dan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

No	Jenis Fasilitas Pendukung	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Halte (Unit)	18	0	0	0	3	21
2	Zona Selamat Sekolah/ZOSS (M2)	0	0	0	2	1	3

Sumber: Dishubkominfo Kota Tegal, 2013

Prasarana perlintasan yang tersedia di Kota Tegal terdiri atas :

- 1) Perlintasan sebidang meliputi 16 perlintasan, yang terdiri atas : 12 perlintasan dikelola oleh Pemerintah kota Tegal dan 4 perlintasan

dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan 2) Perlintasan tidak sebidang terdiri atas 3 perlintasan.

Kota Tegal juga telah memiliki 1 (satu) unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Perkembangan kendaraan bermotor yang berada di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2009 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) sebanyak 3.576 kendaraan, tahun 2013 meningkat menjadi 4.342 kendaraan. Meskipun demikian untuk sistem pengujian kendaraan bermotor di Kota Tegal masih perlu ditingkatkan. Perkembangan KBWU di Kota Tegal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.44 sebagai berikut :

Tabel 2.44
Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

No	Jenis Kendaraan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Mobil Penumpang Umum	35	30	41	43	44
2	Mobil Bus	700	730	765	759	748
3	Mobil Barang	2812	2841	2987	3179	3464
4	Kereta Gandeng	90	81	73	54	58
5	Kereta Tempel	20	20	22	28	28
	Jumlah	3576	3152	3757	4063	4342

Sumber: Dishubkomininfo Kota Tegal, 2013

Persentase KBWU yang lulus uji dibandingkan dengan KBWU yang diuji mengalami peningkatan. Tahun 2009 persentase KBWU yang lulus uji tahun 2009 sebanyak 96,84%, tahun 2013 meningkat menjadi 97,4%. Perkembangan presentase KBWU yang lulus uji dibandingkan dengan KBWU yang diuji dapat dilihat pada Tabel 2.45 sebagai berikut :

Tabel 2.45
Persentase KBWU Yang Lulus Uji Dibanding KBWU Diuji

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	KBWU lulus uji	kendaraan	6594	6786	7001	7463	7537
2	KBWU yang diuji	kendaraan	6809	6986	7123	7656	7738
	Persentase	%	96,84	97,14	98,29	97,48	97.4

Sumber: Dishubkomininfo Kota Tegal, 2013

Angkutan penumpang umum di Kota Tegal terdiri dari 2 jenis yaitu angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek. Angkutan dalam trayek terbagi atas 2 jenis pelayanan yaitu angkutan kota dan angkutan perkotaan jumlah trayek angkutan kota sebanyak 2 buah dengan jumlah kendaraan sebanyak 47 unit, sedangkan untuk angkutan perkotaan sebanyak 6 trayek dengan jumlah kendaraan sebanyak 147 unit. Sementara itu angkutan tidak dalam trayek di Kota Tegal hanya terdapat 1 jenis pelayanan yaitu taksi dengan jumlah operator 2 dan jumlah kendaraan sebanyak 50 unit.

Kota Tegal memiliki 234 ruas jalan. Meskipun demikian belum seluruh ruas jalan tersebut terlayani angkutan umum. Selama 5 tahun terakhir rasio ruas jalan yang terlayani angkutan kota tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 29,06%. Selengkapnya ketersediaan angkutan umum dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Ketersediaan Angkutan Umum Tahun 2009-2013

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah ruas Jalan yang tersedia Angkutan Kota	Ruas jalan	68	68	68	68	68
2	Jumlah Ruas Jalan	Ruas jalan	234	234	234	234	234
	Persentase	%	29,06	29,06	29,06	29,06	29,06

Sumber : Dishubkominfo Kota Tegal, 2013

Disamping sarana dan prasarana perhubungan, di Kota Tegal telah berdiri sebuah lembaga pendidikan di bidang transportasi jalan sejak tahun 1971 dimana sejak tahun 2011 ditingkatkan menjadi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ). Dengan keberadaan lembaga pendidikan tersebut, Kota Tegal diharapkan dapat menjadi kota percontohan di bidang transportasi jalan dan sekaligus menjadi laboratorium hidup (live laboratory) sehingga dapat digunakan sebagai wahana kegiatan pembelajaran bagi siswa maupun taruna PKTJ.

8. Lingkungan Hidup

Indikator pembangunan pada urusan lingkungan hidup meliputi pengembangan kinerja pengelolaan sampah, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pola-pola pengelolaan persampahan berdasarkan undang-undang tersebut dimulai dari pembatasan timbulnya sampah, pendauran ulang sampah dan penggunaan sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali.

Berdasarkan data yang tercatat di BPS, perkembangan produksi sampah di Kota Tegal pada tahun 2012 sebesar 728 m³/hari, meningkat jika dibandingkan dengan produksi sampah pada tahun 2011 sebesar 725 m³/hari. Volume sampah pada tahun 2012 yang terangkut sebesar 450 m³/hari atau sebesar 61,81%. Sementara itu volume sampah yang terangkut kemudian mendapatkan penanganan dengan baik pada tahun 2012 sebesar 60% dan pada tahun 2013 sebesar 60,2%, artinya dalam dua tahun terakhir ada penumpukkan sampah sekitar 39,8% dari sampah yang diangkut tidak mendapatkan penanganan. Jika kondisi ini dibiarkan maka volume sampah setiap tahunnya dipastikan akan terus meningkat. Untuk itu upaya penanganan sampah melalui pemilihan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir menjadi perhatian serius dalam mengatasi masalah sampah di Kota Tegal.

Pada proses pengangkutan sampah, di Kota Tegal terdapat beberapa fasilitas angkut antara lain dump truk sebanyak 19 buah, arm roll sebanyak 3 buah, gerobak angkut sebanyak 122, gerobak angkut dengan mesin roda tiga sebanyak 11 dan container sampah sebanyak 20 buah. Alat angkut tersebut digunakan untuk mengambil sampah dari tempat pembuangan sampah penduduk untuk dikirim ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Fasilitas tempat penampungan sampah sementara di Kota Tegal pada tahun 2013 sebanyak 86 unit yang tersebar di 4 kecamatan dengan jumlah tempat pengolahan sampah terpadu sebanyak 6 unit. Ketersediaan fasilitas penampungan dan pengolahan sampah dilihat dari trennya mengalami peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan produksi sampah yang dihasilkan. Tingkat daya tampung tempat pembuangan sampah jika dibandingkan dengan per satuan penduduk, diketahui bahwa rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada tahun 2013 adalah 2 per 1.000 jumlah penduduk. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,9 per 1.000 jumlah penduduk. Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk dilihat dari capaian selama tahun 2009-2013 menunjukkan angka kenaikan 0,1 per 1.000 penduduk

setiap tahunnya. Kondisi tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Tegal sampai saat ini sudah mampu menampung sampah sebanyak 85% dari produksi sampah seluruh penduduk yang ada. Dengan demikian, daya tampung sampah yang ada di masyarakat dengan fasilitas yang sudah ada saat ini belum menampung keseluruhan produksi sampah yang ada di masyarakat.

Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan melalui kegiatan guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah di Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2009-2013) meningkat sebesar 10%. Kondisi tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2009 sebesar 15% meningkat menjadi 25% pada tahun 2013. Sedangkan jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah sampai pada tahun 2013 ini sudah mencapai 90%. Dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana persampahan di Kota Tegal, diharapkan dapat mendorong penanganan produksi sampah yang setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Indikator kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Tegal dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Rasio Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase penanganan sampah (%)	60	60	60	60	60,2
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (unit)	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
3	Jumlah TPS (unit)	85	86	88	86	86
4	Jumlah TPST (unit)	0	0	0	3	6
5	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (%)	15	15	15	20	25
6	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. (unit)	75	80	85	90	90

Sumber: KLH dan Diskimtaru Kota Tegal, 2013

Masalah sampah pada saat di Kota Tegal menghadapi permasalahan yang cukup serius. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Muarareja dan saat ini masih digunakan penggunaan sewa lahannya akan berakhir bulan Oktober tahun 2015 sesuai perjanjian awal. Oleh karena itu, satu-satunya TPA di Kota Tegal tersebut akan berakhir masa beroperasinya setahun ke depan. Untuk itu, TPA pada tahun berikutnya akan segera pindah dengan alternatif yang diusulkan adalah melalui pembangunan TPA Bokong Semar. Namun untuk pembangunan TPA tersebut membutuhkan biaya yang besar karena akses jalan ke wilayah Bokong Semar tidak memadai, menunggu penyelesaian pembangunan jalan *By Pass* Brebes – Tegal (jalan lingkaran utara Kota Tegal).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa usaha pengawasan terhadap Amdal terdiri dari pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan.

Dalam upaya pengendalian pencemaran air atas hadirnya berbagai jenis usaha/kegiatan di tengah-tengah masyarakat, maka perlu ada pelaporan rutin untuk memastikan bahwa perusahaan yang ada selama ini ikut menjaga kelestarian air di Kota Tegal. Pemantauan terhadap usaha-usaha yang ada selama ini diperlukan guna menilai apakah usaha atau kegiatan yang berjalan selama ini mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air atau tidak. Berdasarkan hasil pemantauan, selama lima tahun terakhir (2009-2013) ketaatan perusahaan untuk mematuhi persyaratan administrasi dan teknis menunjukkan kecenderungan positif, jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis setiap tahunnya meningkat, bahkan sampai pada tahun 2013 sudah tercapai 100%. Kondisi ini menunjukkan seluruh perusahaan di Kota Tegal yang ada dalam pengawasan pemerintah mematuhi atas syarat administrasi dan teknis pencemaran air.

Sementara itu setiap warga masyarakat yang merasa keberatan atas keberadaan perusahaan yang diduga berperan dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berhak untuk melaporkan atas dugaan kerugian tersebut kepada pemerintah. Jenis pelaporan mengenai pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Tegal selama ini diterima dan ditindak lanjuti. Ini dapat dilihat dari jumlah yang masuk dan jumlah yang ditangani secara umum sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan dalam SPM. Gambaran pencemaran lingkungan hidup terlihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pemantauan status mutu air (%)	20	40	60	80	100
2	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.	83	88	88	90	134
3	Persentase Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	27,2 7	45,4 5	63,6 4	90,9 1	100
4	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100	100	100
5	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan (unit)	1	1	1	1	1

Sumber: KLH Kota Tegal, 2013

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kota Tegal ditandai dengan jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan luasan lahan untuk produksi Biomassa. Pada tahun 2012 lahan biomassa yang dilaporkan kerusakannya baru sebesar 63%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 status kerusakan lahan yang dilaporkan sudah mencapai 93%. Target SPM pada tahun 2013 adalah jumlah luasan lahan untuk

produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya adalah 100%.

Pencemaran udara adalah masuknya, atau tercampurnya, unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia serta secara umum menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pencemaran udara berbentuk gas merupakan kumpulan gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan. Pencemar udara yang berbentuk gas adalah karbon monoksida, senyawa belerang (SO_2 dan H_2S), senyawa nitrogen (NO_2), dan chloroflourocarbon (CFC).

Dalam rangka peningkatan pengendalian polusi atau pencemaran udara di Kota Tegal salah satunya adalah dengan mengendalikan jenis-jenis usaha yang diduga memberikan sumbangan dalam pencemaran udara. Pengendalian dengan melakukan pengawasan terhadap setiap jenis usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak agar selalu dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dengan Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak. Upaya tersebut dilakukan setiap tahun dan pada tahun 2013 sudah mencapai 100%, sangat baik jika dibandingkan dengan capaian 4 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 sebesar 14,29%. Capaian Kinerja pengendalian polusi dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Pengendalian Polusi di Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (%)	14,29	42,86	71,43	85,71	100
2.	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi (%)	20	20	20	20	20

Sumber: KLH Kota Tegal, 2013

Kota Tegal sebagai wilayah yang berlokasi di wilayah pantai, tentunya menghadapi permasalahan yang terkait dengan pengelolaan

pesisir. Permasalahn tersebut antara lain adalah rob dan kerusakan lingkungan pesisir. Untuk menangani hal tersebut upaya yang telah dilakukan antara lain pembangunan groin dan penghijauan pantai. Panjang groin yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 panjang groin yang dibangun mencapai 170 meter, tahun 2010 sepanjang 237 meter, 2011 sepanjang 63 meter, 2012 sepanjang 459,5 meter dan tahun 2013 sepanjang 72,5 meter. Sedangkan penghijauan pantai melalui penanaman bakau pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing seluas 0,5 ha, tahun 2011 dan 2012 masing-masing 0,9 ha, dan tahun 2013 seluas 1 ha.

9. Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam urusan pertanahan meliputi: 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

Pembangunan bidang pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah mempunyai fungsi yang ekonomis dan sosial. Karean memiliki peran yang strategis tersebut maka kepemilikan tanah/status atas tanah perlu diberikan bukti yang kuat berupa sertifikat kepemilikan atas tanah yang sah di mata hukum. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf.

Jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di Kota Tegal pada tahun 2013 mencapai 888.279 m². Luasan tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2012 mencapai 1.205.430 m². Secara rinci jumlah sertifikat yang diterbitkan dan luasan lahan bersertifikat setiap tahun dapat dirinci pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan (eksemplar) dan Luas Tanah Bersertifikat (m²) di Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Jenis Sertifikat	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Hak Milik	Sertifikat Diterbitkan	1.667	1.947	2.115	2.280	1.511
		Luas Tanah	645.459	565.214	594.919	770.331	434.679
2	Hak Guna Usaha	Sertifikat Diterbitkan	-	-	-	-	-
		Luas Tanah	-	-	-	-	-
3	Hak Guna Bangunan	Sertifikat Diterbitkan	194	61	30	219	489
		Luas Tanah	90.736	36.045	18.496	225.197	315.242
4	Hak Pakai	Sertifikat Diterbitkan	25	26	29	4	16
		Luas Tanah	40.284	70.371	287.832	189.799	136.368
5	Hak Pengelolaan	Sertifikat Diterbitkan	-	1	-	-	-
		Luas Tanah	-	970	-	-	-
6	Wakaf	Sertifikat Diterbitkan	24	25	13	30	9
		Luas Tanah	3.995	18.523	5.163	20.103	1.990
	Jumlah	Sertifikat Diterbitkan	1.910	2.060	2.187	2.533	2.025
		Luas Tanah	780.474	691.123	906.410	1.205.430	888.279

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2013

Dapat diketahui bahwa luasan lahan yang disertifikatkan di Kota Tegal dibandingkan dengan luas daratan masih cukup rendah. Kota Tegal memiliki lahan seluas 39,68 Km² (3.968.000 m²). Penerbitan sertifikat tanah di Kota Tegal dari Tahun 2009-2013 fluktuatif, tertinggi pada Tahun 2012 sebanyak 2.533 sertifikat dengan luas lahan 1.205.430 m² terendah tahun 2009 sebanyak 1.910 sertifikat dengan luas lahan 780.474 m².

Salah satu kewenangan daerah dalam urusan pertanahan adalah pemberian ijin lokasi. Persentase penyelesaian ijin lokasi yang diajukan melalui BPPT Kota Tegal mencapai 100% atau bisa diartikan seluruh pengajuan ijin lokasi diselesaikan dengan baik. Terkait dengan konflik tanah negara, selama 5 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2013 tidak pernah terjadi kasus yang terkait dengan tanah negara.

Kewenangan lainnya adalah melakukan pensertifikatan tanah pemerintah daerah. Jumlah tanah pemda yang belum bersertifikat sampai dengan tahun 2012 sebanyak 55 bidang. Pengajuan sertifikat pada tahun 2012 dari sebanyak 10 bidang tanah, terealisasi sebanyak 1 bidang tanah. Pada tahun 2013 ajukan sertifikat tanah pemda dari sebanyak 20 bidang terealisasi sebanyak 2 bidang tanah.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dinilai melalui indikator yang meliputi kepemilikan dokumen kependudukan, sistem administrasi kependudukan (SIAK), dan sistem pendaftaran penduduk. Indikator yang dimaksud adalah: rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi ber-akte kelahiran, kepemilikan Akta Kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, ketersediaan database kependudukan, dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Rasio penduduk ber-KTP Kota Tegal cenderung mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2009-2013. Rasio penduduk ber-KTP meningkat dari sebesar 82% pada tahun 2009 menjadi 88% pada tahun 2013. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh capaian kepemilikan KTP di Kota Tegal yang juga cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi 88% hingga tahun 2013. Pembuatan KTP di Kota Tegal telah mengacu kepada pedoman Nasional yaitu dengan menggunakan penerapan KTP berbasis NIK. Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP di Kota Tegal disebabkan oleh adanya program pemerintah pusat yaitu program KTP-eL yang dilaksanakan secara menyeluruh di kabupaten/kota di Indonesia. Capaian rasio penduduk ber-KTP Kota Tegal jauh lebih baik dibandingkan dengan rasio penduduk ber-KTP Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini tercermin dari capaian Jawa Tengah sebesar 83,4% pada tahun 2013. Capaian rasio penduduk ber-KTP dan kepemilikan KTP di Kota Tegal masih dibawah target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yaitu sebesar 100% hingga tahun 2015. Kondisi ini disebabkan oleh penyerahan KTP-eL yang telah dibuat oleh pemerintah pusat masih belum seluruhnya dikirimkan kepada Pemerintah Kota Tegal. Selain itu, sebagian dari jumlah penduduk yang belum ber-KTP merupakan wajib KTP baru yang belum sempat mengajukan permohonan KTP.

Rasio bayi ber-Akta Kelahiran di Kota Tegal pada tahun mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 capaian rasio bayi ber-Akta Kelahiran adalah sebesar 93% meningkat menjadi 94% pada tahun 2012 dan menurun menjadi 91% pada tahun 2013. Menurunnya rasio bayi ber-

Akta Kelahiran di Kota Tegal disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengurus kepemilikan Akta Kelahiran anak. Kecenderungan yang terjadi, pengurusan Akta Kelahiran oleh masyarakat dilakukan ketika anak akan mendaftar sekolah atau kepentingan lain yang didalamnya mempersyaratkan pelampiran Akta Kelahiran. Apabila diperbandingkan dengan target SPM, capaian rasio bayi ber-Akta Kelahiran Kota Tegal telah mencapai target yang telah ditentukan. Target SPM indikator cakupan penerbitan Akta Kelahiran adalah sebesar 90% dan harus dicapai pada tahun 2020.

Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Tegal cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2009-2013, meskipun secara kuantitas pada tahun 2013 kepemilikan Akta Kelahiran mengalami penurunan. Masih adanya penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan oleh masih terdapatnya orang tua bayi yang baru dilahirkan yang belum mengurus Akta Kelahiran sehingga menyebabkan capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Tegal belum bisa mencapai 100%.

Dalam rangka menunjang kelancaran pengurusan administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, Pemerintah Kota Tegal telah menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK). SIK bertujuan untuk mempermudah kinerja petugas administrasi kependudukan dalam menginput, memproses, dan menyimpan data (ketersediaan database). Perkembangan kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (%)

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Rasio penduduk ber KTP	82	84	86	93	88
2.	Rasio bayi ber-akte kelahiran	93	92	94	94	91
3.	Kepemilikan akta kelahiran	92	95	94,54	99,76	97,49
4.	Rasio pasangan berakte kawin	100	100	100	100	100
5.	Ketersediaan database	NA	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
	kependudukan					
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	NA	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, 2013

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi bidang : Pengarusutamaan Gender (PUG), Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, Data dan Informasi Gender dan Anak.

Indikator utama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama pada indikator pembentuk UHH, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja. IPG Kota Tegal pada tahun 2008 – 2012 cenderung meningkat. Pada tahun 2008 IPG Kota Tegal sebesar 61,71 meningkat pada tahun 2012 menjadi 64,44. Namun demikian dibandingkan dengan Kota-kota di Jawa Tengah Kondisi Kota Tegal menduduki urutan terakhir. Demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender. IDG Kota Tegal pada tahun 2008 sebesar 62,08 meningkat pada tahun 2012 menjadi 67,44.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dilaksanakan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah pengarusutamaan gender. Kelembagaan pengarusutamaan gender sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah adalah Pokja PUG dan Focal Point. Di Kota Tegal Pokja PUG telah terbentuk namun kondisinya tidak aktif. Sedangkan Focal Point berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana belum terbentuk. Untuk kelembagaan anak

telah terbentuk forum anak di tingkat Kota dan satu di tingkat kelurahan.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dilaksanakan pada seluruh bidang pembangunan. Setiap SKPD menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender. Namun di Kota Tegal penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender baru dimulai pada tahun 2012 pada 10 SKPD. Lambatnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender dikarenakan bimbingan teknis dilaksanakan pada dua tahun anggaran yaitu 2012 dan 2013, selain itu komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan PPRG belum optimal.

Kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Tegal dapat dilihat dari peran perempuan di Kota Tegal dalam pembangunan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2008 - 2012, Persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2008 persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar 70,41% meningkat pada tahun 2012 menjadi 84,59%. Sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan juga fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2009 partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 56,29% meningkat pada tahun 2012 menjadi 57,35%. Gambaran kondisi perempuan bekerja pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Kondisi Perempuan Bekerja di Kota Tegal Tahun 2009-2012

No	Indikator	2009	2010	2011	2012
1	Persentase Perempuan yang bekerja di Lembaga Swasta (%)	84,13	84,69	81,59	84,59
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,29	58,05	58,81	57,35

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

Rasio kekerasan terhadap perempuan di Kota Tegal relatif kecil. Pada tahun 2009 – 2012 rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa sebagian besar perempuan fluktuatif cenderung turun. Pada tahun 2009 rasio KDRT sebesar 1,85 menurun pada tahun 2013 menjadi 0,57 per 1.000 penduduk. Berdasarkan pelaporan SPM cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan telah dapat tertangani sebesar 100%. Hal ini mengandung arti bahwa semua kasus kekerasan perempuan dan

anak yang melapor pada petugas telah ditindaklanjuti seluruhnya. Penanganan yang diberikan adalah bimbingan rohani, penanganan kejiwaan oleh psikiater, medis bantuan pelayanan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan sampai tingkat pengaduan relatif kecil. Pada tahun 2009 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 0,13% meningkat pada tahun 2013 menjadi 0,18%. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Sesuai SPM
di Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio KDRT per 1.000 penduduk	1,85	1,46	0,75	0,81	0,57
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan (%)	100	100	100	100	100
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	NA	NA	NA	NA	NA
4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan	0,13	0,17	0,4	0,28	0,18

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	terhadap perempuan dan anak. (%)					
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. (%)	0	0	0	100	100
7	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	0	0	0	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	0	0	0	100	100
9	Persentase Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak (%)	85	85	85	91	91

Sumber: Bapermas PP dan KB Kota Tegal, 2013

Perlindungan anak di Kota Tegal dapat dilihat dari terlibatnya anak dalam forum anak, Persentase keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, Cakupan ketersediaan fasilitas informasi layak anak di Kab/Kota, Cakupan ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak di Kab/Kota dan Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan. Pada tahun 2009 – 2013 persentase keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 persentase keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak sebesar 85% meningkat pada tahun 2013 menjadi 91%. Cakupan ketersediaan fasilitas informasi layak anak di Kota Tegal dari tahun 2009 – 2013 relatif sama yaitu 0,03%. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan dari tahun 2009 – 2013 sebesar 60%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
di Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	85%	85%	85%	91%	91%
2	Cakupan ketersediaan fasilitas informasi layak anak di Kota Tegal	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
3	Persentase kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan	-	-	0,74%	0,74%	0,74%
4	Cakupan ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
5	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	60%	60%	60%	60%	60%

Sumber: Bapermas PP dan KB Kota Tegal, 2013

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Perwujudan tujuan tersebut dimulai dengan pembentukan keluarga kecil melalui perencanaan jumlah anak dalam keluarga. Di Kota Tegal rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2009 – 2013 antara 2- 3 anak. Hal ini dapat terlihat dari data jumlah anak setiap keluarga pada tahun 2009 sebesar 2,4. Kondisi ini cenderung stabil sampai dengan tahun 2013 menjadi 2,4. Kondisi ini terjadi karena

unmetneed relatif tinggi. Hal ini berarti kesadaran masyarakat Kota Tegal untuk ber KB masih relatif belum baik.

Perkawinan pada usia muda sudah terlihat jarang di Kota Tegal, ini dapat dilihat dari cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sangat kecil, rata-rata selama tahun 2009 – 2013 sebesar 1,6%. Namun demikian cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) masih cukup besar yaitu 15,21% pada tahun 2013. Kondisi ini masih jauh dari target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang mentargetkan pada tahun 2015 sebesar 4%. Sedangkan target MDGs cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)pada tahun 2015 target sebesar 5%.

Tabel 2.55
Kondisi Keluarga Berencana di Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	SPM/Non SPM	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Non SPM	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4
2.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	SPM	71,46	72,6	73,18	73,36	73,38
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	SPM	0,92	1,36	1,76	2,5	1,84
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	SPM	14,7	14,93	14,82	15,32	15,21
5.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000	Non SPM	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator	SPM/Non SPM	2009	2010	2011	2012	2013
	perempuan usia 15-19 tahun						
6.	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) (%)	SPM	71,46	72,6	73,18	73,36	73,38
7.	Penyediaan alat kontrasepsi sesuai dengan PPM (%)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%
8	Drop Out KB (orang)		763	717	847	863	805

Sumber: Bapermas PP dan KB Kota Tegal, 2013

Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap kelurahan 100%. Artinya semua kelurahan telah menyiapkan data mikro keluarga. Sehingga dapat diketahui kondisi masing-masing keluarga di Kota Tegal. Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I selama tahun 2009 – 2013 cenderung mengalami penurunan dengan persentase tertinggi pada tahun 2010 sebesar 40%.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, PUS diharapkan mengikuti program UPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Pada tahun 2009 – 2013 cakupan PUS peserta KB sebagai anggota UPPKS menunjukkan kecenderungan meningkat. Demikian juga dengan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti program Keluarga Berencana cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2009 – 2013. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut ini:

Tabel 2.56
Peningkatan Keluarga Sejahtera di Kota Tegal
Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan	100	100	100	100	100
2.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	0,39	0,40	0,38	0,38	0,39
3.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	55,9	55,9	55,9	55,9	56,87
4.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	67,41	67,41	67,41	67,41	88,85

Sumber: Bapermas PP dan KB Kota Tegal, 2013

13. Sosial

Pembangunan urusan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal mengacu pada indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Indikator tersebut terdapat dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal dan juga beberapa ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tegal. Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Jumlah PMKS di Kota Tegal dalam jangka waktu 5 tahun angkanya fluktuatif dengan kondisi tahun terakhir sebanyak 17.668 orang. Angka tersebut menurun dibandingkan kondisi tahun 2012 yang sebanyak 19.228 orang. Wilayah dengan jumlah PMKS tertinggi pada tahun 2013 adalah Kecamatan Tegal Timur dan yang paling rendah adalah Kecamatan Margadana.

Tabel 2.57
Jumlah dan Sebaran PMKS Berdasarkan Kecamatan di Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Kecamatan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Tegal Barat	5.305	5.327	5.950	5.420	4.800
2.	Tegal Timur	6.488	6.685	7.110	6.630	5.990
3.	Tegal Selatan	4.169	4.738	4.431	4.260	4.245
4.	Margadana	2.856	2.939	3.129	2.918	2.633
5.	Total Kota Tegal	18.818	19.719	20.620	19.228	17.6698

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Tegal, 2013

Keberadaan PMKS di Kota Tegal tidak bisa dihindari, mengingat letak Kota Tegal yang berada di Pantura, dimana mobilitas manusia sangat tinggi. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk PMKS dilakukan secara selektif, mengingat jumlah PMKS yang banyak. Bantuan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan jumlah PMKS Tahun 2013.

Dua Indikator program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yaitu 1) Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan 2) Persentase (%) PMKS skala Kab./Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain. merupakan indikator capaian SPM bidang sosial. Keduanya telah tercapai pada tahun 2013, tetapi hal ini masih perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyak PMKS yang memerlukan bantuan.

Bencana alam merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak bagi manusia. Bencana alam dapat berupa banjir, rob, gempa bumi, kekeringan, angin puting beliung. Dalam upaya menangani bencana alam pemerintah menyiapkan bantuan dan sarana-prasarana yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Tahun 2013 di Kota Tegal sebesar 100% korban bencana skala yang mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Jumlah penyandang cacat di Kota Tegal pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Sedangkan jumlah penyandang cacat dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan. Kecacatan bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya bawaan lahir, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan juga pola hidup

yang tidak sehat. Perkembangan jumlah penyandang cacat Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Jumlah Penyandang Cacat di Kota Tegal Tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis Kecacatan					
		Tubuh	Tuna Netra	Mental	Tuna Rungu	Ganda	Jumlah
1	Tegal Selatan	130	96	193	71	10	500
2	Tegal Timur	93	41	91	26	24	275
3	Tegal Barat	92	68	133	51	35	379
4	Margadana	116	69	159	60	14	418
	Jumlah 2013	431	274	576	208	83	1.572
	Jumlah 2012	478	154	738	186	127	1.683
	Jumlah 2011	229	86	502	267	247	1.331
	Jumlah 2010	353	123	518	174	110	1.278

Sumber : Dinsosnakertrans, 2013

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial di Kota Tegal sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 31 orang dimana 6 orang telah memperoleh jaminan sosial. Sementara jumlah lanjut usia tidak potensial yang terdata sebanyak 35 orang dan seluruhnya telah memperoleh jaminan sosial. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Tegal baru sebesar 62,12%.

Penanggulangan permasalahan PMKS memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, pemenuhan sarana dan prasarana ini telah menjadi target dari SPM bidang Sosial. Persentase (%) Panti Sosial skala Kab./Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial ditargetkan sebesar 80% pada tahun 2015. Jumlah Panti sosial di Kota Tegal tahun 2013 sebanyak 5 Panti Sosial, satu panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 4 panti lainnya dikelola oleh yayasan. Panti Suko Mulyo merupakan panti rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Tengah. Sementara empat panti lainnya merupakan panti asuhan anak yatim piatu, panti tersebut yaitu, Panti Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Aisyiah, Panti Asuhan Welas Asih dan Panti Asuhan Ar

Rahman. Seluruh panti yang ada di Kota Tegal telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan.

Pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial harus terus dilakukan. Hal ini agar mereka tidak kembali menjadi penyandang masalah sosial. Tahun 2013 sebanyak 1.035 eks penyandang masalah sosial telah dibina, pada umumnya mereka mengalami kesulitan untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungannya.

Upaya penanggulangan PMKS dilakukan dengan dengan berbagai cara, selain melengkapi sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penanggulangan PMKS diperlukan juga upaya untuk membangun organisasi dan personil bisa melakukan penanganan PMKS. Sampai dengan tahun 2013, WKSBM di Kota Tegal baru terdapat di dua kelurahan yaitu di Kelurahan Panggung dan Kelurahan Slerok.

Personil yang terlibat melakukan penanganan PMKS disebut PSKS (Pekerja Sukarela Kesejahteraan Sosial). Sampai dengan tahun 2013 jumlah PSKS di Kota Tegal sebanyak 59. Namun seringkali PSKS ini tidak aktif dalam upaya penanggulangan PMKS, untuk itu perlu adanya keterlibatan pemerintah untuk mengaktifkan PSKS. Capaian kinerja urusan sosial Kota Tegal tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Tegal Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	8,47	12,56	7,56	7,56	8,79
2	Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100
3	Persentase (%) PMKS skala Kab./Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	%	0	0	0	70	80
4	Persentase (%) korban	%	0	0	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
	bencana skala Kab./Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat						
5	Persentase (%) korban bencana skala Kab./Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	0	0	0	0
6	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	62,12	62,12	62,12	62,12	62,12
7	Persentase (%) Panti Sosial skala Kab./Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
8	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	0	0	0
9	Persentase (%) PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	%	75,4	57,3	48,9	47,1	42,4

Sumber : Disnakertransos Kota Tegal, Tahun 2013

14. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kota Tegal mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tegal. Indikator tersebut antara lain

ada dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan serta indikator pembangunan ketenagakerjaan lainnya. Pembangunan dalam urusan ketenagakerjaan bertujuan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing.

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) merupakan salah satu indikator SPM Ketenagakerjaan, memiliki target sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun 2016. Namun sampai dengan tahun 2013 baru tercapai sebesar 5%. Penyelesaian kasus perburuhan dengan Perjanjian Bersama akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Banyaknya kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama mengindikasikan bahwa komunikasi antara pekerja dan pengusaha berjalan dengan baik.

Program Jamsostek merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek juga menjadi salah satu indikator SPM Ketenagakerjaan yang harus dicapai pada tahun 2016 dengan target nasional sebesar 50%. Walaupun target SPM ini sudah tercapai Pemerintah Kota Tegal harus terus meningkatkan kepesertaan Jamsostek sehingga bisa memberikan perlindungan yang lebih luas.

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Kota Tegal selama periode Tahun 2009–2013 terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2009 rasio KHL terhadap UMK baru sebesar 87,12%, maka pada tahun 2013 rasionya sudah mampu mencapai 100,57%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Rasio Rata-rata Upah Minimum Kota
Dibanding KHL di Kota Tegal Tahun 2009–2013

No	Tahun	UMK (Rp/bln/orang)	KHL (Rp/bln/orang)	Rasio (%)
1	2009	611.000	701.336	87,12
2	2010	700.000	798.000	87,72
3	2011	735.000	802.411	91,60
4	2012	795.000	826.975	96,13
5	2013	860.000	855.120	100,57

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Tegal, Tahun 2013

Setiap perusahaan yang menjalankan usaha harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan ini bertujuan untuk

mengetahui perusahaan tersebut telah menjalani semua ketentuan yang berlaku. Selain itu peralatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang harus dilakukan pengujian secara berkala. Semua ini bertujuan menjaga keselamatan pekerja. Capaian dari Indikator Besaran Pemeriksaan Perusahaan dan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan memang sudah melebihi target SPM Ketenagakerjaan. Namun capaian dua indikator ini masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keselamatan pekerja.

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja, hal ini untuk menunjukkan seberapa besar tenaga kerja yang bekerja. Masih adanya sejumlah angkatan kerja yang tidak bekerja menimbulkan angka pengangguran.

Perselisihan perusahaan dan pekerja terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Semakin tinggi angka perselisihan antara perusahaan dan pekerja bisa menimbulkan efek negatif bagi upaya pemerintah menarik investor. Oleh karena itu pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan antara pengusaha dengan pekerja secara musyawarah. Capaian pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)		9,95	19,13	28,46	14,51
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	51,28	66,70	66,70	50,00	57,10
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0	40,00	33,30	40,00	33,30
4.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	15,74	14,22	7,14	8,49	9,25
5.	Keselamatan dan Perlindungan (%)	15	20	25	30	35
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan	68,18	20,00	56,52	21,05	5,00

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	Perjanjian Bersama (PB) (%)					
7.	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	0	0	64,66	52,38	57,24
8.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0	0	61,66	73,83	83,77
9.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	0	0	0	0	94,19
10.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	64,57	70,35	70,20	63,51	71,04
11.	Rasio penduduk yang bekerja	84,3	85,8	92,9	91,5	-
12.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0,00195	0
13.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	48,701	50,18	49,62	44,62	0

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Tegal, Tahun 2013

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UKM di Kota Tegal baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tegal menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2009 perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM mencapai 52,31%, dan di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 61,13%.

Untuk menunjang kemajuan koperasi dan UKM, UKM non BPR/LKM UKM dan BPR/LKM sangat diperlukan. Dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013), jumlah BPR tetap, yaitu sebanyak 3 unit. Sementara itu jumlah UKM non BPR bertambah, dari sebanyak 15 unit pada tahun 2009 menjadi sejumlah 38 unit pada tahun 2013.

Tingkat keaktifan koperasi di Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 semakin baik, terlihat dari peningkatan persentase koperasi aktif dari sebesar 70,43% pada tahun 2009 menjadi sebesar 71,64% pada tahun 2013. Dalam kurun waktu tahun 2009-2013 terjadi peningkatan persentase koperasi kategori sehat, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan. Tahun 2010 persentase koperasi sehat sebesar 50% dan tahun 2013 persentase koperasi sehat meningkat menjadi 92,86%.

Perkembangan capaian kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UKM (%)	52,31	55,23	59,52	60,52	61,13
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	15	13	37	38	38
3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	2	2	4	4	3
4.	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	61	84	212	156	106
5.	Jumlah koperasi	186	186	192	193	194
6.	Persentase koperasi aktif (%)	70,43	71,05	71,05	71,35	71,64
7.	Persentase koperasi sehat (%)	52,63	50	62,5	73,17	92,86
8.	Penyerapan tenaga kerja di koperasi (orang)	287	385	588	588	606
9.	Asset Koperasi (juta Rp)	71,57	82,74	106,58	133,17	200,15

Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kota Tegal, 2013

16. Penanaman Modal Daerah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam PP Nomor 38 tahun 2007, Pemerintah Kota

Tegal harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Tegal sama dengan kewenangan yang diberikan kepada kabupaten/kota lainnya. Kewenangan tersebut antara lain penyelenggaraan kebijakan pengembangan penanaman modal; koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal; melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal; pelaksanaan pelayanan penanaman modal meliputi pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Tegal cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa. Potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri relatif tertutup untuk industri besar karena keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Tegal wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Realisasi investasi di Kota Tegal menunjukkan kecenderungan meningkat. Total Investasi di Kota Tegal tahun 2013 sebesar Rp. 1,265,26 triliun meningkat 31% dibandingkan tahun 2012. Total Investasi tahun 2012 sebesar Rp.967,29 milyar. Jumlah investor dan nilai investasi di Kota Tegal hanya investor skala lokal dan nasional, di Kota Tegal tidak terdapat investor asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Degan demikian jumlah investor dan nilai investasi hanya merupakan investor dan nilai investasi skala lokal dan nasional.

Capaian indikator penanaman modal di Kota Tegal selama kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kota Tegal
Tahun 2009 – 2013

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Kali	1	1	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2009	2010	2011	2012	2013
2.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	Kegiatan	3	2	2	2	2
3.	Jumlah investor berskala nasional	Investor	490	419	652	618	520
4.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp. Milyar)	Rp. Milyar	408,62	416,20	643,93	967,29	1.265,26
5.	Jumlah tenaga kerja yang terserap.	Orang	1.715	1.467	2.282	2.163	1.820
6.	Terselenggaranya pelayanan perIzinan dan nonperIzinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftapran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	%			83,33	83,33	83,33
7.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	-	-	1	1	1
8.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik	%	-	-	75%	75%	75%

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2009	2010	2011	2012	2013
	(SPIPISE)						
9.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	Kali	1	1	1	1	1
10.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah	%	0	2%	55%	50%	31%
11.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Bid. Usaha Unggulan	3	3	3	3	3

Sumber: Profil BP2T Kota Tegal, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan penanaman modal sudah dilaksanakan dengan baik, dengan capaian indikator yang relatif baik. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanaman modal menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sebenarnya dengan kondisi yang ada di Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal mampu melaksanakan atau mencapai target lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam SPM bidang penanaman modal.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu. Pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BP2T. Kinerja BP2T dalam memberikan pelayanan perizinan selama kurun waktu 2009 – 2013 terlihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Realisasi Penerbitan Izin pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Jenis Layanan perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Izin Mendirikan Bangunan	681	730	828	798	1.169
2.	Izin Gangguan (HO)	591	703	842	713	682
3.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	701	413	742	718	610
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan	490	419	652	618	520

No	Jenis Layanan	Jumlah Izin yang diterbitkan				
5.	Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI)	49	34	34	22	24
6.	Izin Pemakaman Dan Perabuan Jenazah	227	189	164	231	268
7.	Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemkot Tegal	353	308	337	332	334
8.	Izin Pemakaian Kios	18	9	43	56	12
9.	Izin Reklame	74	107	18	209	120
10.	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Dan Penyosohan Beras	14	4	1	0	8
11.	Izin Usaha Pariwisata	64	78	42	39	26
12.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	37	71	26	32	55
13.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Izin Bursa Kerja Khusus	0	0	6	7	10
14.	Izin Tenaga Kesehatan	150	129	142	3	11
15.	Izin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat/Apotik	7	1	1	3	3
16.	Izin Sarana Kesehatan	120	106	140	98	109
17.	Izin / Rekomendasi Prinsip	22	22	12	12	24
18.	Izin Trayek/ Operasi Angkutan Umum	97	32	30	28	64
19.	Izin Insidental Angkutan umum	194	163	120	61	36
	Layanan Non Perizinan					
20.	Sertifikat Laik Sehat	120	106	140	98	109
21.	Rekomendasi Pemakaian Alun-Alun	6	11	24	8	15
22.	Rekomendasi Keramaian/Tontonan	8	17	18	9	21
	Jumlah	3.932	3.573	4.386	4.032	4.179

Sumber: Profil BP2T Kota Tegal, 2013.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dinamika usaha masyarakat di Kota Tegal cukup baik. Hal ini dibuktikan bahwa banyak masyarakat Kota Tegal yang mendirikan perusahaan setiap tahunnya. Demikian juga yang berusaha di bidang sarana kesehatan menunjukkan peningkatan. Dinamika seperti ini harus dipertahankan dengan selalu berusaha menciptakan iklim berusaha yang nyaman dan aman.

17. Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut. Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat Internasional.

Perhatian pemerintah dalam rangka pelestarian cagar budaya di Kota Tegal semakin meningkat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah benda, situs maupun kawasan yang telah ditetapkan sebagai BCB di Kota Tegal. Cagar budaya yang terdapat di Kota Tegal sebagian besar berbentuk bangunan dengan gaya arsitektur Belanda. Beberapa bangunan yang masih terpelihara hingga saat ini antara lain: Stasiun Kereta Api Tegal, Gedung DPRD, Pendopo dan Rumah Dinas Walikota, Kantor Pos Besar Tegal, Mako Lanal, Pasar Pagi, Gedung Birao, Gereja Katolik Paroki Hati Kudus, Menara Air Pancasila, Klenteng Tek Hay Kiong, Masjid Agung Tegal, dan sebagian rumah tinggal yang terletak di Jalan Veteran A. Yani dan Jalan Sudirman beserta beberapa kawasan lainnya.

Kota Tegal memiliki jenis kebudayaan yang sangat beragam. Keberadaan beberapa etnis yang tinggal di Kota Tegal menjadi penyebab berkembangnya kebudayaan tersebut. Terdapat tiga etnis besar yang tinggal di Kota Tegal yaitu etnis Pribumi, Tionghoa serta etnis Arab. Masing-masing etnis memiliki beberapa bentuk kesenian dan tradisi yang hingga saat ini masih banyak digelar dan dilaksanakan pada pegelaran maupun event tertentu. Etnis pribumi memiliki beberapa jenis kebudayaan, antara lain seni tari topeng yaitu topeng endel, seni tarik suara yaitu balo-balo, dan seni mistis sintren serta jaran kepang. Adapun kebudayaan etnis Tionghoa dan Arab lebih banyak berbentuk tradisi, seperti Gotong Toa Pe Kong, Haul Habaib, dan Pawai Rolasan. Berkembangnya kesenian di Kota Tegal tidak terlepas dari keberadaan kelompok kesenian yang ada. Hingga tahun 2013, jumlah kelompok kesenian di Kota Tegal mencapai 144 kelompok seni terdiri dari 14 kelompok seni tradisi, 28 grup band, 12 grup dangdut, 7 kelompok keroncong, 7 kelompok karawitan, 1 kelompok tari jaipong, 2 kelompok ketoprak, 6 kelompok teater, 51 kelompok kasidah/ samrah, 9 sanggar tari, 7 kelompok pedhalangan.

Pemerintah Kota Tegal memiliki perhatian yang cukup tinggi dalam pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari kondisi penunjang pengembangan kebudayaan itu sendiri yang sudah banyak tersedia di Kota Tegal, baik dari SDM, sarana prasarana, maupun lembaga penanung pegiat kebudayaan. Kreativitas dan kepedulian masyarakat terhadap pengembangan kesenian sangatlah tinggi terlihat dari banyaknya jumlah kelompok kesenian yang terbentuk di Kota Tegal dan jumlah pagelaran seni yang digelar setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan. Animo masyarakat yang tinggi terhadap kesenian dan kebudayaan mendapatkan ditangkap pemerintah dengan pembangunan sarana prasarana kesenian yang hingga tahun 2013 berjumlah 6 unit.

Diperbandingkan dengan target SPM, capaian pembangunan urusan kebudayaan di Kota Tegal sudah cukup baik. Terlihat dari 7 indikator SPM, sebanyak 5 sudah tercapai dan 2 indikator masih belum tercapai. Kedua indikator SPM yang belum tercapai adalah cakupan kajian seni dan cakupan fasilitasi seni. Misi kesenian yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata antara lain pengiriman duta wisata Kota Tegal, pengiriman duta seni dalam kegiatan pementasan di TMII, dan pengiriman duta seni dalam kegiatan pementasan seni dalam kegiatan karnaval di Jawa Tengah. Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Tegal dalam rangka fasilitasi akses kesenian adalah Gedung Kesenian Daerah dan Taman Budaya Kota Tegal yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan beberapa event kebudayaan dan kesenian di Kota Tegal. Perkembangan kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	NA	NA	18	18	37
2.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	11	9	8	10
3.	Misi Kesenian	NA	NA	100	100	100
4.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	4	4	6
5.	Jumlah grup	NA	105	104	144	144

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	kesenian					
6.	Cakupan Kajian Seni	NA	NA	6,67	6,67	13,33
7.	Cakupan Fasilitasi Seni	NA	NA	15	15	30
8.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	NA	NA	50	50	50
9.	Cakupan Organisasi seni	NA	NA	34	34	34
10.	Cakupan Tempat umum	NA	NA	100	100	100
11.	Cakupan Gelar Seni	NA	NA	100	100	100

Sumber: Dinporabudpar Kota Tegal, Tahun 2013

18. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda menurut UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan Negara. Jenis kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pelayanan kepemudaan sebagaimana tercantum dalam UU No 40 Tahun 2009 ditujukan untuk menumbuhkan budaya prestasi

diantara para pemuda, termasuk didalamnya prestasi dalam bidang olahraga. Fasilitas keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga, pembangunan Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) dan gedung olahraga serta Lapangan olahraga. Tercatat, sebanyak 13 jenis lapangan olahraga telah terbangun dan tersedia dalam rangka meningkatkan kualitas keolahragaan masyarakat Kota Tegal. Ketigabelas jenis lapangan olahraga tersebut adalah, Gelanggang/Balai Remaja, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Basket, Lapangan Volley, Lapangan Bulu Tangkis, Kolam Renang, Lapangan Tennis, Gedung Olahraga, Taman Olahraga, Lapangan Menembak, Sasana Tinju, Tempat Billiard, dan Arena Panjat Tebing. Pemerintah juga melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka menjaring SDM keolahragaan yang baik dan berprestasi. Sebanyak 3 cabang olahraga unggulan yang menjadi andalan Kota Tegal adalah Pencak Silat, Renang, dan Tennis Lapangan. Perkembangan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	7	13	6	3
2.	Jumlah organisasi pemuda	NA	NA	20	20	20
3.	Jumlah organisasi olahraga	NA	NA	24	26	26
4.	Jumlah kegiatan olahraga	5	4	4	4	5
5.	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	3	3	3	3	3
6.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	4	5	6	6	6
7.	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	2	2
8.	Lapangan olahraga	NA	NA	NA	132	132

Sumber: Dinporabudpar Kota Tegal, Tahun 2013

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kondusivitas Wilayah

Letak Kota Tegal berada di jalur utama Pantai Utara Jawa Tengah termasuk rawan terhadap gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan penyakit masyarakat (Pekat) karena mudahnya akses transportasi melalui angkutan umum, dan kereta api dan akses dari pelabuhan laut (penyelundupan dan beredarnya barang illegal). Kondisi ketertiban umum dalam masyarakat selama kurun waktu 2009-2013 secara umum menunjukkan kondisi yang baik, tertib dan aman. Hal ini diketahui dari banyaknya kasus kriminalitas dari tahun 2009 – 2013 antara 106 – 224 kasus. Sedangkan rata-rata penanganan laporan kasus kriminal yang dapat diselesaikan rata-rata masih rendah yaitu 5,27 – 11,60 % per tahun. Hal ini perlu semakin ditingkatkan koordinasi dan kerjasama anatar Polri, Satpol PP dan swdaya masyarakat di tahun-tahun mendatang, melalui intensitas patroli polisi dan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara swadaya. Faktor-faktor yang mendukung dalam meningkatkan keamanan lingkungan antara lain rata-rata Pos Kamling setiap kelurahan (sebanyak 7 – 8 unit) dan dukungan banyaknya petugas Linmas cukup baik serta cakupan Patroli Polisi merata di 4 wilayah kecamatan.

Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat gangguan antara lain unjuk rasa, jumlah penyalahgunaan Napza dari tahun 2009 – 2013 rata-rata antara 13 kasus – 26 kasus per tahun. Sedangkan tindak kejahatan/ kriminalitas paling banyak adalah pencurian dan pencurian dengan kekerasan namun masih dapat dikendalikan oleh Polisi dan aparat keamanan di kelurahan sehingga tidak sampai menimbulkan gangguan yang bersifat anarkhis. Gambaran upaya pembinaan ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah kota bersama instansi keamanan terkait, mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan dan pencegahan/penanggulangan penyakit sosial masyarakat (Pekat), penyalah gunaan Narkoba di masing-masing kelurahan.

Gambaran capaian kinerja terkait dengan kondusivitas daerah Kota Tegal dari tahun 2009 – 2013 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Kondusivitas Daerah Kota Tegal
Tahunan 2009 - 2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka kriminalitas (kasus)	106	224	114	137	145
2.	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	7,78	11,6	5,05	5,01	5,27
3.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (hari)	3	3	3	3	3
4.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	5,29	4,19	3,37	2,78	2,65
5.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Tegal	101,87	117,46	93,74	108,22	108,22
6.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	80,09	65,12	44,55	42,37	42,14
7.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Tegal	0,8	0,65	0,45	0,42	0,42
8.	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	7,19	7,3	7,3	8,15	8,15
9.	Rasio petugas Linmas di Kota Tegal (per 10.000 penduduk)	1,02	1,17	0,94	1,08	1,08
10.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Tegal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumberdata : Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal, 2013

b. Kondisi Politik

Gambaran situasi dan kondisi politik Kota Tegal menunjukkan situasi yang stabil, hal ini dapat digambarkan pada pelaksanaan pendidikan politik dan partisipasi politik dalam pelaksanaan

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, Pilkada Kota Tegal Tahun 2013, Pemilu Legislatif 9 Mei 2014 yang dapat dilaksanakan secara tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan radikal dan anarkis. Jumlah pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (tahun 2013) sebanyak 200.470 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 108.762 sehingga tingkat partisipasi masyarakat sebesar 54,25%. Jumlah pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Walikota Tegal (tahun 2013) sebanyak 196.339 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 118.421 sehingga tingkat partisipasi masyarakat sebesar 60,31%. Jumlah pemilih pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif (tahun 2014) sebanyak 197.958 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 137.199 sehingga tingkat partisipasi masyarakat sebesar 69,31%. Sedangkan jumlah pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 sebanyak 203.366 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 136.535 sehingga tingkat partisipasi masyarakat sebesar 67,14%.

Peningkatan kesadaran politik, kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui program pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, baik melalui sekolah dan OKP bagi pemilih pemula, melalui kelembagaan di tingkat kelurahan untuk pendidikan politik bagi perempuan dan kelompok difabel mendapatkan perhatian. Pentingnya peningkatan kesadaran politik, kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui fasilitasi temu karya, dialog dan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar terwujud toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan tentunya tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Kota Tegal.

c. Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Pelaksanaan program-program pembinaan dan pengembangan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini diketahui dari banyaknya kegiatan pendidikan politik, peningkatan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara dari tahun 2009-2013 dilaksanakan di tiap kelurahan dengan melibatkan lembaga-lembaga kelurahan (LPMK dan Tim Penggerak

PKK serta partisipasi masyarakat melalui RT dan RW). Sedangkan upaya meningkatkan potensi LSM, Ormas dan OKP dalam meningkatkan kelembagaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kerukunan, toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan kerukunan dilaksanakan bersama melalui dialog antar kelompok, antar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan bagi OKP sangat strategis dalam rangka pencegahan dini dan mitigasi bencana, terutama banjir, ROB dan bahaya kebakaran di kawasan pemukiman padat sehingga tumbuhnya potensi keswadayaan dalam pencegahan dan penanganan bencana daalam masyarakat di Kota Tegal melaui pengembangan kelembagaan di kelurahan dan kecamatan rawan bencana.

Gambaran capaian kinerja terkait dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP (orang)	100	100	100	100	100
2	Pembinaan politik daerah (kegiatan)	4	4	4	4	4

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas, 2013

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

a. Hukum dan HAM

Pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penetapan Perda dari tahun 2009 – 2013 rata-rata ditetapkan antara 5 – 8 buah termasuk perubahan Perda agar sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru. Penindakan terhadap pelanggar Perda dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Polri telah diselesaikan dengan cukup baik.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan penyuluhan hukum di 27 kelurahan dan pembentukan Kelurahan Sadar Hukum. Disamping itu, guna penguatan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2011-2014, telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang hukum dan HAM di tingkat kelurahan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good governance*) dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, telah dilaksanakan melalui : (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan penerbitan perijinan dan non perijinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; (2) publikasi dokumen yang dapat diakses melalui *website*. www.tegalkota.go.id dan (3) proses pengadaan barang dan jasa melalui *website* LPSE.

Selama 5 tahun, DPRD Kota Tegal telah menyusun dan menetapkan Perda sebanyak 35 buah, dengan produktivitas yang berbeda setiap tahunnya. Adapun Raperda yang disetujui oleh DPRD setiap tahunnya mencapai angka 100%.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Sub Bidang Hukum dan HAM

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	PERDA yang ditetapkan	8	7	8	7	5
2.	RAPERDA yang disetujui DPRD (%)	100	100	100	100	100
3.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26 100 %	28 100 %	26 100%	22 100%	22 100%

Sumber: Setda Kota Tegal, 2013

b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kota Tegal semakin ditingkatkan, terutama dalam mewujudkan

kepemerintahan yang amanah dan pelayanan kepada masyarakat, mencakup prioritas pelayanan sebagai berikut :

- (1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui penataan kelembagaan pada 60 SKPD Kota Tegal;
- (2) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur pada tahun 2013 sebanyak 311 orang dan sebanyak 12,9% mengikuti Diklat Teknik Fungsional dan Kepemimpinan, baik yang diselenggarakan di Kota Tegal maupun di Provinsi Jawa Tengah dan Pusat;
- (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (4) Penataan perundang-undangan, dilaksanakan dari tahun 2009 – 2013 telah diselesaikan penyusunan sebanyak 33 Perda dan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota (Perwal).
- (5) Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan SKPD yang dilaksanakan secara periodik, antara lain : RSUD; pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan terpadu.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan SKPD Kota Tegal semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website *www.tegalkota.go.id* yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen, antara lain: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Laporan Pembangunan (SIMLABA), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Masyarakat Miskin (SIMASKIN), dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta sistem informasi penunjang lainnya.

Untuk mewujudkan pelayanan perijinan Terpadu yang disertai pelimpahan kewenangan meliputi pelayanan perijinan dan non perizinan sebanyak 43 jenis perizinan dan non perizinan dan 3 jenis izin penanaman modal.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Administrasi Pemerintahan Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	2	2	7	9	4
2.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	Ada	ada	ada
3.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	17	17	17	18	18
4.	Keberadaan E-procurement	Belu m ada	Ada	ada	ada	ada
5.	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada	Ada	ada	ada	ada
6.	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ¹ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	belum	belu m	belu m	ada	ada
7.	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %	100%	100%

Sumber: Setda Kota Tegal, 2014

c. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah (KAD) dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan teknologi,

promosi daerah dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal meliputi kerjasama daerah dengan kabupaten/kota (kerjasama Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang (Bergasmalang), Kerjasama tujuh kabupaten/kota (Sapta Mitra Pantura/ sampan) meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang.

d. Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah aparatur pemerintah Kota Tegal tahun 2013 sebanyak 4.596 orang sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pendukung dan budaya organisasi. Gambaran kondisi aparatur pemerintah Kota Tegal dari tahun 2009–2013, sebagai berikut :

Tabel 2.71
Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
A.	Pendidikan					
1.	Magister (S2)	45	62	71	94	98
2.	Sarjana S1/ Diploma IV	1.758	1.991	2.285	2.267	2.326
3.	Diploma III	493	552	612	571	546
4.	Diploma II	806	814	566	502	428
5.	Diploma I	39	34	32	20	21
6.	SLTA/ sederajad	1.117	1.058	999	960	928
7.	SLTP/ sederajad	203	202	188	176	154
8.	SD/ sederajad	152	128	106	96	95
	Jumlah (orang)	4.613	4.841	4.859	4.686	4.596
B.	Golongan					
1.	Golongan IV	1.382	1.465	1.481	1.468	1.438
2.	Golongan III	1.875	2.034	2.068	2.029	2.026
3.	Golongan II	1.235	1.206	1.180	1.078	1.019
4.	Golongan I	121	136	130	111	113
	Jumlah (orang)	4.613	4.841	4.859	4.686	4.596
C.	Struktural					
1.	Eselon II	22	17	18	20	21

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
2.	Eselon III	91	97	92	93	98
3.	Eselon IV	286	285	278	279	294
	Jumlah (orang)	399	399	388	392	413

Sumberdata : Laporan LKPJ dan AMJ Tahun 2009 – 2013.

Jumlah sumberdaya aparatur pemerintah Kota Tegal dari tahun 2009 – 2013 menunjukkan kecenderungan fluktuatif yaitu sebantak 4.613 orang meningkat menjadi 4.859 orang pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 menjadi sebanyak 4.596 orang. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur maka kapasitas, kapabilitas dan pendidikan aparatur dari tahun ke tahun semakin baik. Pada tahun 2013 diketahui sebagai besar aparat pemerintah Kota Tegal berpendidikan tinggi, baik Sarjana (S-1 dan D-IV) sebanyak 2.326 orang (50,61%) dan Magister (S-2) sebanyak 98 orang (2,13%) dan hanya sebagian kecil berpendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 154 orang (3,35%) dan SD/ sederajat sebanyak 95 orang (2,05%)

Sedangkan berdasarkan kepangkatan dan golongan diketahui sebagai besar aparatur pemerintah Kota Tegal menduduki Golongan III sebanyak 2.026 orang (44,08%) dan Golongan IV sebanyak 1.438 orang (31,09%) dan hanya sebagian kecil termasuk Golongan II 1.019 orang (22,17%) dan Golongan I sebanyak 113 orang (2,45 %).

Jumlah aparatur yang menduduki jabatan struktural dari tahun 2009 – 2013 menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 399 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 392 orang pada tahun 20012 dan tahun 2013 sebanyak 413 orang.

Tabel 2.72
Gambaran Kepegawaian Kota Tegal Tahun 2009-2014

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Ratio PNS terhadap penduduk	0,01 7	0,02 0	0,020	0,01 9	0,018
2.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional	120	223	347	314	311
3.	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis	8,2%	7,9%	11,4%	11,1 8%	12,9 %

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Fungsional dan kepemimpinan					

Sumber: BKD Kota Tegal, 2013

e. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab dan kreatif mencari sumber-sumber pendanaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas maka pendapatan daerah mengandalkan dua sumber utama yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan belanja pegawai.

Peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan kebijakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2011 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tahun 2012 dan 2013 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun mendatang diharapkan memperoleh WTP kembali. Gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Tegal tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat
2.	Belanja Publik terhadap DAU	112,67	99,77	116,61	91,55	103,49
3.	Belanja Langsung terhadap total APBD	55,32	46,51	49,54	48,06	49,34
4.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	21,37	21,98	21,41	24,07	24,36
5.	Rasio SILPA thdp total pendapatan	13,48	12,06	11,96	11,02	17,53
6.	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	93,13	90,41	91,54	91,98	86,57
7.	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	121,26	106,90	103,05	110,95	109,83
8.	Peningkatan PAD (%)	30,58	11,54	15,71	33,62	12,58
9.	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan (%)	100,34	99,18	100,44	100,61	99,75
10.	Belanja untuk pelayanan dasar (%)	66,19	66,47	69,01	73,78	73,16
11.	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan (%)	56,74	53,78	55,64	61,72	59,46

Sumber: DPPKAD Kota Tegal, 2013

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang **Pengelolaan Barang Milik Daerah** dan berpedoman Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah mendukung peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, pemutakhiran data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

f. Pengawasan

Peningkatan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat agar kinerja pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan (obrik) terdiri dari 60 SKPD yaitu badan/dinas dan kantor sebanyak 29 unit, kecamatan sebanyak 4 unit dan kelurahan sebanyak 27 unit.

Capaian kinerja pengawasan selama tahun 2009-2013 dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan di Kota Tegal sebanyak 96 LHP. Masukan dan pengaduan masyarakat mendapatkan apresiasi oleh Inspektorat agar upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif. Dalam rangka penanganan dan pemeriksaan kasus dari pengaduan masyarakat dari tahun 2009 – 2013, rata-rata per tahun sebanyak 16 - 30 kasus dan laporan yang didukung data yang jelas maka semua (100%) telah dapat ditindaklanjuti dan ditangani, hal ini menunjukkan dalam perwujudan dari pelayanan prima.

Tabel 2.74

Capaian Sub Bidang Pengawasan di Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (laporan)	96	96	96	96	96
	Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (orang)	16	16	16	16	15
	Jumlah LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat (kasus)	30	27	15	16	19

Sumber: Inspektorat Kota Tegal, 2013

g. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah Kota Tegal, terutama melalui : (1) pelayanan perijinan terpadu sejak tahun 2012 dan semakin ditingkatkan; (2) keberadaan lembaga pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) mulai tahun 2012; (3) pelayanan KTP elektronik tahun 2012; (4) pelayanan unit pengaduan masyarakat; (4) keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Pemerintah Kota Tegal sejak 2011 dan sekarang 24 SKPD telah memiliki website yang dapat diakses masyarakat pada umumnya. Selain itu untuk memberikan peran kepada masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan publik, Pemerintah Kota Tegal setiap tahunnya selalu melakukan survey kepuasan dengan kegiatan

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit-unit pelayanan publik.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Sub Bidang Reformasi Birokrasi Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Penataan SKPD (unit)	60	60	60	60	60
2.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah (urusan).	12	12	14	14	14
4.	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat

Sumber: Setda Kota Tegal, 2013

21. Ketahanan Pangan

Pembangunan bidang pangan menjadi salah satu komitmen pemerintah Indonesia di tingkat internasional dan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pangan menjadi salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai, yaitu tujuan 1 menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi tahun 1990. Berdasarkan undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara itu ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,

yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan terkait tiga hal, meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan konsumsi pangan dan gizi.

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein perkapita, penanganan daerah rawan pangan. Capaian Ketersediaan pangan utama di Kota Tegal dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 3257 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 3380 ton pada tahun 2013. Ketersediaan energi perkapita meningkat dari tahun 2009 sebesar 90,1%, pada tahun 2013 menjadi sebesar 92,5% dari standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004. Ketersediaan protein perkapita juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 90,1% pada tahun 2009 menjadi sebesar 92,5% dari standar WNPG tahun 2004 pada tahun 2013. Capaian kinerja Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita tersebut lebih tinggi dari target SPM tahun 2015 yaitu sebesar 90% pada tahun 2015. Dalam rangka penanganan daerah rawan pangan, Persentase cadangan pangan kabupaten/kota terhadap standar 100 ton untuk cadangan pangan kota sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 80%, telah melebihi target SPM sebesar 60% pada tahun 2015.

Produksi bahan pangan utama di Kota Tegal yang terdiri dari padi, susu, daging dan telur sejak tahun 2009-2014 kondisinya berbeda-beda. Produksi padi, susu, dan telur ayam mengalami tren yang menurun, sedangkan untuk komoditi daging (sapi dan kambing) serta telur itik kondisinya meningkat.

Tabel 2.76
Produksi Bahan Pangan Utama di Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Produk Pangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Padi (ton)	6.600	8.808	6.577	4.589	4.839
2.	Susu (liter)	74.261	74.261	103.937	81.038	59.668
3.	Daging (Kg)					
	Sapi	9.747	39.270	33.660	31.293	48.222

	Kambing	229.264	202.650	197.655	202.800	216.810
4.	Telur (butir)					
	Itik	1.566.514	1.741.992	1.588.427	1.846.359	1.856.208
	Ayam	133.485	140.705	140.614	49.279	54.868

Sumber: Bapermas PP dan KB Kota Tegal, 2013

Akses dan distribusi pangan dapat diketahui dari capaian indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, dan Stabilitas harga dan pasokan pangan. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar 90% pada tahun 2009 menjadi sebesar 95% pada tahun 2013. Stabilitas harga dan pasokan pangan di Kota Tegal juga menunjukkan kinerja yang baik, yaitu sebesar 90% pada tahun 2009 menjadi sebesar 91% pada tahun 2013. Stabilitas harga dan pasokan pangan menunjukkan kinerja yang baik, pada tahun 2013 telah mencapai 91%, lebih tinggi dari target SPM sebesar 90% pada tahun 2015.

Berkaitan dengan konsumsi pangan, kinerja dapat dilihat dari pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH menunjukkan tingkat keberagaman bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pada tahun 2013 capaian skor PPH sebesar 85,2%, lebih rendah dari target SPM sebesar 90% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang belum terwujud secara optimal. Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan adalah pola konsumsi masyarakat yang cenderung tetap, tidak mau beralih dari beras ke bahan pangan lainnya.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Banyaknya Regulasi ketahanan pangan		-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan pangan utama	ton	3257	3307	3365	3346	3380

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2009	2010	2011	2012	2013
3.	Ketersediaan energi perkapita	%	90,1	90,6	91,3	91,8	92,5
4.	Ketersediaan protein perkapita	%	90,1	90,6	91,3	91,8	92,5
5.	Penguatan cadangan pangan	%	60	60	60	65	80
6.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	90	90	90	91,5	95
7.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	90	90	90,5	91
8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80	80,2	81,2	84,4	85,2
9.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	83	85	87	87,8	87,5
10	Penanganan daerah rawan pangan	%	90	90	100	100	100
11	Jumlah cadangan pangan kota	ton	410	435	520	582	595
12	Persentase kecamatan bebas rawan pangan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapermas PP dan KB Kota Tegal, 2013

22. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau obyek saja.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas

masyarakat, dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berdaya dari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yang berkualitas. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya

Pemerintah Kota Tegal terus berupaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 ayat 8). Program pemberdayaan masyarakat selalu bertumpu pada peran kelembagaan di tingkat Kelurahan, oleh karena itu Pemerintah Kota Tegal selalu memberikan fasilitasi dan dorongan dalam menumbuhkan semangat pemberdayaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan kapasitas pengurus lembaga masyarakat melalui pembinaan dan bimbingan teknis sehingga diharapkan pengelolaan lembaga masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Mengingat pentingnya peran pemberdayaan masyarakat oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan, Pemerintah Kota Tegal menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdiri dari LPMK, PKK, RT dan RW, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan antara lain; menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial; melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong-royong, musyawarah, keswadayaan, dll); Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama; Menurunnya partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah sosial dan lingkungan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang bertujuan

untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan membantu masyarakat untuk mampu mengidentifikasi persoalan kemiskinan di wilayahnya yang selanjutnya bersama stakeholder terkait merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, sehingga diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berdaya dan mandiri. Adapun kegiatannya mencakup bidang ekonomi (perguliran Anggaran), kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di 27 kelurahan.

Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2013 pemerintah Kota Tegal membentuk kelembagaan sosial ekonomi di tingkat Kelurahan yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Pemerintah Kota Tegal telah memberikan pelatihan bagi ibu-ibu yang menganggur di wilayah kecamatan Tegal Selatan dan Margadana, Anggaran sebanyak 100 orang tentang pengolahan berbagai jenis olahan makanan dengan bahan dasar ikan. Selain itu juga memberikan pelatihan bagi ibu-ibu di wilayah pesisir khususnya 4 Kelurahan sebanyak 100 orang yaitu Kelurahan Muarareja, Tegalsari, Mintaragen dan Panggung agar dapat menambah ketrampilan kerajinan dengan bahan dasar mote. Jumlah kelompok usaha bersama yang terbentuk sebanyak 188 kelompok, sedangkan UP2K PKK terus meningkat dari Tahun 2010 terbentuk 3 kelompok dan pada Tahun 2012 sebanyak 9 kelompok.

Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan (FPSDP) di tingkat kelurahan maupun TMMD. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi, memupuk rasa kegotong-royongan dan swadaya dalam pembangunan, peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman serta meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan. Pelaksanaan Kegiatan FPSDP melibatkan semua unsur kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan antara lain RT/RW, LPMK, BKM, PKK, Wartekel maupun karang taruna.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan bertujuan untuk menyediakan data profil Kelurahan di Kota Tegal. Penyusunan Profil Kelurahan dilaksanakan dari Tahun 2010 dengan metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan, yaitu profil kelurahan berbasis data keluarga. Untuk Tahun 2010 baru dilaksanakan pada 2 kelurahan percontohan yaitu Slerok dan Pesurungan Lor, pada Tahun 2012 bertambah 8

Kelurahan, dan pada Tahun 2013 semua Kelurahan sudah menyusun data profil Kelurahan.

Jumlah RT pada Tahun 2013 sebanyak 1.071 meningkat dibandingkan Tahun 2009 jumlah sebanyak 1.057, sedangkan jumlah RW pada Tahun 2013 sebanyak 159 meningkat dibandingkan Tahun 2009 sebanyak 157. Sedangkan LPMK, PKK, Karang Taruna dan Wartekel sudah terbentuk di setiap Kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh kelompok Posyandu yang ada di tiap Kelurahan sebagai wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan Balita. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu antara lain posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu dilaksanakan setiap bulan dari, oleh dan untuk masyarakat, adapun bentuk partisipasi masyarakat dengan memberikan swadaya kudapan/PMT Posyandu, serta dukungan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Jumlah posyandu di Kota Tegal sebanyak 195 yang tersebar di Kecamatan Tegal Timur sebanyak 54 posyandu, Kecamatan Tegal Barat 57 posyandu, Kecamatan Tegal Selatan 45 Posyandu, dan Kecamatan Margadana Anggaran 39 posyandu. Sedangkan kader posyandu sebanyak 1.449 orang yang terdiri dari 23 laki-laki dan 1.426 perempuan. Strata posyandu yang ada di Kota Tegal terdiri dari 20 Madya, 62 Purnama dan 113 Mandiri.

Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu merupakan suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial. Pada Tahun 2010 sudah terbentuk 4 posyandu yang melaksanakan kegiatan terintegrasi dengan kegiatan lain seperti BKB dan Pos Paud, bentuk ini yang disebut sebagai posyandu model, dimana seluruh kegiatan berada pada satu lokasi yang sama dan terintegrasi dalam pengelolaan kegiatannya, antara lain Kelurahan Panggung, Tegalsari, Randugunting dan Pesurungan Lor.

Bentuk lain dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) merupakan sebuah Model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, yang melibatkan laki-laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini melibatkan masyarakat mitra yaitu keluarga miskin pada kelurahan lokasi P2MBG dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan pada satu Kelurahan di Kota Tegal. Adapun kelurahan yang menjadi mitra P2MBG antara lain Kelurahan Muarareja, Sumurpanggang, Panggung, Debong Kulon dan Pesurungan Kidul. Bentuk kegiatan P2MBG ini antara lain pembinaan kepada kelompok masyarakat mitra P2MBG dengan usaha peningkatan ekonomi keluarga secara berkelompok.

Dalam upaya meningkatkan gizi bagi anak SD/MI di sekolah yang mayoritas siswanya dari keluarga kurang mampu, Pemerintah Kota Tegal memberikan bantuan berupa kudapan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Jumlah siswa dan jumlah SD/MI Tahun 2009 sampai dengan 2013 antara lain 13.950 siswa dari 69 SD/MI, 13.950 siswa dari 69 SD/MI, 8.622 siswa dari 40 SD/MI, 6.550 siswa dari 30 SD/MI dan 6.550 siswa dari 34 SD/MI.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat menghasilkan beberapa prestasi penghargaan yang diraih terkait dengan pemberdayaan masyarakat selama Tahun 2009 – 2014 baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat nasional antara lain 1) Kelurahan Tegalsari penghargaan tingkat Nasional yaitu Pakarti Madya II Tingkat Nasional dalam lomba pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2009, 2) Kelurahan Slerok penghargaan tingkat Nasional yaitu Pakarti Utama II Kategori Kota dalam lomba pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2012, 3) Kelurahan Tegalsari penghargaan tingkat provinsi yaitu Juara II lomba pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2010 dan 4) Kelurahan Panggung penghargaan tingkat provinsi yaitu Juara II lomba pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Kategori Kota Tahun 2013

Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat Kota Tegal selama kurun waktu 2009 – 2014 dapat disajikan dalam Tabel 2.78 berikut ini.

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tegal 2009 – 2014

No	Indikator	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	PKK aktif (%)	75,50	76,00	77,00	78,00	78,70
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (PKK)	195	195	195	195	195
3.	Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	LPM Berprestasi (LPM)	3	3	3	3	3
5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	76	82	88	94	100
6.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	85%	85%	90%	90%	90%
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	90	90	95	95	95
8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	90	90	92	95	97

Sumber: Bapermas PP da KB Kota Tegal, 2013

23. Statistik

Ketersediaan data/informasi/statistik berguna untuk mengambil satu kebijakan dimasa yang akan datang. Penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat akan memudahkan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan. Data yang ada, secara regular harus dilakukan pembaharuan sehingga terjaga keakuratannya.

Ketersedian Buku Kota Dalam Angka dan PDRB Kota di Kota Tegal sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu tersedia.

Hal ini tentunya sangat membantu penyediaan data perencanaan pembangunan. Namun demikian yang menjadi perhatian yaitu waktu terbit kedua buku tersebut. Jika buku tersebut terlambat waktu penerbitannya akan mempengaruhi perencanaan pembangunan yang akan disusun. Capaian kinerja urusan statistik dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Kinerja Pembangunan Urusan Statistik

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Buku "kota dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "PDRB Kota/Kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Bappeda Kota Tegal, Tahun 2013

24. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku di Kota Tegal dikelola berdasarkan fungsinya yang terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih diperlukan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan arsip di lingkup Pemerintah Kota Tegal dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing SKPD. Secara umum pelaksanaan kegiatan pengarsipan setiap tahunnya dilakukan oleh masing-masing SKPD, yaitu pada 86 SKPD yang ada di Kota Tegal. Kondisi pengarsipan secara baku yang dilaksanakan oleh SKPD sudah berjalan sejak tahun 2009 – 2013 dengan jumlah SKPD yang melaksanakan tetap.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengarsipan, selama lima tahun terakhir ini telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM (arsiparis) sebanyak 5 kali kegiatan yang dilaksanakan satu kali setiap tahun. Jenis kegiatan peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan pengolahan arsip.

Upaya menghimpun berbagai arsip pembangunan daerah, Pemerintah Kota Tegal telah memiliki Pusat Informasi Daerah, yaitu sebuah pusat informasi yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kearsipan. Jumlah pusat informasi yang tersedia di Kota Tegal

dalam lima tahun terakhir (2009-2013) tidak mengalami peningkatan, yaitu hanya ada 1 Pusat Informasi Daerah.

25. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pengembangan komunikasi, informasi dan media massa selama lima tahun terakhir (2009-2013) di Kota Tegal telah dibangun jaringan komunikasi sebanyak 60 unit. Pembangunan jaringan komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar lembaga pemerintahan maupun dengan masyarakat. Kondisi ini juga didukung dengan terbangunnya website pemerintah Kota Tegal sebagai media informasi, komunikasi, pendidikan dan promosi pembangunan. Jumlah perkembangan website yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tegal juga cukup signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tahun 2009 yang mana Pemerintah Kota Tegal baru terbangun 1 buah website, sementara pada tahun 2013 sudah terbangun 21 website. Dengan semakin luasnya jaringan dan besarnya pertumbuhan website di Kota Tegal diharapkan dapat dijangkau ataupun diakses oleh masyarakat maupun pihak lainnya dalam memberikan pelayanan.

Siaran radio merupakan bagian dari sarana komunikasi kepada masyarakat yang menampilkan berbagai informasi menarik seperti berita, hiburan musik, talk show dan dialog interaktif. Jumlah penyiaran radio di Kota Tegal setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan, masih sama yaitu 18 penyiaran. Melalui 18 penyiaran ini, jumlah penduduk Kota Tegal yang tersebar di empat kecamatan dapat terjangkau. Sampai saat ini, siaran radio masih banyak diminati oleh masyarakat, selain acaranya yang variatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, juga memiliki kecepatan penyampaian informasi lebih baik dibanding televisi dan lebih murah dalam mengaksesnya.

Indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa di Kota Tegal dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80

Indikator Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kota Tegal Tahun 2009-2013

No.	Kondisi Sarpras	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jaringan komunikasi	(belum ada	(belum ada	(belum ada	56	60

No.	Kondisi Sarpras	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	(unit)	pendataan)	pendataan)	pendataan)		
2.	Website milik pemda	1	10	18	21	21
3.	Jumlah penyiaran radio (unit) Jumlah penyiaran TV (unit)	18	18	18	18	18

Sumber : Dishubkominformo Kota Tegal, 2013

Dengan berkembangnya teknologi informatika, upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD Kota Tegal diterapkan melalui pembangunan website pada SKPD. Salah satu tujuan pembangunan website pada SKPD adalah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dengan terbentuknya website pada SKPD, proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal dapat berjalan dengan transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Dengan adanya website pada SKPD diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dalam menyampaikan partisipasinya berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjadi kontrol dalam pengambilan kebijakan publik. Sampai tahun 2013, SKPD yang telah memiliki website sebesar 38,89%, berkembang dengan baik jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009 sebesar 1,85%. Ke depan, pemerintah Kota Tegal masih memiliki sekitar 61,11% SKPD yang belum memiliki website.

Untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Infromasi Daerah (PPID), pemerintah Kota Tegal telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan terhadap PPID SKD selama periode 2009-2013 baru dilaksanakan pada tahun 2013 dengan pembinaan pada 90 personil PPID dari 54 SKPD. Melalui pembinaan ini, PPID yang bertanggungjawab atas pengelolaan informasi daerah dapat menciptakan tenaga-tenaga PPID pada masing-masing SKPD yang handal dalam menjawab berbagai tantangan dan perkembangan teknologi dan infromasi.

Indikator fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi di Kota Tegal dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Indikator Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi Kota Tegal Tahun 2009-2013

No.	Kondisi Sarpras	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Persentase SKPD yang telah memiliki Website	1,85%	9,26%	18,52%	38,89%	38,89%
2.	Fasilitas Pembinaan PPID SKPD	0%	0%	0%	0%	166,67%
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dishubkominfo Kota Tegal, 2013

Kerjasama informasi dan media massa di Kota Tegal dilaksanakan melalui diseminasi dan pendistribusian informasi nasional. Proses pelaksanaan desiminasi dilakukan melalui media majalah, radio, televisi dan website (media online). Proses kegiatan desiminasi dan pendistribusian infromasi dilakukan juga dengan media pertunjukkan rakyat, sarasehan, ceramah/diskusi maupun lokakarya. Sedangkan untuk kegiatan desiminasi di luar ruangan, disampaikan dalam bentuk buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho. Seluruh proses kegiatan desiminasi dan pendistribusian informasi melalui media di atas secara keseluruhan setiap tahun dilaksanakan di Kota Tegal.

Tabel 2.82
Indikator Kerjasama Infromasi dan Media Massa
Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dishubkominfo Kota Tegal, 2014

26. Perpustakaan

Berkaitan dengan kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat dari indikator jumlah perpustakaan, jumlah peningkatan kualitas perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahun dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Dimaksud dengan jumlah perpustakaan adalah jumlah perpustakaan umum, khusus, kelurahan dan sekolah yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perkembangan jumlah perpustakaan di Kota Tegal menunjukkan kondisi yang baik, yaitu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah perpustakaan di Kota Tegal cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sebanyak 167 perpustakaan menjadi 220 perpustakaan pada tahun 2013. Tingkat perkembangan perpustakaan paling tinggi pada perpustakaan kelurahan dan sekolah.

Dengan demikian peningkatan fasilitas perpustakaan baik daerah maupun perpustakaan masyarakat diharapkan semakin mendorong untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Hal ini dalam rangka menunjang peningkatan wawasan dan kecerdasan masyarakat melalui membaca. Perkembangan jumlah perpustakaan di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.83. di bawah ini.

Tabel 2.83
Jumlah Perpustakaan di Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Perpustakaan				Jumlah
		Umum	Khusus	Kelurahan	Sekolah	
1	2009	1	1	2	-	4
2	2010	1	2	6	-	9
3	2011	1	2	6	158	167
4	2012	1	2	14	178	195
5	2013	1	2	20	197	220

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tegal, 2013

Dengan semakin bertambahnya jumlah perpustakaan di Kota Tegal, maka sumberdaya pengelolaan dipastikan mengalami peningkatan jumlah. Dengan meningkatnya jumlah pengelola, maka diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM sebagai upaya memberikan layanan optimal kepada pengguna perpustakaan. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pengelola perpustakaan

baik umum maupun khusus ditunjukkan kepada pengelola melalui kegiatan sosialisasi. Jumlah pengelola yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas selama lima tahun (2009-2013) adalah sebanyak 33 pengelola, meningkat signifikan terutama pada tahun 2012 dan 2013 seperti yang tersaji pada Tabel 2.84. di bawah ini.

Tabel 2.84
Jumlah Pengelola Perpustakaan Umum dan Khusus
yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Pengelola	Jumlah Pengelola yang Mengikuti Bimtek	Persentase
1	2009	4	2	50,00
2	2010	7	2	28,57
3	2011	12	5	41,67
4	2012	19	10	52,63
5	2013	24	14	58,33

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tegal, 2013

Dilihat dari sisi jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Tegal, jumlah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka setiap tahunnya menunjukkan kondisi fluktuatif. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan kunjungan masyarakat ke perpustakaan setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar -6,5%. Kunjungan masyarakat ke perpustakaan tertinggi pada tahun 2012 mencapai 29.622 pengunjung dan paling rendah pada tahun 2010 sebesar 17.082 pengunjung.

Tabel 2.85
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Umum dan Khusus
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Kunjungan ke Perpustakaan	% Pertumbuhan
1	2009	23.066	-
2	2010	17.082	-35,03
3	2011	26.321	35,10
4	2012	29.622	11,14
5	2013	21.562	-37,38

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013

Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Tegal pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 26.221 eksemplar dibanding tahun 2012 jumlah koleksi buku sebanyak 24.036 eksemplar. Perkembangan jumlah koleksi buku perpustakaan di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.86 di bawah ini.

Tabel 2.86
Tingkat Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Eksemplar
1	2009	7.470	10.418
2	2010	10.470	15.056
3	2011	11.950	21.070
4	2012	13.481	24.036
5	2013	8.041	26.221

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Kota Tegal merupakan kota transit di bagian barat Jawa Tengah. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa sedang di bagian selatan dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal serta di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Sebagai wilayah perkotaan, lahan pertanian di Kota Tegal relatif sempit, tahun 2012 tercatat 859,25 Ha atau menurun dari kondisi tahun 2009 yang seluas 892,55 Ha. Lahan pertanian di Kota Tegal kebanyakan tersebar di wilayah kecamatan Tegal Selatan dan Margadana. Lahan pertanian di Kota Tegal di masa mendatang diperkirakan akan semakin sempit akibat konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Kondisi ini merupakan kondisi klasik di wilayah perkotaan.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi pertanian, pemerintah selalu melakukan kegiatan pendampingan dan penyuluhan terhadap petani. Kegiatan tersebut didukung dengan keberadaan SDM penyuluh pertanian yang ada. Jumlah penyuluh pertanian di Kota Tegal dari tahun 2009 sampai tahun 2013 tetap yaitu sebanyak 14 orang, yang terdiri dari 12 orang penyuluh dengan status PNS dan 2 orang penyuluh dengan status THL TBPP (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian).

Produksi pertanian di Kota Tegal selama kurun waktu lima tahun kondisinya fluktuatif. Hasil pertanian utama dari wilayah ini adalah padi dan bawang merah. Produksi padi pada tahun 2013 mencapai 4.839 ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mampu 4.592 ton saja. Produksi padi paling besar terjadi pada tahun 2010, dimana produksi padi mampu mencapai angka 8.808 ton sehingga Pemerintah Kota Tegal mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) atas upayanya dapat meningkatkan produksi padi di atas 5 %. Sedangkan untuk produksi bawang merah selama lima tahun sejak tahun 2009 kondisinya juga fluktuatif, dengan produksi tahun terakhir (2013) mencapai 2.412 ton. Produksi bawang paling baik juga terjadi pada tahun 2010 yang mampu mencapai angka 4.363 ton.

Jika dilihat dari besarnya produksi padi dan ketersediaan lahan pertanian yang ada, maka dapat dilihat bahwa produktivitas padi di Kota Tegal dari tahun ke tahun kondisinya selalu meningkat. Kondisi terakhir tingkat produktivitas padi adalah sebesar 65,57 kw/ha.

Tabel 2.87
Gambaran Kondisi Sub Bidang Pertanian di Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Luas Lahan Sawah (Ha)	892,55	891,55	881,50	859,25	859,225
2.	Produksi Padi (Ton)	6.600	8.808	6.577	4.592	4.839
3.	Luas Panen Padi (Ha)	1,048	1,385	1,038	710	738
4.	Produktivitas Padi (Kw/Ha)	62,07	63,95	63,36	64,68	65,57
5.	Bawang Merah (Ton)	2.239	4.363	2.708	1.637	2.412

Sumber: Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal, 2013

Produksi sub bidang peternakan di Kota Tegal ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Produksi ternak yang mengalami kenaikan yaitu sapi potong,

kambing, dan domba. Sedangkan hewan ternak yang mengalami penurunan yaitu sapi perah, kerbau, ayam buras, ayam ras, itik, dan puyuh.

Perkembangan produksi sub bidang peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88
Jumlah Hewan Ternak (Ekor) di Kota Tegal Tahun 2009 – 2013

No	Jenis Ternak	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Sapi potong	86	140	190	127	148
2.	Sapi perah	61	47	27	26	26
3.	Kambing	1.444	2.088	2.083	2.086	2.983
4.	Domba	1.919	2.522	2.524	2.531	2.897
5.	Ayam Buras	80.094	53.200	51.200	47.550	16.544
6.	Ayam Ras	80.960	92.547	77.500	75.500	76.000
7.	Itik	293.386	285.21	325.000	285.355	278.150

Sumber: Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal, 2013

2. Pariwisata

Kota Tegal memiliki potensi obyek wisata yang bervariasi. Akomodasi penunjang pariwisata di kota Tegal meliputi hotel bintang, hotel melati dan rumah makan. Potensi wisata di kota Tegal secara umum sudah dikelola dengan optimal sehingga mampu meningkatkan jumlah pengunjung di kota Tegal secara signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan di kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan meskipun tidak besar. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2009 mencapai 436.284 pengunjung dan di tahun 2013 mencapai 459.774 pengunjung. Umumnya mereka adalah penduduk Kota Tegal atau hanya sekedar mampir disela-sela aktivitas lainnya, jadi berwisata di obyek wisata kota Tegal belum sepenuhnya menjadi tujuan utama.

Jasa penunjang pariwisata di kota Tegal cukup berkembang, ditandai keberadaan hotel dan restoran yang mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebanyak 30 restoran hingga tahun 2013 menjadi 42 restoran. Sedangkan jumlah hotel pada tahun 2009 sebanyak 23 hotel menjadi 25 hotel pada tahun 2013. Namun

demikian pariwisata di kota Tegal masih belum didukung pengembangan industri pariwisata. Kondisi ini menjadikan kurangnya kemauan wisatawan untuk kembali berkunjung ke obyek wisata yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata sebagai salah satu sumber PAD di kota Tegal, perlu digali potensi-potensi wisata lainnya sebagai pilihan berwisata di kota Tegal. Selain itu perlu pula dilakukan peningkatan jenis produk industri dan jasa yang dapat menunjang pariwisata di kota Tegal.

PAD yang berasal dari sektor pariwisata pada tahun 2009 berjumlah Rp. 678.969.000,- tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 720.217.700,- tahun 2011 meningkat lagi menjadi Rp. 782.389.400,- tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 774.455.500,- dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 880.326.300,-. Perkembangan kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kunjungan wisata (orang)	436.28 4	408.53 3	389.08 8	394.97 4	459.77 4
2.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah obyek wisata unggulan (unit)	1	1	1	1	1
4.	Jumlah restoran (unit)	30	33	39	39	42
5.	Jumlah penginapan/ hotel (unit)	23	23	23	24	25

Sumber: Dinporabudpar Kota Tegal, 2014

Semua jenis wisata, yaitu Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Buatan ada di kota Tegal. Wisata Alam yang ada di kota Tegal saat ini adalah Pantai Alam Indah dan Pantai Muarareja, termasuk di dalamnya wisata minat khusus yang ada di dukuh Kajongan kelurahan Muarareja. Sedangkan wisata Budaya yang selalu ramai dikunjungi wisatawan adalah wisata Religi termasuk

wisata minat khusus Gotong Toa Pe Kong, Khaul Hahad, Khaul mbah Panggung dan Pawai Rolasan. Adapun Wisata Buatan yang ada di kota Tegal berjumlah 4 buah, yaitu Rita Park dan Water Park yang dikelola oleh swasta serta Waterboom PAI dan Bumi Perkemahan (Bumper) yang dikelola oleh pemerintah.

Destinasi Pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah kota Tegal adalah rintisan Desa Wisata Kajongan Muarareja sebagai wisata minat khusus berbasis masyarakat setempat. Melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di sekitar destinasi pariwisata, pemerintah dan masyarakat akan mampu menarik lebih banyak lagi wisatawan datang ke kota Tegal. Untuk lebih memberi informasi tentang pariwisata kota Tegal, telah dibuat website khusus tentang pariwisata dengan alamat : pariwisata.tegalkota.go.id.

3. Kelautan dan Perikanan

Kota Tegal merupakan kota pantai (berbatasan dengan laut) dengan panjang garis pantai sekitar 7,5 km, memiliki potensi perikanan yang cukup besar, khususnya sektor perikanan laut. Hal ini didukung oleh adanya adanya tiga tempat pelelangan ikan (TPI Tegalsari, Muarareja dan Pelabuhan). Sementara potensi perikanan budidaya (tambak), dengan luasan tambak 482.08 Ha, umumnya digunakan untuk budidaya bandeng, udang, kepiting dan rumput laut.

Produksi perikanan tangkap di Kota Tegal menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun. Sementara jumlah nelayan dari tahun ke tahun relatif tetap sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan rata-rata nelayan meningkat.

Produksi perikanan budidaya (tambak) di Kota Tegal trendnya cenderung mengalami peningkatan. Produksinya pernah mengalami peningkatan dari 170.425 Kg pada tahun 2009 menjadi 484.130 Kg pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 398.746 Kg.

Usaha pengolahan ikan di Kota Tegal cukup banyak. Jumlah usaha pengolahan ikan juga mengalami peningkatan dari sebanyak 254 unit pada tahun 2008 menjadi sebanyak 310 unit pada tahun 2012. Namun demikian usaha pengolahan ikan di Kota Tegal sebagian besar masih tradisional dengan penggunaan teknologi produksi yang minim, baik dalam proses pengolahan maupun proses pengemasan. Pemasaran produksi produk olahan ikan di Kota Tegal

juga hanya di dalam daerah (lokal). Perkembangan capaian urusan perikanan dan kelautan tercantum pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90
Kondisi Pembangunan Urusan Perikanan dan Kelautan
Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Kapal yang mendarat di TPI (unit)	8.818	8.121	17.448	20.283	15.904
2.	Jumlah pengolah fillet (orang)	38	39	39	39	39
3.	Jumlah pengolah ikan asin (orang)	62	62	62	62	62
4.	Jumlah Pengolah terasi (orang)	11	11	11	15	15
5.	Produksi fillet ikan (kg)	367.325	377.524	381.468	411.493	398.524
6.	Produksi Ikan asin (kg)	2.692.800	2.803.000	3.405.103	3.491.521	3.213.545
7.	Produksi terasi (ton)	6.1	6,3	6,6	6,7	6,8
8.	Produksi Perikanan Tangkap (kg)	25.285.303	20.323.865	29.516.103	28.517.600	14.929.219
9.	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. 000)	147.611.365	135.616.286	198.911.948	206.770.092	154.583.899
10.	Jumlah kapal yang ada di Kota Tegal (unit)	939	943	943	953	953
11.	Jumlah nelayan (orang)	12.884	12.651	12.640	12.597	12.597
12.	Jumlah alat tangkap ikan (unit)	954	943	943	953	953
	- badong	41	46	46	46	46
	- cantrang	325	492	492	492	492
	- purse seine	146	168	168	168	168
	- gill net	23	23	23	33	33
	- Jaring Arad	299	106	106	106	106
	- Pancing (Prawe)	35	-	-	-	-
	- Pukat pantai	8	19	19	19	19

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	- trammel net	45	76	76	87	87
	Luas tambak (ha)	441.35	441.36	482.08	482.08	482.08
13.	Produksi ikan dari tambak (kg)	170.425	198.180	259.160	484.130	398.746
14.	Panjang APO (meter)	62	112	112	NA	NA
15.	Panjang revertment (meter)	150	150	190	NA	NA

Sumber: Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal, Tahun 2013

4. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian Kota Tegal dan menjadi sektor unggulan. Hal tersebut ditopang oleh letak geografis Kota Tegal yang sangat strategis dalam jalur transportasi utama yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya yang merupakan simpul perekonomian Indonesia.

Salah satu sarana prasarana yang menopang kegiatan perdagangan adalah pasar. Kota Tegal memiliki pasar dengan jumlah yang cukup banyak dan jenisnya juga bermacam-macam, mulai dari pasar tradisional sejumlah 14 buah, sedangkan pasar semi modern sejumlah 19 unit. Selain jenis pasar seperti yang telah tersebut di atas, di Kota Tegal juga terdapat pasar khusus yakni pasar ikan dan pasar beras yang jumlahnya masing-masing 1 unit.

Tabel 2.91
Jenis dan Jumlah Pasar di Kota Tegal Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Jenis Pasar	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Tradisional	11	11	11	12	12
2.	Semi Modern	2	2	2	2	2
3.	Modern/Swalayan	18	18	19	19	19
4.	Beras	1	1	1	1	1
5.	Ikan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tegal, Tahun 2014

Sedangkan jumlah pedagang berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM Perindag Kota Tegal dari tahun 2009 sampai tahun

2012 angkanya selalu menunjukkan kenaikan. Jika pada tahun 2009 jumlah pedagang sebanyak 7.104 orang, maka pada tahun 2013 naik menjadi 10.505 orang.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar adalah melakukan pengawasan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat/konsumen. Hanya saja pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal sampai tahun 2013 berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya baru mencapai 100% atau sekitar 14 pasar dari total 14 pasar yang ada. Selain itu juga Pemerintah Kota Tegal sampai saat ini belum memiliki sebuah lembaga khusus yang menangani permasalahan sengketa konsumen dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat pelaku usaha di Kota Tegal selain pemasarannya dalam negeri, juga sudah mampu mencapai pasar luar negeri. Ada beberapa jenis barang yang merupakan hasil produksi dari Kota Tegal yang sudah dapat diterima oleh pasar internasional. Salah satunya adalah produk Shuttlecock yang mampu menembus pasar global karena sering dipakai dalam event-event pertandingan bulu tangkis di tingkat internasional. Selain shuttlecock masih terdapat juga produk dari Kota Tegal yang mampu masuk ke pasar global, yaitu produk sarung baik ATBM atau ATM. Tahun 2013 terdapat 4 barang/produk dari Kota Tegal yang telah mampu masuk ke pasar global. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 dimana terdapat 7 jenis produk Kota Tegal yang mampu menembus pasar internasional.

Kemampuan produk dari Kota Tegal memasuki pasar global tentunya berpengaruh pada nilai ekspor yang diterima. Nilai ekspor Kota Tegal pada tahun 2009 adalah US\$ 4.111,977 dan menurun menjadi US\$ 2.407.325,30 pada tahun 2010. Tahun 2011 nilai ekspor juga mengalami peningkatan menjadi US\$ 3.490.503,00 dan menjadi US\$ 9.276.903,81 pada tahun 2012.

Seperti halnya yang telah diungkapkan tersebut di atas, bahwa sektor perdagangan merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kota Tegal. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Tegal baik yang berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92

**Sumbangan Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB
Kota Tegal Tahun 2009-2012**

Tahun	PDRB ADHB		
	Nilai PDRB (Rp. 000)	PDRB Sektor Perdagangan (Rp. 000)	Sumbangan (%)
2009	2.387.809.680,97	319.276.800,45	13,37
2010	2.635.244.110,93	348.884.227,95	13,24
2011	2.846.975.053,73	375.472.397,38	13,19
2012	3.081.836.460,41	408.101.981,91	13,24

Sumber: BPS Kota Tegal, Tahun 2014

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam rangka mendukung perkembangan sektor perdagangan. Beberapa diantaranya adalah melalui fasilitasi kegiatan promosi dan pameran. Kendala yang dihadapi adalah baru sedikit usaha dagang kecil dan menengah (UDKM) yang telah bisa difasilitasi. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013, rata-rata baru 1,5% dari total UDKM yang terfasilitasi untuk kegiatan tersebut.

Selain memfasilitasi kegiatan promosi, Pemerintah Kota Tegal juga melakukan pembinaan secara rutin terhadap kelompok-kelompok pedagang/usaha informal yang ada, penataan terhadap pedagang kaki lima, dan juga melakukan pemeliharaan pasar sehingga menjadi pasar yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan nyaman bagi pengunjung. Perkembangan kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.93.

**Tabel 2.93
Kinerja Urusan Perdagangan di Kota Tegal Tahun 2009-2013**

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	90,5	89,87	87,25	84,81	86,46
2	Persentase lokasi PKL yang tertata	12,5	12,5	12,5	12,5	25
3	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan.	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43

Sumber: Dinkop, UMKM, Perindag Kota Tegal Tahun 2014

5. Perindustrian

Industri berdasarkan data dari statistik dibedakan menjadi 4 kelompok yang didasari oleh jumlah tenaga kerja yang diserap. Pertama adalah industri rumah tangga yaitu industri dengan jumlah pekerja antara 1 – 4 orang. Kedua adalah industri kecil, yaitu jumlah pekerja antara 5 – 19 orang. Ketiga adalah industri sedang dengan tenaga kerja antara 20 – 99 orang. Dan yang keempat adalah industri besar yaitu industri yang mampu menyerap tenaga kerja 100 orang tenaga kerja atau lebih.

Industri di Kota Tegal baik industri kecil, sedang, menengah maupun besar jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan industri di Kota Tegal dalam 5 tahun terakhir adalah 7,7%. Perkembangan jumlah industri yang paling besar ada di kategori industri kecil dan menengah. Pertumbuhan jumlah industri tersebut meningkat dan tentunya mempengaruhi tenaga kerja yang terserap.

Tabel 2.94
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Industri Kecil dan Menengah	2.722	2.770	2.885	2.970	3.773
	Jumlah Tenaga Kerja	16.789	17.100	14.272	14.840	15.412
2	Industri Besar	36	38	42	43	45
	Jumlah Tenaga Kerja	1.843	1.876	4.360	4.535	4.707
	Total Industri	2.758	2.770	2.897	2.970	3.818
	Total Tenaga Kerja	18.623	18.976	18.632	19.375	20.119

Sumber: Dinkop, UMKM, Perindag Tahun 2014

Meskipun mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan penyerapan tenaga kerja, namun dari sisi kontribusi terhadap PDRB

justru mengalami penurunan. Jika pada tahun 2009 sektor industri mampu menyumbang 20,82% dari total PDRB, tahun 2012 justru menurun menjadi 20,18% saja. Sektor industri merupakan penyumbang PDRB kedua terbesar di Kota Tegal setelah sektor perdagangan.

Jika dilihat dari total PDRB sektor industri, sebagian besar masih didominasi kontribusi dari industri non rumahan. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri hanya sebesar 4,84% saja pada tahun 2012. Meskipun tidak signifikan namun kondisi tersebut menurun 0,1% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2009.

Kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah adalah bagaimana supaya produk-produk industri kecil dan menengah yang ada mampu bertahan dan memenuhi standar yang ada. Hal tersebut karena sampai tahun 2013 persentase IKM yang telah memiliki izin usaha industri kecil melalui P-IRT dan sertifikasi halal baru mencapai 10,06%. Angka tersebut memang sudah meningkat dibandingkan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah industri yang telah memiliki Six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas) persentasenya juga masih kecil yaitu 21% dari total industri yang ada. Adapun industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi baru mencapai 3,16%.

Untuk mengembangkan perindustrian, khususnya yang masuk dalam kategori kecil dan menengah sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok pengrajin, dimana persentasenya rata-rata adalah 11,34% dari jumlah kelompok pengrajin per tahun. Selain itu juga dilakukan kegiatan pameran promosi produksi, baik yang sifatnya melaksanakan kegiatan sendiri maupun yang berupa pengiriman ke event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Hanya saja kemampuan daerah untuk memfasilitasi pelaku IKM dalam kegiatan tersebut masih terbatas. Rata-rata per tahun jumlah IKM yang mendapat fasilitasi untuk mengikuti pameran promosi produk baru sekitar 7,99%. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut harapannya adalah akan mampu meningkatkan omset penjualan produk IKM di Kota Tegal. Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM kondisinya selama 5 tahun terakhir adalah fluktuatif. Pada tahun 2009 persentase peningkatan omset mampu mencapai 2,7% lalu turun menjadi 1,7% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 omset penjualan mengalami kenaikan lagi sampai

mencapai 3%, dan selalu meningkat sehingga pada tahun 2013 mampu mencapai 21%.

6. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Transmigrasi mempunyai tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Transmigrasi sendiri menurut Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian dibagi atas 3 jenis, yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju, sedangkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Peminat program transmigrasi selama 5 tahun terakhir memang tidak ada meskipun Pemerintah Kota Tegal sebagai fasilitator dari program ini telah berupaya melalui sosialisasi dan pemberian informasi. Sebagai informasi, setiap tahun Pemerintah Kota Tegal mendapatkan kuota dari pemerintah provinsi sebanyak 10 orang transmigran. Ketidak tertarikannya masyarakat terhadap program ini antara lain dipicu oleh ketidakcocokannya bakal calon transmigran terhadap lokasi penempatan yang telah disediakan oleh pemerintah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

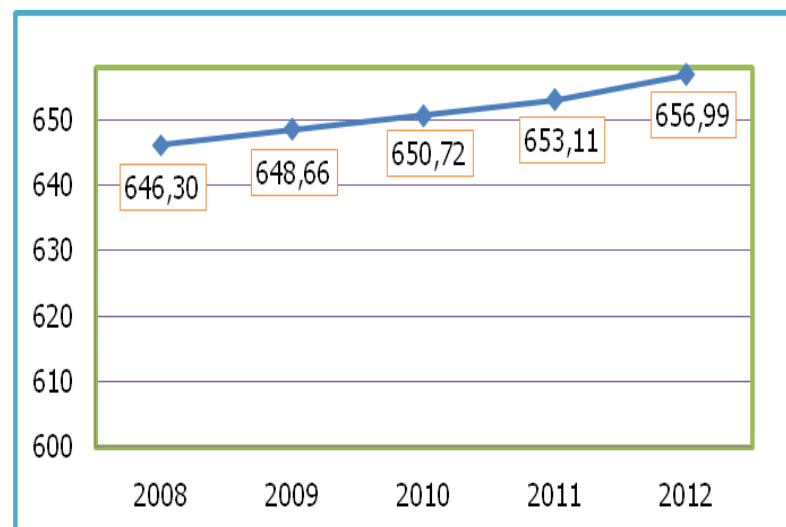
Daya saing adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran

lokal/daerah. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam daya saing daerah meliputi: 1) kemampuan ekonomi daerah; 2) fasilitas wilayah atau infrastruktur; 3) iklim berinvestasi dan; 4) sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dari indikator rata-rata pengeluaran per kapita. Pengeluaran perkapita penduduk semakin meningkat, pada tahun 2008 pengeluaran per kapita hanya sebesar Rp. 646 ribu rupiah, pada tahun 2012 mencapai Rp 659 ribu setiap bulannya. Rata-rata pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Kota Tegal dari tahun 2008 sampai tahun 2012 semakin membaik.

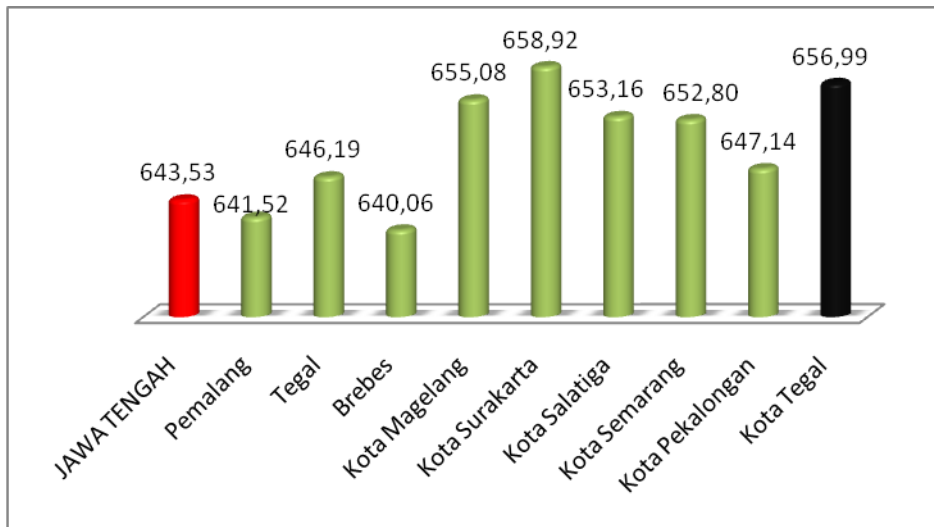
Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita dapat dilihat pada Gambar 2.37.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Gambar 2.40 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kota Tegal Tahun 2008-2012

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Tegal pada tahun 2012 merupakan salah satu yang paling tinggi di wilayah Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar (Brebes, Tegal, dan Pemalang) posisi Kota Tegal masih jauh di atasnya. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, pengeluaran per kapita Kota Tegal hanya berada di bawah Kota Surakarta.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.41 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Tegal Dengan Kabupaten Sekitar dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2012

2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

2.4.2.1 Sarana Transportasi

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis jika dilihat dari aspek transportasi. Hal tersebut dikarenakan posisi geografis Kota Tegal yang terletak di jalur utama yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Jawa. Sarana pendukung transportasi yang ada juga cukup baik. Panjang jalan di Kota Tegal mencapai 242,755 Km, sedangkan kondisi jalan yang baik mencapai 69,99% dari total panjang jalan. Selain jalan Kota Tegal juga memiliki infrastruktur transportasi lain yang cukup representatif. Kota Tegal memiliki terminal, stasiun dan juga pelabuhan.

2.4.2.2 Pelayanan Air Bersih

Sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tegal bersumber dari PDAM dan sumur. Persentase rumah tangga yang sudah mampu mengakses air bersih berdasarkan data dari PDAM Kota Tegal, pada tahun 2012 rumah tangga yang berlangganan air bersih mencapai 12.126 RT. Jumlah tersebut memang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang mencapai angka 65.702 RT. Untuk mengatasi hal tersebut upaya yang dilakukan antara lain adalah penyediaan sumur bor bagi masyarakat.

2.4.2.3 Fasilitas Listrik dan Telepon

Seluruh wilayah Kota Tegal saat ini sudah dapat mengakses jaringan listrik dari PLN. Jumlah pelanggan PLN angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2008 jumlah pelanggan PLN sebanyak 64.938 dengan daya yang terjual sebesar 16.451.189 KWh, maka pada tahun 2012 jumlahnya naik menjadi 73.277 pelanggan dengan daya yang terjual sebesar 16.366.541 KWh. PLN unit Kota Tegal pada tahun 2012 memiliki daya terpasang sebesar 103.519.710 KWh. Dengan demikian maka ketersediaan listrik di Kota Tegal sudah mampu mencukupi kebutuhan akan daya bagi semua pelanggannya karena rasio daya listriknya mencapai 632,5%.

Fasilitas komunikasi wilayah Kota Tegal juga sudah dilayani oleh PT. Telkom untuk jaringan SST. Jumlah pelanggan PT. Telkom di Kota Tegal pada tahun 2012 mencapai 12.855 sambungan. Dari total pelanggan tersebut 191 di antaranya adalah berupa warung telekomunikasi (wartel) sedangkan sisanya adalah sambungan untuk pribadi.

2.4.2.4 Sarana Penginapan

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis posisinya. Sebagai wilayah yang memiliki jalur yang ramai maka sarana dan prasarana harus tersedia dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi. Salah satu sarana penunjang yang tersedia di Kota Tegal penginapan/hotel. Saat ini di Kota Tegal telah ada sebanyak 24 penginapan yang terdiri dari beberapa kelas, mulai dari kelas melati hingga hotel berbintang. Jumlah hotel berbintang 3 di Kota Tegal sebanyak 4 buah, hotel bintang 2 sebanyak 1 buah, dan hotel bintang 1 sebanyak 2 buah. Sedangkan yang kelas melati terdiri dari melati 1 sebanyak 15 buah, melati 2 dan 3 masing-masing 1 buah.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Permasalahan gangguan keamanan memang menjadi masalah yang cukup serius dalam perkembangan wilayah. Hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Tegal. Kondisi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Kota Tegal selama lima tahun terakhir memang mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 hanya terjadi 48 kasus saja, pada tahun 2012 angkanya meningkat cukup signifikan menjadi 385 kasus kejahatan. Dari total 385 kasus yang terjadi, pihak kepolisian mampu menangani dan menyelesaikan sebanyak 155 kasus atau sebesar 40,25%.

2.4.3.2 Kemudahan perijinan

Pelayanan perijinan di Kota Tegal saat ini cukup mudah pengurusannya karena telah dilaksanakan secara *One Stop Service* oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) baik dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, sistem manajemen, sarana prasarana, maupun penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini BPPT Kota Tegal melayani pengurusan perijinan sebanyak 48 jenis dan 3 jenis layanan non perijinan, dengan waktu penyelesaian yang sudah ditentukan. Waktu penyelesaian masing-masing jenis perijinan dapat dilihat pada Tabel 2.95

Tabel 2.95
Waktu Penyelesaian Perijinan di BPPT Kota Tegal

No	Jenis Layanan Perijinan	Waktu Penyelesaian
	Layanan Perijinan	
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	8 Hari Kerja
2.	Ijin Gangguan	8 Hari Kerja
3.	Ijin Pemakaman Dan Perabuan Jenazah	1 Hari Kerja
4.	Ijin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemkot Tegal	8 Hari Kerja
5.	Ijin Pemakaian Kios	7 Hari Kerja
6.	Ijin Reklame	4 Hari Kerja
7.	Ijin Usaha Perdagangan (Siup)	4Hari Kerja
8.	Tanda Daftar Perusahaan (Tdp)	4 Hari Kerja
9.	Ijin Usaha Industri	7 Hari Kerja
10.	Ijin Perluasan Usaha Industri	7 Hari Kerja
11.	Tanda Daftar Industri	7 Hari Kerja
12.	Ijin Perluasan Tanda Daftar Industri	7 Hari Kerja
13.	Ijin Usaha Pergudangan/Tanda Daftar Gudang	5 Hari Kerja

No	Jenis Layanan Perijinan	Waktu Penyelesaian
14.	Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras	7 Hari Kerja
15.	Ijin Penimbunan Dan Penyimpanan Minyak	8 Hari Kerja
16.	Ijin Trayek Angkutan Umum	5 Hari Kerja
17.	Ijin Operasi Angkutan Umum	5 Hari Kerja
18.	Ijin Isidentil Angkutan Umum	5 Hari Kerja
19.	Ijin Usaha Pariwisata	7 Hari Kerja
20.	Ijin Usaha Jasa Kontruksi	7 Hari Kerja
21.	Ijin Pembuatan Tambak	6 Hari Kerja
22.	Ijin Pengusahaan Tambak	6 Hari Kerja
23.	Ijin Lembaga Pelatihan Kerja	8 Hari Kerja
24.	Ijin Bursa Kerja Khusus	8 Hari Kerja
25.	Ijin Kerja Bidan	5 Hari Kerja
26.	Ijin Praktek Bidan	5 Hari Kerja
27.	Ijin Tukang Gigi	5 Hari Kerja
28.	Ijin Praktek Perawat	5 Hari Kerja
29.	Ijin Kerja Perawat	5 Hari Kerja
30.	Ijin Klinik Fisioterapis	8 Hari Kerja
31.	Ijin Rumah Sakit Bersalin Yang Dikelola Oleh Dokter Spesialis	8 Hari Kerja
32.	Ijin Rumah Sakit Bersalin Yang Dikelola Oleh Selain Dokter Spesialis	8 Hari Kerja
33.	Ijin Balai Pengobatan/Klinik Yang Dikelola Oleh Dokter	8 Hari Kerja
34.	Ijin Balai Pengobatan/Klinik Yang Dikelola Oleh Perawat (Selain Dokter)	8 Hari Kerja
35.	Ijin Apotik Baru	8 Hari Kerja
36.	Perubahan Surat Ijin Apotik Karena Pergantian Apoteker Pengelola Apotik	8 Hari Kerja
37.	Perubahan Surat Ijin Apotik Karena Pergantian Pemilik Sarana Apotik	8 Hari Kerja
38.	Perubahan Surat Ijin Apotik Karena Pemindahan Lokasi/Alamat Praktek	8 Hari Kerja
39.	Perubahan Surat Ijin Apotik Karena Pergantian Nama Apotik	8 Hari Kerja
40.	Ijin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat	8 Hari Kerja
41.	Ijin Optik	8 Hari Kerja
42.	Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta	8 Hari Kerja
43.	Ijin/Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit	8 Hari Kerja

No	Jenis Layanan Perijinan	Waktu Penyelesaian
44.	Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah	3 Hari Kerja
45.	Ijin Prinsip	7 Hari Kerja
46.	Ijin/Penetapan Lokasi	7 Hari Kerja
47.	Ijin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari Kerja
48.	Ijin Usaha Penanaman Modal	7 Hari Kerja
	Layanan Non Perijinan	
1.	Sertifikat Laik Sehat	5 Hari Kerja
2.	Rekomendasi Pemakaian Alun-Alun	3 Hari Kerja
3.	Rekomendasi Keramaian/Tontonan	3 Hari Kerja

Sumber: BPPT Kota Tegal, 2014

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Tegal 243.740 jiwa pada tahun 2012. Terdiri dari penduduk usia produktif dan non produktif. Sumber Daya Manusia di Kota Tegal cukup baik dengan tingginya usia produktif yang siap untuk bekerja. Jumlah penduduk yang termasuk dalam usia produktif (15 – 64 tahun) pada tahun 2012 sebanyak 167.293 jiwa atau sebesar 68,63% dari total penduduk Kota Tegal. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 76.437 jiwa (31,37%). Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Tegal adalah sebesar 45,69% atau dapat diartikan bahwa setiap 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang tidak produktif.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. APBD menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. APBD menjadi kerangka kebijakan publik untuk mewujudkan rencana dan program-program yang telah ditetapkan. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, pengalokasian APBD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada bagian ini digambarkan perkembangan realisasi kinerja Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah APBD Kota Tegal dari tahun 2009-2013.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja masing-masing unsur pendapatan daerah Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2013 (rupiah)

NO.	Unsur Pendapatan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pendapatan Asli Daerah	90.840.876.590	101.321.867.412	117.244.290.641	156.663.027.896	176.377.335.075
	a. Pendapatan Pajak Daerah	11.910.295.123	13.100.645.761	20.891.263.399	29.255.081.307	41.068.021.468
	b. Hasil Retribusi Daerah	9.419.114.922	9.577.857.963	14.112.315.105	19.825.520.624	21.953.226.871
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	710.733.750	675.280.427	1.930.051.843	4.570.754.244	2.080.042.469
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	68.800.732.795	77.968.083.261	80.310.660.294	103.011.671.721	111.276.044.267
2.	Bagian Dana Perimbangan	303.728.258.830	296.502.755.004	312.561.579.536	394.762.935.687	430.499.302.526
	a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24.067.001.830	27.232.437.004	23.509.993.536	29.389.100.687	29.817.134.526
	b. Dana Alokasi Umum	241.785.257.000	244.580.618.000	265.483.086.000	334.819.065.000	370.642.983.000
	c. Dana Alokasi Khusus	37.876.000.000	24.689.700.000	23.568.500.000	30.554.770.000	30.039.185.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.485.699.248	63.106.422.241	117.911.651.668	99.379.300.291	117.092.223.484
	a. Pendapatan hibah	-	-	1.028.000.000	-	-
	b. Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.458.174.248	15.839.172.199	21.926.193.788	30.593.129.291	27.267.200.980
	c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	4.959.975.000	34.979.039.042	74.752.623.880	54.384.462.000	74.069.104.000
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.067.550.000	12.288.211.000	20.204.834.000	14.401.709.000	15.755.918.504
	Total Pendapatan Daerah	425.054.834.668	460.931.044.657	547.717.521.845	650.805.263.874	723.968.861.085

Sumber: DPPKAD Kota Tegal

Dari Tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kota Tegal menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp 425.054.834.668,00 pada tahun 2009 menjadi Rp 723.968.861.085,00 pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan daerah terutama berasal peningkatan bagian dana perimbangan dari pemerintah pusat (dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, dan DAK), peningkatan PAD, dan peningkatan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada komponen PAD, rata-rata pertumbuhan pajak daerah mencapai sebesar 10,68%, retribusi daerah sebesar 10,73%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 5%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 13,15%. Pada komponen dana perimbangan, Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak rata-rata tumbuh sebesar 5,44%, Dana Alokasi Umum sebesar 9,78%, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 1,77%. Sementara itu Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,51%, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sebesar 36,20%, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 12,92%. Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dari tahun 2008 disebabkan oleh pada tahun 2009 diterapkan pola pengelolaan keuangan di rumah sakit umum Kardinah dengan pola PPK BLUD, sehingga pendapatan rumah sakit umum Kardinah yang pada tahun 2008 dianggarkan pada retribusi pelayanan kesehatan, pada tahun 2009 menjadi pendapatan dari BLUD di lain-lain PAD yang sah. Hal ini berimplikasi pada penurunan pendapatan dari retribusi daerah.

Perkembangan pertumbuhan masing-masing unsur pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

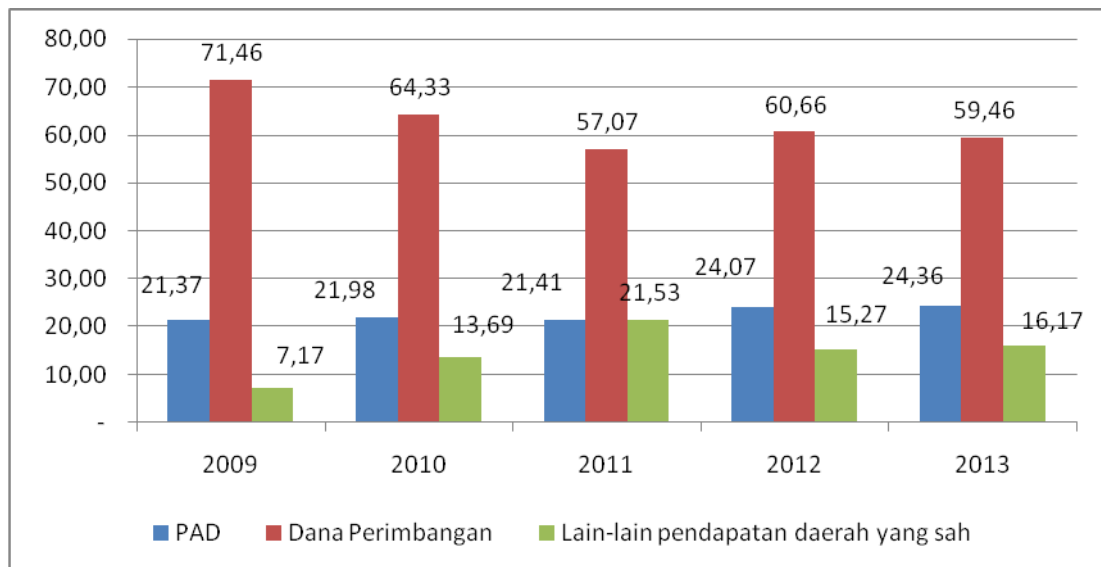
Tabel 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2013 (%)

NO.	Unsur Pendapatan	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1.	Pendapatan Asli Daerah	30,58	11,54	15,71	33,62	12,58	
	a. Pendapatan Pajak Daerah	11,37	9,99	59,47	40,04	40,38	10,68
	b. Hasil Retribusi Daerah	(76,48)	1,69	47,34	40,48	10,73	10,73
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	(2,32)	(4,99)	185,81	136,82	(54,49)	5,00
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	280,09	13,32	3,00	28,27	8,02	13,15
2.	Bagian Dana Perimbangan	4,21	(2,38)	5,42	26,30	9,05	

NO.	Unsur Pendapatan		2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
	a.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1,26	13,15	(13,67)	25,01	1,46	5,44
	b.	Dana Alokasi Umum	2,37	1,16	8,55	26,12	10,70	9,78
	c.	Dana Alokasi Khusus	20,25	(34,81)	(4,54)	29,64	(1,69)	1,77
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		18,50	107,00	86,85	(15,72)	17,82	
	a.	Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	-
	b.	Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34,24	(3,76)	38,43	39,53	(10,87)	19,51
	c.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	85,73	605,23	113,71	(27,25)	36,20	36,20
	d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(16,01)	35,52	64,42	(28,72)	9,40	12,92
	JUMLAH PENDAPATAN		9,90	8,44	18,83	19,01	11,24	

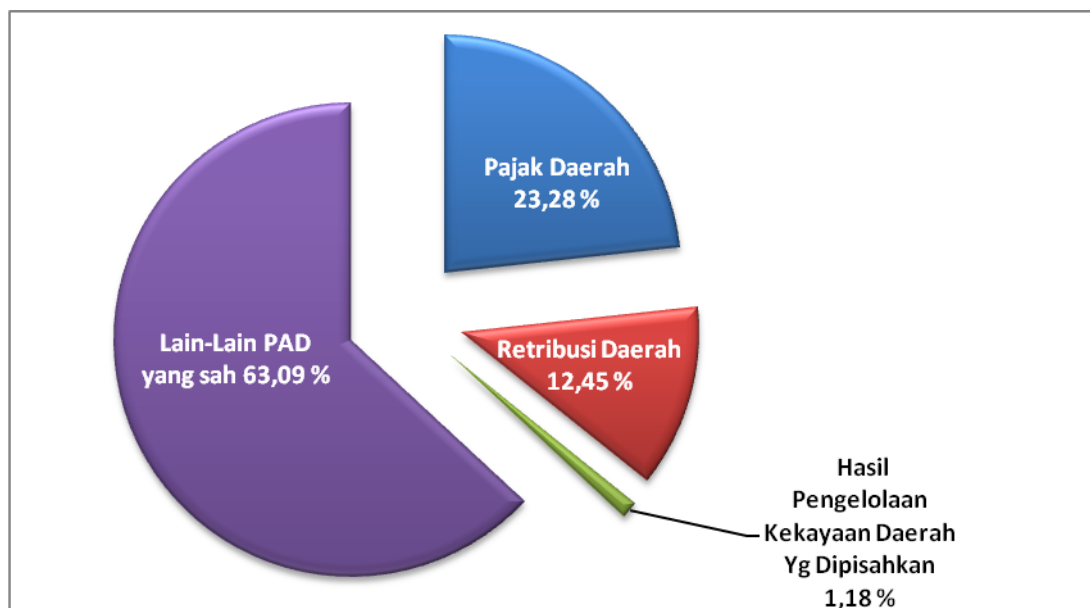
Sumber: DPPKAD Kota Tegal (diolah)

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur menggunakan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 tergolong masih rendah, terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah antara 21,37 - 25,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Tegal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi.



Gambar 3.1 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar berasal dari Lain-lain PAD yang sah, terlihat dari proporsi masing-masing unsur PAD. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar bagi PAD Kota Tegal tahun 2013 sebesar 63,09%, selanjutnya pendapatan pajak daerah sebesar 23,28%, dan retribusi daerah sebesar 12,45%. Sementara itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya memberikan kontribusi sebesar 1,18%. Kontribusi masing-masing unsur PAD tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 3.2



Gambar 3.2 Proporsi Masing-masing Unsur PAD Kota Tegal Tahun 2013 (%)

2. Belanja Daerah

Pos-pos belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah Kota Tegal menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 458.620.879.881,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 474.360.687.266,00 pada tahun 2010, sebesar Rp 572.009.660.567,00 pada tahun 2011, sebesar Rp 586.687.294.770,00 pada tahun 2012, dan sebesar Rp 673.040.144.370,00 pada tahun 2013. Baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung mengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan masing-masing unsur belanja daerah Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Belanja Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2013 (rupiah)

No.	Unsur Belanja		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Belanja Tidak Langsung		204.351.876.599	264.213.093.968	304.404.575.147	321.641.669.180	355.305.436.823
	a.	Belanja Pegawai	183.576.588.914	231.912.329.327	265.599.913.451	302.045.014.008	325.976.076.216
	b.	Belanja Bunga	316.070.805	272.487.184	228.903.564	185.797.572	141.736.324
	c.	Belanja Hibah	6.817.717.000	6.562.511.000	10.245.601.350	4.652.879.400	10.704.605.683
	d.	Belanja Bantuan Sosial	13.566.499.880	24.880.488.057	27.794.146.582	14.065.400.500	17.947.008.400
	e.	Belanja Bantuan Keuangan	-	536.078.400	536.010.200	536.010.200	536.010.200
	f.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000	49.200.000	-	156.567.500	-
2.	Belanja Langsung		254.269.003.282	210.147.593.298	267.605.085.420	265.045.625.590	317.734.707.547
	a.	Belanja Pegawai	26.905.574.272	26.652.571.120	33.689.005.167	35.966.078.450	40.361.053.315
	b.	Belanja Barang dan Jasa	104.751.970.530	117.374.899.898	139.953.220.540	155.775.104.440	176.569.187.536
	c.	Belanja Modal	122.611.458.480	66.120.122.280	93.962.859.713	73.304.442.700	100.804.466.696
	JUMLAH BELANJA		458.620.879.881	474.360.687.266	572.009.660.567	586.687.294.770	673.040.144.370
	SURPLUS / (DEFISIT)		(33.566.045.213)	(13.429.642.609)	(24.292.138.722)	64.117.969.104	50.928.716.715

Sumber: DPPKAD Kota Tegal

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah menunjukkan peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai tumbuh rata-rata per tahun sebesar 15,30%, belanja hibah meningkat sebesar 26,04%, dan belanja bantuan sosial meningkat sebesar 19,65%. Pada Kelompok belanja langsung, masing-masing juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun untuk belanja pegawai sebesar 9,49%, belanja barang dan jasa sebesar 13,99%, dan belanja modal sebesar 8,37%. Belanja bantuan sosial pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat besar disebabkan oleh dianggarkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tegal.

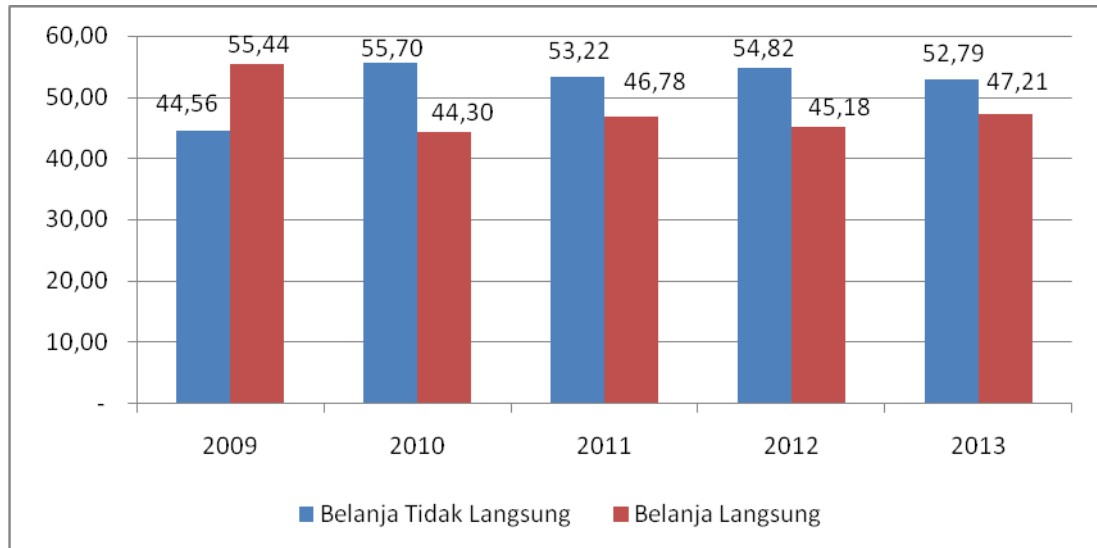
Secara rinci pertumbuhan belanja daerah Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2013 (%)

NO.	Unsur Belanja	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1.	Belanja Tidak Langsung	19,90	29,29	15,21	5,66	10,47	
	a. Belanja Pegawai	14,00	26,33	14,53	13,72	7,92	15,30
	b. Belanja Bunga	81,80	(13,79)	(15,99)	(18,83)	(23,71)	(3,55)
	c. Belanja Hibah	2,35	(3,74)	56,30	(54,59)	130,06	26,04
	d. Belanja Bantuan Sosial	426,30	83,40	11,71	(49,39)	27,60	19,65
	e. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	(0,01)	-	-	-
	f. Belanja Tidak Terduga	-	(34,40)	(100,00)	-	(100,00)	-
2.	Belanja Langsung	14,15	(17,35)	27,34	(0,96)	19,88	
	a. Belanja Pegawai	(43,54)	(0,94)	26,40	6,76	12,22	9,49
	b. Belanja Barang dan Jasa	29,33	12,05	19,24	11,31	13,35	13,99
	c. Belanja Modal	30,29	(46,07)	42,11	(21,99)	37,51	8,37
	JUMLAH BELANJA	16,64	3,43	20,59	2,57	14,72	

Sumber: DPPKAD Kota Tegal (diolah)

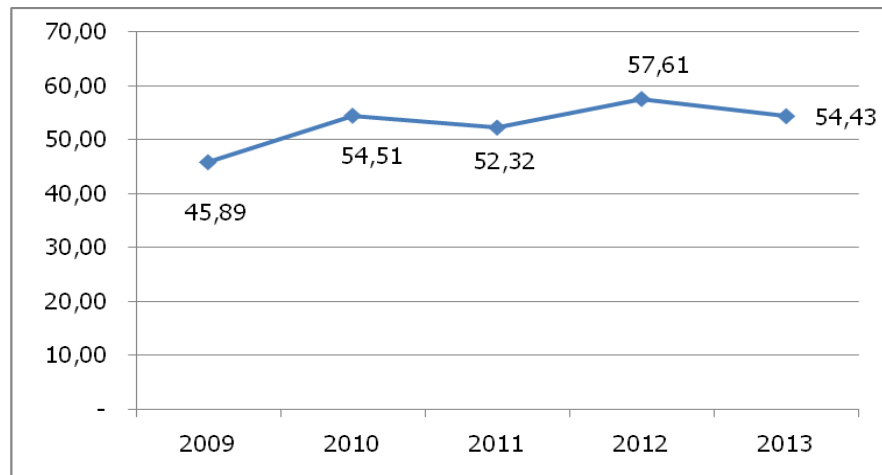
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, di Kota Tegal menunjukkan komposisi yang hampir seimbang. Proporsi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2013 sebesar 47,21%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 52,79%. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berada pada kondisi yang hampir sama. Perbandingan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)

Kinerja belanja daerah juga dapat dilihat dari proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai, begitu pula sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang digunakan untuk belanja aparatur, sehingga konsentrasi APBD bisa lebih pada belanja yang langsung terkait dengan pelayanan publik.

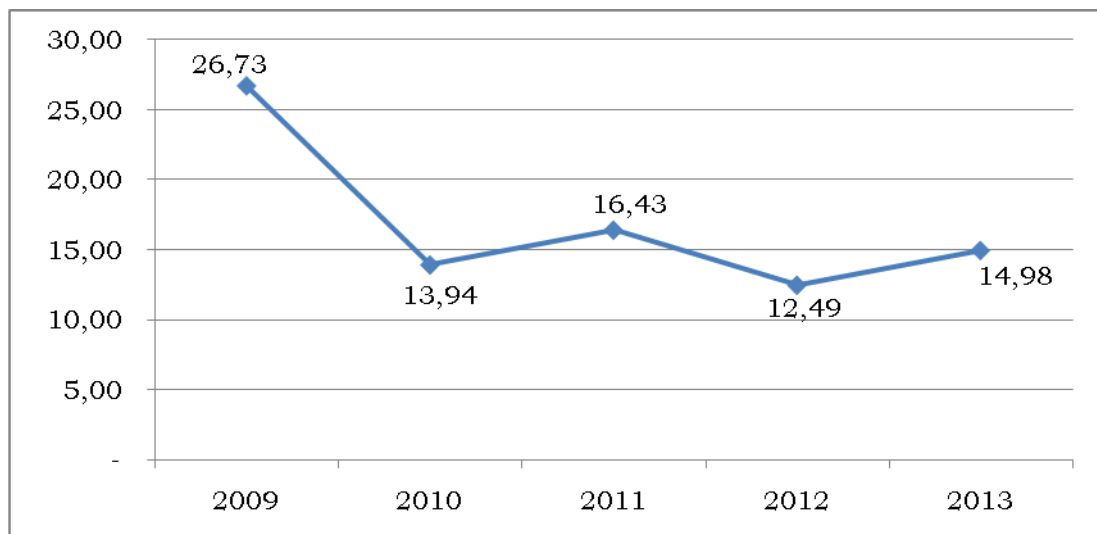
Perkembangan proporsi belanja pegawai (pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 45,89% pada tahun 2009 menjadi sebesar 54,43% pada tahun 2013. Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.4



Gambar 3.4 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (%)

Belanja modal dan belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya terhadap total belanja daerah, maka semakin baik pengaruhnya terhadap perkembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya maka semakin buruk pengaruhnya terhadap perkembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Tegal menunjukkan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu tahun 2009-2013, dari sebesar 26,73% pada tahun 2009 menjadi sebesar 14,98% pada tahun 2013. Perkembangan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Transfer dari Dana Cadangan; (3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan (4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Transfer ke Dana Cadangan; (2) Investasi/Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Kinerja pembiayaan daerah Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Pembiayaan Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2013 (Rupiah)

NO	Unsur Pembiayaan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	112.998.822.088	85.562.488.601	97.974.809.718	73.316.827.722	77.387.437.552
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	49.998.822.088	57.311.131.601	55.577.814.718	65.500.881.722	71.722.961.552
b	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	63.000.000.000	28.251.357.000	42.396.995.000	7.815.946.000	5.664.476.000
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.121.645.274	16.555.031.274	8.181.789.274	65.711.835.274	1.413.843.274
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.544.000.000	334.000.000	-	4.071.000.000	1.048.000.000
b	Pembayaran Utang Pokok	365.843.274	365.843.274	365.843.274	365.843.274	365.843.274
c	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen)	13.211.802.000	15.855.188.000	7.815.946.000	61.274.992.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	90.877.176.814	69.007.457.327	89.793.020.444	7.604.992.448	75.973.594.278
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	57.311.131.601	55.577.814.718	65.500.881.722	71.722.961.552	126.902.310.993

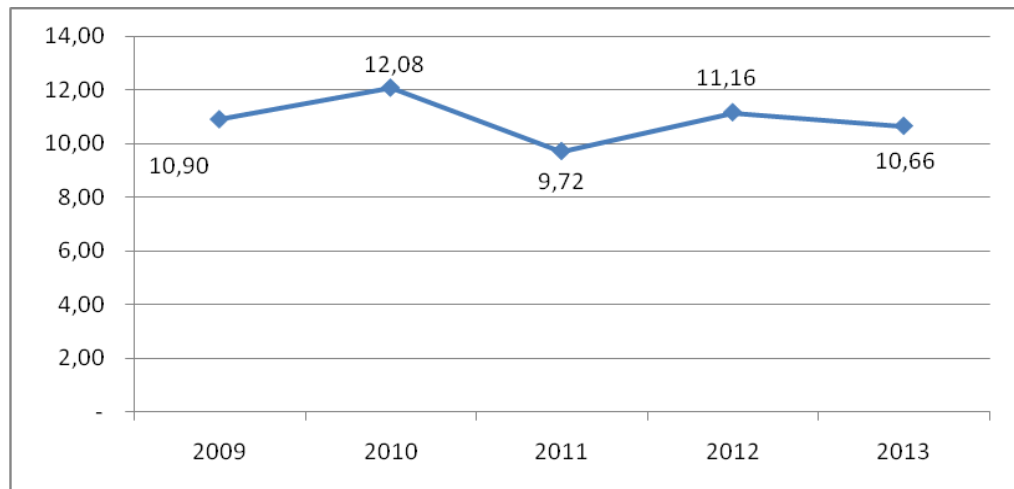
Sumber: DPPKAD Kota Tegal

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Tegal dalam kurun waktu lima tahun cenderung menurun, dari sebesar Rp 112.998.822.088,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 77.387.437.552,00 pada tahun 2013. Sumber utama penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sementara itu pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Tegal dalam kurun waktu enam tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp 22.121.645.274,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 1.413.843.274,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Utang Pokok, dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen). Pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang signifikan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen), mencapai Rp 61.274.992.000,00, sehingga menyebabkan pengeluaran pembiayaan sangat tinggi. Penambahan penyertaan modal pada tahun tersebut yaitu deposito jangka pendek enam bulanan pada Bank-bank Pemerintah, terdiri dari Bank Jateng, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap Total Belanja Daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikan kurang efektifnya perencanaan atau pelaksanaan program/kegiatan di daerah. Sumber SiLPA selain itu adanya dana dari pusat yang tidak terserap.

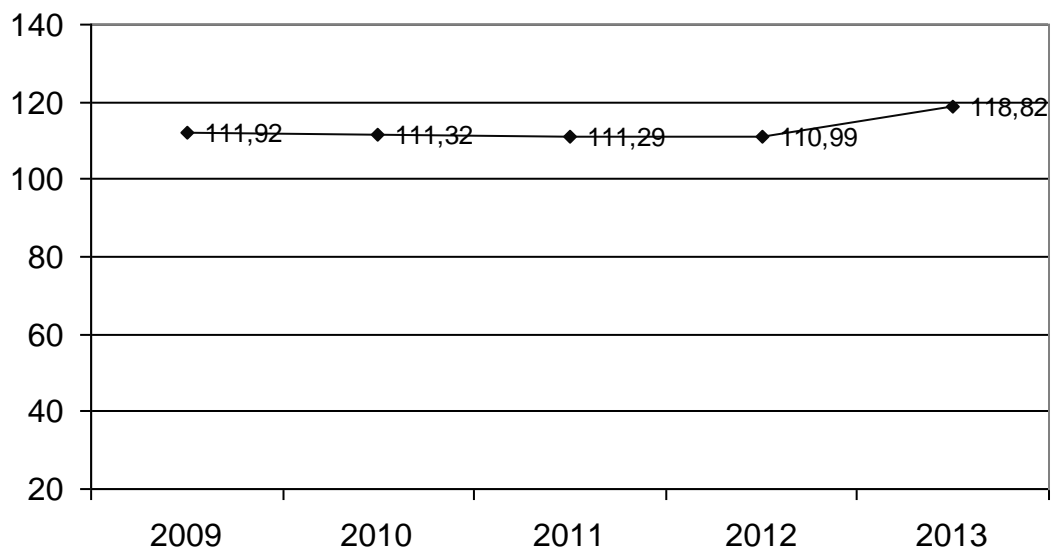
Besarnya persentase SiLPA Terhadap Belanja Daerah Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 antara 10,90%-10,66%. Kondisi ini menunjukkan bahwa SiLPA memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membiayai belanja pembangunan daerah. Kecenderungan ini bisa diartikan bahwa pemerintah Kota Tegal lebih optimis dalam estimasi atas dana yang akan diterima pada tahun anggaran berjalan, akan tetapi kurang berani mengalokasikannya dalam jenis belanja untuk mendanai kegiatan layanan publik dalam APBD.

Perkembangan rasio SiLPA terhadap belanja daerah dapat dilihat pada gambar 3.6



Gambar 3.6 Rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) terhadap Total Belanja Daerah (%)

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan, yang digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Rasio Kemampuan mendanai Belanja Daerah dapat dihitung dari proporsi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap total belanja daerah. Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 menunjukkan angka diatas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Tegal tergolong baik. Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah dapat dilihat pada Grafik 3.7



Gambar 3.7 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kota Tegal (%)

3.1.2. Neraca Daerah

Kondisi neraca daerah Kota Tegal dapat diketahui menggunakan beberapa perhitungan rasio berikut ini.

1. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

2. Rasio Cair

Rasio Cair (Quick Ratio) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\text{Rasio Cair (Quick Ratio)} = \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

3. Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

4. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset.

Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan

kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$$

Hasil penghitungan neraca daerah Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Hasil Penghitungan Neraca Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	10,25	93,45	5,38	5,92	6,80
2	Rasio Cair ((Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	28,18	240,34	10,06	14,64	13,67
3	Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) (Total Kewajiban/Total Aset)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
4	Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset (Total Ekuitas Dana/Total Aset)	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas, dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah Kota Tegal dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya sangat baik, terlihat dari rasio lancar sebesar 6,80 dan rasio cair 13,67 pada tahun 2013. Rasio Hutang Terhadap Aset berada di angka 0,01 artinya pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya (hutang jangka panjangnya sangat kecil). Sementara itu rasio ekuitas dana terhadap aset berada pada angka 0,99 mendekati angka 1 yang berarti baik. Hal ini berarti bahwa pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. Hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana hasil aktifitas operasi, bukan dari pinjaman.

Tabel 3.7
Neraca Keuangan Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2013

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
ASET					
ASET LANCAR	166.642.234.130,00	154.372.499.285,00	132.827.577.795,45	187.666.300.441,40	265.945.777.048,14
Kas	57.311.131.601,00	55.577.814.718,00	65.500.881.722,00	71.722.961.552,00	126.902.794.603,00
Investasi Jangka Pendek	95.005.802.000,00	82.609.633.000,00	48.028.584.000,00	101.487.630.000,00	95.823.154.000,00
Piutang	825.156.054,00	1.140.295.595,00	5.782.317.084,59	1.861.625.277,00	30.294.679.924,12
Piutang Lain-lain	4.400.708.138,00	3.616.385.831,00	3.108.520.718,86	2.393.667.380,40	2.125.995.614,02
Persediaan	9.099.436.337,00	11.428.370.141,00	10.407.274.270,00	10.200.416.232,00	10.799.152.907,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	21.360.915.781,00	18.528.120.523,00	22.414.903.931,00	30.065.913.319,00	33.252.824.066,82
Investasi Non Permanen	1.258.252.438,00	1.032.213.492,00	390.004.700,00	1.010.274.787,00	0,00
Investasi Permanen	20.102.663.343,00	17.495.907.031,00	22.024.899.231,00	29.055.638.532,00	33.252.824.066,82
ASET TETAP	1.250.669.523.612,60	1.290.086.263.081,80	1.396.629.971.109,80	1.463.932.034.591,80	1.572.963.839.352,80
Tanah	583.730.148.015,00	584.648.593.844,00	586.254.824.844,00	592.360.445.374,00	618.593.319.764,00
Peralatan dan Mesin	133.406.442.128,00	153.555.740.641,00	195.225.317.331,00	214.571.259.920,00	244.032.703.882,00
Gedung dan Bangunan	278.822.390.967,00	293.564.777.002,00	335.211.086.403,00	353.016.075.896,00	388.182.172.374,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	227.909.933.425,60	224.247.710.240,80	251.777.950.634,80	273.543.101.948,80	293.678.869.147,80
Aset Tetap Lainnya	20.935.391.877,00	21.341.844.454,00	22.368.478.853,00	22.333.129.553,00	22.336.526.553,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.865.217.200,00	12.727.596.900,00	5.792.313.044,00	8.108.021.900,00	6.140.247.632,00

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA	85.787.682.730,00	111.057.709.223,80	119.039.831.553,80	119.131.682.994,80	130.187.404.751,80
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.263.231.500,00	24.263.231.500,00	24.263.231.500,00	24.263.231.500,00	25.170.193.100,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	30.410.000,00	250.281.000,00	475.701.000,00	516.488.000,00
Aset Lain-lain	61.524.451.230,00	86.764.067.723,80	94.526.319.053,80	94.392.750.494,80	104.500.723.651,80
JUMLAH ASET	1.524.460.356.253,60	1.574.044.592.113,60	1.670.912.284.390,05	1.800.795.931.347,00	2.002.349.845.219,56
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.590.252.573,68	594.746.838,04	12.164.148.255,13	12.120.087.005,78	18.664.350.650,15
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00		
Utang Pajak	0,00	0,00	0,00		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	638.330.458,68	594.746.838,04	551.640.846,13	507.579.596,78	463.995.976,15
Kewajiban kepada			11.612.507.409,00	11.612.507.409,00	18.200.354.674,00

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
pihak ketiga					
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00		
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.951.922.115,00	0,00	0,00		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2.732.282.710,29	2.137.535.872,25	1.585.895.026,12	1.078.315.429,34	614.319.453,19
Utang Dalam Negeri	2.732.282.710,29	2.137.535.872,25	1.585.895.026,12	1.078.315.429,34	614.319.453,19
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH KEWAJIBAN	8.322.535.283,97	2.732.282.710,29	13.750.043.281,25	13.198.402.435,12	19.278.670.103,34
EKUITAS DANA					
EKUITAS DANA LANCAR	161.051.981.556,32	153.777.752.446,96	120.663.429.540,32	175.546.213.435,62	247.281.426.397,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	152.316.933.601,00	138.187.447.718,00	113.529.465.722,00	173.210.591.552,00	222.725.464.993,00
Cadangan untuk Piutang	5.225.864.192,00	4.756.681.426,00	8.890.837.803,45	4.255.292.657,40	32.420.675.538,14
Cadangan untuk Persediaan	9.099.436.337,00	11.428.370.141,00	10.407.274.270,00	10.200.416.232,00	10.799.152.907,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(5.590.252.573,68)	(594.746.838,04)	(12.164.148.255,13)	(12.120.087.005,78)	(18.664.350.650,15)
Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	483.610,00
EKUITAS DANA INVESTASI	1.355.085.839.413,31	1.417.534.556.956,35	1.536.498.811.568,48	1.612.051.315.476,26	1.735.789.748.718,23

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	21.360.915.781,00	18.528.120.523,00	22.414.903.931,00	30.065.913.319,00	33.252.824.066,82
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.250.669.523.612,60	1.290.086.263.081,80	1.396.629.971.109,80	1.463.932.034.591,80	1.572.963.839.352,80
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	85.787.682.730,00	111.057.709.223,80	119.039.831.553,80	119.131.682.994,80	130.187.404.751,80
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	(2.732.282.710,29)	(2.137.535.872,25)	(1.585.895.026,12)	(1.078.315.429,34)	(614.319.453,19)
EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH EKUITAS DANA	1.516.137.820.969,63	1.571.312.309.403,31	1.657.162.241.108,80	1.787.597.528.911,88	1.983.071.175.116,22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.524.460.356.253,60	1.574.044.592.113,60	1.670.912.284.390,05	1.800.795.931.347,00	2.002.349.845.219,56

Sumber: DPPKAD Kota Tegal

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya sebaik-baiknya sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 mencapai sebesar 43,78% hingga 54,32%.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Tegal (Rupiah)

No.	Belanja	2009	2010	2011	2012	2013
a	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	210.482.163.186	258.564.900.447	299.288.918.618	338.011.092.458	366.337.129.531
	Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung	183.576.588.914	231.912.329.327	265.599.913.451	302.045.014.008	325.976.076.216
	Belanja Pegawai pada belanja Langsung	26.905.574.272	26.652.571.120	33.689.005.167	35.966.078.450	40.361.053.315
b	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	480.742.525.155	490.915.718.540	580.191.449.841	652.399.130.044	674.453.987.644
	Belanja	458.620.879.881	474.360.687.266	572.009.660.567	586.687.294.770	673.040.144.370
	Pembiayaan Pengeluaran	22.121.645.274	16.555.031.274	8.181.789.274	65.711.835.274	1.413.843.274
	Prosentase Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (%)	43,78	52,67	51,58	51,81	54,32

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa salah satu permasalahan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lalu dalam hal penggunaan anggaran belanja adalah masih tingginya persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, sehingga alokasi dana pembangunan (belanja modal dan belanja barang dan jasa) untuk keperluan penyelenggaraan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan Kota Tegal terbatas.

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Pemerintah Kota Tegal dalam hal pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan defisit anggaran. Dalam kurun waktu tahun 2009-2013 defisit riil keuangan daerah bervariasi antara Rp 33.566.045.213,00

hingga Rp 24.292.138.722,00. Kebijakan defisit anggaran diambil pemerintah untuk memacu peningkatan pendapatan sehingga dapat menutup defisit anggaran. Namun kenyataannya penutup defisit anggaran Kota Tegal lebih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3.9
Defisit Anggaran dan Komposisi Penutup Defisit Anggaran
Kota Tegal Tahun 2009-2013 (Rupiah)

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
	Defisit Anggaran					
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	425.054.834.668	460.931.044.657	547.717.521.845	650.805.263.874	723.968.861.085
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	458.620.879.881	474.360.687.266	572.009.660.567	586.687.294.770	673.040.144.370
	Surplus/Defisit	(33.566.045.213)	(13.429.642.609)	(24.292.138.722)	64.117.969.104	50.928.716.715
	Penutup Defisit Anggaran					
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	33.566.045.213	13.429.642.609	24.292.138.722	65.500.881.722	71.722.961.552
2.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	63.000.000.000	28.251.357.000	42.396.995.000	7.815.946.000	5.664.476.000

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah Kota Tegal selama tahun 2009-2014, beberapa kebijakan pendapatan daerah perlu dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2015 - 2019, yaitu sebagai berikut :

- a. Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyesuaian tarif pajak daerah;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat dan wajib pajak.
- d. Pengembangan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- e. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- f. Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas manajemen aset daerah;
- g. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Proyeksi pendapatan daerah selama Tahun 2014–2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Rupiah)

NO.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	PENDAPATAN						
1.	Pendapatan Asli Daerah	172.418.930.198	186.354.960.653	202.137.092.519	219.408.766.917	238.316.960.944	259.023.399.974
a.	Pendapatan Pajak Daerah	42.464.334.198	43.916.614.428	45.418.562.641	46.971.877.483	48.578.315.693	50.239.694.090
b.	Hasil Retribusi Daerah	18.006.435.000	19.938.525.476	22.077.929.259	24.446.891.069	27.070.042.480	29.974.658.038
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2.080.042.000	2.184.044.100	2.293.246.305	2.407.908.620	2.528.304.051	2.654.719.254
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	109.868.119.000	120.315.776.649	132.347.354.314	145.582.089.745	160.140.298.720	176.154.328.592
2.	Bagian Dana Perimbangan	449.283.241.000	474.790.126.067	505.796.008.423	530.389.959.108	560.666.361.029	592.725.226.185
a.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	27.972.355.000	29.494.051.112	31.098.527.492	32.790.287.388	34.574.079.022	36.454.908.921
b.	Dana Alokasi Umum	390.732.536.000	414.176.488.160	439.027.077.450	465.368.702.097	493.290.824.222	522.888.273.676
c.	Dana Alokasi Khusus	30.578.350.000	31.119.586.795	35.670.403.481	32.230.969.623	32.801.457.785	33.382.043.588
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	123.996.473.000	140.087.640.394	159.795.117.411	174.009.487.733	182.286.207.756	192.177.715.856

NO.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a.	pendapatan hibah						
b.	Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.853.540.000	29.702.465.654	35.497.416.703	42.422.962.702	50.699.682.725	60.591.190.825
c.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	79.179.445.000	87.842.404.090	97.842.404.090	102.842.404.090	102.842.404.090	102.842.404.090
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.963.488.000	22.542.770.650	26.455.296.618	28.744.120.941	28.744.120.941	28.744.120.941
	JUMLAH PENDAPATAN	745.698.644.198	801.232.727.114	867.728.218.353	923.808.213.758	981.269.529.729	1.043.926.342.015

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja langsung daerah terutama diarahkan pada: pendanaan program dan kegiatan untuk menangani isu strategis pembangunan daerah; pemenuhan pelaksanaan program prioritas daerah sesuai urusan pembangunan daerah; serta mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Proyeksi belanja daerah Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II	BELANJA						
1.	Belanja Tidak Langsung	418.763.833.000	429.050.420.114	433.328.237.353	467.477.598.758	515.303.919.729	497.677.715.184
a.	Belanja Pegawai	386.818.673.000	403.105.260.114	418.383.077.353	453.630.592.758	486.956.913.729	484.330.709.184
b.	Belanja Bunga	98.154.000	98.154.000	98.154.000	-	-	-

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
c.	Belanja Hibah	15.235.625.000	14.235.625.000	4.235.625.000	3.735.625.000	18.735.625.000	3.735.625.000
d.	Belanja Bantuan Sosial	14.075.370.000	9.075.370.000	8.075.370.000	7.575.370.000	7.075.370.000	7.075.370.000
e.	Belanja Bantuan Keuangan	536.011.000	536.011.000	536.011.000	536.011.000	536.011.000	536.011.000
f.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.	Belanja Langsung	388.886.892.000	361.814.463.000	429.387.137.000	453.258.615.000	462.893.610.000	457.784.987.000
a.	Belanja Pegawai	40,661,859,000	37,831,176,574	44,896,548,534	47,392,540,795	48,399,972,046	47,865,816,454
b.	Belanja Barang dan Jasa	200,909,340,000	186,923,001,158	221,832,846,706	234,165,488,892	239,143,184,274	236,503,933,386
c.	Belanja Modal	147,315,693,000	137,060,285,267	162,657,741,759	171,700,585,313	175,350,453,680	173,415,237,161
	JUMLAH BELANJA	807,0.650.72500	790.864,883,114	862,715,374,353	920,736,213,758	978,197,529,729	955,462,702,184

3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah di masa yang akan datang dari sisi penerimaan yaitu menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta Pembayaran Utang Pokok. Proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Rupiah)

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	74.114.924.802	0	0	0	0	0
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	74.114.924.802	0	0	0	0	0
	b. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0	0	0	0	0
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.162.844.000	10.367.844.000	5.012.844.000	3.072.000.000	3.072.000.000	0
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.797.000.000	10.002.000.000	4.647.000.000	3.072.000.000	3.072.000.000	0
	b. Pembayaran Utang Pokok	365.844.000	365.844.000	365.844.000	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	61.952.080.802	(10.367.844.000)	(5.012.844.000)	(3.072.000.000)	(3.072.000.000)	0

Kerangka pendanaan keuangan daerah Kota Tegal tahun 2014-2019 disusun dengan memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2009-2013 menggunakan asumsi tertentu. Beberapa asumsi yang digunakan dalam penghitungan kerangka pendanaan keuangan daerah Kota Tegal tahun 2014-2019 yaitu: (1) Kondisi perekonomian dan kebijakan-kebijakan strategis di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah dan Kota Tegal yang dapat mempengaruhi perolehan pendapatan daerah Kota Tegal tidak mengalami perubahan yang signifikan; dan (2) Tidak ada kebijakan kenaikan gaji pegawai secara signifikan yang dapat mempengaruhi alokasi belanja langsung untuk kepentingan belanja program dan kegiatan pembangunan daerah; dan (3) tidak adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan cara berhutang. Hasil perhitungan kerangka pendanaan Keuangan Daerah Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Pendapatan Daerah	745.698.644.198	801.232.727.114	867.728.218.353	923.808.213.758	981.269.529.729	1.043.926.342.015
1	Pendapatan Asli Daerah	172.418.930.198	186.354.960.653	202.137.092.519	219.408.766.917	238.316.960.944	259.023.399.974
a.	Pendapatan Pajak Daerah	42.464.334.198	43.916.614.428	45.418.562.641	46.971.877.483	48.578.315.693	50.239.694.090
b.	Hasil Retribusi Daerah	18.006.435.000	19.938.525.476	22.077.929.259	24.446.891.069	27.070.042.480	29.974.658.038
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2.080.042.000	2.184.044.100	2.293.246.305	2.407.908.620	2.528.304.051	2.654.719.254
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	109.868.119.000	120.315.776.649	132.347.354.314	145.582.089.745	160.140.298.720	176.154.328.592
2	Dana Perimbangan	449.283.241.000	474.790.126.067	505.796.008.423	530.389.959.108	560.666.361.029	592.725.226.185
a.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	27.972.355.000	29.494.051.112	31.098.527.492	32.790.287.388	34.574.079.022	36.454.908.921
b.	Dana Alokasi Umum	390.732.536.000	414.176.488.160	439.027.077.450	465.368.702.097	493.290.824.222	522.888.273.676
c.	Dana Alokasi Khusus	30.578.350.000	31.119.586.795	35.670.403.481	32.230.969.623	32.801.457.785	33.382.043.588

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Lain- Lain Pendapatan yang sah	123.996.473.000	140.087.640.394	159.795.117.411	174.009.487.733	182.286.207.756	192.177.715.856
a.	pendapatan hibah						
b.	Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.853.540.000	29.702.465.654	35.497.416.703	42.422.962.702	50.699.682.725	60.591.190.825
c.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	79.179.445.000	87.842.404.090	97.842.404.090	102.842.404.090	102.842.404.090	102.842.404.090
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.963.488.000	22.542.770.650	26.455.296.618	28.744.120.941	28.744.120.941	28.744.120.941
II	Belanja Daerah	807,650,725,000	790,864,883,114	862,715,374,353	920,736,213,758	978,197,529,729	955,462,702,184
A	Belanja Tidak Langsung	418,763,833,000	429,050,420,114	433,328,237,353	467,477,598,758	515,303,919,729	497,677,715,184
	Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap belanja daerah (%)	51.85%	54.25%	50.23%	50.77%	52.68%	52.09%
1	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan Mengikat	387,452,838,000	403,739,425,114	419,017,242,353	454,166,603,758	487,492,924,729	484,866,720,184
a	Belanja Pegawai	386,818,673,000	403,105,260,114	418,383,077,353	453,630,592,758	486,956,913,729	484,330,709,184
b	Belanja Bunga	98,154,000	98,154,000	98,154,000	-	-	-
c	Belanja Bantuan Keuangan	536,011,000	536,011,000	536,011,000	536,011,000	536,011,000	536,011,000
2	Belanja Tidak Langsung yang tidak wajib dan Mengikat	31,310,995,000	25,310,995,000	14,310,995,000	13,310,995,000	27,810,995,000	12,810,995,000

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a	Belanja Hibah	15,235,625,000	14,235,625,000	4,235,625,000	3,735,625,000	18,735,625,000	3,735,625,000
b	Belanja Bantuan Sosial	14,075,370,000	9,075,370,000	8,075,370,000	7,575,370,000	7,075,370,000	7,075,370,000
d.	Belanja tidak terduga	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
B	Belanja Langsung	388,886,892,000	361,814,463,000	429,387,137,000	453,258,615,000	462,893,610,000	457,784,987,000
	Proporsi Belanja Langsung terhadap belanja daerah (%)	48.15%	45.75%	49.77%	49.23%	47.32%	47.91%
1	Belanja langsung yang Wajib dan Mengikat	48,289,402,500	50,830,950,000	53,220,005,000	55,721,345,000	58,340,248,000	61,082,240,000
	Program administrasi perkantoran	48,289,402,500	50,830,950,000	53,220,005,000	55,721,345,000	58,340,248,000	61,082,240,000
2	Belanja langsung yang Tidak Wajib dan Mengikat	340,597,489,500	310,983,513,000	376,167,132,000	397,537,270,000	404,553,362,000	396,702,747,000
	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	323,423,062,898	276,962,079,000	345,407,604,000	361,792,567,000	379,902,364,000	371,251,394,000
	Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya	17,174,426,602	34,021,434,000	30,759,528,000	35,744,703,000	24,650,998,000	25,451,353,000
	Surplus (Defisit)	(61,952,080,802)	10,367,844,000	5,012,844,000	3,072,000,000	3,072,000,000	88,463,639,831
III	Pembiayaan						
A	Penerimaan Pembiayaan	74.114.924.802	-	-	-	-	-

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	74.114.924.802	-	-	-	-	-
2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-	-	-
B	Pengeluaran Pembiayaan	12.162.844.000	10.367.844.000	5.012.844.000	3.072.000.000	3.072.000.000	-
1	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat	365.844.000	365.844.000	365.844.000	-	-	-
a	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
b	Pembayaran pokok hutang	365.844.000	365.844.000	365.844.000	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan yang tidak wajib dan mengikat	11.797.000.000	10.002.000.000	4.647.000.000	3.072.000.000	3.072.000.000	-
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.797.000.000	10.002.000.000	4.647.000.000	3.072.000.000	3.072.000.000	-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen)	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	61,952,080,802	(10,367,844,000)	(5,012,844,000)	(3,072,000,000)	(3,072,000,000)	0
	SILPA	0	0	0	0	0	88,463,639,831

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I dan II dihitung berdasarkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Hasil perhitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Tegal
Tahun 2014-2019 (Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan	745,698,644,198	801,232,727,114	867,728,218,353	923,808,213,758	981,269,529,729	1,043,926,342,015
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	74,114,924,802	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-	-	-
	Total penerimaan	819,813,569,000	801,232,727,114	867,728,218,353	923,808,213,758	981,269,529,729	1,043,926,342,015
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Prioritas I)	759,531,147,398	731,898,298,114	818,010,695,353	871,680,515,758	925,735,536,729	917,200,354,184
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	60,282,421,602	69,334,429,000	49,717,523,000	52,127,698,000	55,533,993,000	126,725,987,831

Pada Tabel 3.15 dihitung rencana alokasi pengeluaran prioritas I, prioritas II dan prioritas III pembangunan daerah Kota Tegal tahun 2014-2019. Penetapan urutan prioritas (I, II, dan III) lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besaran persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dirancang untuk menunjang prioritas dimaksud.

Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tegal
Tahun 2014-2019 (Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Kapasitas keuangan daerah	819,813,569,000	801,232,727,114	867,728,218,353	923,808,213,758	981,269,529,729	1,043,926,342,015
1	Pendapatan daerah	745,698,644,198	801,232,727,114	867,728,218,353	923,808,213,758	981,269,529,729	1,043,926,342,015
2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	74,114,924,802	-	-	-	-	-
A	Rencana Alokasi Prioritas I (wajib dan mengikat)	435,742,240,500	454,570,375,114	472,389,739,853	510,207,726,133	546,336,103,223	546,652,057,602
1	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan Mengikat	387,452,838,000	403,739,425,114	419,017,242,353	454,166,603,758	487,492,924,729	484,866,720,184
a	Belanja Pegawai	386,818,673,000	403,105,260,114	418,383,077,353	453,630,592,758	486,956,913,729	484,330,709,184
b	Belanja Bunga	98,154,000	98,154,000	98,154,000	-	-	-
c	Belanja Bantuan Keuangan	536,011,000	536,011,000	536,011,000	536,011,000	536,011,000	536,011,000

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Belanja langsung yang Wajib dan Mengikat	48,289,402,500	50,830,950,000	53,372,497,500	56,041,122,375	58,843,178,494	61,785,337,418
a	Program administrasi perkantoran	48,289,402,500	50,830,950,000	53,372,497,500	56,041,122,375	58,843,178,494	61,785,337,418
3	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat	365,844,000	365,844,000	365,844,000	0	0	0
a	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
b	Pembayaran pokok hutang	365,844,000	365,844,000	365,844,000	0	0	0
II	Kapasitas riil kemampuan keuangan	384,071,328,500	346,662,352,000	395,338,478,500	413,600,487,625	434,933,426,506	497,274,284,413
B	Rencana Alokasi Pengeluaran prioritas II	406,061,318,602	395,835,897,000	460,146,665,000	489,003,318,000	487,544,608,000	483,236,340,000
1	Belanja langsung yang Tidak Wajib dan Mengikat	406,061,318,602	395,835,897,000	460,146,665,000	489,003,318,000	487,544,608,000	483,236,340,000
a	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	388,886,892,000	361,814,463,000	429,387,137,000	453,258,615,000	462,893,610,000	457,784,987,000
b	Belanja Program Pendukung Lainnya	17,174,426,602	34,021,434,000	30,759,528,000	35,744,703,000	24,650,998,000	25,451,353,000
C	Rencana Alokasi pengeluaran prioritas III	43,107,995,000	35,312,995,000	18,957,995,000	16,382,995,000	30,882,995,000	12,810,995,000

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Belanja Tidak Langsung yang tidak wajib dan Mengikat	31,310,995,000	25,310,995,000	14,310,995,000	13,310,995,000	27,810,995,000	12,810,995,000
a	Belanja Hibah	15,235,625,000	14,235,625,000	4,235,625,000	3,735,625,000	18,735,625,000	3,735,625,000
b	Belanja Bantuan Sosial	14,075,370,000	9,075,370,000	8,075,370,000	7,575,370,000	7,075,370,000	7,075,370,000
c	Belanja tidak terduga	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2	Pengeluaran Pembiayaan yang tidak wajib dan mengikat	11,797,000,000	10,002,000,000	4,647,000,000	3,072,000,000	3,072,000,000	0
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,797,000,000	10,002,000,000	4,647,000,000	3,072,000,000	3,072,000,000	0
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen)	0	0	0	0	0	0
	Surplus anggaran riil atau Berimbang	365,844,000	365,844,000	365,844,000	-	-	-
	SILPA	0	0	0	0	0	0

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Pemasalahan Pembangunan Masing-Masing Urusan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut.

4.1.1 Urusan Wajib

1. Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan di Kota Tegal secara umum adalah belum optimalnya pelaksanaan dan pencapaian ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan (5K) dalam pelayanan pendidikan di Kota Tegal. Secara rinci permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Kasar PAUD relatif rendah, pada tahun 2013 APK PAUD sebesar 30,80%.
- 2) Ruang kelas kondisi baik masih belum maksimal karena baru mencapai 80,32% pada tingkat SD/MI, 80,97% pada tingkat SMP/MTs, dan 86,22% pada jenjang SMA/SMK/MA.
- 3) Persentase lembaga PAUD dengan Kondisi layak relatif rendah, pada tahun 2013 persentase lembaga PAUD kondisi layak, sebesar 43,07%
- 4) Angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP dan SMA cukup tinggi yaitu 0,53% SMP dan 1,36% SMA pada tahun 2013, ambang batas angka putus sekolah SMP dan SMA adalah 0,12%.
- 5) Guru SD/MI tidak memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan D4 masih relatif tinggi (guru SD/MI dengan kualifikasi S1 dan D IV sebesar 66,66%) sehingga bisa mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar dan Guru SD/MI yang bersertifikasi baru sebesar 72,3% pada tahun 2013.
- 6) Tingkat pemerataan pendidikan non formal belum optimal yang disebabkan “*data base*” kebutuhan pendidikan non formal belum dimiliki secara lengkap.

2. Kesehatan

- 1) Masih tingginya AKI dan AKB. Angka Kematian Ibu di Kota Tegal cenderung meningkat dengan data tahun 2013 sebesar 7 kasus kematian ibu. Sedangkan Angka Kematian Bayi tahun 2013 sebesar 12,38 per 1.000 kelahiran hidup. Secara nasional AKB di Kota Tegal telah mencapai target MDGs nasional pada tahun 2015 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup dan dibawah target MDGs dalam Pergub No 20 tahun 2011 tentang Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 8,5 per 1.000 kelahiran hidup.
- 2) Masih tingginya prevalensi Balita gizi buruk dengan jumlah kecamatan rawan pangan sebanyak 1 kecamatan. Prevalensi Balita gizi buruk pada tahun 2013 sebesar 1,75%.
- 3) Masih belum optimalnya pelayanan kunjungan ibu hamil K4. Hal ini dapat dilihat dari masih belum tercapainya cakupan kunjungan ibu hamil K4 95,9%.
- 4) Masih tingginya penularan penyakit menular terutama DBD, TB BTA (+) dan HIV AIDS.
- 5) Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya cakupan bayi dengan ASI Eksklusif
- 6) Masih belum optimalnya pengembangan lingkungan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan rumah sehat, pada tahun 2013 masih relatif kecil yaitu 89,17%.

3. Pekerjaan Umum

- 1) Belum optimalnya kondisi jalan dan jembatan di Kota Tegal dalam mendukung pengembangan wilayah. Hal ini terlihat dari kondisi jalan baik tahun 2013 sebesar 73,92%.
- 2) Belum optimalnya fungsi saluran drainase di Kota Tegal. Tahun 2013 kondisi drainase utama kondisi rusak sebanyak 56%. Sementara untuk kondisi saluran sekunder rusak sebanyak 44%. Kondisi saluran drainase tersier rusak sebesar 51%.
- 3) Belum optimalnya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penanganan jaringan irigasi dan drainase lintas wilayah kabupaten
- 4) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum. Ini terlihat dari cakupan pelayanan PDAM Kota Tegal Kota Tegal sampai tahun 2012 adalah 20,09%.
- 5) Belum optimalnya penanganan banjir. Tahun 2013 masih terdapat 10% kawasan yang masih tergenang banjir.

- 6) Belum optimalnya penataan utilitas prasarana perkotaan dalam rangka penataan wajah kota.
- 7) Masih kurangnya tingkat efisiensi penerangan jalan umum.

4. Perumahan

- 1) Masih banyaknya kebutuhan rumah yang belum dapat terpenuhi oleh pengembang maupun masyarakat, hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni yaitu sebanyak 671 unit sampai tahun 2013.
- 2) Upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bersanitasi di Kota Tegal belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari masih dijumpainya kawasan-kawasan permukiman terutama di wilayah pesisir yang masih rendah sanitasinya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2013 baru mencapai sebesar 76,34%.
- 3) Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh di beberapa wilayah Kota Tegal, yang ditunjukkan dengan kondisi pada tahun 2013 persentase kawasan kumuh sebesar 4,01%.
- 4) Dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran masih belum sesuai harapan. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Kota Tegal cukup tinggi. Persentase armada pemadam kebakaran yang mampu memuat 3.000-5.000 liter pada WMK baru 33,33%.
- 5) Ketersediaan lahan untuk pemakaman sangat terbatas, sementara itu kebutuhan akan pemakaman di Kota Tegal semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2013 hanya sebesar 0,96/1000 penduduk.

5. Penataan Ruang

- 1) Sampai pada tahun 2013, kawasan strategis di Kota Tegal belum memiliki RTBL.
- 2) Belum ditetapkannya Perda RDTRK. Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tegal telah menyusun dokumen materi teknis dan Raperda RDTRK untuk SPPK Kejambon dan SPPK Kraton, kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 menyusun Raperda RDTRK untuk SPPK Sumurpanggang dan SPPK Bandung. Tetapi seluruh RDTRK SPPK belum ada yang ditetapkan menjadi Perda.

- 3) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami peraturan tata ruang.
- 4) Masih adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Belum optimalnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang.

6. Perencanaan Pembangunan

- 1) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- 2) Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Belum optimalnya penyusunan rencana pembangunan di bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam.

7. Perhubungan

- 1) Belum adanya perencanaan penyelenggaraan perhubungan.
- 2) Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum (sarana prasarana dan aparatur). ketersediaan angkutan umum pada seluruh ruas jalan baru mencapai 29,06%.
- 3) Masih kurangnya perlengkapan jalan yang terpasang. Tahun 2013 jumlah rambu lalu lintas sebanyak 1.543 unit, kondisi marka jalan 958 m², 59 unit APILL, dan Guardrail 1000 m².
- 4) Belum optimalnya prasarana perlintasan sebidang.
- 5) Belum optimalnya sistem pengujian kendaraan bermotor.
- 6) Jumlah pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor cukup tinggi. Persentase KBWU yang lulus uji dibandingkan dengan KBWU yang diuji tahun 2013 sebesar 97,4%.
- 7) Masih rendahnya fasilitas terminal dan sumberdaya manusia.
- 8) Pelayanan dalam bidang perhubungan laut masih kurang.

8. Lingkungan Hidup

- 1) Masih belum optimalnya penanganan sampah yang terangkut. Pada tahun 2013, sampah yang mendapatkan penanganan baru 60,2%.
- 2) TPA Muarareja yang selama ini digunakan akan berakhir pada tahun 2015, sementara itu warga disekitar lokasi menolak untuk perpanjangan TPA.

- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- 4) Tingkat informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 93% masih berada di bawah target SPM sebesar 100% tahun 2013.
- 5) Menurunnya luasan ruang terbuka hijau menjadi 31,15% meskipun persentasenya masih di atas standar.
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk penyediaan ruang terbuka hijau oleh sektor privat.
- 7) Menurunnya kualitas lingkungan di wilayah pesisir ditandai dengan terjadinya rob, abrasi, berkurangnya tanaman bakau dan pengelolaan sampah di muara sungai.
- 8) Masih terbatasnya sarana monitoring polusi, pada tahun 2013 sarana yang tersedia baru mencapai 20%.

9. Pertanian

- 1) Masih rendahnya kesadaran untuk mengurus sertifikat tanah oleh pemilik lahan, diperlihatkan dari rendahnya persentase lahan yang bersertifikat dibandingkan luas daratan yaitu baru 30,38% pada tahun 2012.
- 2) Belum optimalnya pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah, ditandai masih terdapat 55 bidang tanah yang belum bersertifikat.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Belum seluruh penduduk memiliki akta kelahiran, hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 55% penduduk belum memiliki akta kelahiran
2. Belum seluruh wajib KTP memiliki KTP, hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 12% wajib KTP belum memiliki KTP

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Hal ini dapat dilihat dari belum aktifnya Pokja PUG, belum terbentuknya *focal point*, masih dibentuknya forum anak di tingkat Kota dan 1 di Kelurahan.
- 2) Masih kurangnya kualitas hidup perempuan, hal ini dapat dilihat dari rendahnya perempuan yang bekerja. Pada tahun 2013 persentase perempuan yang bekerja sebesar 57,53%
- 3) Belum optimalnya penanganan kekerasan perempuan dan anak. Hal ini ditandai dengan masih belum dilatihnya petugas

kesehatan, petugas penanganan pengaduan kekerasan perempuan

- 4) Lemahnya jaringan dalam penanganan kekerasan perempuan, hal ini dapat dilihat belum terbentuknya forum gender di Kota Tegal.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Masih tingginya Unmetneed yang menyebabkan masih banyak PUS yang belum mengikuti program keluarga berencana. Pada tahun 2013 unmetneed sebesar 15,21%, sementara target MDGs dan SPM pada tahun 2015 sebesar 4%.
- 2) Masih belum optimalnya PUS yang ber KB sebagai anggota UPPKS, hal ini dapat dilihat dari Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 56,87%.
- 3) Masih belum optimalnya pembinaan peran serta masyarakat untuk ber KB secara mandiri.
- 4) Belum optimalnya pengembangan BKB Posyandu dan PADU dalam peningkatan partisipasi keluarga berencana, hal ini dapat dilihat dari Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB masih 88,85% sedangkan target SPM adalah sebesar 100%

13. Sosial

- 1) Belum optimalnya penanganan PMKS, tahun 2013 baru 8,79% yang tertangani
- 2) Rendahnya motivasi PMKS untuk berusaha.
- 3) Belum lengkapnya sarana dan prasarana tanggap darurat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tegal,
- 4) Masih adanya penyandang cacat dan lansia tidak potensial yang belum menerima jaminan sosial.
- 5) Belum semua panti sosial memiliki sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial secara lengkap.
- 6) Belum ada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, sementara target SPM sebesar 60% pada tahun 2015
- 7) Masih adanya PSKS tidak melaksanakan usaha kesejahteraan Sosial. Tahun 2013 baru sebesar 42,4% PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

14. Ketenagakerjaan

- 1) Masih terbatasnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan, tahun 2013 baru sebesar 14,51%.

- 2) Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja.
- 3) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, tahun 2013 sebesar 9,25%.
- 4) Belum optimalnya perjanjian bersama dalam menyelesaikan perselisihan buruh. Hal ini terlihat pada tahun 2013 baru sebesar 5% perselisihan buruh diselesaikan dengan perjanjian bersama
- 5) Masih adanya tenaga kerja yang tidak mengikuti program Jamsostek. Tahun 2013 baru sebesar 57,24% pekerja yang mengikuti Jamsostek
- 6) Masih adanya perusahaan yang belum dilakukan pemeriksaan terkait keselamatan pekerja, tahun 2013 baru sebesar 83,77% perusahaan terdaftar yang telah diperiksa
- 7) Masih adanya peralatan yang terdaftar belum dilakukan pengujian, tahun 2013 baru sebesar 94,19%.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Menurunnya jumlah BPR/LKM Aktif. Terlihat dari capaian indikator di tahun 2011 sebanyak 4 BPR/LKM aktif dan di tahun 2013 menurun menjadi 3 BPR/LKM aktif.
- 2) Kemampuan pemasaran produk UMKM yang terbatas.
- 3) Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku Usaha (UMKM, Usaha Besar, dan BUMN)
- 4) Terbatasnya modal dan akses kepada sumber dan pelaku lembaga keuangan.
- 5) Belum semua koperasi di Kota Tegal berada dalam kondisi aktif dan sehat. Persentase koperasi aktif di Kota Tegal baru mencapai 71,64% dan koperasi sehat 92,86%.
- 6) Belum adanya sinergitas antar UMKM yang bergabung dalam suatu koperasi
- 7) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah

16. Penanaman Modal Daerah

- 1) Belum optimalnya promosi investasi di Kota Tegal, secara kualitas dan kuantitas.
- 2) Belum disusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang menggambarkan potensi dan peluang investasi yang dapat dioptimalkan di Kota Tegal.
- 3) Daya tarik investasi di Kota Tegal belum optimal karena informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan belum dikemas dalam informasi yang menarik.
- 4) Belum optimalnya kualitas dan kapabilitas SDM teknis pelayanan perijinan dan penanaman modal.

- 5) Belum optimalnya koordinasi pengendalian dan pengembangan penanaman modal terutama untuk investasi PMDN skala di bawah 10 milyar dan UMKM sesuai kewenangan daerah.
- 6) Belum optimalnya koordinasi dalam penyediaan sarana pendukung investasi.
- 7) Belum terusunnya regulasi yang pro investasi.
- 8) Peningkatan iklim kondusif terutama pada aspek keamanan dan kenyamanan berusaha.

17. Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kota Tegal, karena saat ini benda cagar budaya yang terdata baru 37 unit.
- 2) Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan pemerintah dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya. Hingga tahun 2013, cakupan fasilitasi seni baru mencapai 30% dan pengkajian seni baru mencapai 13,33%.

18. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga
- 2) Masih minimnya prestasi pemuda di tingkat regional dan nasional. Hal ini disebabkan belum optimalnya fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga. Kondisi ini tercermin dari pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang masih kurang, yaitu sebanyak 3 kegiatan kepemudaan.
- 3) Masih minimnya cabang olahraga yang mempunyai prestasi di event tingkat regional maupun nasional. kondisi ini terlihat dari masih minimnya jumlah cabang olahraga berprestasi di Kota Tegal yaitu sebanyak 3 cabang olahraga.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Belum optimalnya partisipasi dalam menjaga ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kejahatan, hal ini diketahui dari angka kriminalitas sebanyak 137 kasus pada tahun 2012 menjadi 145 kasus pada tahun 2013;
- 2) Belum optimalnya pencegahan, penanganan pelanggaran dan penegakan Perda, termasuk pelanggaran perizinan dan Perda K3, disebabkan terbatasnya jumlah petugas dan intensitas patroli Satpol PP yang bertugas dan rata-rata 3 kali per hari melakukan patroli;

- 3) Belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan penanganan kasus penyakit masyarakat yang dilaporkan, masih termasuk rendah yaitu sebesar 5,27% pada tahun 2013;
- 4) Belum optimalnya cakupan pendidikan politik masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama sampai di tingkat kelurahan;
- 5) Belum optimalnya upaya pencegahan dini dan kesadaran masyarakat terhadap bencana di Kota Tegal, terutama banjir dan rob di wilayah pesisir .

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

- 1) Belum optimalnya penataan peraturan perundangan sesuai dengan tata peraturan peundangan yang baru, diketahui dari rata-rata jumlah Perda yang ditetapkan dari tahun 2009 – 2013 rata-rata sebanyak 5 – 8 Perda;
- 2) Belum semua unit-unit pelayanan SKPD memiliki pedoman standar pelayanan publik (SPP) dan melaksanakan secara konsisten, sampai dengan tahun 2013 sebanyak 407 telah ditetapkan SK Walikota Tegal dan perlunya ditingkatkan;
- 3) Belum optimalnya pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta promosi penanaman modal secara intensif ;
- 4) Belum optimalnya peningkatan profesionalisme aparatur, kapasitas aparatur melalui studi lanjut, diklat keahlian, fungsional dan kepemimpinan agar sesuai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment) sejalan kebijakan nasional;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset dan barang milik secara efektif dan efisien;
- 6) Belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam pencegahan dan penanganan kasus hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.

21. Ketahanan Pangan

- 1) Rendahnya produksi berbagai jenis bahan pangan seperti padi yang menurun drastis dari tahun 2009 sebesar 6600 ton menjadi 4839 ton pada tahun 2013. Kondisi ini menjadikan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan bahan pangan dari daerah sekitar dalam memenuhi kebutuhan pangan.

- 2) Belum terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang, dan aman disebabkan pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan, serta belum optimalnya pemanfaatan jenis pangan lokal.
- 3) Adanya berbagai kasus penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan.

22. Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
- 2) Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa, hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih rendah dan kapasitas pelaku usaha masih rendah.
- 3) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
- 4) Belum optimalnya kinerja aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan kelurahan.

23. Statistik

- 1) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- 2) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.

24. Kearsipan

- 1) Belum optimalnya sistem pengelolaan administrasi kearsipan yang memenuhi standar pengarsipan.
- 2) Masih rendahnya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk elektronik.
- 3) Sistem keamanan penyimpanan data kearsipan belum merata di seluruh SKPD.
- 4) Kurangnya kegiatan peningkatan kualitas SDM kearsipan.
- 5) Rendahnya minat SDM untuk berkarier dibidang kearsipan

25. Komunikasi dan Informatika

- 1) Update data website belum optimal yang ditunjukkan dengan data yang tersaji dalam laman web statis.

- 2) Belum adanya rencana induk dan tata kelola TIK Kota Tegal.
- 3) Jumlah SKPD yang memiliki website masih berada di bawah 50%.
- 4) Kurangnya pembinaan dan pelatihan kapasitas SDM bidang Kominfo, hal ini dapat dilihat selama lima tahun baru 1 kali dilaksanakan.
- 5) Masing-masing SKPD pengampu sarana desiminasi informasi dalam pendistribusian informasi nasional belum terkoordinasi dengan baik.
- 6) Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Tegal.

26. Perpustakaan

- 1) Kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan.
- 2) Menurunnya pertumbuhan kunjungan ke perpustakaan yang ditandai dengan kunjungan pada tahun 2013 sebesar -37,38% dibandingkan tahun 2012 sebesar 11,14%.
- 3) Tenaga kepastakaan yang mendapatkan pembinaan masih sedikit yaitu baru 58,33%.
- 4) Belum adanya tenaga profesional perpustakaan
- 5) Koleksi buku diperpustakaan pertumbuhannya menurun yang ditunjukkan dengan kondisi tahun 2013 menurun sebanyak 8.041 buku dibandingkan tahun 2012 sebanyak 13.481.

3.1.2 Urusan Pilihan

1. Pertanian

- 1) Kurang optimalnya produksi dan produktivitas pertanian ditandai produksi padi sebesar 4.839 ton pada tahun 2013, dan produktivitas padi 65,57 kw/ha.
- 2) Rendahnya tingkat pendapatan petani akibat dari sempitnya lahan garapan, rendahnya teknologi pertanian dan belum optimalnya penerapaaan pola usaha tani yang baik.
- 3) Menurunnya beberapa populasi ternak dan hasil produksi peternakan, khususnya sapi perah, kerbau, ayam buras, ayam ras, itik dan puyuh.
- 4) Masih adanya kasus penyakit ternak, ditandai dengan angka kesakitan ternak.

2. Pariwisata

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalah dibandingkan obyek wisata di kabupaten/kota lain ;

- 2) Masih kurangnya pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan/binaan manusia ;
- 3) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru ;

3. Kelautan dan Perikanan

- 1) Menurunnya produksi perikanan tangkap, dengan kondisi capaian tahun 2013 sebesar 14.929.219 kg, sedangkan tahun 2009 sebesar 25.285.303 kg.
- 2) Menurunnya produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya air payau, produksi tahun 2012 484.130 kg turun menjadi 398.746 pada tahun 2013.
- 3) Belum optimalnya kualitas hasil olahan perikanan, dan tingkat konsumsi ikan.

4. Perdagangan

- 1) Masih terbatasnya pengawasan terhadap pasar yang bisa berakibat pada tidak terlindunginya konsumen. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya pasar yang belum diawasi, karena yang terawasi baru mencapai 30%.
- 2) Belum optimalnya penerapan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- 3) Belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 4) Menurunnya jumlah produk daerah yang diterima oleh pasar internasional, dari 7 jenis menjadi 4 jenis.
- 5) Masih terbatasnya akses pelaku UDKM terhadap kegiatan promosi/pameran produk. Total baru 1,5% pelaku UDKM yang bisa terfasilitasi kegiatan promosi/pameran produk tiap tahunnya.
- 6) Belum semua kelompok pedagang/usaha informal mendapat pembinaan dari pemerintah. Kelompok yang terbina baru mencapai 86,46% dari total kelompok pada taun 2013.
- 7) Masih banyaknya pedagang kaki lima yang belum tertata sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Lokasi PKL yang tertata baru mencapai 25%.
- 8) Masih adanya pasar tradisional yang kumuh dan belum memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan. Total pasar yang belum memenuhi syarat tersebut mencapai 28,57%.

5. Perindustrian

- 1) Masih rendahnya kelompok-kelompok pengrajin yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah, tahun 2013 baru sekitar 8,1%.
- 2) Masih sedikitnya industri yang telah memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas), karena yang telah memiliki baru 21 %.
- 3) Masih rendahnya kedaran pelaku IKM untuk mengurus legalitas/perijinan atas produk yang dihasilkan, karena total IKM yang telah mengurus P-IRT dan sertifikasi halal baru mencapai 10,66%.
- 4) Masih terbatasnya akses pelaku IKM dalam mengikuti kegiatan pameran promo produk.
- 5) Masih kecilnya persentase industri yang memenuhi standar kelayakan industri (3,16%).

6. Transmigrasi.

- 1) Rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, ditandai dengan tidak adanya peserta tranmigrasi dari Kota Tegal.

4.2 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan pada bab 2 dan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Tegal pada lima tahun yang akan datang. Isu strategis tersebut dirumuskan dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan mendasar dalam pembangunan daerah. Isu terebut dikelompokkna menjadi 7 kelompok yaitu, kemiskinan, reformasi birokrasi, pengangguran, pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kondusivitas daerah dan demokratisasi.

1. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kota Tegal dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah adalah tertinggi ketiga setelah Kota Surakarta dan Magelang, dan dibawah rata-rata Jawa Tengah. Tren perkembangannya tahun 2008-2012 cenderung turun pada tahun 2012 sebesar 10,04% dari jumlah penduduk di Kota Tegal. Selama kurun waktu 2010 – 2011 persentase penduduk miskin bergerak lamban yaitu 10,62% pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,81% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 turun menjadi 10,04%. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan belum optimal. Indeks kedalaman kemiskinan P1 sebesar

0,95 walaupun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya namun ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin masih tinggi.

2. Reformasi Birokrasi

Upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kota Tegal melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. *E-government* yang ada belum secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah menurut opini BPK masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013 walaupun pada tahun 2011 pernah mendapatkan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tegal tertinggi diantara kota-kota lainnya di Jawa Tengah. TPT cenderung turun dari 2008-2011, namun pada 2011-2013 meningkat. Pada tahun 2013 TPT sebesar 9,25% dari total Angkatan Kerja lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2012 TPT Kota Tegal sebesar 8,49% dari total Angkatan Kerja.

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi belum secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal pada tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Tegal sebesar 4,72% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,07%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut membawa dampak salah satunya pada peningkatan angka pengangguran terbuka. Selain itu upaya pembangunan ekonomi Kota Tegal yang berdaya saing dengan berbasis pada potensi lokal belum secara optimal mampu menggerakkan perekonomian Kota Tegal.

5. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi aktivitas penduduk belum terlaksana secara optimal. Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Tegal pada tahun 2013 baru mencapai 73,92%, ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebesar 19,68%, saluran drainase utama dalam kondisi rusak sebesar 56%, cakupan pelayanan air minum baru mencapai 20,09% dan 10% kawasan di Kota Tegal masih rentan terhadap ancaman bencana banjir.

6. Kualitas Sumberdaya Manusia dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal masih relatif rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Tegal pada tahun 2012 sebesar 74,63 lebih tinggi dari Jawa Tengah namun terendah dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah. Derajat kesehatan masyarakat Kota Tegal masih relatif rendah. Usia Harapan Hidup penduduk Kota Tegal sebesar 69,12 tahun terendah dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah. Kasus kematian ibu di Kota Tegal pada tahun 2012 di antara kota-kota di Jawa Tengah adalah yang tertinggi kedua setelah Kota Semarang dengan jumlah kasus sebanyak 11 kematian. Sedangkan tren dari tahun 2008-2013 cenderung naik dengan kondisi terakhir pada tahun 2013 adalah 176,33 per 100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi di Kota Tegal pada tahun 2012 lebih rendah dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Sedangkan tren dari tahun 2008-2013 cenderung naik dengan kondisi terakhir pada tahun 2013 adalah 12,38 per 10.000 kelahiran hidup. Sedangkan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan angka rata-rata lama sekolah relatif tinggi yaitu 8,30 tahun, lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah namun paling rendah dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah.

7. Kondusifitas Daerah dan Demokratisasi

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Tegal masih belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Tingkat keamanan dan ketertiban di Kota Tegal baru mencapai 75%. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan bernegara yang baik masih perlu ditingkatkan. Partisipasi politik masyarakat dalam berbagai kegiatan politik dan pendidikan politik masih harus

ditingkatkan. Partisipasi politik masyarakat Kota Tegal pada pemilu Legislatif tahun 2014 mencapai 79,4% sudah termasuk kategori tinggi walaupun masih belum maksimal 90%.

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Tegal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2019. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Tegal yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal selama lima tahun (2014-2019) adalah sesuai visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kota Tegal **Sejahtera, Bermartabat** dan berbasis **Pelayanan Prima**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Tegal yang Sejahtera, merupakan suatu kondisi masyarakat Kota Tegal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Kota Tegal **Bermartabat**, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki harkat kemanusiaan tinggi yaitu bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Kota Tegal berbasis **Pelayanan Prima** atau *excellent service*, merupakan semangat pemerintahan Kota Tegal untuk melayani dengan baik dan memuaskan (melebihi pengharapan) masyarakatnya. Semangat ini didukung oleh segenap stakeholder dan terinternalisasi dalam semangat pengabdian seluruh aparatur pelaksana di Pemerintahan Kota Tegal. Semangat Pelayanan Prima ini menjadi dasar utama dalam rangka terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat. Pada setiap unit pemerintahan yang memberikan pelayanan publik

kepada masyarakat memiliki mekanisme penerimaan respon penilaian tingkat kepuasan dari masyarakat yang menunjukkan kinerja semakin baik dari waktu ke waktu.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Misi ini diarahkan untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha yang mendukung perekonomian daerah baik skala mikro, kecil, dan menengah maupun besar, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal yang ada di kota Tegal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya yang lain termasuk sumberdaya manusia:

2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.

3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ini diarahkan untuk : perwujudan kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan, produktivitas, budi pekerti dan penghayatan terhadap agama serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) serta bebas dari KKN

Misi ini diarahkan untuk penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh unit pemerintahan daerah dengan kualitas prima yang memuaskan masyarakat baik terkait dengan pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan drainase dan air bersih dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta masing-masing unit memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Tegal dalam kurun waktu 2014-2019. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Meningkatkan kinerja penanaman modal
- c. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
- d. Meningkatkan produktivitas pertanian
- e. Meningkatkan derajat kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)
- f. Meningkatkan kinerja pariwisata kota baik wisata alam, wisata buatan maupun wisata budaya, serta atraksi pariwisata.
- g. Meningkatkan produksi hasil perikanan dan kelautan
- h. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan
- i. Meningkatkan kinerja sektor industri

Sasaran:

- a. Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.
- b. Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perijinan.
- d. Meningkatnya realisasi investasi

- e. Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- f. Meningkatnya distribusi pangan secara merata.
- g. Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat.
- h. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan
- i. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura
- j. Meningkatnya produksi peternakan.
- k. Meningkatnya derajat kesehatan hewan
- l. Meningkatnya kualitas produk asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)
- m. Meningkatnya ketersediaan pasokan energi rumah tangga.
- n. Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan asing
- o. Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
- p. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya.
- q. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap).
- r. Meningkatnya nilai ekspor
- s. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri
- t. Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.
- u. Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen.
- v. Meningkatnya produktivitas industri pengolahan
- w. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor industri
- x. Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah.

2. Misi : 2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pekerjaan umum
- b. Menjamin ketercukupan kebutuhan rumah dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
- c. Meningkatkan pelayanan perhubungan
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- d. Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob
- c. Mempertahankan kualitas jaringan irigasi.
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih dan sanitasi
- e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tata bangunan gedung
- f. Meningkatnya keindahan dan kenyamanan jalur pedestrian
- g. Meningkatnya efisiensi penggunaan daya listrik pada LPJU
- h. Meningkatnya ketersediaan *supply* rumah dan berkurangnya jumlah *backlog* kebutuhan rumah
- i. Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.
- j. Meningkatnya pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.
- k. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran
- l. Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang pada semua level baik pemerintah kota maupun pada level kecamatan
- m. Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- n. Meningkatnya pelayanan perhubungan darat.
- o. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan laut.
- p. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- q. Meningkatnya kualitas pengelolaan pesisir pantai
- r. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup.
- s. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan
- t. Meningkatnya kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- u. Meningkatnya jumlah petak tanah yang tersertifikat
- v. Menurunnya kasus-kasus sengketa pertanahan

3. Misi: 3.Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak
- b. Meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesadaran bela negara
- d. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- d. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatnya rasa aman masyarakat
- f. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas
- g. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara.
- h. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat.
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tujuan:

- a. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pendidikan
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil
- d. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
- e. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja.
- f. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya lokal
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan perpustakaan masyarakat
- h. Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda dan prestasi olah raga
- i. Meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan pendidikan
- b. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

- d. Meningkatnya kesetaraan dalam pelayanan pendidikan
- e. Meningkatnya keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan
- g. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
- h. Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
- j. Menurunnya angka *unmetneed*.
- k. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
- l. Meningkatnya kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- m. Meningkatnya kesejahteraan pekerja
- n. Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota Tegal
- o. Meningkatnya perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah.
- p. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah
- q. meningkatnya potensi perpustakaan masyarakat
- r. Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda
- s. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
- t. Meningkatnya prestasi olahraga Kota Tegal
- u. Meningkatnya ketaqwaan dan penghayatan masyarakat terhadap agamanya masing-masing.

5. Misi: 5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tujuan:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang amanah
- d. Meningkatkan ketersediaan data statistik yang dapat mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan
- f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-goverment
- g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi (sesuai dengan kewenangan pemerintah kota yaitu pada rekrutiring dan penyiapan ketrampilan serta kemampuan transmigran)

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan
- b. Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- e. Meningkatnya kualitas pengawasan internal
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.
- g. Meningkatnya kualitas dan pendidikan aparatur
- h. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan baku.
- j. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- k. Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah
- l. Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi dan meningkatnya kualitas calon transmigran.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Tegal
Tahun 2014- 2019

Visi: Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima										
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Misi 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.	1. Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.	Persentase koperasi aktif	%	71,92	72,42	72,87	73,25	73,90	74,12
			Persentase koperasi sehat	%	93,15	93,45	93,87	94,40	94,85	95,15
		2. Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.	Usaha Mikro dan Kecil	%	61,50	62,45	63,10	63,55	64,35	64,58
	2. Meningkatkan kinerja penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perijinan.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	75,00	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan realisasi	Jumlah nilai	Trilyun Rp	1,39	1,53	1,68	1,85	2,04	2,24

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		investasi	investasi berskala nasional (PMDN/PM A)							
	3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.	Ketersediaan energi perkapita (%)	%	92,50	93,00	93,50	93,50	93,50	93,50
		2. Meningkatkan distribusi pangan secara merata.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	%	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
		3. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86,00	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	4. Meningkatkan produktivitas pertanian	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Produksi padi	Ton	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839
		2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman	Produktivitas	Kw/ha	65,31	65,31	65,31	65,31	65,31	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		hortikultura								
		3. Meningkatkan produksi peternakan.	Produksi hasil peternakan	ekor	2.236.513	2.253.065	2.269.734	2.286.529	2.303.484	2.303.448
	5. Meningkatkan derajat kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)	1. Meningkatkan derajat kesehatan hewan	Angka prevalensi penyakit hewan	%	8,57	6,90	5,26	3,62	1,98	1,19
		2. Meningkatkan kualitas produk asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)								
	6. Meningkatkan kinerja pariwisata kota baik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta atraksi pariwisata.	1. Meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah.	Kunjungan wisata	Orang	464.599	468.724	473.583	478.568	483.580	488.705
		2. Meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Ribu Rp	974.521	1.015.423	1.058.694	1.109.379	1.167.598	1.223.478
	7. Meningkatkan produksi hasil perikanan dan kelautan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya.	Produksi perikanan budidaya	ton	1.511	1.586	1.655	1.749	1.836	1.298
		2. Meningkatkan produksi perikanan	Produksi perikanan	ton	22.469,96	22.604,78	22.717,8	22.990,41	23.335,27	23.685,3

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap).	Tangkap							
	8. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	1. Meningkatkan nilai ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	449.341	471.800	495.400	520.168	546.176	573.485
		2. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,94	15,00	15,06	15,12	15,18	15,24
		3. Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	78,57	78,57	78,57	85,71	85,71	85,71
		4. Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen.	Tingkat Terlindunginya konsumen	%		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	9. Meningkatkan kinerja sektor industri	1. Meningkatkan produktivitas industri pengolahan	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	10,76	17,98	18,34	18,71	19,27	19,94
		2. Meningkatkan nilai tambah dan	Kontribusi sektor industri	%	6,05	6,42	6,48	6,58	6,69	6,82

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		kontribusi sektor industri	terhadap PDRB (%)							
		3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	13,11	13,48	13,83	14,21	14,63	15,33
2. Misi: 2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pekerjaan umum	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	73,93	74	74,2	74,5	75,5	75,8
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60,55	61,11	61,20	61,27	61,33	61,44
		3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih dan	Cakupan layanan sanitasi	%	77,02	77,96	78,76	79,25	80,46	81,13

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		sanitasi								
		4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tata bangunan gedung	Persentase gedung yang dibangun sesuai standar tata bangunan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5. Meningkatkan keindahan dan kenyamanan jalur pedestrian	Persentase panjang trotoar pada jalan protokol yang direvitalisasi	%		20	40	60	80	100
		6. Meningkatkan efisiensi penggunaan daya listrik pada LPJU	Persentase PJU yang terlayani meterisasi	%	86,11	90,71	90,89	91,5	93,20	94,10
			Persentase PJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	%	1,44	8,51	10,25	12,07	15,55	17,20
	2. Menjamin ketercukupan kebutuhan rumah dan	1. Meningkatkan ketersediaan <i>supply</i> rumah dan	Penyediaan rumah bagi MBR	unit	196	196	204	204	204	204

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.	berkurangnya jumlah <i>backlog</i> kebutuhan rumah								
		2. Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.	Persentase kawasan kumuh	%	3,96	3,91	3,86	3,81	3,76	3,71
		3. Meningkatkan pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.	Rasio TPU / satuan penduduk	%	23,54	25,54	27,54	29,54	31,54	33,54
		4. Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	33	100	100	100	100	100
	3. Meningkatkan kualitas dan pengendalian penataan ruang	1. Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang pada semua level baik pemerintah kota maupun pada level kecamatan	Tersediannya Perda RDTRK pada 4 SSPK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Terkendalinya	Jumlah	unit	1155	1141	1127	1114	1100	1087

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		a pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.	bangunan ber-IMB							
	4. Meningkatkan pelayanan perhubungan	1. Meningkatkan pelayanan perhubungan darat	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kota	%	40,20	45,20	50,20	55,20	60,20	65,20
			Terpenuhiya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota.	%	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
			Prosentase kendaraan lulus uji	%	97,5	97,5	97,6	97,65	97,7	97,8
			Tersusunnya dokumen perencanaan penyelenggaraan	Dokumen	1	1	3	2	2	1

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			perhubungan							
			Prosentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	53,08	58,50	64,17	72,33	80,00	90,00
		2. Meningkatkan pelayanan perijinan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan laut.	Pelayanan perijinan PAS kecil	%	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Jumlah sungai yang tidak tercemar	Sungai	3	3	3	3	3	3
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pesisir pantai	Persentase mangrove kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan	%	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			pencemara n air							
		4. Meningkatkan a kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penangana n sampah	%	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00
		5. Meningkatkan a kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	32,15	32,98	33,1	33,22	33,34	33,47
	6.Meningkat kan kualitas manajeme n pertanaha n	1. Meningkatkan a jumlah petak tanah pemda yang tersertifikat	Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatk an	petak	5	5	10	10	10	12
		2. Menurunnya kasus-kasus sengketa pertanahan	Kasus sengketa pertanahan	kasus	2	2	1	1	1	1
3. Misi: 3.Mewujudk an kesatuan sosial serta ketentrama n, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong	1.Meningkat kan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindung an anak	1. Meningkatkan a indeks pembanguna n gender dan indeks pemberdayaa n gender.	IPG	Indeks	67,65	65,4	65,88	66,36	66,84	67,32
		2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap	Cakupan perempuan dan anak korban	%	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.		perempuan dan anak.	kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan							
	2. Meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Berkurangnya jumlah PMKS	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
		2. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.	Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	%	42,4	45,00	47,50	50,00	52,50	55,00
	3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesadaran bela negara	1. Meningkatnya rasa aman masyarakat	Angka Kriminalitas	kasus	145	140	130	125	115	105
		2. Berkurangnya kasus-pelanggaran kamtibmas	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara.	Tingkat partisipasi pemilu	%	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	8,000
	4. Meningkatkan	1. Memantapkan	Posyandu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	kan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	n keberdayaan kelembagaan masyarakat.	aktif							
		2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	95,83	96,67	97,50	98,33	99,17	100
4. Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,4	99,55	99,66	99,77	99,88	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,86	99,88	99,90	99,92	99,94	99,96
			Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,87	99,89	99,91	99,93	99,95	100
			Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI		6,52	6,61	6,70	6,79	6,81	6,83
			Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs		6,87	6,99	7,11	7,23	7,35	7,50

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA		6,34	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50
		2. Meningkatkan akses masyarakat untuk bersekolah	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	31,50	32,20	32,90	33,60	34,30	35,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,00	111	111	111	111	111
			Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	%	71,00	72,80	74,60	76,40	78,20	80,00
			Angka partisipasi murni SMA sederajat	%	80,00	81,24	83,42	85,60	87,78	90,00
		3. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan (<i>governance</i>)	Persentase sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah	%	100	100	100	100	100	100
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Angka kematian Bayi (AKB)	Per 1000 kelahiran hidup	14	14	12	10	9	8

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	t	baik dasar maupun rujukan	Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran Hidup	17	15	13	12	10	8
			Jumlah Kematian Ibu	Kasus	6	5	4	3	3	3
		2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil	1. Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Rasio bayi berakte kelahiran	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
	4. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB.	Cakupan peserta KB aktif	%	73,38	73,39	73,40	73,40	73,41	73,42
	5. Meningkatkan	1. Meningkatkan kualitas	Besaran tenaga	%	57,10	63,55	75,00	75,00	75,00	75,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja.	tenaga kerja	kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi							
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	33,30	46,65	60,00	65,00	70,00	75,00
		2. Meningkatkan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	72,06	73,65	75,24	76,82	78,41	80
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya lokal	1. Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota Tegal	Cakupan Gelar Seni	%	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		2. Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	unit	37	47	47	47	57	57

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		benda-benda peninggalan sejarah.	dilestarikan							
	7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan perpustakaan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah	Tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun	orang	23.071	24.581	26.090	27.599	29.109	30.618
		2. Meningkatkan potensi perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan masyarakat yang aktif	Unit	25	30	35	40	45	47
		8. Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda dan prestasi olahraga	1. Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda	organisasi	21	22	23	24	25	26
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah gedung olahraga	Gedung olahraga	0	0	1	1	0	0
		3. Meningkatkan prestasi olahraga Kota Tegal	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang	3	2	2	3	1	1
5. Misi: 5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola	1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan	Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD sesuai standar.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen	Keselarasan kegiatan APBD dengan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) serta bebas dari KKN.		perencanaan dan penganggaran.	kegiatan RKPD							
	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan	Persentase Unit pelayanan publik memiliki IKM kategori baik	%	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	%		23,68	24,58	26,08	27,02	28,58
		3. Meningkatkan kualitas pengawasan internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	96	96	96	96	96	96
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.	Persentase Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan (%)	%	22,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	3. Meningkatkan kualitas dan	1. Meningkatkan kualitas dan pendidikan	Persentase aparatur PNS yang mengikuti	%	13,20	13,60	15,00	15,60	16,70	17,30

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	kapasitas aparatur yang amanah	aparatur	Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan							
	4. Meningkatkan ketersediaan data statistik yang dapat mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan Buku statistik daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan baku.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	SKPD	3	5	10	10	10	10
	6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-government	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	buah		19	20	21	22	23

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2. Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan daerah	Web site milik pemerintah daerah	SKPD	23	31	42	49	54	54
	7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi (sesuai dengan kewenangan pemerintah kota yaitu pada rekruting dan penyiapan ketrampilan serta kemampuan transmigran)	1. Meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi dan meningkatnya kualitas calon transmigran	Persentase penempatan transmigran	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan jangka menengah Kota Tegal tahun 2014-2019, maka dalam penetapan strategi dan kebijakan harus memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait yaitu Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD Kota Tegal tahun 2005-2025), RPJMN tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sekitar, yaitu RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016; RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012-2017; dan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2013-2018, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

6.1 RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Tegal adalah: **"Kota Perdagangan, Jasa dan Industri, dengan Masyarakat yang Sejahtera Bermartabat"**. Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Mewujudkan aneka usaha bidang perdagangan, jasa dan industri, guna mendorong pengembangan ekonomi daerah yang semakin mantap.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, dan berbudaya.
3. Mewujudkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan.
4. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal serta menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah

Skala prioritas pada RPJPD Kota Tegal tahun 2005 – 2025 pada tahun terakhir periode perencanaan jangka menengah 2009 – 2014 dan periode 2015 – 2019 menjadi muatan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, setelah dilakukan

perpaduan di antara kedua periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Perpaduan ini menjadi penting karena *time-frame* perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tegal tahun 2014 – 2019 meliputi dua periode perencanaan jangka menengah yang terdapat dalam RPJPD Kota Tegal Tahun 2005 – 2025.

Pemerintah Kota Tegal dalam merespon peningkatan kualitas kehidupan manusia mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan serta pengangguran terbuka. Dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih memfokuskan pada profesionalisme aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan penegakan hukum dan HAM serta berkeadilan menjadi tujuan dari Pemerintah Kota Tegal. Upaya untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam rangka menuju kearah tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Pemerintah Kota Tegal menindaklanjuti dengan upaya perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

RPJP Kota Tegal tahun 2005 – 2025 juga menempatkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Hal tersebut menunjukkan terjadinya sinergi antara pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program-program di bidang kesehatan. Dalam pembangunan lingkungan hidup juga memfokuskan diri pada pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pelestarian. Prioritas pembangunan infrastruktur Kota Tegal adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menyangkut berbagai jenis mulai jalan, jembatan, air bersih, sampai dengan penanganan banjir dan pembangunan drainase serta sanitasi. Sementara itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

6.2 RPJM Nasional Tahun 2010-2014

Dalam RPJM Nasional tahun 2010-2014, Visi jangka menengah yang ingin dicapai adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”** dengan misi : (1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, terdapat 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu : (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Kesebelas prioritas nasional tersebut dilaksanakan melalui berbagai program aksi di seluruh wilayah dengan memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan di setiap wilayah.

Pembangunan kewilayahan untuk Jawa-Bali diarahkan guna tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional, mengembangkan industri pengolahan secara terkendali dan memperkuat interaksi perdagangan, serta meningkatkan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional sebagai wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

6.3 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah: **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.

Misi pertama merupakan acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa. Kedaulatan pangan dan energi sebagai *pengejawantahan* bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui

perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal tahun 2014-2019 secara substansi mendukung pencapaian visi dan misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagaimana telah diuraikan diatas.

6.4 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

Visi jangka menengah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : **“Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”**. Pencapaian visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan berbasis kompetensi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
5. Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan.
6. Mengembangkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghormati.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pemalang diatas, rumusan kalimat visi-nya agak berbeda namun secara substansi terdapat kesamaan dengan visi dan misi Kota Tegal tahun 2014-2019, karena kondisi masyarakat yang sehat, cerdas bedaya saing dan berakhlak mulia adalah cerminan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

6.5 RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2012 – 2017 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan”**. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2012-2017, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan Memperhatikan Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan, dan mewujudkan perlindungan sosial.
6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Brebes diatas, secara substansi tidak terdapat perbedaan dengan visi dan misi Kota Tegal tahun 2014-2019, kesamaan terlihat pada aspek kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai oleh Kabuapten Brebes maupun Kota Tegal.

6.6 RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2013-2018.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah: **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”**. Misi yang ditempuh untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat rumusan visi dan misi Kabupaten Tegal di atas, secara substansi tidak terdapat perbedaan yang nyata dengan visi dan misi

Kota Tegal tahun 2014-2019, terdapat kesamaan cita-cita yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

6.7 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pangaturan pelaksanaannya. (Lampiran III Permendagri 54/2010, hal-51). Untuk mencapai visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal 2014-2019 yang akan dilaksanakan melalui lima misi, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan masing-masing misi sebagai berikut ;

a. Misi 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Strategi :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi melalui fasilitasi pembentukan koperasi, pembinaan dan pemberdayaan pengurus dan pengawas koperasi.
2. Meningkatkan kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan, fasilitasi peralatan usaha, dan pengembangan klaster UMKM.
3. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perijinan melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta optimalisasi penerapan SOP (standar operasional prosedur) dan SPP (standar pelayanan publik) secara konsisten.
4. Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui peningkatan kuantitas dan kualitas promosi investasi, peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal, peningkatan pengendalian penanaman modal, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung investasi, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.
5. Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau melalui pemantauan persediaan dan harga bahan pangan secara rutin.

6. Meningkatkan distribusi pangan secara merata melalui peningkatan akses informasi distribusi pangan.
7. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan non terigu dan beras, serta optimalisasi pengawasan keamanan pangan.
8. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, pengendalian hama terpadu, dan penyediaan sarana produksi yang memadai.
9. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura melalui intensifikasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, pengendalian hama terpadu, dan penyediaan sarana produksi yang memadai.
10. Meningkatkan produksi peternakan melalui penyediaan sarana produksi peternakan yang memadai, pengelolaan usaha peternakan, dan pengendalian penyakit ternak.
11. Meningkatkan derajat kesehatan hewan melalui pelayanan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan
12. Meningkatkan kualitas produk asal hewan yang ASUH (aman sehat utuh dan halal) melalui optimalisasi pengawasan produk
13. Meningkatkan ketersediaan pasokan energi melalui pemantauan pasokan dan distribusi secara berkala.
14. Menjamin ketersediaan pasokan energi listrik melalui koordinasi dengan PT PLN (Persero)
15. Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi dan pengembangan destinasi pariwisata, dan peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan pariwisata.
16. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui penyediaan sarana produksi, penyediaan benih unggul, dan peningkatan kemampuan pembudidaya ikan.
17. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap) melalui peningkatan kualitas sarana dan alat tangkap perikanan, serta penanganan/pengolahan.
18. Meningkatkan nilai ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas produk, kerjasama perdagangan internasional, dan peningkatan kualitas pelayanan ekspor.
19. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri melalui pembenahan pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima, dan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri.

20. Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui optimalisasi kinerja BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan peningkatan kesadaran kritis konsumen
21. Meningkatkan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi pengembangan usaha.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi terutama pada peningkatan kemandirian dan keaktifan koperasi.
2. Fasilitasi pembentukan koperasi baru
3. Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan terutama pada aspek produksi, pemasaran dan permodalan, dan fasilitasi peralatan usaha.
4. Pengembangan kluster UKM terutama pada UMKM unggulan.
5. Peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM terutama pada SDM teknis penanaman modal dan pelayanan perijinan.
6. Optimalisasi pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) menuju tercapainya pelayanan prima.
7. Peningkatan kuantitas promosi terutama pada media-media promosi berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
8. Peningkatan realisasi investasi melalui kerjasama investasi antar daerah dan dengan pihak swasta.
9. Peningkatan koordinasi pengendalian penanaman modal terutama pada sektor industri, jasa dan perdagangan.
10. Peningkatan regulasi pro-investasi terutama pada investasi yang menjadi kewenangan daerah.
11. Peningkatan iklim kondusif terutama pada aspek keamanan dan kenyamanan berusaha.
12. Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan harga pangan terutama pada bahan pangan pokok dan event-event keagamaan.
13. Peningkatan akses informasi distribusi pangan terutama pada bahan pangan pokok.
14. Peningkatan pelaksanaan diversifikasi pangan terutama pemanfaatan bahan pangan lokal non beras.
15. Optimalisasi pengawasan keamanan pangan baik pada pangan segar maupun olahan.
16. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan yang memadai terutama pupuk.
17. Peningkatan kemampuan petani tanaman pangan terutama dalam pengelolaan usaha dan penerapan teknologi pertanian, serta

- pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman dalam hal ini tanaman pangan dan hortikultura.
18. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian hortikultura yang memadai terutama pupuk.
 19. Peningkatan kemampuan petani hortikultura terutama dalam pengelolaan usaha dan penerapan teknologi pertanian, serta pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
 20. Peningkatan ketersediaan sarana produksi peternakan yang memadai terutama pada penyediaan bibit unggul.
 21. Peningkatan kemampuan peternak dalam pengelolaan usaha terutama pada penerapan teknologi peternakan dan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
 22. Peningkatan kesehatan hewan terutama pada optimalisasi sarana dan prasarana klinik hewan
 23. Meningkatkan kualitas produk dengan prioritas pada peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha peternakan tentang pentingnya kualitas produk asal hewan yang ASUH.
 24. Peningkatan pemantauan pasokan dan distribusi energi rumah tangga terutama LPG rumah tangga bersubsidi
 25. Peningkatan koordinasi dalam penyediaan energi listrik dengan PT PLN (Persero) baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dengan industri.
 26. Peningkatan promosi terutama melalui pemanfaatan TIK serta penyelenggaraan *calendar of event* pariwisata daerah.
 27. Pengembangan destinasi pariwisata terutama pada pengembangan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta atraksi pariwisata.
 28. Fasilitasi penyediaan sarana produksi terutama terkait dengan benih unggul.
 29. Peningkatan kemampuan pembudidaya ikan terutama terkait dengan peningkatan produktivitas dan pencegahan penyakit ikan.
 30. Peningkatan kualitas alat tangkap mengarah pada alat tangkap yang ramah lingkungan.
 31. Peningkatan kualitas penanganan/pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
 32. Peningkatan promosi dan daya saing produk diprioritaskan pada produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama perdagangan internasional.
 33. Peningkatan rehabilitasi dan penataan pasar tradisional dengan prioritas pada peningkatan sarana prasarana kenyamanan konsumen guna menghadapi penetrasi pasar ritel modern.

34. Pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan terutama terkait dengan kualitas produk, pelayanan dan kejujuran.
35. Peningkatan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri terutama produk lokal Kota Tegal.
36. Peningkatan kinerja BPSK terutama terkait dengan peningkatan kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen
37. peningkatan kesadaran kritis akan hak-hak konsumen, dan kemampuan konsumen dalam pemilihan produk yang aman dan berkualitas.
38. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri Kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran.
39. Pengembangan sentra-sentra Industri potensial untuk akselerasi pertumbuhan industri unggulan Kota Tegal (industri logam)

b. Misi: 2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkala
2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob melalui pemeliharaan secara berkala, perbaikan saluran yang rusak, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan saluran.
3. Memelihara kualitas jaringan irigasi melalui pemeliharaan secara berkala dan perbaikan saluran yang rusak.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih, dan menjalin kerjasama dengan Kabupaten sekitar dalam penyediaan air bersih.
5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pemeliharaan dan pembangunan gedung pemerintah.
6. Meningkatkan pembangunan rumah/gedung/bangunan yang sesuai melalui pembinaan dan pengawasan bangunan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana utilitas kota melalui revitalisasi dan pembangunan trotoar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota.

8. Meningkatkan efisiensi dan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum melalui meterisasi, dan penggantian lampu sodium menjadi *Light Emitting Diode (LED)*.
9. Meningkatkan ketersediaan supply rumah dan berkurangnya jumlah backlog kebutuhan rumah melalui kerjasama dengan REI dan Perum Perumnas dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk dapat menyediakan rumah secara swadaya.
10. Mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan.
11. Meningkatkan pelayanan pemakaman umum melalui penyediaan sarana prasarana dan perbaikan manajemen pengelolaan TPU.
12. Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran, peningkatan kualitas SDM, dan sosialisasi keamanan gedung.
13. Menyusun dokumen perencanaan tata ruang pada semua level baik pada level kota maupun pada level kecamatan secara bertahap.
14. Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang melalui pengawasan secara intensif pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
15. Meningkatkan pelayanan perhubungan darat melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat.
16. Meningkatkan pelayanan izin perhubungan laut melalui peningkatan sarana-prasarana dan SDM pelayanan pelayanan *pass* kecil.
17. Fasilitasi pengembangan pelabuhan.
18. Menurunkan kasus pencemaran lingkungan hidup melalui teknologi ramah lingkungan, peningkatan manajemen dan penyediaan sarana pengelolaan limbah, pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi fungsi laboratorium lingkungan.
19. Meningkatkan kualitas pesisir pantai melalui pembangunan fisik, perbaikan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat
20. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan secara intensif.
21. Meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, lembaga pengelola sampah, dan pengendalian volume sampah melalui 3R (*reuse, reduce dan recycle*)

22. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui penataan dan pemeliharaan RTH, serta mendorong masyarakat untuk menyediakan dan mengelola RTH secara swadaya.
23. Meningkatkan jumlah petak tanah yang tersertifikat melalui fasilitasi pensertifikatan massal.
24. Menurunkan kasus-kasus sengketa pertanahan melalui fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, dan sosialisasi tentang pentingnya penetapan batas-batas tanah.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan terutama pada jalan kondisi rusak berat dan rusak ringan.
2. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana drainase, dan sarana prasarana pengendali rob dengan prioritas pada kawasan kumuh dan rawan banjir.
3. Pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi terutama yang berkondisi rusak berat dan rusak ringan.
4. Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Peningkatan kualitas gedung perkantoran sebagai pendukung pelayanan prima, dan penyusunan regulasi tata bangunan.
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas kota melalui revitalisasi dan pembangunan trotoar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota.
7. Peningkatan efisiensi dan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum melalui meterisasi dan penggantian lampu sodium menjadi *Light Emitting Diode* (LED).
8. Penambahan LPJU, meterisasi, dan penggantian lampu sodium menjadi *Light Emitting Diode* (LED) dengan prioritas pada jalan-jalan penghubung antar wilayah kecamatan, dan antar kelurahan.
9. Peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat sendiri.
10. Peningkatan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terutama bagi masyarakat kurang mampu.
11. Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga kurang mampu dan penataan lingkungan terutama pada kawasan kumuh.
12. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana TPU potensial menuju pengelolaan TPU terpadu.

13. Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai standar, dan peningkatan kapasitas SDM teknis pemadam kebakaran.
14. Peningkatan penyusunan rencana tata ruang sebagai turunan dari RTRW Kota terutama pada pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam pemberian izin mendirikan bangunan.
16. Peningkatan pelayanan angkutan umum
17. Peningkatan perlengkapan jalan dan prasarana perlintasan sebidang.
18. Peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
19. Peningkatan pelayanan terminal.
20. Perencanaan penyelenggaraan perhubungan darat.
21. Peningkatan pelayanan izin pass kecil dibawah 7 GT dengan prioritas pada peningkatan sarana-prasarana dan SDM pelayanan.
22. Peningkatan koordinasi pengembangan pelabuhan.
23. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama pada sungai-sungai besar yang dilalui usaha industri pengolahan
24. Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama pada industri pengolahan.
25. Peningkatan pembangunan groin, penghijauan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir terutama pada wilayah rawan abrasi.
26. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri pengolahan.
27. Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
28. Penambahan dan peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama pada kawasan padat lalu lintas.
29. Peningkatan kesadaran dan pelayanan administrasi pertanahan.
30. Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, terutama pada aset tanah milik pemerintah daerah.

c. Misi: 3. Mewujudkan kesatuan sosial serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Strategi :

1. Meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (pendidikan, kesehatan dan pendapatan), partisipasi politik perempuan, PUG dan PUHA
2. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui optimalisasi pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Puskesmas PPT dan optimalisasi kelembagaan P2TP2A.
3. Mengurangi jumlah PMKS melalui upaya pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, fasilitasi, dan pemberdayaan
4. Meningkatkan partisipasi PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial melalui pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan
5. Meningkatkan rasa aman masyarakat melalui pembinaan dan pelibatan partisipasi masyarakat
6. Menurunkan kasus-kasus pelanggaran kamtibmas melalui penegakan peraturan perundang-undangan, dan patroli wilayah
7. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara.
8. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam Musrenbang, swadaya pembangunan kelurahan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan terutama peningkatan pendapatan perempuan, kesehatan, dan partisipasi politik perempuan
2. Peningkatan penyelenggaraan pengarusutamaan hak anak terutama pada kualitas tumbuh kembang, pendidikan dan perlindungan.
3. Peningkatan penyelenggaraan PUG dengan fokus pada perencanaan penganggaran responsif gender dan pengembangan Kota Layak Anak.
4. Peningkatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan prioritas ada penyediaan layanan *one stop crisis center*, PPT Puskesmas, dan P2TP2A
5. Peningkatan kualitas petugas layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya petugas kesehatan.
6. Pencegahan bertambahnya jumlah PMKS terutama anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar

7. Peningkatan pelayanan PMKS terutama wanita rawan ekonomi, orang tua terlantar, anak jalanan dan orang cacat.
 8. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terutama bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan, perdagangan manusia (*trafficking*) dan korban eksploitasi seksual.
 9. Peningkatan kesejahteraan bagi penyandang PMKS terutama bagi kelompok masyarakat miskin.
 10. Peningkatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial terutama yang menagani anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar serta pengiriman tenaga kerja di luar negeri.
 11. Meningkatkan kualitas keamanan khususnya wilayah rawan konflik, rawan bencana, dan rawan kerusuhan,
 12. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya pada linmas.
 13. Peningkatan pemeliharaan ketrantibnas dan pencegahan tindak kriminal terutama pada wilayah rawan keamanan
 14. Memperluas dan meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli keamanan terutama pada wilayah rawan pelanggaran dan rawan konflik.
 15. Meningkatkan penanganan pelanggaran kamtibmas khususnya pelanggaran perda.
 16. Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan terutama bagi generasi muda.
 17. Peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang ada di kelurahan.
 18. Memperkuat pengelola lembaga masyarakat terutama pengurus RT, RW, dan organisasi masyarakat di tingkat kelurahan
 19. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terutama partisipasi perempuan.
 20. Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan terutama swadaya untuk pembanguna kelurahan.
 21. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam monitoring evaluasi pembangunan terutama pembangunan di tingkat kelurahan.
- d. Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.**
- Strategi :**
1. Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan melalui penningkatan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik; peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.
 2. Meningkatkan akses masyarakat untuk bersekolah melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ijin belajar bagi guru untuk melanjutkan pendidikan, dan penyelenggaraan diklat teknis bagi guru, dan penyediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan.
4. Meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan APK dan APM baik laki-laki maupun perempuan, Peningkatan angka melanjutkan baik laki-laki maupun perempuan.
5. Meningkatkan keterjaminan dalam memperoleh pelayanan pendidikan melalui perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui money standarisasi pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis serta penerapan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan dasar, penunjang dan rujukan
7. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan gizi masyarakat
8. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, sosialisasi kepada masyarakat, pemutakhiran data kependudukan, pelayanan langsung jemput bola, kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil serta penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) dalam pelayanan administrasi kependudukan.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi, dan optimalisasi peran Penyuluh KB.
10. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi, serta magang kerja.
11. Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, dan pengembangan kerjasama tripartit.
12. Mengembangkan seni budaya lokal melalui kajian seni, pementasan seni dan budaya lokal.
13. Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah melalui kajian seni, pendataan cagar budaya.

14. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah melalui peningkatan sarana prasarana, koleksi, peningkatan kualitas SDM, serta pelayanan perpustakaan
15. Meningkatkan kualitas perpustakaan masyarakat melalui peningkatan fasilitasi bantuan, sarana prasarana dan koleksi kepada perpustakaan masyarakat
16. Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda melalui pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, dan pelatihan wirausaha bagi pemuda.
17. Meningkatnya prestasi olah raga Kota Tegal melalui pembinaan atlet, peningkatan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
18. Meningkatkan derajat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui fasilitasi peningkatan sarana prasarana peribadatan, dan fasilitasi peningkatan aktivitas kegiatan keagamaan di masyarakat.

Arah Kebijakan :

1. Optimalisasi rehabilitasi ruang kelas terutama pada jenjang pendidikan SD/MI;
2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran terutama perpustakaan sesuai standard an laboratorium untuk jenjang pendidikan dasar.
3. Optimalisasi angka partisipasi sekolah terutama pada peningkatan pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas pada pendidik SD yang belum sarjana dan rekruting pendidik dengan pendidikan sarjana.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai terutama pada pendidikan dasar.
6. Peningkatan APK dan APM terutama pada jenjang pendidikan menengah,
7. Peningkatan angka melanjutkan terutama dari SMP/MTs ke SMA/SMK Perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan terutama pada sekolah yang belum terakreditasi dan terakreditasi C.
8. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan rujukan dan dasar
9. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas perawatan dan non perawatan
10. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis terutama dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak.

11. Penerapan manajemen mutu pelayanan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan BPJS
12. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam peningkatan cakupan ASI eksklusif, peningkatan kawasan tanpa rokok, dan cakupan penggunaan SPAL dan jamban keluarga, peningkatan PSN.
13. Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui aksesibilitas dan mutu layanan prima terutama pada peningkatan peran stakeholder pada Kelurahan Siaga dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan anak, dan peningkatan kapasitas petugas PONEC, peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan pasca kelahiran (nifas) Peningkatan kualitas lingkungan sehat terutama pada tempat-tempat umum, dan industri menuju Tegal Kota Sehat
14. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama TB, DBD, Diare, HIV AIDS, dan Kusta
15. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular terutama Diabetes Mellitus, jantung dan hipertensi.
16. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada penanganan gizi buruk, dan gizi lebih.
17. Peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diprioritaskan pada pencatatan kelahiran, kematian, KTP eL dan Kartu Keluarga.
18. Peningkatan pelayanan program KB dan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat diutamakan pada penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.
19. Peningkatan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada pencari kerja dengan peningkatan kualitas instruktur dan sarana prasarana BLK.
20. Peningkatan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja terutama pada pencari kerja yang telah mendapat pelatihan baik kompetensi maupun kewirausahaan.
21. Peningkatan perlindungan tenaga kerja diprioritaskan pada pemberian jaminan tenaga kerja, dan penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama.
22. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya daerah diprioritaskan pada pengembangan seni Kota Tegal.
23. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian cagar budaya diprioritaskan pengelolaan cagar budaya .

24. Peningkatan sarana dan prasana, koleksi, dan kapasitas SDM perpustakaan daerah terutama yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
25. Peningkatan fasilitasi pengembangan perpustakaan masyarakat, terutama pada lingkungan masyarakat kurang mampu
26. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda.
27. Peningkatan pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olah raga terutama pada kategori olah raga prestasi.
28. Peningkatan fasilitasi peningkatan sarana prasarana peribadatan terutama pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan kualitas sarana prasarana peribadatan masih rendah.
29. Peningkatan aktivitas kegiatan keagamaan di masyarakat terutama pada wilayah-wilayah yang derajat penghayatan agamanya relatif rendah.

e. Misi: 5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) serta bebas dari KKN.

Strategi :

1. Mewujudkan kualitas proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana dan juga stakeholder terkait.
2. Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan melalui monitoring dan evaluasi berkala.
3. Mewujudkan pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan melalui perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP, serta penyediaan sarana-prasarana yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan mensinergikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan mengoptimalkan kapasitas tenaga pemeriksa.
6. Meningkatkan pelayanan kepada DPRD melalui peningkatan kapasitas aparatur Setwan untuk melayani kegiatan-kegiatan anggota DPRD.

7. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelaksanaan diklat pimpinan, diklat teknis, serta pemberian ijin belajar.
8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik melalui penyusunan berbagai dokumen statistik daerah.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penyiapan sarana-prasarana arsip, dan penerapan pengelolaan arsip secara baku di SKPD.
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen.
11. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media berbasis TIK.
12. Meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi melalui sosialisasi dan promosi
13. Meningkatkan kualitas calon transmigran dan pengelolaan transmigrasi melalui penyiapan ketrampilan usaha bagi calon transmigran, dan perbaikan sistem pengelolaan transmigrasi.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur terutama pada aparatur perencana pada masing-masing SKPD
2. Peningkatan kualitas pelaksana monitoring dan evaluasi terutama pada program yang capaian indikatornya masih di bawah target RPJMD.
3. Perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP terutama pada SKPD yang kinerja pelayanannya masih rendah.
4. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dengan prioritas pada unit-unit pelayanan yang masih belum memadai sarana dan prasarannya.
5. Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pada pajak dan retribusi daerah.
6. Optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan prioritas pada pengelolaan keuangan pada semua SKPD.
7. Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan prioritas peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas atau auditor internal.
8. Peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan.
9. Optimalisasi Pelaksanaan diklat pimpinan dengan prioritas pada pimpinan yang belum menempuh diklat pimpinan

10. Optimalisasi Pelaksanaan diklat teknis dan pemberian ijin belajar terutama pada aparatur yang komptensinya belum sesuai dengan kualifikasi teknis dan masih berpendidikan SMA atau sederajat.
11. Optimalisasi penyediaan data pembangunan dengan prioritas pada validitas data dan penyusunan data untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan.
12. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan terutama pada arsip internal SKPD.
13. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian, serta pelayanan dokumen/arsip daerah dengan prioritas arsip-arsip bernilai sejarah tinggi.
14. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen dengan prioritas pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Peningkatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah terutama melalui media informasi berbasis TIK.
16. Peningkatan upaya promosi, sosialisasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan transmigrasi dan peningkatan kerjasama dengan daerah tujuan transmigran Kota Tegal.
17. Optimalisasi peningkatan kapasitas calon transmigran dan pelayanan penempatan transmigran terutama pada penyiapan keterampilan teknis sesuai dengan kondisi daerah tujuan transmigrasi serta kemampuan usaha bagi calon transmigran, serta perbaikan sistem pengelolaan transmigrasi.

6.8 Arah Kebijakan Tahunan

Selanjutnya arah kebijakan yang telah diuraikan diatas, dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahunan ini sifatnya penekanan prioritas namun tidak meninggalkan aspek yang lain, dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan dari setiap tahapan pembangunan tahunan daerah.

1. Arah Kebijakan Tahun 2014

Kebijakan pembangunan tahun 2014, pada dasarnya merupakan **kelanjutan dari kebijakan pembangunan periode sebelumnya, agar terjadi kesinambungan dengan program-program pembangunan daerah** pada RPJMD sebelumnya yang telah direncanakan dalam RKPD 2014.

2. Arah Kebijakan Tahun 2015

Prioritas kebijakan pembangunan tahun 2015 di Kota Tegal dilakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 yaitu **“Meningkatkan infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Berkaitan dengan hal ini prioritas pembangunan Kota Tegal pada tahun 2015 adalah **“meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik dasar khususnya pendidikan dan kesehatan”** penekanan kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, drainase dan jaringan irigasi, air bersih dan kualitas bangunan gedung pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, manajemen pengelolaan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan proses belajar mengajar untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan relevansi serta kualitas tata kelola pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu serta mengarah kepada terbukanya akses tumbuh berkembangnya pelayanan kesehatan premium, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tegal juga untuk wilayah Jawa Tengah bagian barat guna menegaskan ikon Kota Tegal sebagai Kota Jasa.
- d. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta peningkatan kenyamanan masyarakat.

3. Arah Kebijakan Tahun 2016

Prioritas kebijakan tahun 2016 mulai mengarah pada dasar untuk pencapaian masyarakat sejahtera dan bermartabat yaitu **“peningkatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas SDM menuju pelayanan prima didukung oleh infrastruktur yang semakin mantap”**. Dengan penekanan kebijakan pada :

- a. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*).
- b. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia aparatur sehingga memiliki kapabilitas yang tinggi untuk efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada seluruh jajaran pemerintah daerah menuju terwujudnya pelayanan prima.
- d. Pemantapan ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Peningkatan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan mendorong berkembangnya investasi terutama yang memiliki daya serap tinggi terhadap tenaga kerja setempat;

4. Arah Kebijakan Tahun 2017

Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2017 mengarah pada **“peningkatan perkembangan perekonomian daerah, dan daya saing menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat”** prioritas kebijakannya meliputi :

- a. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi berorientasi pada pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi.
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
- c. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta peningkatan nilai tambah produk melalui industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya.
- d. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan standarisasi produk dan upaya-upaya promosi yang efektif.
- e. Peningkatan iklim kondusif dan peningkatan agresivitas promosi investasi untuk menggairahkan investasi di Kota Tegal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- f. Peningkatan jaminan ketersediaan pasokan energi baik energi bersubsidi untuk masyarakat miskin, maupun ketersediaan pasokan listrik untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelayanan investasi yang memadai.

5. Arah Kebijakan Tahun 2018

Prioritas kebijakan pembangunan tahun 2018 difokuskan pada aspek **“kesatuan sosial, keamanan, ketenteraman masyarakat,** yang meliputi:

- a. Peningkatan keberdayaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka optimalisasi peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah termasuk dalam mendukung terwujudnya ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.
- b. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya Kota Tegal, untuk lebih mempererat semangat persatuan masyarakat
- c. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda.
- d. Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat untuk menjamin terwujudnya kenyamanan dan ketenteraman bertempat tinggal masyarakat.

6. Arah Kebijakan Tahun 2019

Fokus kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 diarahkan pada **“Pemantapan perwujudan masyarakat sejahtera dan bermartabat”**, meliputi kebijakan yang bersifat penguatan atau pemantapan sebagai berikut :

- a. Peningkatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merata pada seluruh wilayah
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbasis potensi unggulan dan rekayasa teknologi dengan fokus perhatian pada koperasi dan UKMK
- c. Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM serta sarana prasarana yang memadai untuk menjamin keberlanjutan pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. Pemantapan kualitas infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan
- e. Pemantapan pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang lestari
- f. Pemantapan derajat kerukunan masyarakat dan memberikan penghargaan tinggi pada budaya lokal serta tercapainya kondusivitas wilayah.
- g. Pemantapan penyelenggaraan tata-kelola pemerintahan yang bersih dan baik dan iklim demokrasi yang kondusif.

Keterkaitan antara misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tegal tahun 2014-2019 secara komprehensif dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dalam Setiap Misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2015

Visi: Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Misi 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
a.	Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat	a.	Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.	a.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi melalui fasilitasi pembentukan koperasi, pembinaan dan pemberdayaan pengurus dan pengawas koperasi.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi terutama pada peningkatan kemandirian dan keaktifan koperasi. • Fasilitasi pembentukan koperasi baru
		b.	Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.	b.	Meningkatkan kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan, fasilitasi peralatan usaha, dan pengembangan klaster UMKM.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan terutama pada aspek produksi, pemasaran dan permodalan, dan fasilitasi peralatan usaha. • Pengembangan klaster UKM terutama pada UMKM unggulan.
b.	Meningkatkan kinerja penanaman modal	a.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perijinan.	a.	Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perijinan melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM, penyediaan sarana dan	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM terutama pada SDM teknis penanaman modal dan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					prasarana, serta optimalisasi penerapan SOP dan SPP secara konsisten.		<p>pelayanan perijinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP menuju tercapainya pelayanan prima.
		b.	Meningkatnya realisasi investasi	b.	Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas promosi investasi, peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal, penyusunan regulasi pro investasi, dan peningkatan iklim kondusif.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas promosi terutama pada media-media promosi berbasis TIK. • Peningkatan realisasi investasi melalui kerjasama investasi antar daerah dan dengan pihak swasta. • Peningkatan koordinasi pengendalian penanaman modal terutama pada sektor industri. • Peningkatan regulasi pro investasi terutama pada investasi yang menjadi kewenangan daerah. • Peningkatan iklim kondusif terutama pada aspek keamanan dan kenyamanan berusaha.
c.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	a.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau bagi	a.	Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau melalui pemantauan persediaan dan harga	a.	Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan harga pangan terutama pada bahan pangan pokok dan event-event

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			masyarakat.		bahan pangan secara rutin.		keagamaan.
		b.	Meningkatnya distribusi pangan secara merata.	b.	Meningkatkan distribusi pangan secara merata melalui peningkatan akses informasi distribusi pangan.	b.	Peningkatan akses informasi distribusi pangan terutama pada bahan pangan pokok.
		c.	Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat.	c.	Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan non terigu dan beras, serta optimalisasi pengawasan keamanan pangan.	c.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelaksanaan diversifikasi pangan terutama pemanfaatan bahan pangan lokal non beras. • Optimalisasi pengawasan keamanan pangan baik pada pangan segar maupun olahan.
d.	Meningkatkan produktivitas pertanian	a.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan	a.	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, pengendalian hama terpadu, dan penyediaan sarana produksi yang memadai.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan yang memadai terutama pupuk. • Peningkatan kemampuan petani tanaman pangan terutama dalam pengelolaan usaha dan penerapan teknologi pertanian, serta pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman tanaman pangan dan hortikultura.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		b.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura	b.	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura melalui intensifikasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, pengendalian hama terpadu, dan penyediaan sarana produksi yang memadai.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian hortikultura yang memadai terutama pupuk. • Peningkatan kemampuan petani hortikultura terutama dalam pengelolaan usaha dan penerapan teknologi pertanian, serta pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
		c.	Meningkatnya produksi peternakan.	c.	Meningkatkan produksi peternakan melalui penyediaan sarana produksi peternakan yang memadai, pengelolaan usaha peternakan, dan pengendalian penyakit ternak.	c.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan sarana produksi peternakan yang memadai terutama pada penyediaan bibit unggul. • Peningkatan kemampuan peternak dalam pengelolaan usaha terutama pada penerapan teknologi peternakan dan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
e.	Meningkatkan derajat kesehatan	a.	Meningkatnya derajat kesehatan hewan	a.	Meningkatkan derajat kesehatan hewan melalui pelayanan pencegahan,	a.	Peningkatan kesehatan hewan terutama pada optimalisasi sarana dan prasarana klinik

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
	hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)				pengendalian dan pengobatan penyakit hewan		hewan
		b.	Meningkatnya kualitas produk asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	b.	Meningkatkan kualitas produk asal hewan yang ASUH melalui optimalisasi pengawasan produk .	b.	Meningkatkan kualitas produk dengan prioritas pada peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha peternakan tentang pentingnya kualitas produk asal hewan yang ASUH.
f.	Meningkatkan jaminan ketersediaan energi bagi masyarakat	a.	Meningkatnya ketersediaan pasokan energi rumah tangga.	a.	Meningkatkan ketersediaan pasokan energi melalui pemantauan pasokan dan distribusi secara berkala.	a.	Peningkatan pemantauan pasokan dan distribusi energi rumah tangga terutama LPG rumah tangga bersubsidi
		b.	Terjaminnya pasokan energi listrik bagi masyarakat dan industri	b.	Menjamin ketersediaan pasokan energi listrik melalui koordinasi dengan PT PLN (Persero)	b.	Peningkatan koordinasi dalam penyediaan energi listrik dengan PT PLN (Persero) baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dengan industri.
g.	Meningkatnya kinerja pariwisata kota baik wisata alam, wisata buatan, wisata	a.	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah.	a.	Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi dan pengembangan destinasi pariwisata, dan peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan pariwisata	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan promosi terutama melalui pemanfaatan TIK serta penyelenggaraan calendar of event pariwisata daerah. • Pengembangan destinasi pariwisata terutama pada
		b.	Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah				

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
	budaya, serta atraksi pariwisata.		dari sektor pariwisata.				pengembangan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta atraksi pariwisata.
h.	Meningkatkan produksi hasil perikanan dan kelautan	a.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya.	a.	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui penyediaan sarana produksi, penyediaan benih unggul, dan peningkatan kemampuan pembudidaya ikan.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan sarana produksi terutama terkait dengan benih unggul. • Peningkatan kemampuan pembudidaya ikan terutama terkait dengan peningkatan produktivitas dan pencegahan penyakit ikan.
		b.	Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap).	b.	Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap) melalui peningkatan kualitas sarana dan alat tangkap perikanan, serta penanganan/pengolahan.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas alat tangkap mengarah pada alat tangkap yang ramah lingkungan. • Peningkatan kualitas penanganan/pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
i.	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	a.	Meningkatnya nilai ekspor	a.	Meningkatkan nilai ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas produk, kerjasama perdagangan internasional, dan peningkatan kualitas pelayanan ekspor.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan promosi dan daya saing produk diprioritaskan pada produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama perdagangan internasional.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		b.	Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri	b.	Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri melalui pembenahan pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima, dan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan rehabilitasi dan penataan pasar tradisional dengan prioritas pada peningkatan sarana prasarana kenyamanan konsumen guna menghadapi penetrasi pasar ritel modern. • Pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan tertutama terkait dengan kualitas produk, pelayanan dan kejujuran. • Peningkatan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri terutama produk lokal Kota Tegal.
		c.	Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.	c.			
		d.	Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen.	d.	Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui optimalisasi kinerja BPSK, dan peningkatan kesadaran kritis konsumen	c.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja BPSK terutama kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen • peningkatan kesadaran kritis akan hak-hak konsumen, dan kemampuan konsumen dalam pemilihan produk yang aman dan berkualitas.
j.	Meningkatkan kinerja sektor industri	a.	Meningkatnya produktivitas industri	a.	Meningkatkan produktivitas industri pengolahan melalui	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi pengembangan industri Kecil

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			pengolahan		peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi pengembangan usaha.		dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran.
		b.	Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor industri				• Pengembangan sentra-sentra Industri potensial untuk akselerasi pertumbuhan industri unggulan Kota Tegal (industri logam)
		c.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah.				

Misi: 2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
a.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pekerjaan umum	a.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan	a.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkala	a.	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan terutama pada jalan kondisi rusak berat dan rusak ringan.
		b.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob	b.	Meningkatkan kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob melalui pemeliharaan secara berkala, perbaikan saluran yang rusak, dan peningkatan kesadaran	b.	Peningkatan fungsi sarana dan prasarana drainase, dan sarana prasarana pengendali rob dengan prioritas pada kawasan kumuh dan rawan banjir.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan saluran.		
		c.	Mempertahankan kualitas jaringan irigasi.	c.	Memelihara kualitas jaringan irigasi melalui pemeliharaan secara berkala dan perbaikan saluran yang rusak.	c.	Pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi terutama yang berondisi rusak berat dan rusak ringan.
		d.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih dan sanitasi	d.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih, dan menjalin kerjasama dengan Kabupaten sekitar dalam penyediaan air bersih.	d.	Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.
		e.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tata bangunan gedung	e.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pelayanan publik melalui pemeliharaan dan pembangunan gedung pemerintah.• Meningkatkan pembangunan rumah/gedung/banguna n yang sesuai melalui pembinaan dan pengawasan bangunan.	e.	Peningkatan kualitas gedung perkantoran sebagai pendukung pelayanan prima, dan penyusunan regulasi tata bangunan.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		f.	Meningkatnya keindahan dan kenyamanan jalur pedestrian	f.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana utilitas kota melalui revitalisasi dan pembangunan trotoar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota	f.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas kota melalui revitalisasi dan pembangunan trotoar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota
		g.	Meningkatnya efisiensi penggunaan daya listrik pada LPJU	g.	Meningkatkan efisiensi dan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum melalui meterisasi, dan penggantian lampu sodium menjadi Light Emitting Diode (LED).	g.	Penambahan LPJU, meterisasi, dan penggantian lampu sodium menjadi Light Emitting Diode (LED) dengan prioritas pada jalan-jalan penghubung antar wilayah kecamatan, dan antar kelurahan.
b.	Menjamin ketercukupan kebutuhan rumah dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.	a.	Meningkatnya ketersediaan supply rumah dan berkurangnya jumlah backlog kebutuhan rumah	a.	Meningkatkan ketersediaan supply rumah dan berkurangnya jumlah backlog kebutuhan rumah melalui kerjasama dengan REI dan Perum Perumnas dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk dapat menyediakan rumah secara swadaya.	a.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat sendiri.• Peningkatan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terutama bagi masyarakat kurang mampu.
		b.	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan	b.	Mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh	b.	Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga kurang mampu dan penataan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
			kumuh perkotaan.		perkotaan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan.	lingkungan terutama pada kawasan kumuh.
		c.	Meningkatnya pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.	c.	Meningkatkan pelayanan pemakaman umum melalui penyediaan sarana prasarana dan perbaikan manajemen pengelolaan TPU.	c. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana TPU potensial menuju pengelolaan TPU terpadu.
		d.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran	d.	Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran, peningkatan kualitas SDM, dan sosialisasi keamanan gedung.	d. Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai standar, dan peningkatan kapasitas SDM teknis pemadam kebakaran.
c.	Meningkatkan kualitas dan pengendalian penataan ruang.	a.	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang pada semua level baik pemerintah kota maupun pada level kecamatan	a.	Menyusun dokumen perencanaan tata ruang pada semua level baik pada level kota maupun pada level kecamatan secara bertahap.	a. Peningkatan penyusunan Rencana tata ruang sebagai turunan dari RTRW Kota terutama pada pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
		b.	Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.	b.	Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang melalui pengawasan secara intensif pemberian ijin pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.	b. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam pemberian ijin mendirikan bangunan.
d.	Meningkatkan pelayanan perhubungan	a.	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	a.	Meningkatkan pelayanan perhubungan darat melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat.	a. Peningkatan pelayanan angkutan umum
						b. Peningkatan perlengkapan jalan dan prasarana perlintasan sebidang.
						c. Peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
						d. Peningkatan pelayanan terminal.
						e. Perencanaan penyelenggaraan perhubungan darat.
		b.	Meningkatnya pelayanan perijinan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan laut.	b.	Meningkatkan pelayanan ijin perhubungan laut melalui peningkatan sarana-prasarana dan SDM pelayanan pelayanan pass kecil.	b. Peningkatan pelayanan ijin pass kecil dibawah 7 GT dengan prioritas pada peningkatan sarana-prasarana dan SDM pelayanan.
				c.	Fasilitasi pengembangan pelabuhan.	Peningkatan koordinasi pengembangan pelabuhan.
e.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a.	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	a.	Menurunkan kasus pencemaran lingkungan hidup melalui teknologi ramah lingkungan,	a. •Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama pada sungai-sungai besar yang dilalui

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					peningkatan manajemen dan penyediaan sarana pengelolaan limbah, pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi fungsi laboratorium lingkungan.		usaha industri pengolahan •Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama pada industri pengolahan.
		b.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pesisir pantai	b.	Meningkatkan kualitas pesisir pantai melalui pembangunan fisik, perbaikan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat	b.	Peningkatan pembangunan groin, penghijauan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir terutama pada wilayah rawan abrasi.
		c.	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup.	c.	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan secara intensif.	c.	Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri pengolahan.
		d.	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	d.	Meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, lembaga pengelola sampah, dan pengendalian volume	d.	Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					sampah melalui 3R (<i>reuse, reduce dan recycle</i>)		
		e.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	e.	Meningkatkan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui penataan dan pemeliharaan RTH, serta mendorong masyarakat untuk menyediakan dan mengelola RTH secara swadaya.	e.	Penambahan dan peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama pada kawasan padat lalu lintas.
f.	Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan	a.	Meningkatnya jumlah petak tanah yang tersertifikat	a.	Meningkatkan jumlah petak tanah yang tersertifikat melalui fasilitasi pensertifikatan massal.	a.	Peningkatan kesadaran dan pelayanan administrasi pertanahan.
		b.	Menurunnya kasus-kasus sengketa pertanahan	b.	Menurunkan kasus-kasus sengketa pertanahan melalui fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, dan sosialisasi tentang pentingnya penetapan batas-batas tanah	b.	Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, terutama pada aset tanah milik pemerintah daerah.

Misi: 3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
a.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak	a.	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.	a.	Meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (pendidikan, kesehatan dan pendapatan), partisipasi politik perempuan, PUG dan PUHA	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup perempuan terutama peningkatan pendapatan perempuan, kesehatan, dan partisipasi politik perempuan • Peningkatan penyelenggaraan pengarusutamaan hak anak terutama pada kualitas tumbuh kembang, pendidikan dan perlindungan. • Peningkatan penyelenggaraan PUG dengan fokus pada perencanaan pengaggran responsif gender dan pengembangan Kota Layak Anak.
		b.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	b.	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui optimalisasi pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Puskesmas PPT dan optimalisasi kelembagaan P2TP2A.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan prioritas ada penyediaan layanan <i>one stop crisis center</i>, PPT Puskesmas, dan P2TP2A • Peningkatan kualitas petugas layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							khususnya tugas kesehatan.
b.	Meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	a.	Berkurangnya jumlah PMKS	a.	Mengurangi jumlah PMKS melalui upaya pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, fasilitasi, dan pemberdayaan	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan bertambahnya jumlah PMKS terutama anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar • Peningkatan pelayanan PMKS terutama wanita rawan ekonomi, orang tua terlantar, anak jalanan dan orang cacat. • Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terutama bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan, perdagangan manusia (<i>trafficking</i>) dan korban eksploitasi seksual. • Peningkatan kesejahteraan bagi penyandang PMKS terutama bagi kelompok masyarakat miskin.
		b.	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam melaksanakan	b.	Meningkatkan partisipasi PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial melalui pembinaan, pelatihan	b.	Peningkatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial terutama yang menangani anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar serta

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
			usaha kesejahteraan sosial.		dan pemberdayaan	pengiriman tenaga kerja di luar negeri.
c.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesadaran bela negara	a.	Meningkatnya rasa aman masyarakat	a.	Meningkatkan rasa aman masyarakat melalui pembinaan dan pelibatan partisipasi masyarakat	a. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas keamanan khususnya wilayah rawan konflik, rawan bencana, dan rawan kerusuhan, • Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya pada linmas.
		b.	Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas	b.	Menurunkan kasus-kasus pelanggaran kamtibmas melalui penegakan peraturan perundang-undangan, dan patroli wilayah	b. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemeliharaan ketrantibnas dan pencegahan tindak kriminal terutama pada wilayah rawan keamanan • Memperluas dan meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli keamanan terutama pada wilayah rawan pelanggaran dan rawan konflik. • Meningkatkan penanganan pelanggaran kamtibmas khususnya pelanggaran perda.
		c.	Meningkatnya kesadaran politik	c.	Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara.	c. Peningkatan pendidikan Politik dan wawasan kebangsaan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
			dan bela negara.			terutama bagi generasi muda.
d.	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a.	Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat.	a.	Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat.	a. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang ada di kelurahan. • Memperkuat pengelola lembaga masyarakat terutama pengurus RT, RW, dan organisasi masyarakat di tingkat kelurahan
		b.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	b.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam Musrenbang, swadaya pembangunan kelurahan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan.	b. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terutama partisipasi perempuan. • Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan terutama swadaya untuk pembanguna kelurahan. • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam monitoring evaluasi pembangunan terutama pembangunan di tingkat kelurahan.

Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
a.	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	a.	Meningkatnya ketersediaan Pelayanan Pendidikan	a.	Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan melalui peningkatan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik; peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.	a.	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi rehabilitasi ruang kelas terutama pada jenjang pendidikan SD/MI; Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran terutama perpustakaan sesuai standar an laboratorium untuk jenjang pendidikan dasar.
		b.	Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan	b.	Meningkatkan akses masyarakat untuk bersekolah melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada semua jenjang pendidikan.	b.	Optimalisasi angka partisipasi sekolah terutama pada peningkatan pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
		c.	Meningkatnya kualitas pendidikan	c.	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ijin belajar bagi guru untuk melanjutkan pendidikan, dan penyelenggaraan diklat teknis bagi guru, dan penyediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan.	c.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas pada pendidik SD yang belum sarjana dan rekrutings pendidik dengan pendidikan sarjana. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai terutama pada pendidikan dasar.
		d.	Meningkatnya kesetaraan dalam pelayanan	d.	Meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan APK dan	d.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan APK dan APM terutama pada jenjang pendidikan menengah,

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
			pendidikan		APM baik laki-laki maupun perempuan, Peningkatan angka melanjutkan baik laki-laki maupun perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan angka melanjutkan terutama dari SMP/MTs ke SMA/SMK
		e.	Meningkatnya keterjaminan dalam memperoleh pelayanan pendidikan	c.	Meningkatkan keterjaminan dalam memperoleh pelayanan pendidikan melalui perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan.	c. Perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan terutama pada sekolah yang belum terakreditasi dan terakreditasi C.
b.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan	a.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui monev standarisasi pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis serta penerapan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan dasar, penunjang dan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas perawatan dan non perawatan serta laboratorium kesehatan daerah. • Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis terutama dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan status kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas manajemen dan tata kelola pembiayaan kesehatan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan JKN
		b.	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	b.	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan gizi masyarakat	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam peningkatan cakupan ASI Eksklusif, peningkatan kawasan tanpa rokok, dan cakupan penggunaan SPAL dan jamban keluarga, peningkatan PSN. • Peningkatan kesehatan ibu dan anak terutama pada peningkatan peran stakeholder pada Kelurahan siaga dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan anak, dan peningkatan kapasitas petugas PONED, peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan pasca kehamilan (nifas) • Peningkatan kualitas lingkungan sehat terutama pada tempat-tempat umum, dan industri menuju Tegal

Tujuan		Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan
							Kota Sehat <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama TB, DBD, Diare, HIV AIDS, dan Kusta• Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular terutama Diabetes Mellitus, Jantung dan Hipertensi.• Perbaikan gizi masyarakat terutama pada penanganan gizi buruk, dan gizi lebih.
c.	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil	a.	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.	a.	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui sosialisasi kepada masyarakat, dan penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.	a.	Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil terutama pada pencatatan kelahiran, kematian, e KTP dan Kartu Keluarga.
d.	Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	a.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.	a.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi, dan optimalisasi peran Penyuluh KB.	a.	Peningkatan pelayanan program KB dan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat diutamakan pada penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
e.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja.	a.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	a.	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi, serta magang kerja.	a.	Peningkatan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada pencari kerja dengan peningkatan kualitas instruktur dan sarana prasarana BLK.
		b.	Meningkatnya kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.	b.	Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, dan pengembangan kerjasama tripartit.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja terutama pada pencari kerja yang telah mendapat pelatihan baik kompetensi maupun kewirausahaan. • Peningkatan perlindungan tenaga kerja diprioritaskan pada pemberian jaminan tenaga kerja, dan penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama.
f.	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya lokal	a.	Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota Tegal	a.	Mengembangkan seni budaya lokal melalui kajian seni, pementasan seni dan budaya lokal.	a.	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya daerah diprioritaskan pada pengembangan seni Kota Tegal.
		b.	Meningkatnya perlindungan nilai-nilai budaya dan	b.	Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda	b.	Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian cagar budaya diprioritaskan pengelolaan cagar budaya .

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			pelestarian benda-benda peninggalan sejarah.		peninggalan sejarah melalui kajian seni, pendataan cagar budaya.		
	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan perpustakaan masyarakat		Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah		Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah melalui peningkatan sarana prasarana, koleksi, peningkatan kualitas SDM, serta pelayanan perpustakaan		Peningkatan sarana dan prasana, koleksi, dan kapasitas SDM perpustakaan daerah terutama yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
			meningkatkan potensi perpustakaan masyarakat		Meningkatkan kualitas perpustakaan masyarakat melalui peningkatan fasilitas bantuan, sarana prasarana dan koleksi kepada perpustakaan masyarakat		Peningkatan fasilitasi pengembangan perpustakaan masyarakat, terutama pada lingkungan masyarakat kurang mampu
g.	Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda dan prestasi olahraga	a.	Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda	a.	Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda melalui pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, dan pelatihan wirausaha bagi pemuda.	a.	Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda.
		b.	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	b.	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga melalui pembangunan gedung olahraga	b.	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi olahraga

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		c.	Meningkatnya prestasi olah raga Kota Tegal	c.	Meningkatnya prestasi olah raga Kota Tegal melalui pembinaan atlet, peningkatan penyelenggaraan kompetisi olahraga.	c.	Peningkatan pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olah raga terutama pada kategori olah raga prestasi.
h.	Meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.	a.	Meningkatnya ketaqwaan dan penghayatan masyarakat terhadap agamanya masing-masing.	a.	Meningkatkan derajat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui fasilitasi peningkatan sarana prasarana peribadatan, dan fasilitasi peningkatan aktivitas kegiatan keagamaan di masyarakat.	a.	Peningkatan fasilitasi peningkatan sarana prasarana peribadatan terutama pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan kualitas sarana prasarana peribadatan masih rendah.
						b.	Peningkatan aktivitas kegiatan keagamaan di masyarakat terutama pada wilayah-wilayah yang derajat penghayatan agamanya relatif rendah.

Misi: 5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance) serta bebas dari KKN.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
a.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	a.	Meningkatnya kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan	a.	Mewujudkan kualitas proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana dan juga stakeholder terkait.	a.	Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur terutama pada aparatur perencana pada masing-masing SKPD

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		b.	Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.	b.	Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan melalui monitoring dan evaluasi berkala.	b.	Peningkatan kualitas pelaksana monitoring dan evaluasi terutama pada program yang capaian indikatornya masih di bawah target RPJMD.
b.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	a.	Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan	a.	Mewujudkan pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan melalui perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP, serta penyediaan sarana-prasarana yang memadai.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP terutama pada SKPD yang kinerja pelayanannya masih rendah. • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dengan prioritas pada unit-unit pelayanan yang masih belum memadai sarana dan prasarananya.
		b.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	b.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan mensinergikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pada pajak dan retribusi daerah. • Optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan prioritas pada pengelolaan keuangan pada semua SKPD.
		c.	Meningkatnya	c.	Meningkatkan kualitas	c.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			kualitas pengawasan internal		pengawasan internal dengan mengoptimalkan kapasitas tenaga pemeriksa.		internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan prioritas peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas atau auditor internal.
		d.	Meningkatnya kualitas pelayanan DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.	d.	Meningkatkan pelayanan kepada DPRD melalui peningkatan kapasitas aparatur Setwan untuk melayani kegiatan-kegiatan anggota DPRD.	d.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan.
c.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang amanah	a.	Meningkatnya kualitas dan pendidikan aparatur	a.	Meningkatnya kualitas aparatur melalui pelaksanaan diklat pimpinan, diklat teknis, serta pemberian ijin belajar.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Pelaksanaan diklat pimpinan dengan prioritas pada pimpinan yang belum menempuh diklat pimpinan • Optimalisasi Pelaksanaan diklat teknis dan pemberian ijin belajar terutama pada aparatur yang komptensinya belum sesuai dengan kualifikasi teknis dan masih berpendidikan SMA atau sederajat.
e.	Meningkatkan ketersediaan	a.	Meningkatnya ketersediaan dan	a.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik	a.	Optimalisasi penyediaan data pembangunan dengan prioritas

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
	data statistik yang dapat mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		kualitas data statistik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		melalui penyusunan berbagai dokumen statistik daerah.	pada validitas data dan penyusunan data untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan.
f.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan baku.	a.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penyiapan sarana-prasarana arsip, dan penerapan pengelolaan arsip secara baku di SKPD.	a. <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki sistem administrasi pengelolaan kearsipan terutama pada arsip internal SKPD. • Peningkatan penyelamatan dan pelestarian, serta pelayanan dokumen/arsip daerah dengan prioritas arsip-arsip bernilai sejarah tinggi.
g.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-government	a.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK	a.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen.	a. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen dengan prioritas pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
		b.	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	b.	Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media berbasis TIK.	b. Peningkatan penyebaran informasi pembangunan daerah terutama melalui media informasi berbasis TIK.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
h.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi (sesuai dengan kewenangan pemerintah kota yaitu pada rekruting dan penyiapan ketrampilan serta kemampuan transmigran)	a.	Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi dan kualitas calon transmigran	a.	Meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi melalui sosialisasi dan promosi	Peningkatan upaya promosi, sosialisasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan transmigrasi dan peningkatan kerjasama dengan daerah tujuan transmigran Kota Tegal.
					Meningkatnya kualitas calon transmigran dan pengelolaan transmigrasi melalui penyiapan ketrampilan usaha bagi calon transmigran, dan perbaikan sistem pengelolaan transmigrasi.	a. Optimalisasi peningkatan kapasitas calon transmigran dan pelayanan penempatan transmigran terutama pada penyiapan keterampilan teknis sesuai dengan kondisi daerah tujuan transmigrasi serta kemampuan usaha bagi calon transmigran, serta perbaikan sistem pengelolaan transmigrasi.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi jangka menengah daerah Kota Tegal tahun 2014-2019 mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu: perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan umum pembangunan daerah tersebut sebagai berikut:

a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan

Diarahkan pada: peningkatan kapasitas pengurus koperasi, pelaku UMKM, petani, peternak, dan pembudidaya ikan; peningkatan sarana produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan; peningkatan ketersediaan pangan; peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan; peningkatan pelayanan perijinan investasi, dan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil; peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dan kesehatan; peningkatan pelayanan KB, peningkatan infrastruktur meliputi jalan dan jembatan, saluran drainase, air bersih dan sanitasi; penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; penyediaan sarana-prasarana perhubungan; pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan sampah; penanganan PMKS; penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak; peningkatan kualitas tenaga kerja dan penempatan kerja, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pembinaan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga, pelestarian seni dan budaya daerah, peningkatan pelayanan transmigrasi.

b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal

Diarahkan pada: pelaksanaan SOP dan SPP pada unit pelayanan publik untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan; penerapan sistem pengadaan barang dan jasa melalui LPSE; peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan

Diarahkan pada: peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur; penataan organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta pengembangan pola karier yang terbuka.

d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan

Diarahkan pada: optimalisasi pendapatan asli daerah, penerapan sistem *on-line* dalam penerimaan dan pengeluaran APBD untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan penerapan politik anggaran yang efisien, efektif dan proporsional.

7.2. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah merupakan kumpulan program prioritas yang memiliki peranan langsung dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Tegal tahun 2014-2019. Program unggulan secara khusus menjabarkan masing-masing misi yang sudah ditetapkan untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan. Selain itu, program unggulan merupakan program yang akan menjadi bahan utama dalam melihat keberhasilan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal periode 2014 – 2019. Secara terperinci program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Penerapan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan sumberdaya birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat .
2. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya perluasan kesempatan memperoleh pendidikan formal dan non formal bagi warga kurang mampu, sesuai dengan kewenangan pemerintah kota.
4. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan baik Puskesmas (dasar) maupun Rumah Sakit Umum Daerah (rujukan) dan optimalisasi peran Posyandu.
5. Pemberdayaan dan optimalisasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi rakyat.
6. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan pencari kerja dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.
7. Pengembangan kepariwisataan berbasis potensi budaya lokal.
8. Penanganan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni.
9. Peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.
10. Pengembangan kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat dalam rangka partisipasi pemecahan permasalahan pembangunan di Kota Tegal.

11. Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk pengembangan semangat kerukunan dan kepedulian warga serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mencapai program unggulan di atas, fokus program yang menjadi prioritas dijabarkan ke dalam masing-masing misi di bawah ini.

- 1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.** Misi ini akan mendorong tercapaiannya program unggulan: Pemberdayaan dan optimalisasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat; Peningkatan ketrampilan dan kemampuan pencari kerja dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi; dan Pengembangan kepariwisataan berbasis potensi budaya lokal.

Untuk mewujudkan program unggulan tersebut, program yang akan dijalankan meliputi :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 4) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
- 5) Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
- 6) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- 9) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 10) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 11) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 12) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 13) Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 14) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
- 15) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 16) Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan
- 17) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
- 18) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 19) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

- 2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.** Misi ini akan mendorong tercapaiannya program unggulan: Penanganan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni; dan Peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan program unggulan tersebut, program yang akan dijalankan meliputi :

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 3) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- 5) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
- 6) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
- 7) Program Pengendalian Banjir
- 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 9) Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- 10) Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
- 11) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan.
- 12) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ.
- 13) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- 14) Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan.
- 15) Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas.
- 16) Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut.
- 17) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 18) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 19) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.**

Misi ini akan mendorong tercapaiannya program unggulan: Pengembangan kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat dalam rangka partisipasi pemecahan permasalahan pembangunan di Kota Tegal; dan Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk pengembangan semangat kerukunan dan kepedulian warga serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan program unggulan tersebut, program yang akan dijalankan meliputi :

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
- 2) Program Peninglam Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
- 3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
- 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 6) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- 7) Program Pemeliharaan Ketrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 8) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 9) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- 10) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
- 11) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi ini akan mendorong tercapaianya program unggulan: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya perluasan kesempatan memperoleh pendidikan formal dan non formal bagi warga kurang mampu, sesuai dengan kewenangan pemerintah kota; dan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan baik Puskesmas (dasar) maupun Rumah Sakit Umum Daerah (rujukan) dan optimalisasi peran Posyandu.

Untuk mewujudkan program unggulan tersebut, program yang akan dijalankan meliputi :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
- 3) Program Pendidikan Menengah
- 4) Program Pendidikan Non Formal
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 7) Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
- 8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 9) Program Pengawasan Obat Dan Makanan
- 10) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- 11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

- 13) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 14) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 15) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 16) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya.
- 17) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
- 18) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 20) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
- 21) Program Operasional Blud

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean govermance*) serta bebas dari KKN. Misi ini akan mendorong tercapaiannya program unggulan: Penerapan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan sumberdaya birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat; dan Penerapan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan program unggulan tersebut, program yang akan dijalankan meliputi :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- 3) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 6) Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- 7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Program Pendidikan Kedinasan
- 10) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 11) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 13) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 14) Program Perencanaan Sosial Budaya
- 15) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Secara rinci kebijakan umum dan program pembangunan Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan Kota Tegal

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal											
1	Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.	a.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi melalui fasilitasi pembentukan koperasi, pembinaan dan pemberdayaan pengurus dan pengawas koperasi.	a.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi terutama pada peningkatan kemandirian dan keaktifan koperasi.• Fasilitasi pembentukan koperasi baru	Persentase koperasi aktif	%	71,92	74,12	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinkop UMKM Indag
						Persentase koperasi sehat	%	93,15	95,15		
2	Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.	a.	Meningkatkan kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan, fasilitasi	a.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan terutama pada aspek produksi, pemasaran dan permodalan, dan fasilitasi peralatan usaha.• Pengembangan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil thd total UMKM	%	61,50	64,58	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif	Dinkop UMKM Indag
						Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	38	47	Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			peralatan usaha, dan pengembangan klaster UMKM.		klaster UMKM terutama pada UMKM unggulan.	Pertumbuhan Perkembangan kewirausahaan	%	2,15	2,20	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinkop UMKM Indag
1 3	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perijinan.	a.	Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perijinan melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi penerapan SOP dan SPP secara konsisten.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM terutama pada SDM teknis penanaman modal dan pelayanan perijinan. • Optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP menuju tercapainya pelayanan prima. 	<p>Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal</p> <p>Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)</p>	%	83,33	100	Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	BP2T
							%	75,00	100,00		

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
1 4	Meningkatnya realisasi investasi	a.	Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas promosi investasi, peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal, penyusunan regulasi pro investasi, dan peningkatan iklim kondusif.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi terutama pada media-media promosi berbasis TIK. • Peningkatan realisasi investasi melalui kerjasama investasi antar daerah dan dengan pihak swasta. • Peningkatan koordinasi pengendalian penanaman modal terutama pada sektor industri, jasa dan perdagangan • Peningkatan regulasi pro investasi terutama pada investasi yang menjadi kewenangan 	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	1,39 T	2,24 T	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	BP2T
						Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	kali	2	2		
						Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	bidang usaha unggulan	1	5	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	BP2T

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					daerah. • Peningkatan iklim kondusif terutama pada aspek keamanan dan kenyamanan berusaha.						
4 .	Meningkatnya nilai ekspor	a.	Meningkatkan nilai ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas produk, kerjasama perdagangan internasional, dan peningkatan kualitas pelayanan ekspor.	a.	• Peningkatan promosi dan daya saing produk diprioritaskan pada produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama perdagangan internasional.	Ekspor Bersih Perdagangan	Ribu Rp	449.341,4	573.485,0	Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor	Dinkop UMKM Indag
						Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Jenis	4	5	Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	
5 .	Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri	b.	Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri melalui pembenahan	b.	• Peningkatan rehabilitasi dan penataan pasar tradisional dengan prioritas pada peningkatan	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	78,57	85,71	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Dinkop UMKM Indag

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
6	Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.	c.	pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima, dan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri.		sarana prasarana kenyamanan konsumen guna menghadapi penetrasi pasar ritel modern. <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan terutama terkait dengan kualitas produk, pelayanan dan kejujuran. • Peningkatan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri terutama produk lokal Kota Tegal. 	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	23,52	35,29	Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan	Dinkop UMKM Indag
7	Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen.	d.	Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui optimalisasi	c.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja BPSK terutama kualitas SDM dalam penanganan 	Tingkat Terlindunginya konsumen	%	15,00	30,00	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	Dinkop UMKM Indag

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			kinerja BPSK, dan peningkatan kesadaran kritis konsumen		kasus/sengketa konsumen • peningkatan kesadaran kritis akan hak-hak konsumen, dan kemampuan konsumen dalam pemilihan produk yang aman dan berkualitas.						
8	Meningkatkan kinerja sektor industri	a.	Meningkatkan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi pengembangan usaha.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi pengembangan industri Kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran. • Pengembangan 	Jumlah industri kecil dan menengah	unit	3.856	4.194	Program pengembangan industri Kecil dan menengah	Dinkop UMKM Indag
9	Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor industri					Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6,05	6,82		
10	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industri kecil dan menengah.					Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	13,11	15,33	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Dinkop UMKM Indag

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					sentra-sentra Industri potensial untuk akselerasi pertumbuhan industri unggulan Kota Tegal (industri logam)	Persentase klaster industri yang berkembang	%	0,00	50,00	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial	Dinkop UMKM Indag
						Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas)	%	22,00	45,00	Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi	Dinkop UMKM Indag
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	a.	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi, serta magang kerja.	a.	Peningkatan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada pencari kerja dengan peningkatan kualitas instruktur dan sarana prasarana BLK.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	57,10	75,00	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinsosn akertrans
1	Meningkatnya kesempatan	a.	Peningkatan kesempatan	a.	• Peningkatan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	33,30	75,00		
2	Meningkatnya kesempatan	a.	Peningkatan kesempatan	a.	• Peningkatan	Pencari kerja yang	%	72,06	80,00	Program peningkatan	Dinsosn akertrans

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
	kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.		kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, dan pengembangan kerjasama tripartit.		kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja terutama pada pencari kerja yang telah mendapat pelatihan baik kompetensi maupun kewirausahaan. • Peningkatan perlindungan tenaga kerja diprioritaskan pada pemberian jaminan tenaga kerja, dan penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama.	ditempatkan Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	5	10	Kesempatan Kerja	s
15	Meningkatnya kunjungan wisatawan	a.	Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi	a.	• Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi terutama melalui	Kunjungan wisata	orang	464.599	488.705	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinpora budpar

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
1 6	Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.		dan pengembangan destinasi pariwisata, dan peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan pariwisata		pemanfaatan TIK serta penyelenggaraan <i>calendar of event</i> pariwisata daerah. • Pengembangan destinasi pariwisata terutama pengembangan atraksi wisata alam (laut) dan wisata religi.	Jumlah obyek wisata unggulan	OW	1	2	Program pengembangan destinasi pariwisata	Dinpora budpar
						Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Ribu Rp	974.521	1.223.478		
1 7	Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota Tegal	a.	Mengembangkan seni budaya lokal melalui kajian seni, pementasan seni dan budaya lokal.	a.	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya daerah diprioritaskan pada pengembangan seni Kota Tegal.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	10	8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinpora budpar
						Cakupan Gelar Seni	keg	3 keg (75,00%)	2 keg (50,00%)	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinpora budpar
1 8	Meningkatnya perlindungan	a.	Meningkatkan perlindungan	a.	Pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Benda, Situs dan Kawasan	Unit	37	57	Program pengembangan	Dinpora budpar

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
	nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah.		nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah melalui kajian seni, pendataan cagar budaya.		dan pelestarian cagar budaya diprioritaskan pengelolaan cagar budaya.	Cagar Budaya yang dilestarikan				n Nilai Budaya	

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan											
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan	a.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkala	a.	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan terutama pada jalan kondisi rusak berat dan rusak ringan.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	73,93	76,00	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan.	DPU
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	DPU
						Persentase pemenuhan kebutuhan	%	56,00	76,00	Program peningkatan sarana dan	DPU

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
						alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium);				prasarana kebinamargaan	
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob	b.	Meningkatkan kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob melalui pemeliharaan secara berkala, perbaikan saluran yang rusak, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan saluran.	b.	Peningkatan fungsi sarana dan prasarana drainase, dan sarana prasarana pengendalian rob dengan prioritas pada kawasan kumuh dan rawan banjir.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60,55	71,35	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Program Pengendalian Banjir, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	DPU
3	Meningkatnya keindahan dan kenyamanan jalur pedestrian	a.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana utilitas kota melalui revitalisasi dan pembangunan	a.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas kota melalui revitalisasi dan pembangunan trotoar serta	Panjang trotoar jalan yang direvitalisasi dan dibangun	meter	-	40.326	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	DPU

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			trotoar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota						
4	Meningkatnya efisiensi penggunaan daya listrik pada LPJU	a.	Meningkatkan efisiensi dan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum melalui meterisasi, dan penggantian lampu sodium menjadi Light Emitting Diode (LED)	a.	Pemasangan meterisasi pada lampu penerangan jalan umum	Persentase jumlah LPJU yang terlayani meterisasi	%	86,11	94,1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPU
				b.	Penggantian lampu sodium menjadi <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	Persentase LPJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	%	1,44	17,2		
5	Meningkatnya ketersediaan <i>supply</i> rumah dan berkurangnya jumlah <i>backlog</i> kebutuhan	a.	Meningkatkan ketersediaan <i>supply</i> rumah dan berkurangnya jumlah <i>backlog</i> kebutuhan rumah melalui kerjasama	a.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat sendiri. Peningkatan 	Cakupan ketersediaan rumah layak huni.	%	97,36	99,70	Program pengembangan Perumahan	Diskimtaru

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
	rumah		dengan REI dan Perum Perumnas dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk dapat menyediakan rumah secara swadaya.		rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terutama bagi masyarakat kurang mampu.						
6	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.	b.	Mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan.	b.	Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga kurang mampu dan penataan lingkungan terutama pada kawasan kumuh.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Unit	91	204	Program Lingkungan Sehat perumahan	Diskimtaru
						Persentase kawasan kumuh	%	3,96	3,71		

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
7	Meningkatnya Pelayanan perhubungan darat	a.	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kinerja sarana dan prasarana perhubungan darat melalui pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat.	a.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan darat, terutama halte angkutan umum pada trayek-trayek yang belum memiliki halte.• Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas terutama pada titik-titik rawan kecelakaan.	Tersusunnya dokumen perencanaan penyelenggaraan perhubungan darat.	Dokumen	1	10	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Dishubko minfo
						Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	53,08	90	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
						Ketersediaan halte sesuai kebutuhan	Unit	21	27	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
						Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam kab/kota	Unit	1	1		
						Terpenuhinya standar pelayanan	%	25,00	50,00	Program peningkatan Pelayanan	

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
						bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota				Angkutan	
						Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	%	29,06	40		
						Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kota	%	23,21	61,36	Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas	Dishubko minfo
8	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	b.	Meningkatkan pelayanan ijin perhubungan laut melalui penyediaan unit pelayanan PAS kecil.	b.	Penyediaan unit pelayanan ijin PAS kecil dibawah 7 GT dengan prioritas pada penyediaan sarana-prasarana dan SDM pelayanan.	Prosentase kepemilikan ijin PAS KECIL Kapal < 7 GT	%	30,00	75,00	Program Peningkatan perhubungan laut	Dishubko minfo

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
laut.		Meningkatkan fasilitasi pengembangan pelabuhan		Peningkatan koordinasi pengembangan pelabuhan	Terbentuknya tim pengembangan pelabuhan	Tim	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD	
Misi 3 : Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.											
1	Berkurangnya jumlah PMKS	a.	Mengurangi jumlah PMKS melalui upaya pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, fasilitasi, dan pemberdayaan	a.	<ul style="list-style-type: none">Pencegahan bertambahnya jumlah PMKS terutama anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	%	8,79	15,00	Program pemberdayaan n Fakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsosnakertrans
					<ul style="list-style-type: none">Peningkatan pelayanan PMKS terutama wanita rawan ekonomi, orang tua terlantar, anak jalanan dan orang cacat.	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	%	100,00	100,00	Program pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Dinsosnakertrans

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terutama bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan, perdagangan manusia (<i>trafficking</i>) dan korban eksploitasi seksual. Peningkatan kesejahteraan bagi penyandang PMKS terutama bagi kelompok masyarakat miskin. 	kesejahteraan sosial.					
						Persentase (%) korban bencana skala Kab./Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinsosnak ertrans
						Persentase (%) korban bencana skala Kab./Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	80,00	80,00		Dinsosnak ertrans
						Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah	%	62,12	68,00	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat	Dinsosnak ertrans

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
						menerima jaminan sosial					
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.	b.	Meningkatkan partisipasi PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial melalui pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan	b.	Peningkatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial terutama yang menagani anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar serta pengiriman tenaga kerja di luar negeri.	Persentase (%) PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.	%	42,4	55,00	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
3	Meningkatnya rasa aman masyarakat	a.	Meningkatkan rasa aman masyarakat melalui pembinaan dan pelibatan partisipasi masyarakat	a.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas keamanan khususnya wilayah rawan konflik, rawan bencana, dan rawan kerusuhan, Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100,00	100,00	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesbangpo linmas

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					khususnya pada linmas.						
4	Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas	b.	Menurunkan kasus-kasus pelanggaran kamtibmas melalui penegakan peraturan perundang-undangan, dan patroli wilayah	b.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemeliharaan ketrantibnas dan pencegahan tindak kriminal terutama pada wilayah rawan keamanan • Memperluas dan meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli keamanan terutama pada wilayah rawan pelanggaran dan rawan konflik. • Meningkatkan penanganan pelanggaran kamtibmas khususnya pelanggaran perda. 	Angka kriminalitas yang tertangani	%	5,27	16,00	Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal	Kesbangpo linmas
						Jumlah kasus Pekat ditangani	%	75,00	80,00	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
						Tingkat partisipasi dalam pemilu	%	79,00	80,00	Program Pendidikan Politik Masyarakat	

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
5	Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara.	c.	Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara.	c.	Peningkatan pendidikan Politik dan wawasan kebangsaan terutama bagi generasi muda.	Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP	kali	1	4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	Kesbang polinmas
						Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/ kepercayaan Kepada Tuhan YME	kali	1	4		Kesbangpo linmas

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa											
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	a.	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ijin belajar bagi guru untuk melanjutkan	a.	• Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas pada pendidik SD yang belum sarjana dan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,44	100,00	Program pendidikan Dasar 9 Tahun	Dinas Pendidikan
						Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs.	%	99,86	99,96		
						Angka Kelulusan (AL)	%	99,87	100,00	Program Pendidikan	

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			pendidikan, dan penyelenggaraa n diklat teknis bagi guru, dan penyediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan. Meningkatnya akses masyarakat untuk bersekolah melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pendidikan melalui perbaikan manajemen pengelolaan		rekruting pendidik dengan pendidikan sarjana. • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai terutama pada pendidikan dasar. • Optimalisasi angka partisipasi sekolah terutama pada peningkatan pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. • Perbaikan manajemen pengelolaan	SMA/SMK/MA .				Menengah	
						Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	63,24	72,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
						Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,08	90,70		
						Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,50	96,70		
						Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,20	99,00		

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ijin belajar bagi guru untuk melanjutkan pendidikan, dan penyelenggaraa n diklat teknis bagi guru, dan penyediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan.		pendidikan terutama pada sekolah yang belum terakreditasi dan terakreditasi C. • Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas pada pendidik SD yang belum sarjana dan rekruting pendidik dengan pendidikan sarjana. • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai terutama pada pendidikan dasar.						
2	Meningkatnya akses	a.	Meningkatnya akses	b.	• Optimalisasi angka partisipasi	• APK Pendidikan	%	31,50	35,00	• Program Pendidikan	Dinas Pendidikan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
masyarakat untuk bersekolah		masyarakat untuk bersekolah melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara n pendidikan melalui perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ijin belajar bagi guru untuk melanjutkan pendidikan, dan penyelenggara		sekolah terutama pada peningkatan pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan terutama pada sekolah yang belum terakreditasi dan terakreditasi C. • Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas pada pendidik SD yang belum sarjana dan rekruting pendidik dengan pendidikan 	Anak Usia Dini (PAUD)				Anak Usia Dini (PAUD). <ul style="list-style-type: none"> • Program pendidikan Dasar 9 Tahun • Program Pendidikan Menengah 	
						• Angka Partisipasi Kasar SD sederajat.	%	115,39	115,00		
						• Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat.	%	117,39	111,00		
						• Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat	%	113,00	113,00		
						• Angka partisipasi murni SMA sederajat	%	80,00	90,00		
						• Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	1,36	0,31		

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			n diklat teknis bagi guru, dan penyediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan. Meningkatnya akses masyarakat untuk bersekolah melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada semua jenjang pendidikan.		<p>sarjana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai terutama pada pendidikan dasar. • Optimalisasi angka partisipasi sekolah terutama pada peningkatan pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. 						
3	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan (governance)	a.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan melalui perbaikan	b.	Perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan terutama pada sekolah yang belum	Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi B dan A	%	97,56	100,00	Program manajemen pendidikan	Dinas Pendidikan
						Persentase SMP/ SMPLB/	%	98,76	100,00		

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			manajemen pengelolaan pendidikan.		terakreditasi dan terakreditasi C.	MTs yang terakreditasi B dan A					
						Persentase SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi B dan A	%	100,00	100,00		
						Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	97,73	99,00	Program Pendidikan Non Formal	
						Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	70,60	73,00		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan	a.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui money standarisasi pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan	a.	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan rujukan dan dasar	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Cakupan pelayanan kesehatan	%	11,86	100	Program Upaya Kesehatan	

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis serta penerapan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan dasar, penunjang dan rujukan Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyehatan lingkungan,		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas perawatan dan non perawatan 	rujukan pasien masyarakat miskin				Masyarakat	
						Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	151,29	100,00		
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis terutama dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak. 	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	89,40	92,50	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	
						Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	%	1,70	1,20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
					<ul style="list-style-type: none"> Penerapan manajemen mutu pelayanan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan BPJS 	Cakupan Rumah Sehat	%	89,17	95,00	Program pengembangan Lingkungan Sehat	
						Angka kesakitan DBD	Per 100.00 Penduduk	35	20	Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit	
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 						

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan gizi masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui monev standarisasi pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis serta penerapan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan dasar, penunjang dan		terutama dalam peningkatan cakupan ASI Eksklusif, peningkatan kawasan tanpa rokok, dan cakupan penggunaan SPAL dan jamban keluarga, peningkatan PSN. • Peningkatan kesehatan ibu dan anak terutama pada peningkatan peran stakeholder pada Kelurahan siaga dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan anak, dan peningkatan kapasitas	Penemuan baru TB Paru positif (CDR)	%	60,00	85,00	Menular	
						Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan	(per 10.000 penduduk)	1,25	1,50		
						Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	14,00	8,00	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
						Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran Hidup	17,00	8,00		
						Cakupan lansia sehat	%	80,00	80,00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
						Angka Kematian Ibu	Kasus	7	3	Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan	

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			rujukan Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan gizi masyarakat		petugas PONED, peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan pasca kehamilan (nifas) • Peningkatan kualitas lingkungan sehat terutama pada tempat-tempat umum, dan industri menuju Tegal Kota Sehat • Pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama TB, DBD, Diare, HIV AIDS, dan Kusta • Pencegahan					Dan Anak	

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					<p>dan pengendalian penyakit tidak menular terutama Diabetis Mellitus, Jantung dan Hipertensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan gizi masyarakat terutama pada penanganan gizi buruk, dan gizi lebih. • Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan rujukan dan dasar • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 						

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					terutama puskesmas perawatan dan non perawatan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis terutama dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak. • Penerapan manajemen mutu pelayanan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan BPJS • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam peningkatan cakupan ASI Eksklusif, peningkatan 						

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					kawasan tanpa rokok, dan cakupan penggunaan SPAL dan jamban keluarga, peningkatan PSN. • Peningkatan kesehatan ibu dan anak terutama pada peningkatan peran stakeholder pada Kelurahan siaga dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan anak, dan peningkatan kapasitas petugas PONED, peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melakukan						

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					<p>pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan pasca kehamilan (nifas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas lingkungan sehat terutama pada tempat-tempat umum, dan industri menuju Tegal Kota Sehat • Pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama TB, DBD, Diare, HIV AIDS, dan Kusta • Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular terutama 						

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					Diabetis Mellitus, Jantung dan Hipertensi. • Perbaikan gizi masyarakat terutama pada penanganan gizi buruk, dan gizi lebih.						
5	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	a.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui money standarisasi pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis serta penerapan sistem manajemen	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan rujukan dan dasar • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas perawatan dan non perawatan 	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi ISO/akreditasi	%	12,50	100,00	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Dinas Kesehatan
						Cakupan puskesmas yang representatif	%	100,00	100,00	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Dinas Kesehatan
						Cakupan puskesmas pembantu yang representatif	%	100	100		

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			mutu pelayanan kesehatan dasar, penunjang dan rujukan		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis terutama dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak. • Penerapan manajemen mutu pelayanan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan BPJS 						

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
Misi 5 : Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>) serta bebas dari KKN											
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan	a.	Mewujudkan kualitas proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan	a.	Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur terutama pada aparatur perencanaan pada	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan	%	1	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Bappeda

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana dan juga stakeholder terkait.		masing-masing SKPD	dgn PERDA/PERKADA					
						Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Buah	2	10		
						Persentase SKPD memiliki Rentra SKPD sesuai standar.	%	80,00	100,00		
						Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar.	%	80,00	100,00		
						Dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang	%	100,00	100,00	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
						ekonomi					
						Dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang sosial budaya	%	100,00	100,00	Program perencanaan Sosial Budaya	Bappeda
						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.	a.	Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan melalui monitoring dan evaluasi berkala.	a.	Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terutama pada program yang capaian indikatornya masih di bawah target RPJMD.	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	90,00	90,00	Program Pengembangan Data/Informasi	Bappeda

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
3	Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan	a.	Mewujudkan pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan melalui perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP, serta penyediaan sarana-prasarana yang memadai.	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP terutama pada SKPD yang kinerja pelayanannya masih rendah. • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dengan prioritas pada unit-unit pelayanan yang masih belum memadai sarana dan prasarananya. 	Persentase unit pelayanan publik menerapkan SPP dan SOP.	%	50,00	80,00	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Bappeda
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	a.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli	a.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pada pajak dan retribusi daerah. 	Jumlah PAD	Juta Rp	172.418	286.641	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
			daerah, dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan mensinergikan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan mengoptimalkan kapasitas tenaga pemeriksa.		<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan prioritas pada pengelolaan keuangan pada semua SKPD. • Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan prioritas peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas atau auditor internal. 	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang	15	19	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	BKD

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
5	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a.	Meningkatkan pelayanan DPRD melalui peningkatan kapasitas aparatur Setwan untuk melayani kegiatan-kegiatan anggota DPRD.	a.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan. 	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	dokumen	96	96	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setwan
6	Meningkatnya kualitas pelayanan DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.	a.	Meningkatnya kualitas aparatur melalui pelaksanaan diklat pimpinan, diklat teknis, serta pemberian izin belajar.	a.	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Pelaksanaan diklat pimpinan dengan prioritas pada pimpinan yang belum menempuh diklat pimpinan Optimalisasi Pelaksanaan diklat teknis dan pemberian izin belajar terutama pada aparatur yang kompetensinya belum sesuai dengan kualifikasi 	Persentase Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan (%)	Perda	8	12	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Setwan
						Jumlah perda yang ditetapkan	Perda	7	44	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
					teknis dan masih berpendidikan SMA atau sederajat.						
7	Meningkatnya kualitas dan pendidikan aparatur	a.	Mewujudkan pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan melalui perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP, serta penyediaan sarana-prasarana yang memadai.	a.	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP dan SPP terutama pada SKPD yang kinerja pelayanannya masih rendah. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dengan prioritas pada unit-unit pelayanan yang masih belum memadai sarana dan prasarananya. 	Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	Orang	50	666	Program Pendidikan Kedinasan	BKD
						Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan	%	13,20	17,30	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKD
8	Meningkatnya cakupan pelayanan	a.	Meningkatkan pelayanan administrasi	a.	Peningkatan pelayanan Administrasi	Rasio penduduk ber KTP	%	100,00	100,00	Program penataan Administrasi	Disdukcapil

Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2019)	Program	SKPD
	administrasi kependudukan dan catatan sipil.		kependudukan dan catatan sipil melalui sosialisasi kepada masyarakat, dan penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.		Kependudukan dan catatan sipil terutama pada pencatatan kelahiran, kematian, e KTP dan Kartu Keluarga.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	91,00	100,00	i Kependudukan	

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dan prioritas disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD. Sedangkan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
					Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				
					target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A	Urusan Wajib																
1.	Urusan Wajib Pendidikan																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini					60.000		66.414		69.535		72.804		76.233		344.986	
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30,8	31,5	32,2		32,9		33,6		34,3		35		35		Disdik
	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun					13.839.357		15.318.784		16.038.767		16.792.589		17.583.520		79.573.017	Disdik
		Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	115,39	115	115		115		115		115		115		115		
		Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	117,39	111	111		111		111		111		111		111		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,12	98	98,4		98,8		99,2		99,6		100		100		
		Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	83,87	71	72,8		74,6		76,4		78,2		80		80		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,38	0,38	0,35		0,32		0,29		0,26		0,23		0,23		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,53	0,53	0,51		0,49		0,47		0,45		0,43		0,43		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,44	99,55		99,66		99,77		99,88		100		100		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,56	99,86	99,88		99,9		99,92		99,94		99,96		100		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	6,88	6,52	6,61		6,7		6,79		6,81		6,83		7		

		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	7,88	6,87	6,99		7,11		7,23		7,35		7,5		7,5		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	108,2	100	100		100		100		100		100		100		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	113,7	100	100		100		100		100		100		100		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	80,32	80,32	82		83,4		83,6		83,8		84		84		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	80,97	80,97	81		81		82		82		82		82		
		Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	47,14	51,22	51,37		51,52		51,67		51,82		51,97		51,97		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata	16	16	15		14		13		12		11		11		
	Program Pendidikan Menengah					5.712.027		6.322.643		6.619.807		6.930.938		7.257.385		32.842.800	Disdik
		Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat	124,64	113	113		113		113		113		113		113		
		Angka partisipasi murni SMA sederajat	79,06	80	81,24		83,42		85,6		87,78		90		90		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,36	1,36	1,15		0,94		0,73		0,52		0,31		0,31		
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,87	99,87	99,89		99,91		99,93		99,95		100		100		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA	7,09	6,34	6,5		6,75		7		7,25		7,5		7,5		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK	7,09	6,47	6,6		6,8		7		7,3		7,6		7,6		
		Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi Ruang Kelas baik	86,22	86,22	86,4		86,8		87,2		87,6		88		88		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	29,11	29,11	29,28		29,45		29,62		29,79		30		30		

		Rasio guru terhadap murid	12	12	11,6		11,2		10,8		10,4		10		10		
	Program Pendidikan Non Formal					1.393.465		1.542.426		1.614.920		1.690.822		1.770.459		8.012.092	Disdik
		Penduduk usia >15 tahun melek huruf	97,73	97,73	97,98		98,23		98,48		98,73		99		99		
		Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	70,6	70,6	71	180.000	71,5		72		72,5		73		73		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan					573.913		635.264		665.122		696.382		729.182		3.299.863	Disdik
		Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	37,12	63,24	65,5		66,9		69,1		70,9		72		72		
		Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	66,66	83,08	85		86,7		88,1		89,5		90,7		90,7		
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,85	90,5	91,7		92,5		94,1		95,9		96,7		96,7		
		Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,62	96,2	97		97,9		98,2		98,9		99		99		
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil	100	100	100		100		100		100		100		100		

		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	100	100	100		100		100		100		100		100		

		Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan	100	100	100		100		100		100		100		100		
2.	Urusan Wajib Kesehatan																
	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan					2.278.778		2.506.655		2.757.320		3.033.052		3.336.357		13.912.162	
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase ketersediaan bahan dan alat penunjang obat sesuai dengan kebutuhan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					17.451.475		17.600.296		17.781.413		17.920.697		18.145.847		88.899.728	Dinke s
		Terselenggaranya pelayanan Jamkesta	100	100	100												

		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	11,86	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	151,29	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase jemaah calon haji sehat secara fisik dan mental berdasarkan tes kebugaran	0	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pengobatan tradisional yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	0	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase ketersediaan reagensia & bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinke s
		Cakupan perijinan tenaga kesehatan sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI	0	0	100		100		100		100		100		100		Dinke s
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SLTP/SLTA	0	0	100		100		100		100		100		100		
		Angka bebas jentik		87,14	88,5		90		92,38		93,69		95		95		
		Cakupan Posyandu strata Mandiri	0	60	76		84		92		100						
		Rasio posyandu per satuan balita	12,87	12,87	12,87		12,87		12,87		12,87		12,87		12,87		

	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat					265.821		400.000		470.000		520.000		520.000		2.175.821	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	89,4	89,56	90		91,4		91,8		92,2		92,5		92,5		
		Presentase pengetahuan remaja siswa SLTA tentang kesehatan	0	0	20		40		60		80		80		80		
		Presentase pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	0	0	20		35		55		75		75		75		
		Terpenuhinya media promosi kesehatan sesuai kebutuhan	0	0	100		100		100		100		100		100		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					740.000		775.000		825.000		855.000		905.000		4.100.000	
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu (D/S)		72,5	74,4		76,18		77,9		79,4		80		80		
		Presentase Balita bawah garis merah yang naik berat badannya		70	75		80		85		85		85		85		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	1,75	1,7	1,6		1,5		1,4		1,3		1,2		1,2		
		Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)	0,27	0,27	0,23		0,2		0,17		0,14		0,15		0,15		
		Universal salt Iodium	98,6	98,6	98,8		99		99,25		99,5		100		100		
		Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi ≥ satuan persen	2,79		2,75		2,71		2,67		2,63		2,59		2,59		

		Prevalensi balita gizi kurang 2satuan persen	13,29	13,1	13		12,7		12,4		12,1		11,8		11,8		
		Persentase cak Vitamin A pada bayi	97,66	97,66	98		98,5		99		99,5		100		100		
		Persentase cakupan vitamin A pada Balita	98,73	98,73	99		93,3		99,6		99,8		100		100		
		Persentase cakupan vitamin A pada ibu nifas	85,8	85,8	88,1		91,6		95,1		98		100		100		
		Persentase tablet Fe da folat pada ibu hamil	90,22	90,22	92,22		94		96		98		100		100		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	49,55	50	52		54		56		61		65		65		
		Cakupan keluarga sadar gizi	80	80	85		90		95		95						
	Program pengembangan Lingkungan Sehat					176.410		225.000		265.000		305.000		345.000		1.316.410	
		Cakupan Rumah Sehat	89,17	89,17	91		92		93		94		95		95		
		Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	85%	85%	87%		89%		91%		100%		100%		100%		
		Cakupan sarana air bersih PDAM pada kran umum perumahan yang memenuhi syarat kesehatan	0	0	0		70%		75%		80%		85%		85%		
		Cakupan sampel air bersih di perumling yang memenuhi syarat kesehatan	0%	85%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		

		Cakupan pengusaha industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat P-IRT	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan sarana Depot air Minum yang memenuhi syarat Kesehatan	70%	75%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		
		Cakupan pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan CPPB	0	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan sanitasi makanan minuman pada PKL yang memenuhi syarat kesehatan	0	0	0%		70%		75%		80%		85%		85%		
		Cakupan sampel makanan minuman pada JB dan RM/Rest yang memenuhi syarat kesehatan	0	0	0%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Cakupan sampel makanan minuman pada PKL yang memenuhi syarat kesehatan	0	0	0%		70%		75%		80%		85%		85%		
	Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit Menular					1.661.998		2.510.000		1.980.000		2.107.000		2.286.000		10.544.998	
		Angka kesakitan DBD			35/10 Orb Penduduk		33/10 Orb Penduduk		30/100 rb Penduduk		27/100 rb Penduduk		24/10 Orb Penduduk		24/10 Orb Penduduk		
		Angka kematian DBD	< 2 %	< 2 %	< 2 %		< 2 %		< 2 %		< 2 %		< 2 %		< 2 %		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka bebas jentik	> 95 %	> 95 %	> 95 %		> 95 %		> 95 %		> 95 %		> 95 %		> 95 %		

		Prosentase penderita HIV/IMS yang diobati	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Presentase anak usia 15 s/d 24 Tahun mengetahui 5 pengetahuan dasar HIV AIDS	0	10%	10%		50%		65%		75%		85%		85%		
		Angka kesembuhan (curre rate) penderita TB Paru	65%	65%	69%		74%		79%		84%		> 85%		> 85%		
		Penemuan baru TB Paru positif (CDR)	60%	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%		
		Prevalensi TB Paru (per 10.000 penduduk)	64/10rb penduduk	64/10rb penduduk	70/10rb penduduk		75/10rb penduduk		80/10rb penduduk		86/10rb penduduk		91/10rb penduduk		91/10rb penduduk		
		Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan	1,25/10rb penduduk	1,25/10rb penduduk	1,3/10rb penduduk		1,35/10rb penduduk		1,4/10rb penduduk		1,45/10rb penduduk		1,5/10rb penduduk		1,5/10rb penduduk		
		Presentase penderita Kusta yang ditangani	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka kesembuhan (RFT) Kusta		67,50%	71%		75%		79%		83%		85%		85%		
		Prosentase penderita diare Balita ditangani	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Prosentase penderita Ispa Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		UCI Kelurahan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tertanganinya KLB > 24 jam	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15 th)	2/100.000 pddk >15th	2/100.000 pddk >15th	2/100.000 pddk >15th		2/100.000 pddk >15th		2/100.000 pddk >15th		2/100.000 pddk >15th		2/100.000 pddk >15th		2/100.000 pddk >15th		

	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					145.515		1.026.500		500.000		500.000		500.000		2.672.015	
		Cakupan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar B	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi ISO	12,50%	12,50%	12,50 %		12,50 %		12,50%		12,50%		12,50 %		12,50 %		
		Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang akreditasi	0	0	0		100%		100%		100%		100%		100%		
		Proporsi pembiayaan kesehatan dari APBD	> 10%	> 10%	> 10%		> 10%		> 10%		> 10%		> 10%		> 10%		
		Kajian District health account	0	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.					1.543.146		1.750.000		2.000.000		2.190.000		2.700.000		10.183.146	
		Cakupan puskesmas yang refresentatif	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pembantu puskesmas yang refresentatif	77,7	77,7	77,7		77,7		77,7		77,7		77,7		77,7		
		Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	100	100	100		100		100		100		100		100		

	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					395.000		378.000		454.000		400.000		425.000		2.052.000	
		Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	14	14	12		10		9		8		7		7		
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	17/1000	17/1000	15/1000		13/1000		12/1000		10/1000		8/1000		8/1000		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	95%	95%	96%		97%		98%		99%		100%		100%		
		Cakupan kunjungan bayi	95%	95%	95%		96%		96%		97%		98%		98%		
		Cakupan kunjungan Balita	96%	96%	97%		97%		98%		99%		100%		100%		
		Jumlah Kematian Ibu (kasus)	7	6	5		4		3		3		3		3		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					175.000		180.000		200.000		225.000		250.000		1.030.000	
		Cakupan lansia sehat	80%	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
		Cakupan kunjungan lansia	50%	50%	50%		55%		55%		69%		60%		60%		
		Proporsi Lansia kategori A yang mendapat layanan home care	30%	30%	50%		75%		80%		90%		100%		100%		
		Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	94,49		95		95		95		95		95		95		
	Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak					1.300.000		1.210.000		1.400.000		1.350.000		1.400.000		6.660.000	Dinke s

		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,90%	95%	96%		97%		98%		98%		99%		99%		
		Cakupan pelayanan nifas	97,8	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	126,3	100	100		100		100		100		100		100		
		Jumlah Kematian Ibu (kasus)	7	6	5		4		3		3		3		3		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan peserta KB aktif	77	77	80		81		82		83		84		84		
	Program Operasional BLUD					103.518.470		124.936.441		130.808.454		136.956.452		143.393.405		639.613.222	RSUD
		BOR (Bed Occupancy Ratio)	75,1	74	76,4		73,2		74,7		76,2		77,7		77,7		
		AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	4,3	4,3	5,3		5,3		5,3		5,3		5,3		5,3		
		TOI (Turn Over Interval)	1,4	1,5	1,6		1,9		1,8		1,7		1,5		1,5		
		BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	57,3	56,4	47,5		45,5		46,4		47,3		48,2		48,2		
		NDR (Net Death Rate)	33,2	32,3	32,6		31,7		31,4		31,1		30,8		30,8		
		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	77,8	78	78,5		78,7		79		79,5		80		80		
		Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Kunjungan)	0,017	0,018	0,021		0,022		0,022		0,021		0,021		0,021		

		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,12	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		
		Persentase RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar (Kandungan dan Kebidanan, Bedah, penyakit dalam dan anak)	100	100	100		100		100		100		100		100		
3.	Urusan Wajib Pekerjaan Umum																
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					3,310,000		14,300,508		15,097,117		28,050,938		4,100,000		64,858,563	
		Panjang jalan terbangun (km)	229,85	229,85	229,85		229,85		229,85		230,45		230,45		230,45		DPU
		Jumlah Jembatan terbangun	61	61	62		62		63		63		63		63		
	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan					9,920,379		13,867,801		13,919,588		14,089,084		13,779,287		65,576,139	
		Persentase jalan dalam kondisi baik	73,92	73,93	74		74,2		74,5		75,5		75,8		75,8		DPU
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase LPJU yang terlayani meterisasi		86,11	90,71		90,89		91,5		93,2		94,1		94,1		DPU
		Persentase LPJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)		1,44	8,51		10,25		12,07		15,5		17,2		17,2		DPU
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		2.500.000	

		Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)	54	56	56		56		56		56		56		56		DPU
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya					1.131.970		1.252.978		1.311.868		1.373.525		1.438.218		6.508.559	
		Persentase terbangunnya sarana dan prasarana jaringan irigasi pertanian dan jaringan pengairan lainnya	30	30	40		40		60		70		80		80		DPU
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					4.633.530		4.840.224		4.940.815		5.046.133		5.156.636		24.617.338	
		Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,5	60,55	61,11		61,2		61,27		61,33		61,44		61,44		DPU dan SKPD Kelurahan
		Cakupan pelayanan Sistem Drainase	47,16	48,57	50,03		51,53		53,08		54,67		56,31		58		
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	68,02	68,56	69,11		69,67		70,22		70,78		71,35		71,35		
	Program pengendalian banjir					11.894.005		15.165.474		15.878.251		16.624.529		17.407.545		76.969.804	

		Prosentase wilayah bebas genangan banjir	90	94,76	95,04		95,66		96,3		96,78		97,11		97,11		DPU
		Menurunnya luas Genangan banjir (Km ²)		2,07	1,97		1,72		1,47		1,27		1,15				
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					159.397		176.437		184.729		193.411		202.521		916.495	
		Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100	100	100		100		100		100		100		100		BP2T
		Tersediannya sistem informasi jasa konstruksi															
		Jumlah sertifikasi hasil uji															
	Program pembangunan infrastruktur perkotaan					4.591.316		6.082.128		6.367.988		6.667.283		6.981.312		30.690.027	
		Persentase kawasan kumuh	4,01	3,96	3,91		3,86		3,81		3,76		3,71		3,71		
		Panjang trotoar jalan yang direvitalisasi dan dibangun	-	-	8.000		16.000		24.000		32.000		40.000		40.000		DPU
4.	Urusan Wajib Perumahan																
	Program pengembangan Perumahan					500.000		600.000		600.000		650.000		700.000		3.050	Diski mtaru
		Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (unit)	196	196	196		204		204		204		204		490		
	Program Lingkungan Sehat perumahan					2.499.400		3.749.100		3.925.308		4.109.797		4.303.369		18.586.974	
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni(%)	97,99%	97,36%	97,87 %		98,42 %		98,95%		99,48%		100%		100%		

		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Unit)	91	91	196		294		294		490		490		490		
		Cakupan layanan sanitasi(%)	76,34	77,02	77,96		78,76		79,25		80,46		81,13		81,13		
	Program pengelolaan areal pemakaman					1.500.000		1.660.350		1.738.386		1.820.091		1.905.817		8.624.644	
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk(%)	0,96	23,54	25,54		27,54		29,54		31,54		33,54		33,54		
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					1.538.950		1.703.464		1.783.527		1.867.352		1.955.305		8.848.598	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota(%)	33	33	33		33		33		100		100		100		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (%)	60	65	65		70		70		100		100		100		
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi(%)	25	25	30		35		40		45		50		50		
		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK(%)	33,33	33,33	33,33		47,7 atau 1 mobil damkar		72,7 atau 1 mobil damkar		100 atau 1 mobil damkar		100		100		
5.	Urusan Wajib Penataan Ruang																
	Program Perencanaan Tata Ruang					337.741		373.846		391.416		409.813		429.115		1.941.931	

		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital :															Diskinmtaru
		Peta analog (%)	31	100	100		100		100		100		100		100		
		Peta digital (%)	0	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase kawasan yang memiliki RTBL (%)		Draft koridor 1	Perwal Koridor I				Draft Koridor II dan III		Draft Koridor IV dan V		Draft Koridor VI dan VII		7 Koridor		Diskinmtaru
		Tersediannya Perda RDTRK pada 4 SPPK	0	draft RDTRK	100		100		100		100		100		100		
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					100.000		110.690		122.523		135.620		150.118		618.951	
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	31,23	32,15	32,98		33,1	0	33,22		33,34		33,47		33,47		Diskinmtaru
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1.169	1155	1141		1127		1114		1100		1087		1087		
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	18,16	16,34	0		0		0		0		0		0		Diskinmtaru
		Prosentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang yang tertangani (%)	60	100	100		100		100		100		100		100		
6.	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan																
	Program Pengembangan Data/Informasi					527.842		584.268		611.729		640.480		670.647		3.034.966	

		Tersedianya dokumen data/ informasi perencanaan pembangunan															Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					1.194.623		1.322.328		1.384.478		1.449.548		1.517.822		6.868.799	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	1	1	1		1		1		1		1		1		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	2	2	2		2		2		2		2		10		
		Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD sesuai standar. (%)	0	80	100		100		100		100		100		100		
		Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar(%)	0	60	80		100		100		100		100		100		
		Tersedianya dokumen LKPJ	2	1	1		1		1		2		1		6		
		Tersedian dokumen evaluasi perencanaan pembangunan (dok)	2	1	1		2		1		2		1		7		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					307.500		340.372		356.369		373.119		390.692		1.768.052	

		Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang ekonomi(%)		100	100		100		100		100		100		100		Bappeda
	Program perencanaan Sosial Budaya					241.265		267.056		279.608		292.749		306.538		1.387.216	
		Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang sosial budaya(%)		100	100		100		100		100		100		100		Bappeda
	Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam					150.000		166.035		173.839		182.009		190.582		862.465	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah(%)		100	100		100		100		100		100		100		Bappeda
	Program Kerjasama Pembangunan					125.000		138.363		144.866		151.674		158.818		718.721	
		Terwujudnya kerja sama antar daerah dibidang pembangunan (keg)	2	2	2		2		2		2		2		10		

	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					135.000		149.432		156.455		163.808		171.524		776.219	
		Tersediannya dokumen kajian perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh	2	2	2		2		2		2		2		10		
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar					40.000		44.276		46.357		48.536		50.822		229.991	
		Tersediannya dokumen perencanaan infrastruktur perkotaan	1	1	1		1		1		1		1		5		
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					60.000		66.414		69.535		72.804		76.233		344.986	
		Persentase aparat perencana yang meningkat kapasitasnya (%)	80	80	100		100		100		100		100		100		
7.	Urusan Wajib Perhubungan																
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					250.000		600.000		300.000		300.000		100.000		1.550.000	

		Tersusunnya dokumen perencanaan penyelenggaraan perhubungan darat (dokumen)	0	1	1		3		2		2		1		10		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					3.075.000		3.860.000		6.460.000		6.550.000		6.850.000		26.795.000	Dinhu bkomi nfo
		Persentase Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	50,83	53,08	58,5		64,17		72,33		80		90		90		
	Program peningkatan Pelayanan Angkutan					710.000		1.220.000		1.780.000		1.880.000		1.790.000		7.380.000	
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan (%)	29,06	29,02	29,06		29,06		29,06		34		40		40		Dinhu bkomi nfo
		Terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota (%)	25%	25%	30%		35%		40%		45%		50%		50%		
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					422.000		550.000		650.000		700.000		1.300.000		3.622.000	Dinhu bkomi nfo
		Persentase kendaraan yang lulus uji (%)	97,4	97,45	97,5		97,55		97,6		97,65		97,7		97,8		

	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan					-		50.000		100.000		110.000		120.000		380.000	Dinhu bkomi nfo
		Pembangunan Halte	21	21	0		0		2		2		2		6		
		Tersediannya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam kabupaten/trayek	1	1	1		1		1		1		1		1		
	Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas					1.669.000		3.145.000		2.445.000		2.585.000		2.555.000		12.399.000	Dinhu bkomi nfo
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) (%)	19,68	23,21	28,54		35,09		40,8		47,36		61,36		61,36		
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut					120.000		225.000		295.000		400.000		360.000		1.400.000	Dinhu bkomi nfo
		Terbentuknya tim pengembangan pelabuhan	1	1	1		1		1		1		1		1		
		Prosentase kepemilikan ijin PAS KECIL Kapal < 7 GT (%)	0	30%	40%		46%		52%		63%		75%		75%		
8.	Urusan Wajib Lingkungan Hidup																
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					1.350.000		1.494.315		11.564.548		11.638.082		11.715.235		37.762.180	KLH/D is kimta ru

		Persentase penanganan sampah (%)	62,6	65,6	70		75		80		85		90		90		
		Ketersediaan Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	85	87	88		89		90		91		92		93		
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (/1000 penduduk)	2	2,1	2,2		2,3		2,4		2,5		2,6		2,7		
		Jumlah TPS (unit)	86	81	77		72		68		50		50		50		
		Jumlah TPST (unit)	6	10	4		4		4		4		1		27		
		Tersedianya sarana dan prasarana TPA serta fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (%)	25	26	28		30		31		33		35		35		
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. (%)	90	90	92		92		94		96		98		98		
	Program Pengendalian pencemaran Dan kerusakan Lingkungan Hidup					1.196.342		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		7.196.342	KLH
		Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	20	20		20		20		20		20		100		
		Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		

		Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan (unit)	1	1	1		1		1		1		1		1		
		Kegiatan Penegakkan hukum lingkungan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup					59.640		66.016		69.118		72.367		75.775		342.916	KLH
		Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya (%)	93	94	95		96		97		98		100		100		
	Program peningkatan Pengendalian Polusi					100.000		110.690		115.892		121.339		127.054		574.975	KLH
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut					987.502		2.093.066		2.191.440		2.294.438		2.402.506		9.968.952	KLH
		Panjang Groin yang terbangun															

	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					3.816.755		4.892.696		3.981.653		2.074.791		2.172.513		16.938.408	
		Luas RTHK Perkotaan Publik (%)	11,08	11,08	11,25		11,50		12,00		12,30		12,60		13,00		
9.	Ururan Wajib Pertanahan																
	Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah					177.660		196.652		205.894		215.572		225.725		1.021.503	Bag. Tata Pemerintahan
		Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatkan	502	10	25		25		25		25		25		126		
10.	Ururan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil																
	Program penataan Administrasi Kependudukan					804.000		884.000		973.000		1.070.000		1.273.735		5.004.735	Dispendukcapil
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga(%)	97	98	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk(%)	88	89	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran(%)	45	50	55		60		75		80		85		85		
		Cakupan penerbitan akta kematian (%)	0	20	25		30		40		50		60		60		
		Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Penerapan KTP Berbasis NIK	sudah	sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		

11.	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak					90.948		135.345		135.345		136.948		136.948		90.948	Bapermas KB PP dan PA
		<i>Focal point</i> aktif (%)		0	0		100		100		100		100		100		Bapermas PP KB & KP
		Forum Anak Aktif (Jumlah Forum Anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang aktif/Jumlah Forum Anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan) (%)		31,25			56,25		100		100		100		100		
		Persentase Sekolah Ramah Anak (%)		0,003		-	0		25	25		25		100		175	
	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan					69.876		89.706		100.000		115.000		75.000		449.582	Bapermas PP KB & KP
		Meningkatnya kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender (%)	25	25		35		40		60		75		100			

		Meningkatnya partisipasi perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan (%)	25	25		35		40		60		100	.000	100			Baper mas PP KB & KP
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak					51.000		96.000		89.000		156.000		114.000		506.000	
		Rasio KDRT	0,57	0,57	0,57		0,56		0,56		0,55		0,55				
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penanganan pengaduan	0,57	0,57	0,57		0,56		0,56		0,55		0,55				
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS(%)	0,57	0,57	25		0,56		0,56		0,55		0,55				
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu(%)	0,57	0,57	25		0,56		0,56		0,55		0,55				

		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	75	75	75		80		85		90		95				
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100		100		100		100		100				
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	100	100		100		100		100		100				
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	91	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	100	100		91		91		91		91		91			

		Meningkatnya kebijakan pengarusutamaan gender sebagai upaya peningkatan kualitas perlindungan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	0	0		100		20		100		0		100		320	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					420.147		500.000		500.000		500.000		500.000		2,420,147	
		Semakin baiknya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dalam peningkatan SDM	100	100		100		100		100		100		100		500	
		Persentase Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak (%)															
		Meningkatnya kebijakan pengarusutamaan gender sebagai upaya peningkatan kualitas perlindungan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan		0		100		100		100		100		100		500	
12.	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																

	Program Keluarga Berencana					254.512		279.963,20		293.961,40		308.659,40		324.092,40		1.461.18,4	Baper mas pp dan KB
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3	2,3		2,2		2,2		2,2		2,2		2,2		
		Rasio akseptor KB	73,38		73,39		73,401		73,408		73,415		73,422		73,422		
		Cakupan peserta KB aktif (%)	73,38		73,394		73,401		73,408		73,415		73,422		73,422		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	15,21		15,13		15,05		14,97		14,89		14,81		14,81		
	Program Pelayanan Keluarga Berencana					165.660		183.369		191.987		201.011		210.478		952.506	Baper mas pp dan KB
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan (%)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39	39	39		38		37		36		35		35		
		Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) (%)	73,38	73,38	73,39		73,4		73,41		73,42		73,42		73,42		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	1,84	1,84	1,828		1,828		1,816		1,816		1,804		1,804		

	Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri					25.393		28.108		29.429		30.812		32.263		146.005	Baper mas PP dan KB
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	56,87		55,9	15	55,9	15	55,9	15	55,9	16	56,87	16	56,87	79	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	88,85		88,97		89,03		89,09		89,15		89,21		89,21		
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39		39		38		37		36		35		35		
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR					14.638		16.203		16.964		17.762		18.598		84.165	Baper mas PP dan KB
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	88,85		88,97		89,03		89,09		89,15		89,21		89,21		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	1,84		1,828		1,819		1,816		1,809		1,804		1,804		
13.	Urusan Wajib Sosial																

	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					62.775		69.486		72.751		95.086		99.565		399.663	Dinso snake rtrans
		Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	8,79	9	10		11		12		13		14		15		
		Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase (%) PMKS skala Kab./Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	80		81		82		83		84		85		85		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					225.571		249.685		261.420		341.676		357.768		1.436.120	Dinso snake rtrans
		Persentase (%) korban bencana skala Kab./Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100		100		100		100		100		100		100		

		Persentase (%) korban bencana skala Kab./Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0		80		80		80		80		80		80		
		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	62,12		63		64		65		66		67		68		
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo					12.565		13.908		14.562		19.032		19.929		79.996	Dinso snake rtrans
		Persentase (%) Panti Sosial skala Kab./Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100		100		100		100		100		100		100		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					256.877		284.337		297.701		389.095		407.422		1.635.432	Dinso snake rtrans
		Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	0	25		25		50		50		62,5		62,5		Dinso snake rtrans
		Persentase (%) PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	42,4	42,4	45		47,5		50		52,5		55		55		
	Program Pembinaan Anak Terlantar					18.840		20.854		21.834		28.537		29.881		119.946	Dinso snake rtrans

		Persentase anak terlanjar yang dibina (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial					391.033		432.834		453.178		592.303		620.201		2.489.549	Dinso snake rtrans
		Tersedianya taman makam pahlawan yang representatif	100	100	100		100		100		100		100		100		
14.	Urusan Wajib Ketenagakerjaan																
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					441.693		488.910		511.889		535.948		561.191		2.539.631	Dinso snake rtrans
		Pencari kerja yang ditempatkan	72,06	72,06	73,65		75,24		76,82		78,41		80		80		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	57,1	57,1	63,55		75		75		75		75		75		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	33,3	33,3	46,65		60		65		70		75		75		
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					205.291		227.237		237.917		249.099		260.831		1.180.375	Dinso snake rtrans
		Keselamatan dan Perlindungan (%)	35		38		42		45		47		50		50		
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	5	5	10		10		10		10		10		10		

		Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	57,24	57,79	58,34		58,9		59,45		57,79		60		60		
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	83,77	85,02	86,26		87,51		88,75		85,02		90		90		
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	94,19	94,19	94,35		94,51		94,68		94,84		95		95		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					583.023		645.348		675.680		707.436		740.757		3.352.244	Dinso snake rtrans
		Angka Partisipasi Angkatan Kerja	-														
15.	Urusan Wajib Koperasi dan UMKM																
	Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah					500.000		585.000		673.500		765.850		862.435		3.386.785	Dinko p UMK M, Perin dag
		Usaha Mikro dan Kecil yang dibina (%)	61,13	61,5	62,45		63,1		63,55		64,35		64,58	200	64,58	520	
		Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	38	38	40		42		44		45		47		47		
		Jumlah BPR/LKM	3	3	4		4		5		5		6		6		Dinko p UMK M, Perin dag dan Bagia n Ekban g

		Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk (%)	106	135	154		168		170		182		187		187		
	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					100.000		150.000		200.000		250.000		300.000		1.000.000	Dinko p UMK M, Perin dag
		Persentase koperasi aktif (%)	71,64	71,92	72,42		72,87		73,25		73,9		74,12		74,12		
		Persentase koperasi sehat (%)	92,86	93,15	93,45		93,87		94,4		94,85		95,15		95,15		
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM					75.000		100.000		125.000		150.000		200.000		650.000	Dinko p UMK M, Perin dag
		Perkembangan kewirausahaan	2,14	2,15	2,16	75	2,17	100	2,18	125	2,19	150	2,2	200	2,2	661	
16.	Urusan Wajib Penanaman Modal																
	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi					337.000		373.025		1.390.132		1.455.468		1.524.021		5.079.646	
		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali		
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali	1 kali (40 perush)	1 kali (100 perush)		1 kali (100 perush)		1 kali (100 perush)		1 kali (100 perush)		1 kali (100 perush)		5 kali (500 perush)		

		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	2 kali pameran	2 kali pameran	2 kali pmr		2 kali pmr		2 kali pmr		2 kali pmr		2 kali pmr		10 kali pmr		
		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	4 kali	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 kali		
	Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi					541.000		587.764		1.498.852		1.569.298		1.643.212		5.840.126	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	520	327 (s/d bl. Juni)	574		602		633		664		697		697		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1,265 T	1,39 T	1,53 T		1,68 T		1,85 T		2,04 T		2,24 T		2,24 T		
		Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal:	83,33%	83,33%	83,33 %		100%		100%		100%		100%		100%		

		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu)															
		kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota															
		Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	75%	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	31%	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah					53.000		58.666		61.423		64.310		67.339		304.738	
		Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	3 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan		1 bidang usaha unggulan		1 bidang usaha unggulan		1 bidang usaha unggulan		1 bidang usaha unggulan		5 bidang usaha unggulan		

17.	Urusan Wajib Kebudayaan																
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					129.000		142.790		149.501		156.528		163.900		741.719	
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	37	37	3		0		0	0	2	0	0	0	42		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					1.475.000		1.632.678		1.807.211		2.000.402		2.214.244		9.129.535	
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10 keg	10 keg	8 keg		8 keg		8 keg		8 keg		8 keg		40 keg		
		Misi Kesenian	3 keg	5 keg	6 keg		6 keg		7 keg		7 keg		7 keg		33 keg		
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6 bh	6 bh	6 bh		6 bh		6 bh		6 bh		6 bh		6 bh		
		Jumlah grup kesenian	34	34					1				1		36		
		Cakupan Kajian Seni	2 keg	2 keg	2 keg		2 keg		2 keg		3 keg		2 keg		11 keg		
			(diskusi & workshop)	(diskusi & workshop)	(diskusi & inventarisasi)		(diskusi & workshop)		(diskusi & workshop)		(diskusi, workshop & inventarisasi)		(diskusi & workshop)				
		Cakupan Fasilitasi Seni	2 keg	6 keg	6 keg		6 keg		6 keg		6 keg		6 keg		30 keg		
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	4 klasifikasi	5 klasifikasi	5 klasifikasi		5 klasifikasi		5 klasifikasi		5 klasifikasi		5 klasifikasi		5 klasifikasi		
		Cakupan Organisasi seni (%)	50%	50%	50%		50%		50%		50%		50%		50%		
			(Poin 1)	(Poin 1)	(Poin 1)		(Poin 1)		(Poin 1)		(Poin 1)		(Poin 1)				
		Cakupan Tempat umum	6 Bh	6 Bh	6 Bh		6 Bh		6 Bh		6 Bh		6 Bh		6 Bh		
		Cakupan Gelar Seni	100%	3 keg	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		
18.	Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga																

	Program pengembangan Kebijakan Dan manajemen Olah Raga					75.000		83.018		86.919		91.005		95.291		431.233	
		Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi Olahraga dari pemerintah kota	-	-	2		2		2		3		3		12		Dispo rabud par
	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga					2.142.060		2.371.046		7.482.485		7.485.954		2.721.583		17.316.336	
		Jumlah klub olahraga	-		0		3		3		3		3		12		Dispo rabud par
		Jumlah organisasi cabang olahraga	26	28	2		5		2		1		1		39		
		Jumlah kegiatan olahraga	5	5	1		2		2		1		1		12		
		Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	3	3	2		2		3		1		1		12		
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga					10.904.988		11.396.764		1.000.000		1.047.000		1.096.314		26.119.033	
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	6	6	0		1		1		-		-		8		Dispo rabud par
		Jumlah gedung olahraga	2	2	-		1		1		-		-		4		
		Lapangan olahraga	132	132	2		6		3		0		0		11		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan					851.315		942.321		986.610		1.032.980		1.081.634		4.894.860	
		Jumlah Kegiatan kepemudaan	3	3	3		3		3		3		3		15		

19.	Urusan Wajib Kesbangpol dagri																
	Program Peningkatan Kenyamanan dan Kenyamanan Lingkungan					1.295.891		1.434.422		1.501.840		1.662.536		1.646.487		7.541.176	
		Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal (%)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP
		Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) (%)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					1.146.242		1.268.775		1.328.408		1.470.547		1.456.352		6.670.324	
		Angka Kriminalitas (kasus)	145	145	140		130		125		115		105		95		
		Angka kriminalitas tertangani (%)	5,27	5,27	8		12		14		16		16		16		
		Persentase (%) patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman	75%	75%	100		100		100		100		100		100		Satpol PP
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	3	3	3		3		3		3		3		3		Satpol PP
		Jumlah pelanggar Perda ditertibkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan																
		Jumlah linmas per 10.000 penduduk	42,14	42,14	42,14		43		44		45		46		46		Kesbanglin mas

	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan					1.142.815		1.264.982		1.324.436		1.466.151		1.451.997		6.650.381	
		Pembinaan kesadaran wawasan wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP	1	1	4		4		4		4		4		4		Kesba nglin mas
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/ kepercayaan Kepada Tuhan YME	1	1	4		4		4		4		4		4		Bag Kesra Setda
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					27.925		30.910		32.363		35.826		35.480		162.504	
		Jumlah kasus Pekat ditangani (%)	75%	75%	77,50 %		77,50 %		79,50%		80%		80%		80%		Kesba nglin mas
	Program Pendidikan Politik Masyarakat					20.424		22.607		23.670		26.203		25.950		118.854	
		Pendidikan politik dan budaya demokrasi	4	4	4		4	40	4	40	4	40	4	40	4		Kesba nglin mas
	Program pencegahan Dini dan Penanggulanga n korban bencana alam					25.028		27.703		29.006		32.109		31.799		145.645	
		Bintek peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi masyarakat	1	1	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	Kesba nglin mas
20.	Urusan Wajib Otonomi Daerah																

	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					6.557.631		7.258.642		7.599.798		7.956.988		8.331.763		37.704.822	
		Persentase Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan (%)															Sekretariat DPRD
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					263.575		291.751		305.463		319.820		334.884		1.515.493	
		Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	22		4	78	4	83	5	88	4	94	4	99	21	462	Setda
	Program Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah					55.775		61.737		64.639		67.677		70.865		320.693	
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					3.090.195		3.420.537		3.581.302		3.749.623		3.926.231		17.767.888	
		Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)			23,68		24,58		26,08		27,02		28,58		28,58		DPPK AD
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					1.164.412		1.288.888		1.349.465		1.412.890		1.479.437		6.695.092	

		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	96	96	96	488.980	96	537.878	96	591.666	96	650.833	96	715.916	96	2.985.273	Inspektorat Daerah
		Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan expose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	96	96	96	332.260	96	379.840	96	417.824	96	459.606	96	505.566	96	2.095.096	
	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					23.730		26.103		28.713		31.584		34.742		144.872	
		Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	15	15	15		19		19		19		19		19		Inspektorat Daerah
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					224.171		248.135		259.797		272.008		284.819		1.288.930	
		Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	17	18	19		20		21		22		23		23		Setda
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					63.330		70.100		73.395		76.844		80.464		364.132	
		Jumlah KAD															Bappeda
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					742.202		821.543		860.156		900.583		943.001		4.267.485	

		Jumlah perda yang ditetapkan	35	6	7	62	9	67	10	72	11	77	7	72	44	350	Setda
	Program Pendidikan Kedinasan					608.836		673.921		705.595		738.758		773.553		3.500.663	
		Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	39	50	256		120		120		110		60		666		BKD
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur					2.490.864		2.757.137		2.886.723		3.022.399		3.164.754		14.321.877	
		Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan (%)	12,9	13,2	13,6		15		15,6		16,7		17,3		17,3		BKD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					1.485.025		1.643.774		1.721.032		1.801.920		1.886.790		8.538.541	
		Rasio PNS terhadap penduduk	1,87	1,87	1,85		1,85		1,85		1,85		1,85		1,85		BKD
	Program Pembangunan Kecamatan					158.244		175.160		183.393		192.012		201.056		909.865	
		Tersedianya program pembangunan kecamatan	4	4	4		4		4		4		4		4		
	Program Pembangunan Kelurahan					295.650		327.255		342.636		358.740		375.637		1.699.918	
		Tersedianya program pembangunan kelurahan	27	27	27		27		27		27		27		27		

	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					6.097.825		6.749.682		7.066.918		7.399.063		7.747.559		35.061.047	
		Tersedianya infrastruktur kelurahan	27	27	27		27		27		27		27		27		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					3.918.776		4.337.693		4.541.565		4.755.018		4.978.980		22.532.032	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
21.	Urusan Wajib Ketahanan Pangan																
	Program peningkatan ketahanan pangan					125.577		138.134		151.947		167.141		183.855		766.654	
		Ketersediaan pangan utama (ton)	3.380	3.380	3.380		3.380		3.385		3.385		3.385		3.385		Baper mas PP KB & KP
		Ketersediaan energi perkapita (%)	92,5	92,5	93		93,5		93,5		93,5		93,5		93,5		
		Ketersediaan protein perkapita (%)	91,25	91,25	91,5		91,75		91,75		91,75		91,75		91,75		
		Penguatan cadangan pangan (%)	80	81	83		85		85		85		90		90		
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	95	96	97		98		99		99		99		99		
		Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	91	91	91		91		91		91		91		91		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	85,2	86	87		90		90		90		90		90		

		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	87,5	88	89		88		90		90		90		90		
		Penanganan daerah rawan pangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Terlaksananya promosi hasil pertanian di tingkat provinsi	0	0	15%		30%		45%		60%		80%		80%		Dinas Kelautan dan Pertanian
22.	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat																
	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat							300.030		314.131		328.895		344.386		1.287.442	Bapermas PP KB & KP
		PKK aktif (%)	78,7	82,25	85,8		89,35		92,9		96,45		100		100		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2218	2310	2413		2495	29,6	2588	21,6	2680	30	2773	32	2773	32	
		Posyandu aktif (%)	100%	100%	100%		100%	5	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	
		LSM aktif (%)															
		LPM Berprestasi	3 L	6	9		12	18,5	15	27	18	27	21	27	21	27	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100	106	112	6	118	6	124	6	139	7	135	7	135	7	
	Program pengembangan Lembaga Ekonomi					24.112		26.690		27.944		29.257		30.635		138.638	
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (%)	38	38	40	50	42	75	44	100	45	125	47	150	47	500	
	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun					1.139.578		1.261.399		1.320.685		1.382.757		1.447.885		6.552.304	

		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	95	95,83	96,67	73.402	97,5	77,012	98,33	80,925	99,17	84.971	100	89.200	100	89,2	
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	97	97,5	98	177	98,5	180,2	99	182,01	99,5	185.020	100	187	100	187	
	Program peningkatan kapasitas pemerintah					91.219		110.092		115.267		120.684		126.368		563.630	
23.	Urusan Wajib Statistik																
	Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah					118.585		131.262		137.431		143.890		150.668		681.836	
		Buku "kota/kabupaten dalam angka"	ada	ada	1		1		1		1		1		5		Bappeda
		Buku "PDRB Kota/Kabupaten"	ada	ada	1		1		1		1		1		5		
24.	Urusan Wajib Kearsipan																
	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan					106.275		117.636		123.165		128.953		135.027		611.056	
		Pusat Informasi Daerah	1	1	1		1		1		1		1				KAPD
		Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	3	3	5		10		10		10		10				
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	24	24	25		50		50		100		100		100		
	Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah					204.980		226.892		237.556		248.721		260.436		1.178.585	

		Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	0	0	0		200		250		300		350		1100		KAPD
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan					11.620		12.862		13.467		14.100		14.764		66.813	
		Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya (%)			1		1		1		1		1				KAPD
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan					24.212		26.800		28.060		29.379		30.762		139.213	
		Persentase sarana kearsipan dalam kondisi baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
25.	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika																
	Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa					2.975.670		3.293.769		3.448.576		3.610.659		3.780.721		17.109.395	
		Jumlah jaringan komunikasi (unit)	60	60	60		60		60		60		60		60		Dishu bkomi nfo
		Web site milik pemerintah daerah	21	2	8		11		7		5		31		54		
		Jumlah penyiaran radio/TV (unit)	18	18	18		18		18		18		18		18		
	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa					499.642		553.054		579.047		606.262		634.817		2.872.822	

		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; Media baru seperti website (media online); Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	100	100	100		100		100		100		100		100		Setda
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	0	0	0		25		50		75		100		100		
	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi					90.136		99.772		104.461		109.370		114.522		518.261	
		Jumlah Kajian dan Penelitian Untuk Menetapkan Kebijakan di Bidang Kominfo	0	0	0		1		1								

	Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					154.223		170.709		178.733		187.133		195.947		886.745	
		Fasilitasi pembinaan PPID SKPD (%)	0	100	100		100		100		100		100		100		
26.	Urusan Wajib Perpustakaan																
	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					246.958		1.273.358		286.206		299.657		313.771		2.419.950	KAPD
		Jumlah perpustakaan yang dibina	38	38	38		38		40		45		47		47		
		Peningkatan kualitas perpustakaan (SDM)	12	12	12		14		14		14		15		15		
		Jumlah pengunjung kunjungan perpustakaan dalam satu tahun	21.562	23.071	24.581		26.090		27.599		29.109		30.618		30.618		
		Tingkat Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah			2000		2000		2000		2000		2000		2000		
B.	Urusan Pilihan																
1.	Urusan Pilihan Pertanian																
	Program peningkatan Kesejahteraan Petani					114.930		127.216		133.195		139.455		146.024		344.986	
		Nilai Tukar Petani	101,66	101,66	101,66		101,66		101,66		101,66		101,66		101,66		
	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan					305.000		337.605		353.472		370.085		387.516		344.986	
		Produksi padi (ton)	4.839	4.839	4.839		4.839		4.839		4.839		4.839		4.839		
		Produktivitas padi (kw/ha)	65,57	65,57	65,57		65,57		65,57		65,57		65,57		65,57		

		Angka prevalensi penyakit hewan (%)	9,97	8,57	6,9		5,26		3,62		1,98		1,19		1,19		
		Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	0,59	0,18	0,144		0,108		0,072		0,036		0,015		0,015		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					305.000		337.605		353.472		370.085		387.516		1.753.678	DKP
2.	Urusan Pilihan Pariwisata																
	Program pengembangan pemasaran pariwisata					1.109.963		1.228.618		1.286.363		1.346.822		1.410.257		6.382.023	
		Kunjungan wisata	459.77 4	464.59 9	468.72 4		473.58 3		478.56 8		483.58 0		488.70 5		488.70 5		Dispo rabud par
		Persentase obyek wisata yang dipromosikan (%)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah PAD dari sektor Pariwisata (Rp)	880.32 6	874.52 1	1.015. 423		1.058. 694		1.109.3 79		1.167.5 98		1.223. 478		1.223. 478		
	Program pengembangan destinasi pariwisata					238.463		2.263.955		1.276.361		289.350		302.978		4.371.107	
		Jumlah obyek wisata unggulan	1	1	2		2		2		2		2		2		Dispo rabud par
	Program pengembangan kemitraan pariwisata					121.360		134.333		140.647		147.257		154.193		697.790	
		Jenis, kelas, dan jumlah restoran	42	42	42		42		42		42		42		42		Dispo rabud par
		Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	25	25	25		25		25		25		25		25		
3.	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan																

	Program Perikanan Tangkap					1.250.000		1.383.625		2.448.655		1.516.742		1.588.181		8.187.203	DKP
		Produksi perikanan Tangkap (ton)	23.474,06	22.469,96	22.604,78		22.717,80		22.990,41		23.335,27		23.685,30				
	Program pengembangan Budidaya Perikanan					1.587.000		1.756.650		1.839.213		1.925.656		2.016.354		9.124.873	DKP
		Produksi perikanan budidaya (ton)	650,48	1.511	1.586		1.655		1.749		1.836		1.298				
		Jumlah produksi hasil olahan ikan (ton)	4.628	4.676	4.729		4.729		4.937		5.037		5.145				
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar					70.000		77.483		581.125		608.438		637.095		1.974.141	DKP
	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat					20.000		22.138		23.178		24.268		25.411		114.995	DKP
4.	Urusan Pilihan Perdagangan																
	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan					224.298		246.728		271.400		298.540		328.395		1.369.361	
		Tingkat Terlindunginya konsumen	30%	15%	30%		30%		30%		30%		30%		30%		Dinko p UMK M, Perin dag

		Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kota (%)	0	0	0		0		0		0		0		0		
	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor					12.200		63.420		14.762		16.238		17.862		124.482	
		Ekspor Bersih Perdagangan	449.34 2,40	449.34 1,40	471.80 0	350	495.40 0	370	520.16 8	390	546.17 6	410	573.48 5	430	573.48 5	2.710.664	Dinko p UMK M, Perin dag
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,82	14,94	15		15,06		15,12		15,18		15,24		15,24		
		Pembangunan promosi perdagangan Internasional	1,16	1,2	1,2		1,22		1,25		1,27		1,3		1,3		
		Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	4	4	4		4		4		5		5		5		Dinko p UMK M, Perin dag
	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri					454.026		410.178		475.365		497.707		521.149		9.358.425	
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	86,46	86,46	86,5		86,75	315	87	320	87,25	325	87,5	330	87,5	1.726	Dinko p UMK M, Perin dag
		Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	71,43	78,57	78,57		78,57		85,71		85,71		85,71		85,71		

	Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan					96.685		107.021		1.112.051		164.317		172.056		1.652.130	
		Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	23,52	23,52	23,52		23,52		23,52		29,41		35,29	700	35,29	847	Dinko p UMK M, Perin dag
5.	Urusan Piliha Perindustrian																
	Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi					700.000		1.365.000		285.000		360.000		450.000		3.160.000	Dinko p UMK M, Perin dag
		Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	8,1	8,1	13,5		21,6		32,4		45,9		59,4		59,4		
		Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas) (%)	21	22	25		30		35		40		45		45		
		Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (%)	13,16	13,11	13,48		13,83		14,21		14,63		15,33		15,33		
	Program pengembangan industri Kecil Dan menengah					480.000		580.000		670.000		800.000		970.000		3.500.000	Dinko p UMK M, Perin dag
		Jumlah industri kecil dan menengah	3.773	3.856	3.894		3.933		4.012		4.092		4.194		4.194		

		Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal (%)	10,66	10,76	10,87		11,03		11,25		11,48		11,77		11,77		
		Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk (%)	10,02	10,5	11,04		11,59		12,17		13,39		14,72		14,72		
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial					200.000		220.000		250.000		290.000		350.000		1.310.000	
		Persentase klaster industri yang berkembang (%)	-	-	10		20		30		40		50		50		Dinko p UMK M, Perin dag
		Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM (%)	16,6	17,72	17,98		18,34		18,71		19,27		19,94		19,94		Dinko p UMK M, Perin dag
6.	Urusan Pilihan Transmigrasi																
	Program Transmigrasi Regional					56.473		62.510		65.448		68.524		71.751		324.706	
		Penempatan transmigran	-	-	100		100		100		100		100		100		Dinso snake rtrans
	Jumlah Anggaran Belanja Urusan					276.725.500		345.409.935		361.792.566		380.177.189		371.347.043		1.733.409.307	
	Jumlah Proyek Belanja Langsung (Bab III)					395.628.303		442.203.084		485.665.413		521.746.757		576.273.581		3.466.473.629	
	Selisih					118.902.803		96.793.149		123.872.847		141.569.568		204.926.538		6.932.947.257	
	Program Seluruh SKPD																

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan surat-menyerut, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi				50.830.950		50.830.950		53.220.005		55.721.345		58.340.248		61.082.240	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.				32.885.972		32.831.613		34.500.000		23.072.968		24.086.898		147.377.451	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.				737.989		772.674		808.990		847.013		886.822		4.053.489	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD				397.473		416.154		435.713		456.192		477.633		2.183.166	
	Jumlah Program Seluruh SKPD					84,852,384		87,240,446		91,466,049		82,716,421		86,533,593		432,808,893	
	Total Anggaran Belanja Langsung					361,814,463		429,387,137		453,258,615		462,893,610		457,784,987		2,165,138,812	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal (Bappenas). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri Nomor 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD ini menjadi target bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah selama lima tahun. Indikator kinerja daerah sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal sehingga menjadi pedoman bagi SKPD dalam penentuan target kinerja Renstra SKPD dan Renja SKPD. Indikator dan target kinerja dalam RPJMD ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dikelompokkan berdasarkan aspek dan fokus pembangunan, baik indikator agregat dan indikator makro, maupun indikator urusan pembangunan daerah, seperti tercantum pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1.

Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kota Tegal

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	4,93	4,93-5,43	5,03-5,53	5,13-5,63	5,23-5,73	5,33-5,93	5,43-5,93	5,43-5,93	Semua SKPD
2.	Inflasi		5,11	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	Semua SKPD
3.	Persentase penduduk miskin	%	10,04	9,76	9,48	9,2	8,92	8,64	8,36	8,36	Semua SKPD
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,25	9	8,75	8,5	8,25	8	7,75	7,75	Semua SKPD
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		74,76	74,84	75,05	75,26	75,47	75,68	75,89	75,89	Semua SKPD
6.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)		64,76	64,92	65,4	65,88	66,36	66,84	67,32	67,32	Semua SKPD
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)		67,54	67,65	67,86	68,07	68,28	68,49	68,7	68,7	Semua SKPD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Fokus Layanan Urusan Wajib										
A.	Pendidikan										
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini 4-6 tahun (PAUD)	(%)	30,80	31,50	32,20	32,90	33,60	34,30	35,00	35,00	Dinas Pendidikan
2.	Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	(%)	115,39	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	Dinas Pendidikan
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	(%)	117,39	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	Dinas Pendidikan
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(%)	96,12	98,00	98,40	98,80	99,20	99,60	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
5.	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	(%)	83,87	71,00	72,80	74,60	76,40	78,20	80,00	80,00	Dinas Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(%)	0,38	0,38	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,23	Dinas Pendidikan
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(%)	0,53	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43	0,43	Dinas Pendidikan
8.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	100,00	99,44	99,55	99,66	99,77	99,88	100	100	Dinas Pendidikan
9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	99,5	99,86	99,88	99,90	99,92	99,94	99,96	99,96	Dinas Pendidikan
10.	Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik	(%)	100,00	100,00	100,00	83,40	83,60	83,80	84,00	84,00	Dinas Pendidikan
11.	Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	(%)	99,96	99,96	99,96	81,00	82,00	82,00	82,00	82,00	Dinas Pendidikan
12.	Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat	(%)	124,64	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	Dinas Pendidikan
13.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	(%)	79,06	80,00	81,24	83,42	85,60	87,78	90,00	90,00	Dinas Pendidikan
14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	(%)	1,36	1,36	1,15	0,94	0,73	0,52	0,31	0,31	Dinas Pendidikan
15.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	(%)	99,87	99,87	99,89	99,91	99,93	99,95	100,00	100,00	Dinas Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
16.	Ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	(%)	86,00	86,00	86,40	86,80	87,20	87,60	88,00	88,00	Dinas Pendidikan
17.	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	(%)	97,73	97,73	97,98	98,23	98,48	98,73	99,00	99,00	Dinas Pendidikan
18.	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	37,12	63,24	65,50	66,90	69,10	70,90	72,00	72,00	Dinas Pendidikan
19.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	66,66	83,08	85,00	86,70	88,10	89,50	90,70	90,70	Dinas Pendidikan
20.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	89,85	90,50	91,70	92,50	94,10	95,90	96,70	96,70	Dinas Pendidikan
21.	Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	95,62	96,20	97,00	97,90	98,20	98,90	99,00	99,00	Dinas Pendidikan
B.	Kesehatan										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	11,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	(%)	151,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
4.	Cakupan Posyandu strata Mandiri	(%)	0	60,0	76,0	84,0	92,0	100,00			Dinas Kesehatan
5.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	(%)	89,40		90,00	91,40	91,80	92,20	92,50	92,50	Dinas Kesehatan
6.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
7.	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	%	1,75	1,70	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,20	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
8.	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)			0,27	0,23	0,2	0,17	0,14	0,15	0,15	Dinas Kesehatan
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
10.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	(%)	49,55	50,,00	52,00	54,00	56,00	61,00	65,00	65,00	Dinas Kesehatan
11.	Cakupan keluarga sadar gizi	(%)		80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan
12.	Cakupan Rumah Sehat	(%)	89,17		91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan
13.	Angka kesakitan DBD	Per 100.000 Pendud uk			35,00	33,00	30,00	27,00	24,00	20,00	Dinas Kesehatan
14.	Angka kematian DBD	(%)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
16.	Prosentase penderita HIV/IMS yang diobati	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
17.	Penemuan baru TB Paru positif (CDR)		60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Dinas Kesehatan
18.	Prevalensi TB Paru	(per 10.000 penduduk)	64,00	64,00	70,00	75,00	80,00	86,00	91,00	91,00	Dinas Kesehatan
19.	Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan	(per 10.000 penduduk)	1,25	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,50	Dinas Kesehatan
20.	Angka kesembuhan (RFT) Kusta	(%)	66,50	67,50	71,00	75,00	79,00	83,00	85,00	85,00	Dinas Kesehatan
21.	Prosentase penderita ISPA Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
22.	Kelurahan dengan UCI	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
23.	Tertanganinya KLB > 24 jam	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
24.	AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15 th)	(per 100.000 penduduk)	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
25.	Cakupan puskesmas yang refresentatif	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
26.	Angka kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	14,00	14,00	14,00	12,00	10,00	9,00	8,00	7,00	Dinas Kesehatan
27.	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1000 kelahiran Hidup	17,00	17,00	15,00	13,00	12,00	10,00	8,00	8,00	Dinas Kesehatan
28.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(%)	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
29.	Cakupan kunjungan bayi	(%)	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00	98,00	98,00	Dinas Kesehatan
30.	Cakupan kunjungan Balita	(%)	96,00	96,00	97,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
31.	Angka Kematian Ibu	Kasus	7	6	5	4	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
32.	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	(%)	94,49	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan
33.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
34.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95,90	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	Dinas Kesehatan
35.	Cakupan pelayanan nifas	%	97,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
36.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	126,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
37.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
38.	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	75,10	74,00	76,40	73,20	74,70	76,20	77,70	77,70	RSUD
39.	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%	4,30	4,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	RSUD
40.	TOI (Turn Over Interval)		1,40	1,50	1,60	1,90	1,80	1,70	1,50	1,50	RSUD
41.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)		57,30	56,40	47,50	45,50	46,40	47,30	48,20	48,20	RSUD
42.	NDR (Net Death Rate)		33,20	32,30	32,60	31,70	31,40	31,10	30,80	30,80	RSUD
43.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD		77,80	78,00	78,50	78,70	79,00	79,50	80,00	80,00	RSUD
44.	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Kunjungan)		0,017	0,018	0,021	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	RSUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
C.	Pekerjaan Umum										
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	73,92	73.93	74,00	74,20	74,50	75,50	75,80	75,80	DPU
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPU
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60,50	60,55	61,11	61,20	61,27	61,33	61,44	61,44	DPU dan Kelurahan
4.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	68,02	68,56	69,11	69,67	70,22	70,78	71,35	71,35	DPU
5.	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	%	90,00	94.76	95,04	95,66	96,30	96,78	97,11	97,11	DPU
6.	Persentase kawasan kumuh	%	4,01	3,96	3,91	3,86	3,81	3,76	3,71	3,71	Diskimtaru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
7.	Panjang trotoar yang direvitalisasi dan dibangun	meter	-	-	8.000	16.000	24.000	32.000	40.000	40.000	SPU
8.	Persentase PJU yang terlayani meterisasi	%	-	86,11	90,71	90,89	91,5	93,2	94,1	94,1	DPU
9.	Persentase PJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	%	-	1,44	8,51	10,25	12,07	15,5	17,2	17,2	DPU
D.	Perumahan										
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,99	97,36	97,87	98,42	98,95	99,48	99,70	99,70	Diskimtaru
2.	Penyediaan Rumah Bagi MBR	Unit	91	91	196	294	294	294	294	294	Diskimtaru
3.	Luas Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	ha	23,54	23,54	25,54	27,54	29,54	31,54	33,54	33,54	Diskimtaru
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00	DPU
6.	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	25,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	DPU
7.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	33,33 (3 mobil damkar)	33,33 (3 mobil damkar)	33,33 (3 mobil damkar)	47,70 atau 1 mobil damkar	72,70 atau 1 mobil damkar	100,00 atau 1 mobil damkar	100,00	100,00 atau 6 mobil damkar	DPU
E.	Penataan Ruang										
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital :										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
1.	Peta analog	%	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskimtaru
2.	Peta digital	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskimtaru
3.	Persentase kawasan yang memiliki RTBL	%	0	Draft koridor 1	Perwal Koridor I		Draft Koridor II dan III	Draft Koridor IV dan V	Draft Koridor VI dan VII	7 Koridor	Diskimtaru
4.	Tersediannya Perda RDTRK pada 4 SSPK	%	0,00	Draft RDTRK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskimtaru
5.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	31,23	32,15	32,98	33,1	33,22	33,34	33,47	33,47	Diskimtaru
F.	Perencanaan Pembangunan										
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	buah	1	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Buah	2	2	2	2	2	2	2	10	Bappeda
3.	Persentase SKPD memiliki Rentra SKPD sesuai standar.	%	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda
4.	Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar.	%	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda
G.	Perhubungan										
1.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll)	%	19,68	23,21	28,54	35,69	40,80	47,36	61,36	61,36	Dishubkominfo
2.	Terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota	%	25,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	Dishubkominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
3.	Persentase kendaraan yang lulus uji	%	97,40	97,45	97,50	97,55	97,60	97,65	97,70	97,70	Dishubkominfo
H.	Lingkungan Hidup										
1.	Persentase penanganan sampah	%	62,60	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	KLH / DISKIMTARU
2.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)	Per 1000 pendud uk	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	DISKIMTARU
3.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KLH
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
5.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	(%)	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	KLH
6.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KLH
I. Pertanian											
1.	Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatkan	bidang	502	10	25	25	25	25	25	126	Setda
J. Kependudukan dan Catatan Sipil											
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	(%)	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispendukcapil
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	(%)	88,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispendukcapil
3.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	(%)	45,00	50,00	55,00	60,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Dispendukcapil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	(%)	0,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00	Dispendukcapil
K.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1.	Persentase Focal point aktif	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPMPPKB
2.	Persentase Forum Anak Aktif	%	31,25	31,25	56,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPMPPKB
3.	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	0,003	0,003	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	BPMPPKB
4.	Rasio KDRT	%	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	BPMPPKB
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	BPMPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	0,57	0,57	25,00	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	BPMPPKB
7.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	0,57	0,57	25,00	0,56	0,56	0,55	0,55	100,00	BPMPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	BPMPPKB
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPMPPKB
10.	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPMPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
11.	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPMPPKB
L.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,77	1,77	1,758	1,746	1,734	1,722	1,71	1,710	BPMPPKB
2.	Cakupan peserta KB aktif	%	73,38	73,38	73,39	73,40	73,40	73,41	73,42	73,42	BPMPPKB
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	15,21	15,21	15,13	15,05	14,97	14,89	14,81	14,81	BPMPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
4.	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	73,38	73,38	73,39	73,40	73,40	73,41	73,42	73,42	BPMPPKB
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,84	1,84	1,82	1,81	1,80	1,79	1,78	1,78	BPMPPKB
6.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	56,87	56,87	66,87	71,87	76,87	81,87	87,00	87,00	BPMPPKB
7.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88,85	88,85	88,97	89,03	89,09	89,15	89,21	89,210	BPMPPKB
M.	Sosial										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
1.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	(%)	8,79	8,79	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	Dinsosnakertrans
2.	Persentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsosnakertrans
3.	Persentase PMKS skala Kab./Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	(%)	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	Dinsosnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
4.	Persentase korban bencana skala Kab./Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsosnakertrans
5.	Persentase korban bencana skala Kab./Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	(%)	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Dinsosnakertrans
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	(%)	62,12	62,12	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	Dinsosnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
7.	Persentase Panti Sosial skala Kab./Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsosnakertrans
8.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	50,00	62,50	62,50	Dinsosnakertrans
N.	Ketenagakerjaan										
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	(%)	72,06	72,06	73,65	75,24	76,82	78,41	80,00	80,00	Dinsosnakertrans
2.	Proporsi UMK terhadap KHL	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsosnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	(%)	57,10	57,10	63,55	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Dinsosnakertrans
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	(%)	33,30	33,30	46,65	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	Dinsosnakertrans
5.	Keselamatan dan Perlindungan (persentase perusahaan yang menerapkan KS)	(%)	35,00	35,00	38,00	42,00	45,00	47,00	50,00	50,00	Dinsosnakertrans
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	5	5	10	10	10	10	10	10	Dinsosnakertrans
7.	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker	(%)	57,24	57,79	58,34	58,90	59,45	57,79	60,00	60,00	Dinsosnakertrans
8.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	(%)	83,77	85,02	86,26	87,51	88,75	85,02	90,00	90,00	Dinsosnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
9.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	(%)	94,19	94,24	94,35	94,51	94,68	94,84	95,00	95	Dinsosnakertrans
O. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UKM	%	61,13	61,50	62,45	63,10	63,55	64,35	64,58	64,58	Dinkop UMKM, Indag
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	38	38	40	42	44	45	47	47	Dinkop UMKM, Indag
3.	Jumlah BPR/LKM	Unit	3	3	4	4	5	5	6	6	Dinkop UMKM, Indag
4.	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	106	135	154	168	170	182	187	187	Dinkop UMKM, Indag
5.	Persentase koperasi aktif	%	71,64	71,92	72,42	72,87	73,25	73,90	74,12	74,12	Dinkop UMKM, Indag
6.	Persentase koperasi sehat	%	92,86	93,15	93,45	93,87	94,40	94,85	95,15	95,15	Dinkop UMKM, Indag

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
P.	Penanaman Modal										
1.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjsama kemitraan	kali	1	1	1	1	1	1	1	5	BPPT
2.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	kali	1	1 (40 perush)	1 (100 perush)	1 (100 perush)	1 (100 perush)	1 (100 perush)	1 (100 perush)	5 (500 perush)	BPPT
3.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	kali	2	2	2	2	2	2	2	10	BPPT
4.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	kali	4	4	4	4	4	4	4	20	BPPT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
5.	Jumlah investor berskala nasional	Investor	520	327 (s/d bl. Juni)	574	602	633	664	697	697	BPPT
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rupiah	1,265 T	1,39 T	1,53 T	1,68 T	1,85 T	2,04 T	2,24 T	2,24 T	BPPT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
7.	<p>Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal:</p> <p>Pendaftapran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu)</p> <p>kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota</p>	%	83,33	83,33	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPPT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
8.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPPT
9.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Bidang usaha unggula n	3	1	1	1	1	1	1	5	BPPT
Q. Kebudayaan											
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	37	37	3	0	0	2	0	42	Dinporabudpar
2.	Cakupan Kajian Seni	Kali	2	2	2	2	2	3	2	11	Dinporabudpar
3.	Cakupan Fasilitasi Seni	(%)		85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	Dinporabudpar
4.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	(%)	50,00	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	Dinporabudpar
5.	Cakupan Organisasi seni	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinporabudpar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
6.	Cakupan Tempat	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinporabudpar
7.	Cakupan Gelar Seni	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinporabudpar
R.	Kepemudaan dan Olahraga										
8.	Jumlah organisasi cabang olahraga	kelompok	26	28	2	5	2	1	1	39	Dinporabudpar
9.	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	5	5	1	2	2	1	1	12	Dinporabudpar
10.	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang	3	3	2	2	3	1	1	12	Dinporabudpar
11.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	6	6	0	1	1	-	-	8	Dinporabudpar
12.	Jumlah gedung olahraga	unit	2	2	-	1	1	-	-	4	Dinporabudpar
13.	Lapangan olahraga	Buah	132	132	2	6	3	-	-	143	Dinporabudpar
S.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
1.	Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
2.	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
3.	Angka Kriminalitas	kasus	145	145	140	130	125	115	105	95	Satpol PP
4.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kali/ hari	3	3	3	3	3	3	3	3	Satpol PP
5.	Cakupan rasio petugas linmas (1 orang tiap RT atau sebutan lainnya)/ per 10.000 penduduk	Per 10.000 pendud uk	42,14	42,14	42,14	43,00	44,00	45,00	46,00	46,00	Kesbangpolinmas
6.	Tingkat partisipasi dalam pemilu	%		79,00	-	-	-	80,00	80,00	80,00	Kesbangpolinmas

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
T.	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian										
1.	Persentase Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan	(%)	8	8	9	10	11	12	12	54	Setwan
2.	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	buah	22	22	4	4	5	4	4	21	Setda
3.	Jumlah PAD	Juta Rp	176.377	172.418	190.354	210.453	232.987	258.266	286.641	286.641	DPPKAD
4.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokume n	96	96	96	96	96	96	96	96	Inspektorat
5.	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang	15	15	15	19	19	19	19	19	Inspektorat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
6.	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	17	18	19	20	21	22	23	23	Setda
7.	Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	%	39,00	50,00	256,00	120,00	120,00	110,00	160,00	766,00	BKD
8.	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan	%	12,90	13,20	13,60	15,00	15,60	16,70	17,30	17,30	BKD
9.	Rasio PNS terhadap penduduk	%	1,87	1,87	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	BKD
U.	Ketahanan Pangan										
10.	Ketersediaan pangan utama	(ton)	3.380	3.380	3.380	3.380	3.385	3.385	3.385	3.385	BPMPPKB
11.	Ketersediaan energi perkapita	(%)	92,50	92,50	93,00	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	BPMPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
12.	Ketersediaan protein perkapita	(%)	91,25	91,25	91,5	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75	BPMPPKB
13.	Penguatan cadangan pangan	(%)	80,00	81,00	83,00	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	BPMPPKB
14.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	(%)	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00	BPMPPKB
15.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	(%)	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	BPMPPKB
16.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(%)	85,20	86,00	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	BPMPPKB
17.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	87,50	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	BPMPPKB
18.	Penanganan daerah rawan pangan	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPMPPKB
V. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan											
1.	PKK aktif	(%)	78,70	82,25	85,80	89,35	92,90	96,45	100	100	BPMPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
2.	Posyandu aktif	(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPMPPKB
3.	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi	LPM	3	6	9	12	15	18	21	21	BPMPPKB
4.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	(%)	38,00	38,00	40,00	42,00	44,00	45,00	47,00	47,00	BPMPPKB
5.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	(%)	95,00	95,83	96,67	97,50	98,33	99,17	100,00	100,00	BPMPPKB
W. Statistik											
1.	Buku "Kota Tegal dalam angka"	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
2.	Buku "PDRB Kota"	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda
3.	Profil Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
X.	Kearsipan										
1.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	SKPD		3	5	10	10	10	10	48	Kantor Arpusda
2.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	Eks	0	0	0	200	250	300	350	1.100	Kantor Arpusda
3.	Arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	perwal	0	0	1	1	1	1	1	5	Kantor Arpusda
Y.	Komunikasi dan Informatika										
1.	Jumlah jaringan komunikasi	unit	60	60	60	60	60	60	60	60	Dinhubkominfo
2.	Web site milik pemerintah daerah	SKPD	21	2	8	11	7	5	31	54	Dinhubkominfo
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	Dinhubkominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
4.	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; Media baru seperti website (media online); Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinhubkominfo
Z.	Perpustakaan										
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	20	25	30	35	40	45	47	47	Kantor Arpusda
2.	Peningkatan kualitas perpustakaan (SDM)	Orang	12	12	12	14	14	14	15	15	Kantor Arpusda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
3.	Tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun	Orang	21.562	23.071	24.581	26.090	27.599	29.109	30.618	30.618	Kantor Arpusda
4.	Tingkat Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Eksemplar	26.221	28.221	30.221	32.221	34.221	36.221	38.221	38.221	Kantor Arpusda
	Fokus Layanan Urusan Pilihan										
A.	Pertanian										
1.	Produksi padi	Ton	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	Dinas Kelautan dan Pertanian
2.	Produktivitas	Kw/ha	65,57	65,57	65,57	65,57	65,57	65,57	65,57	65,57	
3.	Angka prevalensi penyakit hewan (%)	(%)	9,97	8,57	6,9	5,26	3,62	1,98	1,19	1,19	Dinas Kelautan dan Pertanian
4.	Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	(%)	0,59	0,18	0,144	0,108	0,072	0,036	0,015	0,015	Dinas Kelautan dan Pertanian
5.	Produksi hasil peternakan	Ekor	1.856.208	2.236.513	2.253.065	2.269.734	2.286.529	2.303.484	2.303.448	2.320.448	Dinas Kelautan dan Pertanian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
6.	Tingkat kenaikan produksi daging	(%)	0,01	0,21	0,21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Kelautan dan Pertanian
7.	Tingkat kenaikan produksi Susu	(%)	0,01	0,21	0,21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Kelautan dan Pertanian
8.	Tingkat kenaikan produksi telur	(%)	0,01	0,21	0,21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Kelautan dan Pertanian
B. Pariwisata											
1.	Kunjungan wisata	Orang	459.774	464.599	468.724	473.583	478.568	483.580	488.705	488.705	Dinporabudpar
2.	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Ribu Rp	880.326	974.521	1.015.423	1.058.694	1.109.379	1.167.598	1.223.478	1.223.478	Dinporabudpar
3.	Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinporabudpar
C. Kelautan dan Perikanan											
1.	Produksi perikanan Tangkap	Ton	23.474,06	22.469,96	22.604,78	22.717,8	22.990,41	23.335,27	23.685,3	23.685,3	Dinas Kelautan dan Pertanian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
2.	Produksi perikanan budidaya	Ton	650,48	1.511	1.586	1.655	1.749	1.836	1.298	1.298	Dinas Kelautan dan Pertanian
3.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	ton	4.628	4.676	4.729	4.729	4.937	5.037	5.145	5.145	Dinas Kelautan dan Pertanian
D. Perdagangan											
1.	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Jenis	4	4	4	4	4	5	5	5	Dinkop UMKM, Indag
2.	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	449.342	449.341	471.800	495.400	520.168	546.176	573.485	573.485	Dinkop UMKM, Indag
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,82	14,94	15	15,06	15,12	15,18	15,24	15,24	Dinkop UMKM, Indag
4.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	29,41	35,29	35,29	Dinkop UMKM, Indag
5.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	71,43	78,57	78,57	78,57	85,71	85,71	85,71	85,71	Dinkop UMKM, Indag

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
E.	Perindustrian										
1.	Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas)	%	21,00	22,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00	Dinkop UMKM, Indag
2.	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	unit	3.773	3.856	3.894	3.933	4.012	4.092	4.194	4.194	Dinkop UMKM, Indag
3.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	unit	10,66	10,76	10,87	11,03	11,25	11,48	11,77	11,77	Dinkop UMKM, Indag
4.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,00	6,05	6,42	6,48	6,58	6,69	6,82	6,82	Dinkop UMKM, Indag
5.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	13,16	13,11	13,48	13,83	14,21	14,63	15,33	15,33	Dinkop UMKM, Indag
6.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	-	-	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	Dinkop UMKM, Indag

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi tahun 2013	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
F.	Ketrasmigrasian										
1.	Persentase penempatan transmigran	%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsosnakertrans

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJMD sama dengan masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, yaitu tahun 2014-2019.

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kota Tegal Tahun 2019–2024 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2020 di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Walikota Tegal berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
3. SKPD berkewajiban menyusun Renstra SKPD pada periode yang sama sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra SKPD akan dijadikan pedoman dalam menyusun Renja SKPD.
4. RPJMD ini akan dijabarkan kedalam RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD dan mewujudkan sinergitas pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD dan RKPD, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD untuk memastikan pencapaian visi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.
6. RPJMD ini pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Tegal.
7. RPJMD ini menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat Kota Tegal untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

BAB XI

PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Tegal. Pelaksanaan RPJMD selanjutnya akan dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan RKPD. Dalam Renstra SKPD dan RKPD tersebut, ditetapkan kegiatan pada masing-masing program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi jangka menengah daerah Kota Tegal.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahun juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dalam RPJMD telah ditetapkan indikator dan target kinerja pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun pada masing-masing program prioritas. Indikator dan target kinerja tersebut menjadi ukuran kinerja keberhasilan pencapaian visi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan, baik SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal, anggota DPRD Kota Tegal, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Diharapkan masing-masing unsur pemangku kepentingan dapat, bekerjasama dan berpartisipasi sehingga Visi Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2014-2019 yaitu: *“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”* dapat terwujud.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP.19680216 198903 1 004